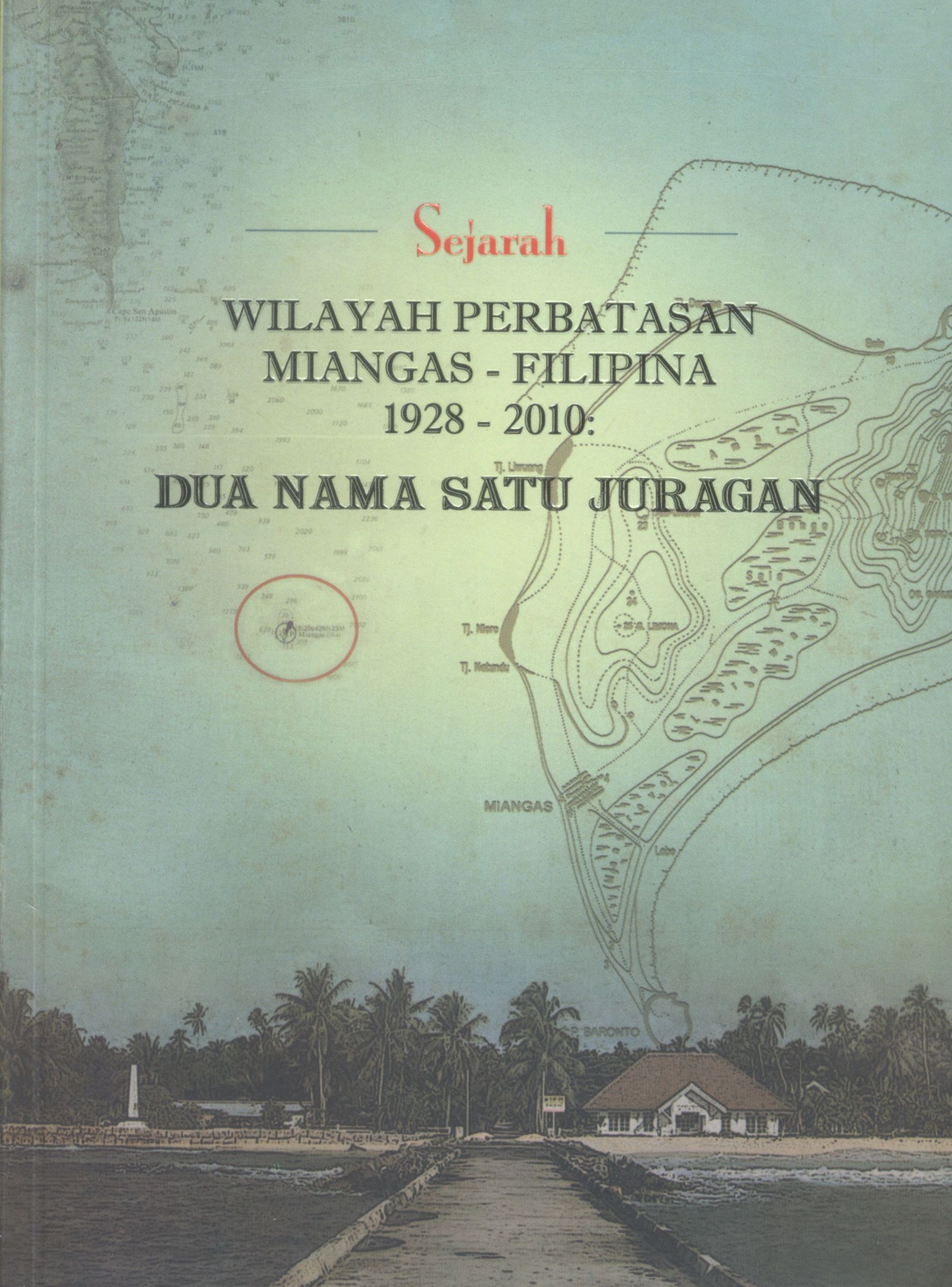


Sejarah

WILAYAH PERBATASAN MIANGAS - FILIPINA

1928 - 2010:

DUA NAMA SATU JURAGAN



Sejarah

WILAYAH PERBATASAN
MIANGAS - FILIPINA
1928 - 2010:
DUA NAMA SATU JURAGAN

Penulis
Alex J. Ulaen
Triana Wulandari
Yuda B. Tangkilisan

Penyunting
Endjat Djaenuderajat

SEJARAH WILAYAH PERBATASAN
MIANGAS - FILIPINA 1928 - 2010:
DUA NAMA SATU JURAGAN

Penulis

Alex J. Ulaen

Triana Wulandari

Yuda B. Tangkilisan

Penyunting

Endjat Djaenuderajat

Perancang sampul dan layouter

Joko Suharbowo

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Penerbit

Direktorat Geografi Sejarah

Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala

Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI

Gedung E Lt. 8 Komplek Kementerian Pendidikan Nasional

Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telp./Fax. : 021-5725539

Dicetak di Jakarta

2011

224 hlm: 18 x 25 cm

ISBN: 978-979-18278-3-6

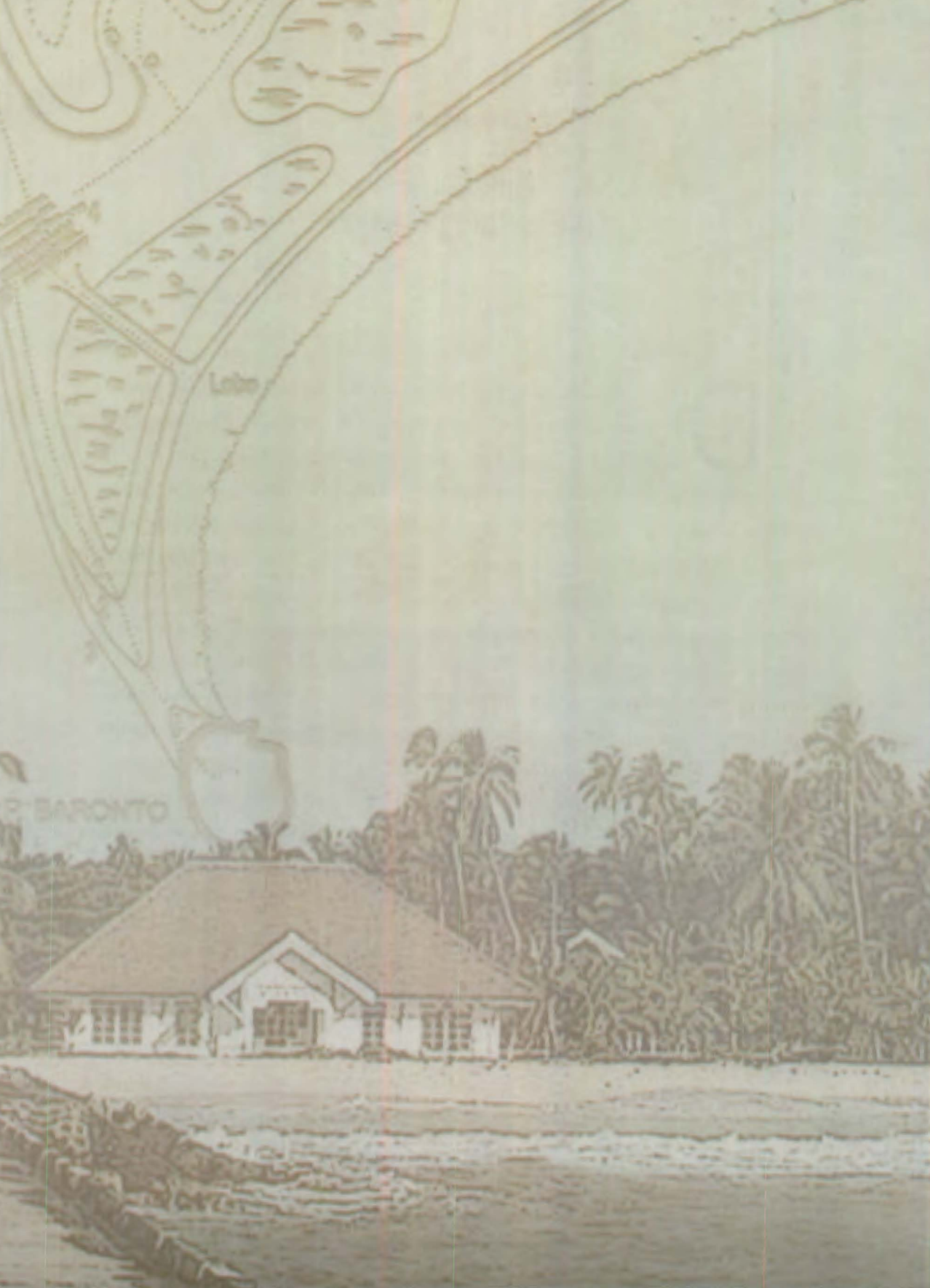
DAFTAR ISI

HALAMAN

6	
	SAMBUTAN DIREKTUR GEOGRAFI SEJARAH
9	
	BAB 1 PENDAHULUAN
31	
	BAB 2 MENGUNGKAP RUANG JEJARING
75	
	BAB 3 PULAU MIANGAS YANG DIPERSENGKETAKAN
113	
	BAB 4 MIANGAS: DARI "PULAU PERBATASAN" KE "BERANDA DEPAN"
159	
	BAB 5 MIANGAS: APA KATA (d)ORANG
193	
	BAB 6 PENUTUP
200	
	DAFTAR PUBLIKASI MEDIA TENTANG MIANGAS
212	
	KEPUSTAKAAN
221	
	BIODATA PENULIS

MIAMI





SAMBUTAN

DIREKTUR GEOGRAFI SEJARAH

Dalam dua tahun terakhir ini, Direktorat Geografi Sejarah, Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, telah menerbitkan dua buah buku tentang sejarah perbatasan yaitu: (a) Sejarah Wilayah Perbatasan Entikong-Malaysia 1845-2009, Satu Ruang Dua Tuan dan (b) Sejarah Wilayah Perbatasan Batam-Singapura 1824-2009, Satu Selat Dua Nakhoda. Kedua buku tersebut dicetak oleh Penerbit Gramata Publishing, Jakarta. Buku tersebut disebarluaskan melalui beberapa toko buku di berbagai kota besar di Indonesia. Penerimaan masyarakat cukup menggembarakan, terbukti kedua buku tersebut banyak diminati oleh masyarakat luas. Banyaknya permintaan agar penerbitan buku serupa terus dilakukan dengan pembahasan daerah perbatasan yang lain. Tentu kami mengucapkan banyak terimakasih atas sambutan positif tersebut. Atas permintaan dan dorongan itu, Direktorat Geografi Sejarah kali ini menggagas penulisan sejarah perbatasan yang memfokuskan pada sejarah Pulau Miangas (Indonesia) yang berbatasan langsung dengan negara Filipina.

Dinamika kesejarahan daerah ini (Miangas dan Filipina) dapat disebut tidak sepanas bila dibanding dengan perbatasan antara negara Indonesia dengan Malaysia di tapal batas manapun. Namun peristiwa perebutan wilayah ini pernah mewarnai wajah sejarah kewilayahan, itu terjadi ketika Indonesia belum terbentuk – antara Amerika dengan pemer-

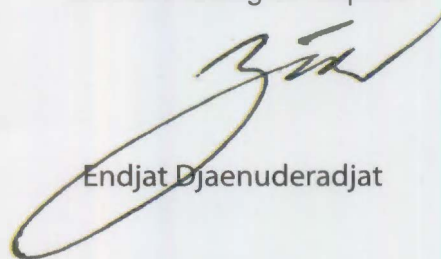
intah Belanda. Peristiwanya hampir sama dengan perebutan Pulau Sipadan dan Ligitan antara Malaysia dengan Indonesia, yang keputusannya ditentukan oleh Mahkamah Internasional.

Kemenangan Belanda dalam penguasaan Pulau Miangas atas klaim Amerika menunjukkan kematangan persiapan Belanda dengan berbagai kelengkapan yang dibutuhkan sebagai alat pembuktian di Mahkamah Internasional. Kedigdayaan sejarah itu ternyata tak terulang sebagai keniscayaan sejarah bagi Indonesia, ketika Pulau Sipadan dan Ligitan di Mahkamah Internasional palu keputusan lebih berpihak ke Malaysia.

Buku berjudul "Sejarah Wilayah Perbatasan Miangas – Filipina 1928-2010: Dua Nama Satu Juragan", menyajikan sejarah Pulau Miangas mulai dari penemuan, penguasaan, pendudukan, perebutan wilayah hingga upaya pemberdayaan penduduknya. Semoga buku ini akan memperkaya ingatan kolektif bangsa guna peningkatan wawasan, kewaspadaan, dan komitmen untuk membuat sejarah ke depan lebih bermartabat khususnya bagi bangsa dan negara tercinta.

Akhirnya ucapan terimakasih kami haturkan kepada segenap penulis buku ini, semoga sumbangsih yang sangat berharga ini akan terus dikenang dan bermanfaat bagi kelangsungan peneguhan kecintaan dan kebanggaan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

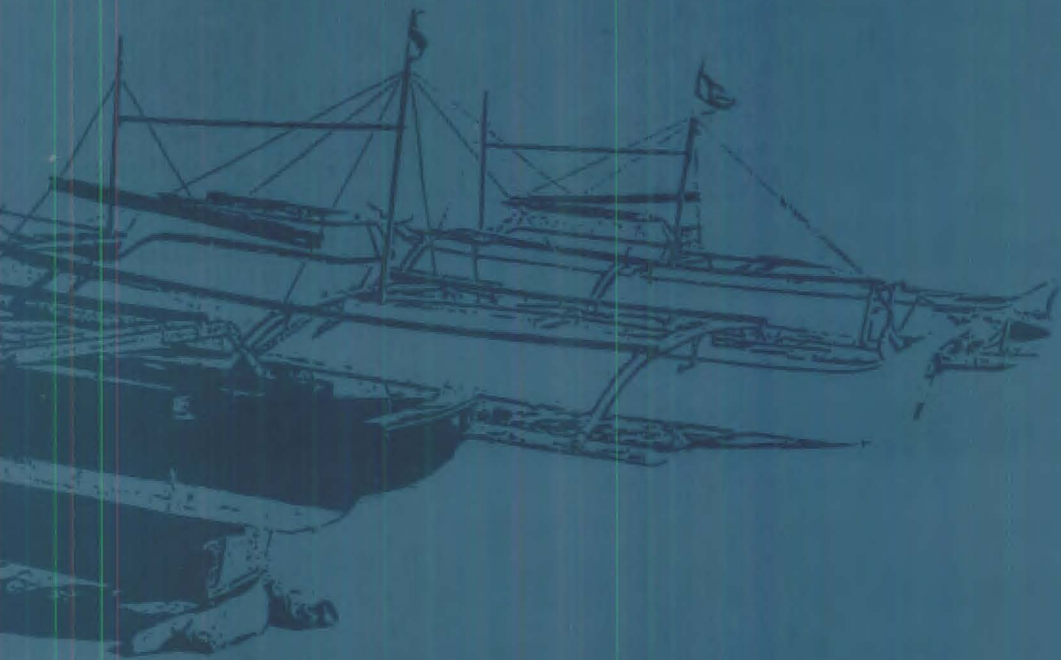
Jakarta, Desember 2011
Direktur Geografi Sejarah



Endjat Djaenuderadjat

BAB 1

PENDAHULUAN



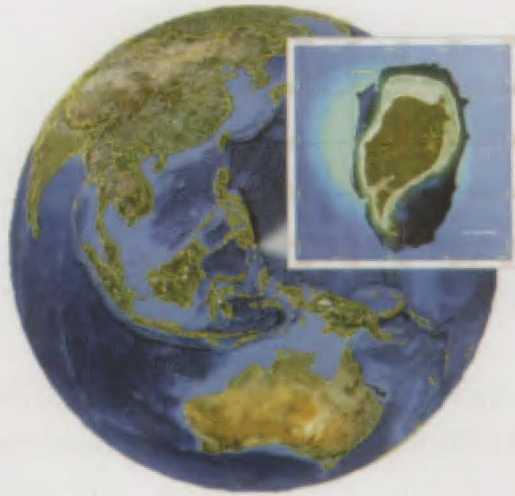
1.1 Menyoyal Pulau Miangas

Sejak awal tahun 2003 hingga akhir 2010, pulau Miangas alias *Las Palmas* ramai diberitakan dalam media cetak. Selama kurun waktu itu, tidak kurang dari 100 buah artikel, opini dan surat pembaca yang dapat dibaca pada dua media nasional – *Kompas* dan *Tempo* – menyoyal “kepemilikan” dan permasalahan pulau seluas 315 hektar di ujung utara Sulawesi, berbatasan dengan negara tetangga, Filipina¹. Ada dua hal yang menjadi penyebab ketertarikan media terhadap Pulau Miangas. Pertama, letak pulau Miangas yang berada di perbatasan Indonesia – Filipina. Kedua, sejak tahun 2005 daerah perbatasan dan terpencil masuk dalam agenda pembangunan nasional².

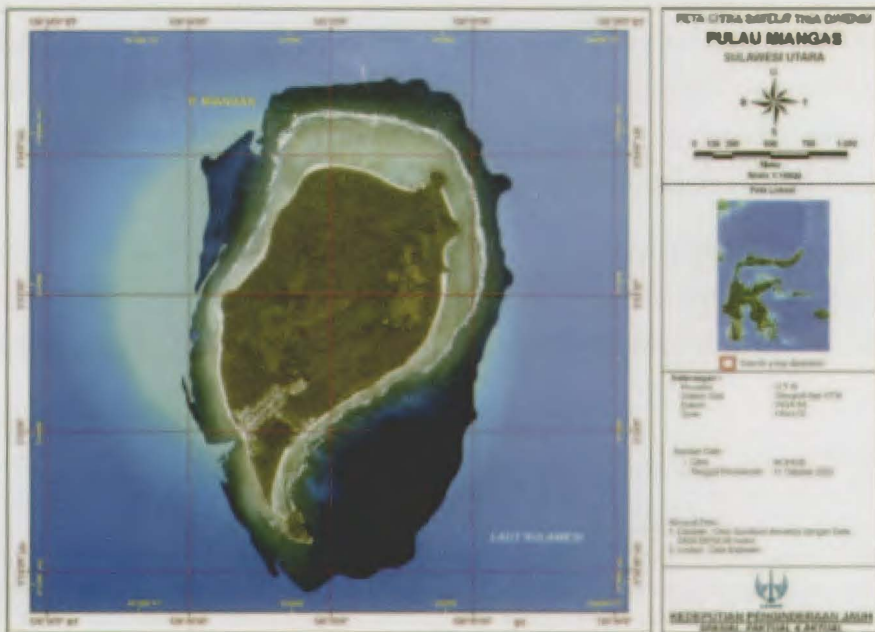
Letak geografis pulau Miangas di perbatasan Indonesia – Filipina, tepatnya berada di wilayah teritorial Filipina, mengundang kekhawatiran banyak pihak. Kekhawatiran ini semakin menguat setelah Indonesia tidak

1 Lihat: “Daftar Publikasi Media Tentang Miangas Periode 1985 - 2010” terlampir. Bandingkan dengan publikasi periode 1985 - 2001, *Miangas* terbacanya hanya dalam empat berita. (1) *Miangas* disebut sebagai penanda tapal-batas Provinsi Sulawesi Utara, dalam berita “Penggantian Gubernur Sulawesi Utara” (*Tempo*, Maret 1985); (2) *Miangas* sebagai salah satu pelabuhan yang dikunjungi pelayaran perintis, dalam berita “Subsidi Untuk Perintis” (*Tempo*, 7 November 1987); (3) *Miangas* disebut sebagai tempat sensus orang Indonesia di Mindanao, dalam berita “Kembalinya si Anak Haram” (*Tempo*, 12 Juni 1993); dan (4) *Miangas* mewakili Etnis Minoritas Sangir di MPR-RI (*Tempo*, 30 Agustus 1999).

2 Lihat: Peraturan Presiden No. 7 tahun 2005, khususnya Bab 4.12 Pengurangan Ketimpangan Pembangunan wilayah.



Gambar 1.1 Pulau Miangas dalam peta bumi



Gambar 1.2 Pulau Miangas menurut citra satelit



Gambar 1.3 Pulau Miangas (Las Palmas) antara Mindanao dan Sulawesi Utara



Gambar 1.4 Tiga pulau terdepan (P. Marore, P. Miangas, P. Marampit)

dapat mempertahankan pulau Sipadan dan Ligitan. Meskipun pada penghujung tahun 2002, Menteri Luar negeri Hassan Wirajuda dalam wawancara khusus dengan Majalah Tempo menegaskan bahwa "... pulau Miangas sudah jelas milik kita. Tidak ada pihak lain yang menyoal hal itu ³," tetap saja ada pemberitaan yang isinya mengkhawatirkan "kepemilikan" pulau di perbatasan ini⁴. Kekhawatiran seperti itu kembali terbaca dalam berita Majalah *Gatra*, "Menjaga Miangas tak jadi Las Palmas"⁵. Pasalnya, berawal dari temuan Konsul Jenderal RI di Davao. Ada brosur yang mencantumkan pulau Miangas sebagai salah satu tujuan wisata yang dipasarkan oleh agen wisata di Davao.

Selain menyoal "kepemilikan Pulau Miangas" yang konon "rawan dicaplok"⁶; pulau ini juga dianggap sebagai "Pulau Bermasalah"⁷. Hanya saja masalahnya apa, tidak jelas dalam pemberitaan dan penjelasan narasumber berita itu. Ada juga yang menyoal posisi pulau Miangas dan pulau lainnya di perbatasan rentan masalah kejahatan transnasional, mulai dari kegiatan penyelundupan, terorisme, penangkapan ikan tidak sah atau *illegal fishing* hingga ke jaringan narkoba⁸.

3 "Hassan Wirajuda: "Tak ada Lagi Pulau yang Menjadi Sengketa" Tempo, 23 Desember 2002.

4 Lihat misalnya, Tempo Edisi 20 – 26 Januari 2003, "Sambung-menyambung Diambil Tetangga"; "Pulau Miangas Belum Sepenuhnya Milik Indonesia" Tempo, 12 Februari 2003; "Pertahanan Laut Indonesia Lemah: Miangas Terancam Lepas" Berita Sulut, 11 Oktober 2005 (Budi H. Rarumangkay); "Miangas-Marore Bisa Jadi Sipadan-Ligitan Jilid II", Kompas, 12 Januari 2009; dan sejumlah berita serupa.

5 Minggu *Gatra*, Nomor 15, beredar Kamis, 19 Februari 2009.

6 "Marore, Miangas, Marampit Potensial 'Dicaplok' <http://www.identitasminaesa.com>, 16 Desember 2006; "Perbatasan Tak Terurus" Kompas, 14 Februari 2009.

7 "Menteri Kelautan: Sepuluh Pulau Indonesia Masih Bermasalah" ...pernyataan dari Rokhmin Dahuri, antara lain pulau Miangas yang masih bermasalah. Tempo, 12 Juli 2003; "Rencana Kunjungan ke Daerah Perbatasan" ...menurut staf ahli Pansus DPD Chandra Motik, pulau Miangas adalah salah satu dari 12 Pulau Bermasalah di Perbatasan. <http://dpd.go.id/> 17 Maret 2011, Lela.

8 "Kekuatan TNI-AL Memang Menurun" Tempo, 15 Agustus 2005; "Miangas-Marore Dijaga Intensif" Kompas, Jumat, 10 Februari 2006; "Hampir Separuh Pengguna Narkoba Usia Produktif". Tempo, 22 Juni 2010; "TNI-AL Tingkatkan Pengamanan Pulau Terluar" Tempo, Minggu, 23 Desember 2010.



Masuknya kawasan perbatasan dalam agenda (prioritas) pembangunan semenjak pemerintahan Pasca-Soeharto menjadi salah satu alasan bagi pejabat pemerintah pusat melakukan kunjungan ke pulau-pulau di perbatasan. Salah satunya adalah pulau Miangas. Selama periode 2003 – 2011, tidak kurang dari empat menteri (Menteri Negara PDT, Syaifullah Yusuf; Menteri Perikanan & Kelautan Rokhmin Dahuri dan penerusnya, Freddy Numberi; dan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fausi), anggota DPR-RI dan DPD-RI, Panglima Kodam VII Wirabuana, serta Gubernur Sulawesi Utara dan pejabat lainnya. Kalangan kampus pun tidak ketinggalan. Universitas Indonesia bahkan mengirim kurang lebih 70 mahasiswa ber-Kuliah Kerja Nyata selama sebulan (Juli – Agustus 2009). Terakhir, pada bulan Mei 2010, Badan Narkotika Nasional menggelar aksi pengibaran bendera sepanjang 7.000 meter mengelilingi pulau Miangas hingga tercatat dalam Rekor Muri.⁹

Bila artikel, berita, surat pembaca yang termuat pada media cetak perihal Pulau Miangas pada periode 2003 – 2010 di atas mau disimak dengan cermat satu per satu, topik pemberitaan menyangkut status “kepemilikan” pulau Miangas-lah yang lebih menonjol dan dikomentari oleh banyak pihak. Hal menarik adalah berbagai reaksi sepertinya tidak memahami pernyataan Menteri Luar Negeri pada akhir tahun 2002 dan kembali ditegaskan pada tahun 2009. Sangat jelas menurut Beliau bahwa tidak ada klaim dari pihak negara tetangga soal Pulau Miangas.¹⁰ Menarik karena meskipun Pejabat Negara yang memiliki otoritas telah memberikan keterangan yang lugas dan jelas, namun masih ada saja pihak-pihak (pejabat dan penguasa) yang tetap mempernyokan dan mempersoalkan

9 Lihat: “Daftar Publikasi Media Tentang Miangas Periode 1985 - 2010” terlampir.

10 Lihat “Hassan Wirajuda: “Tak Ada Lagi Pulau yang Menjadi Sengketa” (Tempo, 23 Desember 2002) dan “Soal Pulau Miangas: Menlu: Kita Sering Ribut” (Gatra, 14 Februari 2009); “Menlu: Soal Miangas, Banyak Perdebatan yang Tidak Perlu” (Kompas, 16 Februari 2009); dan “Kemenlu RI: Door Stop Interview Foreign Policy Breakfast (130209).

status pulau paling utara ini.¹¹ Hal lain yang ditemukan baik dalam artikel, berita maupun surat pembaca yang dimaksud, adalah ada pernyataan dari narasumber yang tidak didukung oleh data terpercaya. Misalnya, soal penduduk pulau Miangas dan jumlahnya, kehidupan ekonomi, sosial dan kultural yang terkesan didramatisasi, dan hal-hal lainnya.¹²

Keadaan sedemikian akhirnya mengundang munculnya pertanyaan: apakah belum tersedia informasi tertulis baik tentang status Pulau Miangas maupun informasi lainnya menyangkut pulau di perbatasan ini yang dapat dijadikan rujukan?

Penelusuran atas sejumlah dokumen menunjukkan bahwa satu-satunya buku tentang Pulau Miangas, diterbitkan hampir 80 tahun lalu, tepatnya tahun 1932, karya Dr. H.J. Lam.¹³ Buku setebal 65 halaman itu ditulis dalam bahasa Inggris dan lebih banyak berisikan keterangan tentang alam, geofisik, fauna, flora, jenis bebatuan yang ada di pulau Miangas. Keterangan tentang manusianya sebanyak 17 halaman dan yang dipaparkan berturut-turut tentang asal-mula penduduk pulau Miangas, dilanjutkan dengan keterangan sekilas tentang kehadiran pemerintahan Hindia Belanda dan diselingi oleh peristiwa seperti adanya wabah kolera yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk; keadaan (jumlah) penduduk pada tahun 1905, 1906, 1909 dan 1923; penataan

11 Lihat: "Miangas-Marore Bisa Jadi Sipadan-Ligitan Jilid II" (Kompas, 12 Januari 2009); "KSAL: Deplu Harusnya Tertantang Selesaikan Miangas" (Kompas, 12 Februari 2009); "Perbatasan Tak Terurus" (Kompas, 14 Februari 2009) serta berita lainnya yang serupa.

12 Lihat misalnya pernyataan Bupati Sangihe-Talaud dalam berita berjudul "Pulau Miangas Belum Sepenuhnya Milik Indonesia" (Tempo online, 12 Februari 2003); ketidak-akuratan berita tentang budaya Miangas dalam "Penyewaan Pulau: Mendulang Rupiah dari Pulau-pulau Kosong" (Tempo interaktif, 22 September 2003); pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang jumlah penduduk Miangas dan Marore sebanyak 20.000 jiwa pindah ke Mindanao dalam "Indonesia Butuh Investasi Rp. 90 Miliar" (Tempo interaktif, 17 April 2006), dan sebagainya.

13 *Miangas (Palmas) Scattered Annotations, made and collected by dr. H.J. Lam (Botanist at the Herbarium and Museum for Systematical Botany at Buitenzorg Printed by G. Kolf & Co. At Batavia, 1932.*



pemukiman, beberapa baris tentang agama dan kepercayaan penduduk, kesehatan dan pertanian. Selain karya H.J. Lam, ditemukan dua artikel tulisan Djorina Velasco¹⁴ dan sebuah artikel dari Andreas Harsono¹⁵ yang informatif dan didasarkan pada kunjungan lapangan serta data yang akurat. Ada juga sejumlah tulisan, baik dalam bentuk buku maupun artikel tentang daerah perbatasan Indonesia – Filipina. Di antaranya, ada yang menyinggung soal pulau (dan warga) Miangas secara sepintas, ada pula yang tidak menyertakan keterangan tentang Miangas di dalamnya¹⁶.



Gambar 1.3 Pulau Miangas dilihat dari arah selatan

14 "Navigating the Indonesian-Philippines Border: The Challenges of Life in the Borderzone" dalam Kasarinlan: *Philippine Journal of Third World Studies*, 2010, 25 (1-2): 93 – 118; dan "Between Manado and Davao: How the Indonesian Island of Miangas is Making use of its Philippine Ties" dalam *Newsbreak Online*.

15 "Miangas, nationalism and isolation" dalam *Asia Views* (2004)

16 Lihat antara lain: A.B. Lopian, 2009, *Orang Laut, Bajak Laut, Raja Laut: Sejarah Kawasan Laut Sulawesi Abad XIX*. Komunitas Bambu, Jakarta; Aswatini Raharto, 2000, "Return Migration Among the Sangirese: Life and Adjustment in the Homeland" dalam *Population Movement in Southeast Asia: Changing Identities and Strategies for Survival*. Edited by Abe Ken-ichi & Ishii Masako. JCAS Symposium Series 10. The Japan Center for Area Studies. National Museum of Ethnology.

Minimnya keterangan tertulis tentang Pulau Miangas inilah yang menjadi alasan betapa perlunya menghadirkan sebuah tulisan – dari aspek kesejarahan dan sosio-kultural – tentang kelompok komunitas di pulau perbatasan ini.



Gambar 1.6 Laut dan ombak di sekitar Pulau Miangas

1.2 Miangas dalam Catatan

Sejak kapan pulau Miangas dikenal – terutama oleh para pelaut dan penjelajah alam – dapat ditelusuri baik dalam catatan-catatan pelayaran maupun peta serta dokumen-dokumen kolonial, peneliti alam dan pekabar injil. Konon, pulau ini pertama kali ditemukan oleh pelayaran yang dipimpin pelaut dan peneliti alam Spanyol, Garcia de Loaisa, bulan



Oktober 1526.¹⁷ Ada juga sumber lain yang menyebut bahwa yang menemukan pulau itu adalah pelaut Portugis.¹⁸ Hal itu dapat dibuktikan dengan penggunaan nama (sebutan) *Ilha de Palmeiras* yang berada pada letak pulau Miangas seperti yang tergambar baik dalam Peta Abraham Ortelius (1570) maupun Peta Petrus Plancius (1594)¹⁹. Sebutan *Ilha de (das) Palmeiras* digunakan oleh Pelaut Portugis dan kemudian dikutip oleh pembuat peta berkebangsaan Belanda, sedangkan sebutan yang digunakan oleh pelaut dan peneliti alam berkebangsaan Spanyol adalah *Islas de las Palmas*.²⁰

Penelusuran terhadap beberapa peta-peta awal, menunjukkan bahwa pulau kecil ini sudah dikenal sejak pertengahan abad ke- 16. Tepatnya dalam peta Asia Tenggara yang digambar oleh Gerard Mercator pada tahun 1569.²¹ Tercantum dalam peta itu sebuah pulau kecil yang dinamai *y(slas) de Cocos* berada ujung tenggara Mindanao dan utara timur laut pulau-pulau *Talao alijs Tarrao infule*.²² Sebutan *y(slas) de Cocos* dengan letak dan koordinat yang sama juga ditemukan dalam peta Asia dari Abraham Ortelius, 1570.²³ Selanjutnya, peta yang dipublikasi oleh Antonio de Herera y Tordesillas (1601), *Descripcion de las Indias del Poniente*, tergambar sebuah pulau di bagian tenggara pulau Mindanao dan bagian utara *el Maluco* (Halmahera), bernama *ysla de Palmas*²⁴ (*Isla de las Palmas*). Sebutan serupa yang dapat ditemukan dalam dokumen Belanda adalah *Palmas eiland* yang digunakan secara bersamaan dengan sebutan

17 Lihat "Permanent Court of Arbitration" hal. 13.

18 Lihat H.J. Lam, 1932 halaman 42.

19 Lihat, Thomas Suárez, 1999 halaman 165, peta 85 & halaman 174-175 peta 90.

20 Lihat juga Peta yang digambar oleh Linschoten.

21 Mungkin saja ada peta sebelumnya. Tulisan ini hanya berdasarkan pada peta koleksi Yayasan Marin-CRC Manado.

22 Lihat, Thomas Suárez, 1999 halaman 141, peta 76.

23 Suárez, 1999 halaman 165, peta 86.

24 Suárez, 1999 halaman 162, peta 84.

Pulau Miangas. Salah satu dokumen resmi yang menggunakan sebutan itu adalah publikasi dari *Departement van Binnenlandsch Bestuur* menyertakan *Schetskaart van de Sangi- en Talaud-Eilanden*, skala 1:500.000 (Batavia, 1911) yang mencantumkan Miangas (Palmas eil.) sebagai pulau paling utara dari *Nanoesa eilanden*. Dalam dokumen tersebut dijelaskan bahwa gugusan pulau Nanusa adalah satu wilayah *Djogoegoeschappen Nanoesa eilanden*.²⁵ Gugusan kepulauan Sangihe dan Talaud, dalam dokumen Belanda, terutama sejak ekspedisi Robertus Padtbrugge, dinamakan *het noorder-eilanden*, atau kini dikenal dengan sebutan *Nusa-Utara*.²⁶

Penggunaan nama Palmas *eiland* dan Pulau Miangas, baik secara bersamaan maupun bergantian, dapat dibaca dalam beberapa publikasi Belanda, antara lain buku "*Miangas (Palmas) Scattered Annotations, made and collected by dr. H.J. Lam*" (1932). Buku ini berupa laporan kunjungan Tim Ahli Kebun Raya Bogor atau kala itu dikenal sebagai *Botanical Gardens of Buitenzorg*; yang dipimpin oleh dr. H.J. Lam ke pulau Miangas tanggal 11 – 12 Juni 1926. Tim ini didampingi oleh Residen Manado H.J. Schmidt, Controleur pulau-pulau Sangihe, H. Sieberg, Raja Tahuna, S. Ponto, Raja Talaud, J.S. Tamawiwi dan pejabat sipil *Gezaghebber* Talaud, H. Eckenhausen; dengan menggunakan kapal api "*Zwaluw*".

Penggunaan sebutan serupa, yakni "*Miangas (Palmas island)*", juga digunakan dalam "*The Island of Palmas Case (or Miangas) United States of America v. The Netherlands, Award of the Tribunal*" dari Permanent Court of Arbitration, The Hague, 4 April 1928; dan beberapa publikasi telaahan

25 Lihat, *Mededeelingen van het Bureau voor de Bestuurszaken der Buitenbezittingen*, Aflevering II, Kaart II.

26 Lihat, "*Het Journaal van (R.) Padtbrugge's reis naar Noord-Celebes en de Noordereilanden (16 Augustus – 23 December 1677) Met bijlagen; en met Aanhangel door P.A. Loupe*" dalam *Bijdragen tot de taal-land en volkenkunde (van Nederlandsch Indie)* 14, deel 2: 105 – 340.



keputusan Arbitrase Internasional Max Huber.²⁷ Dalam dokumen dari Mahkamah Internasional setebal 37 halaman juga ditemukan beberapa keterangan tentang pulau (dan warga Miangas) yang didasarkan pada informasi kedua belah pihak (Amerika Serikat dan Belanda).

Lain lagi halnya dengan D. Brilman. Pekabar Injil ini dalam "De Zending op de Sangi- en Talaud- eilanden" (1938), menggunakan sebutan Miangas, tanpa menyertakan sebutan *Palmas eiland*. Singkatnya, untuk sebuah pulau ini dua nama yang banyak digunakan baik secara bersamaan yakni Miangas (*Palmas*) atau secara bergantian yakni Pulau Miangas dan *Isla de las Palmas* atau *Palmas Island*.²⁸ Di samping nama-nama lain yang ditemukan dalam dokumen Eropa seperti *Ilha de Palmeiras*²⁹, *Isla de Cocos*³⁰, *Las Islas Miangis*³¹, *Mianguis, Island Meangis*,³² *Meangas (Mejages)*³³, dan *Melangis*³⁴.

Kemudian tuturan dalam tradisi lisan – terutama tradisi bahari yang menggunakan "bahasa sasahara" dalam pelayaran – tidak menggunakan sebutan Miangas atau Palmas, maupun beberapa nama yang sudah

27 Lihat antara lain, Daniel-Erasmus Khan, "Max Huber as Arbitrator: The Palmas (Miangas) Case and other Arbitration" dalam *The European Journal of International Law*. Vol. 18, No. 1 (145 – 170).

28 Penggunaan sebutan itu digunakan baik oleh penulis berkebangsaan asing antara lain Shinzo Hayase dalam "Mindanao Ethnohistory Beyond Nations, Maguindanao, Sangir, and Bagobo Societies in East Maritime Southeast Asia" Ateneo de Manila University Press, 2007; penulis berkebangsaan Filipina Edwin Espejo, "Miangas: Flashpoint island between RP and Indonesia" dalam *Asia Correspondent* (2010) dan Djorina Velasco, "Between Manado and Davao: How the Tagalog Island of Miangas is making use of its Philippine ties" dalam *Newsbreak Online* (2007); penulis berkebangsaan Indonesia, Andreas Harsana, "Miangas, nationalism and isolation" dalam *Asia Views* (2008), dan penulis lainnya.

29 Lihat Peta Ortelius, 1570 & Peta Plancius, 1595.

30 Lihat Peta Ortelius, 1570

31 Lihat "Permanent Court of Arbitration" hal. 27

32 Sebutan yang digunakan oleh Dampier yang dipublikasi pada tahun 1698.

33 Digunakan oleh komandan Larycque dalam laporannya ketika mengunjungi pulau itu pada tahun 1700. Lihat Permanent Court....halaman 30.

34 Lihat "Permanent Court...halaman 30.

disebut di atas, tetapi sebutan “*Tinonda*” dan “*Poilaten*”.³⁵ Penggunaan sebutan *Tinonda* dalam frasa “...dari Tinonda sampai Popayato”, acapkali disebut-sebut oleh para pejabat sejak era Pemerintahan Gubernur Sulawesi Utara, Hein Victor Worang ketika menyampaikan pidato atau sambutan dan menyatakan batas-batas satuan administratif Propinsi Sulawesi Utara dan berakhir pada masa gubernur E.E. Mangindaan, ketika Gorontalo dimekarkan dari Sulawesi Utara³⁶. Sebutan serupa kembali digunakan setelah adanya pemekaran Kabupaten Kepulauan Talaud. Penggunaan sebutan *Tinonda* (... dari *Tinonda* sampai Napombalu..) dalam pidato atau sambutan para pejabat di Kabupaten Kepulauan Talaud untuk menandai batas Utara – Selatan wilayah administratif kabupaten Talaud hampir selalu ditemukan dalam naskah resmi pidato Bupati Talaud³⁷.

Kata *Tinonda* merupakan penanda yang digunakan untuk memaknai keberadaan warga atau penduduk pulau Miangas yang berasal dari gugusan pulau-pulau Nanusa (Marampit dan Karatung). Secara harafiah kata itu berarti mereka yang ditempatkan di pulau yang agak terpisah dari tempat asalnya (gugusan pulau-pulau Nanusa). Kata *Poilaten* adalah kosakata bahasa sasahara yang digunakan oleh pelaut. Ketika berlayar, mereka menyebut sesuatu entah itu benda bukan dengan sebutan biasa.

35 Tentang “bahasa sasahara” lihat uraian R.M. Sutjipto Wirjosuparto, 1964. *Bunga Rampai Sedjarah Budaya Indonesia*. Penerbit Djambatan, Djakarta. Halaman 104 – 108. (hal 105: “...bahasa pantang dalam bahasa Sangi jang dinamakan bahasa **Sasahara** atau bahasa laut. Djika orang Sangi sedang berlar, di tengah laut mereka menggunakan bahasa pantang tersebut jang sebagian besar terdiri atas segala hal jang bersangkutan dengan alat perahu, keadaan alam ditengah laut dan binatang laut Bahasa sasahara dalam bentuknja dapat dibagikan atas beberapa djenis: (1) keterangan jang menundjukkan nama benda (2) mengambil perkataan jang sama bunjinja dengan barang jang dilarang disebut (3) memakai perkataan jang tua bentuknja untuk mengganti perkataan jang terlarang..... (4) tambahan awalan **ang** jang menunjukkan keterangan tempat....” ^

36 Lihat dalam beberapa arsip Pidato Gubernur Sulawesi Utara di setiap kunjungan kerja ke wilayah maupun pada upacara hari ulang tahun propinsi serta beberapa peristiwa lainnya.

37 “... dari Tinonda (Miangas) sampai Napombalu (pulau Karang di ujung tenggara pulau Kabaruan. Sedangkan Popayato adalah nama tempat (pemukiman) sekaligus nama Kecamatan paling ujung Selatan di Gorontalo.



Misalnya, ketika mereka melihat pulau, pantang bagi pelaut menyebutnya "pulau". Begitu pula halnya dengan benda lainnya seperti air, api, dan sebagainya. Kebiasaan para pelaut ketika berlayar mendekati pulau Miangas, dan jika pulaunya sudah tampak, maka mereka tidak akan mengatakannya pulau Miangas, tetapi "*Poilaten*" atau "*poi wanua*" yang harafiah berarti di sana kampung halaman atau pulau kita.³⁸

Ingatan kolektif warga terutama menyangkut silsilah (*genealogy*) serta kisah-kisah kesejarahan tentang komunitasnya. Penelusuran atas silsilah serta kisah-kisah kesejarahan di kalangan kelompok komunitas etnis di wilayah perbatasan ini menunjukkan adanya pertalian kekerabatan yang erat warga yang mendiami pulau-pulau di perbatasan baik dengan kelompok komunitas etnis (asli) di Mindanao maupun dengan kelompok komunitas etnis di Sulawesi Utara.³⁹ Tentang asal mula penduduk pulau Miangas, sebagian besar berasal dari pulau-pulau Nanusa (Marampit dan Karatung), dan ada juga yang berasal dari daratan Mindanao dan kawin mawin dengan penduduk pulau Miangas.⁴⁰ Kisah-kisah kesejarahan yang dituturkan dan yang paling diingat adalah perlawanan terhadap "Orang Balangingi" yang melakukan perampokan dan penculikan warga untuk diperdagangkan sebagai "budak" di kesultanan Sulu. Aksi menangkal serangan perampok ini meninggalkan bekas berupa benteng yang berada di puncak gunung di pulau Miangas.

38 Keterangan dari beberapa arang tua, antara lain K. Rumewa (pensiyunan guru, 67 thn, tinggal di Melanguane) dan J. Lupa (Pensiyunan guru, 77 thn, tinggal di Doddap, desa resettlemen warga Miangas di Kabupaten Balaang Montedow Timur).

39 Lihat: Shinza Hayase, Domingo M. Nan, Alex J. Utæn, comps. 1999, "*Silsilah/Tarsilah (Genealogies) and Historical Narratives in Sorongon Bay and Davao Gulf Regions, South Mindanao, Philippines, and Sangihe-Talaud islands, North Sulawesi, Indonesia*" Kyoto: Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University.

40 Selain tuturan beberapa informan (pak J. Lupa dan K. Rumewa, catatan kaki 36) keterangan dan nama nenek mayang yang berasal dari Mindanao dapat juga dibaca dalam H.J. Lam, 1932 halaman 36.

Menelusuri “kehadiran” Miangas dalam publikasi sezaman dapat dilakukan dengan melihat publikasi dari kedua belah pihak (Indonesia dan Filipina) maupun dari pihak luar, dengan melakukan amatan singkat dari sejumlah publikasi yang sempat terlacak. Adapun yang dimaksud dengan publikasi sezaman adalah publikasi setelah kemerdekaan Indonesia.

Sepertinya, perebutan Pulau Miangas antara Amerika Serikat dengan Belanda, luput dari perhatian beberapa sejarawan Filipina seperti Theodore A. Agoncillo,⁴¹ Sonya Zaide⁴² yang sudah menerbitkan karya yang digunakan sebagai buku teks di universitas. Akademisi Filipina yang menaruh perhatian terhadap masalah perbatasan antara dua negara (Indonesia dan Filipina) antara lain adalah Evelyn Tan Culamar⁴³, Macario D. Tiu⁴⁴, Djorina Velasco⁴⁵. Berbeda dengan Tan Culamar dan Macario Tiu yang memusatkan perhatian mereka ke warga keturunan Indonesia di Mindanao dan hanya melakukan kunjungan singkat di kepulauan Sangihe dan Talaud, Djorina Velasco⁴⁶, melakukan kerja lapangan dan menetap beberapa bulan di pulau Miangas dan beberapa tempat di kepulauan

41 “*History of the Filipino People*” (Eight Edition), 1990. Dalam bob 17, secara khusus ia membahas kebijakan Leonard Woods, Gubernur wilayah Moro yang mengajukan keberatan dan membawa kasus Miangas ke Arbitrase Internasional di Den Haag.

42 “*The Philippines: A Unique Nations*” dan “*History of the Republic of the Philippines*” All Nations Publ. Co. Inc. Quezon City, 1994.

43 “The Indonesian Diaspora in Southern Mindanao: Implication for the Philippines – Indonesia Relations” 1989 (Thesis, Asian Center University of the Philippines Diliman, Quezon City; dan “Migration across the Sulawesi Sea” dalam *Proceedings of the Symposium Human Flow and Creation of New Cultures in Southeast Asia*. December 3 – 5, 1996 Tokyo: KKR Hotel Tokyo (Tokebashi Kaikan). Institute for the Study of Languages and Cultures of Asia and Africa. Tokyo University of Foreign Studies. 1998, ps. 13 – 26.

44 “*Personal Accounts of Indonesian Migrants in Davao and Cotabato*”. n.d. Kyoto Review of Southeast Asia. http://kyotoreviewsea.org/Tiu_final.htm (dikunjungi Juli 2007).

45 “Navigating the Indonesian-Philippines Border: The Cholenes of Life in the Borderzone” dalam *Kasarinlan: Philippine Journal of Third World Studies*, 2010, 25 (1-2): 95 – 118; dan “Between Manado and Davao: How the Indonesian Island of Miangas is Making use of Its Philippine Ties” dalam *Newsbreak Online*.

46 Sosiolog dan pengajar di Ateneo de Manila, Filipina.



Sangihe dan Talaud. Tidaklah mengherankan apabila kedua tulisannya lebih rinci dan diperoleh dari sumber utama atau data yang akurat. Hal lainnya adalah kemampuannya berkomunikasi dalam bahasa setempat yang ia kuasai.⁴⁷

Di pihak Indonesia, kajian tentang perbatasan yang umum sifatnya dilakukan oleh Alex Ulaen⁴⁸; Salindeho & Sombowadile⁴⁹ dan Andreas Harsono⁵⁰. Tulisan Andreas Harsono secara khusus tentang Miangas menunjukkan kepiawaiannya sebagai investigator berpengalaman dengan gaya pemaparan menarik. Ia tidak saja menghadirkan keseharian orang Miangas, tetapi juga persoalan yang ada dalam lingkup kehidupan berbangsa⁵¹.

Masih tentang kajian wilayah perbatasan, karya Shinzo Hayase baik secara perorangan⁵² maupun bersama rekannya Filipina dan Indonesia⁵³; kajian Takeshi Shiraishi & Alex Ulaen⁵⁴; meskipun tidak memberi tempat bagi Miangas dalam paparannya, namun dari karya-karya tersebut dapat

47 Sosiolog yang satu ini (Velasco) tidak hanya mampu berkomunikasi dalam bahasa Indonesia, tetapi juga dalam bahasa Melayu-Manado dan paham bahasa Sangihe dan Talaud.

48 *Nusa Utara: Dari Lintasan Niaga ke Daerah Perbatasan* Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2003; dan *Nusa Utara dalam Peta Sejarah Bahari*. Marin-CRC Manado, 2010.

49 *Kawasan Sangihe – Talaud – Sitara: Daerah Perbatasan, Keterbatasan, Pembatasan*. Nyspad Yogyakarta, 2008.

50 "Miangas, nationalism and isolation" dalam *Asia Views* (2004),

51 Andreas Harsono dikenal sebagai salah satu pelopor jurnalis sastrawi dari kelompok PANTAU, dan banyak melakukan investigasi.

52 *"Mindanao Ethnohistory Beyond Nations, Maguindanao, Sangir, and Bagobo Societies in East Maritime Southeast Asia"* Ateneo de Manila University Press, 2007.

53 Shinzo Hayase, Domingo M. Non, Alex J. Ulaen, comps. 1999, *"Silsilas/Tarsilas (Genealogies) and Historical Narratives in Sarangani Bay and Davao Gulf Regions, South Mindanao, Philippines, and Sangihe-Talaud islands, North Sulawesi, Indonesia"* Kyoto: Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University.

54 Takeshi Shiraishi & Alex J. Ulaen, 2004, *"The Traffic Zone Reconsidered: Manado – Sangihe/ Talaud – Mindanao"* dalam *Dynamics Studies on the everyday life and resources management in maritime world Wallacea*. Kyoto: Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University.

diperoleh sedikit informasi tentang Miangas serta permasalahannya di daerah perbatasan.

Dokumen lainnya yang berisikan keterangan tentang status pulau Miangas, dapat diperoleh dalam dokumen *Border Crossing Agreement* (1956) antara Pemerintah Indonesia dengan Filipina. Dokumen tersebut mengalami beberapa perbaikan dan penambahan pada tahun-tahun berikutnya. Dokumen ini tidak hanya mengatur lalu-lintas orang yang bepergian dari kepulauan Sangihe dan Talaud ke Mindanao maupun sebaliknya, tetapi berisikan pengakuan dari Pemerintah Filipina atas kepemilikan pulau Miangas sehubungan dengan ditetapkannya pulau Miangas (dan Marore) sebagai pelabuhan masuk-keluar di wilayah Indonesia.

1.3 Urutan Pemaparan

Seperti lazimnya, Pendahuluan yang mengawali tulisan ini disajikan dalam tiga bagian. Pertama, latar belakang penulisan diberi judul “menyoal Pulau Miangas”. Kedua, sebuah tulisan kesejarahan, senantiasa memaparkan sumber. Tanpa sumber yang akurat, tulisan yang dihasilkan hanyalah sebuah hasil rekaan semata. Di sini disajikan dua kelompok sumber, yakni yang berasal dari dokumen kolonial mulai dari peta (tua), arsip sampai dengan tulisan se zaman. Sumber mana dipandang perlu dilengkapi dengan “ingatan-ingatan kolektif” dari mereka yang dibahas, baik itu masih dalam bentuk lisan maupun yang sudah dicatat.

Memetakan tempat atau lokasi kajian dipilih sebagai upaya mengawali pemaparan tulisan ini. Pemetaannya pun dilakukan dengan merunut-kembali sejauh “ingatan dan pengalaman bersama” itu terekam, baik dalam rupa dokumen maupun hasil-hasil kajian terdahulu. Pada



pemetaan awal, pulau (warga) Miangas telah terhisab dalam sebuah “ruang-jejaring” yang diwarnai dengan “tradisi-melayu”. Tradisi ini pula lah yang menandai kawasan seputar Laut Sulu, Laut Sulawesi, dan Laut Mindanao, tempat dimana Pulau Miangas ditemukan, seakan-akan sebuah kesatuan. Kehadiran pelaut berkebangsaan Eropa yang berlayar mengikuti jalur pelayaran Sino-Melayu disusul dengan perebutan koloni, lambat-laun memisahkan “ruang-jejaring” yang ada. “...Kesatuan dunia bahari di sini mulai retak dengan kedatangan orang asing (banyaga) dari Eropa Barat..” ungkap sarjana sejarah bahari senior (A.B. Lopian) dalam salah satu tulisan⁵⁵. Akhir dari persaingan kekuasaan ini menempatkan pulau Miangas sebagai titik terujung di utara sebuah keresidenan (Manado) dalam wilayah sebuah koloni yang disebut Hindia Belanda. Sejak pulau ini dinyatakan sebagai wilayah yang tunduk pada kekuasaan perdagangan VOC (1677), yang setelah tiga setengah abad kemudian dapat dibaca sebuah deskripsi tentang sebuah pulau yang disebut Miangas⁵⁶. Upaya pendeskripsian itu bersamaan dengan proses penentuan “keberhakan” dari dua negara kolonial atasnya⁵⁷. Paparan ini dapat dibaca dalam Bab II “Mengungkap Ruang Jejaring” tulisan ini.

Sewaktu Pemerintah Amerika Serikat menyerahkan salinan surat Perjanjian Perdamaian yang salah satu pasalnya berhubungan dengan status pulau Miangas atau Traktat Paris 1898, kepada Pemerintah Kerajaan Belanda, tidak ada reaksi (resmi) terhadap pemberitahuan itu. Sengketa pulau Miangas baru terangkat setelah Gubernur Propinsi Moro (Mindanao – Filipina) Jenderal Leonard Wood berkunjung ke pulau

55 Lihat A.B. Lopian “Pengantar” dalam Alex J. Ulen, 2003, *Nusa Utara: Dari Lintasan Nigga ke Daerah Perbatasan*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, halaman vi.

56 Buku dimaksud adalah karya Dr. H.J. Lam, yang diterbitkan pada tahun 1932, dan itu merupakan hasil kunjungan sebuah tim penelitian yang dipimpinnya berkunjung di pulau ini tahun 1926.

57 Sengketa Pulau Miangas antara Pemerintah Amerika Serikat dengan Kerajaan Belanda diserahkan kepada Mahkamah Internasional tahun 1925 dan diputuskan pada tahun 1928.

Mianguas, dan diterima warga dengan kibaran triwarna, merah-putih-biru, bendera Kerajaan Belanda. Setelah melalui perundingan yang alot, akhirnya kedua pihak sepakat membawa persoalan status kepemilikan pulau Mianguas ke Mahkamah Internasional yang berkedudukan di Den Haag, Belanda. Dr. Max Huber, terpilih sebagai arbitrator tunggal yang dipercaya untuk menyelesaikan kasus yang dikenal dengan *The Island of Palmas Case (or Mianguas)*. Soal inilah yang dipaparkan dalam Bab III "Pulau Mianguas yang Dipersengketakan".

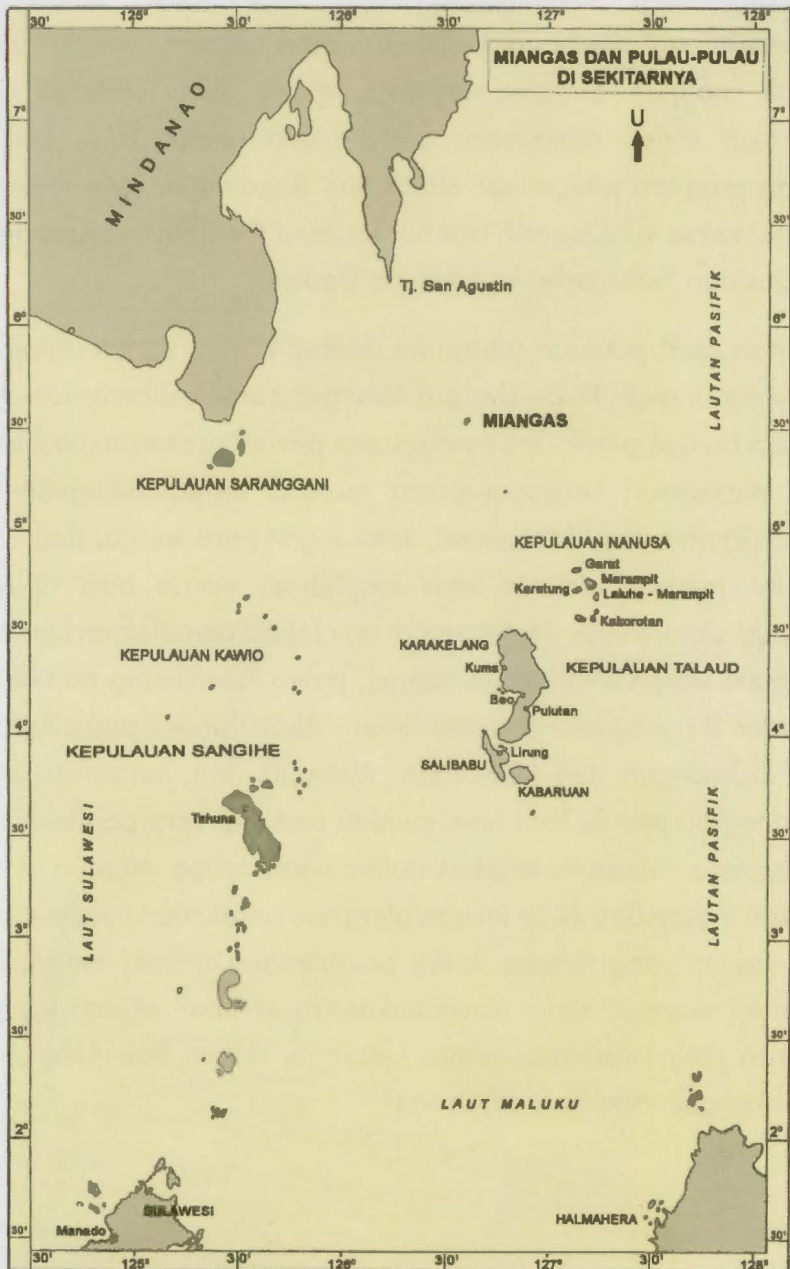
Setelah dua negara-bangsa merdeka, Pulau Mianguas tidak lagi disebut-sebut. Pemerintah Republik Filipina meskipun dalam konsitusinya menetapkan wilayahnya berdasarkan isi pasal III Traktat Paris 1898, tetapi ia menghormati Keputusan Mahkamah Internasional tentang kepemilikan Pulau Mianguas yang ada pada Pemerintah Hindia-Belanda, yang kemudian diwarisi oleh Pemerintah Republik Indonesia. Hal itu nampak dalam penentuan Pulau Mianguas sebagai salah satu pos (masuk-keluar) di pihak Indonesia dalam kaitannya dengan Perjanjian Lintas-Batas antara kedua negara yang disepakati pada tahun 1956, serta beberapa perjanjian setelah itu. Pada era pemerintahan dua orde (Lama & Baru), Pulau Mianguas – seperti halnya pulau-pulau lainnya yang terisolir dan berada di wilayah perbatasan – kurang mendapat perhatian (pembangunan). Nanti setelah itu, atau pada era Pasca-Soeharto, daerah-daerah perbatasan mulai mendapat perhatian. Kenyataan ini tidak dapat dipandang lepas dari pengalaman Indonesia yang kalah dari Malaysia memperebut Sipadan dan Ligitan. Bersamaan dengan dibentuknya Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, pulau-pulau dan kawasan di perbatasan mendapat perhatian besar baik dari penyelenggara pemerintahan di tingkat pusat, propinsi, dan kabupaten. Mianguas – dibandingkan dengan pulau Marore yang keduanya berada di kawasan perbatasan Indonesia – Filipina – mendapat perhatian lebih besar. Setidaknya lewat media cetak. Mianguas yang sebelumnya dikenal sebagai "perbatasan" yang identik dengan



“daerah-belakang” diwacanakan dan diagendakan untuk menjadi “beranda-depan”. Berbagai kunjungan para pejabat baik dari kalangan eksekutif maupun anggota legislatif, aktivis dari lembaga swadaya masyarakat ramai diberitakan oleh media-massa. Lalu, bagaimana aksi dan program pengalihan status itu? Bagaimana pula reaksi warga yang menerima kunjungan? Hal-hal tersebut menjadi isi paparan Bab IV “Miangas dari Perbatasan ke Beranda Depan”.

Pada awal paparan tulisan ini disebut bahwa hanya dalam kurun-waktu yang singkat, Pulau (warga) Miangas banyak diberitakan. Menjadi perhatian banyak pihak. Terkesan banyak pihak mau bicara soal Miangas. Upaya menelusuri berbagai berita tersebut diperbandingkan dengan catatan-catatan resmi (dokumen), keterangan para warga, dan “ingatan-bersama” mereka, amatan atas keseharian warga baik di Miangas maupun di perantauan – terutama di dua lokasi pemukiman kembali atau resettlement warga Miangas di Bengel, pulau Karakelang dan di Dodap, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur – akan tampak perbedaan antara berita, keterangan dan kenyataan. Miangas dan warganya dicitrakan oleh beberapa penulis dan nara sumber menurut cara-pandang mereka. Dan bisa saja, tulisan ini terjebak dalam cara-serupa. Namun, yang ingin dilakukan dalam Bab Akhir ini adalah upaya untuk memaparkan keadaan warga seperti yang terbaca lewat pemberitaan media, teramat dalam keseharian mereka, serta menuturkannya kembali seperti yang sudah dituturkan oleh beberapa warga. Untuk itu dalam Bab Akhir (V) diberi judul “Miangas, Apa Kata (d)Orang”⁵⁸.

58 Sisipan (d) mendahului kata Orang, bisa terbaca ‘dorang’, sebuah lema Melayu Manado yang berarti ‘mereka’. Jadi, judul bab ini, selain dibaca ‘Apa Kata Orang’ boleh juga dibaca ‘Apa Kata Dorang’.

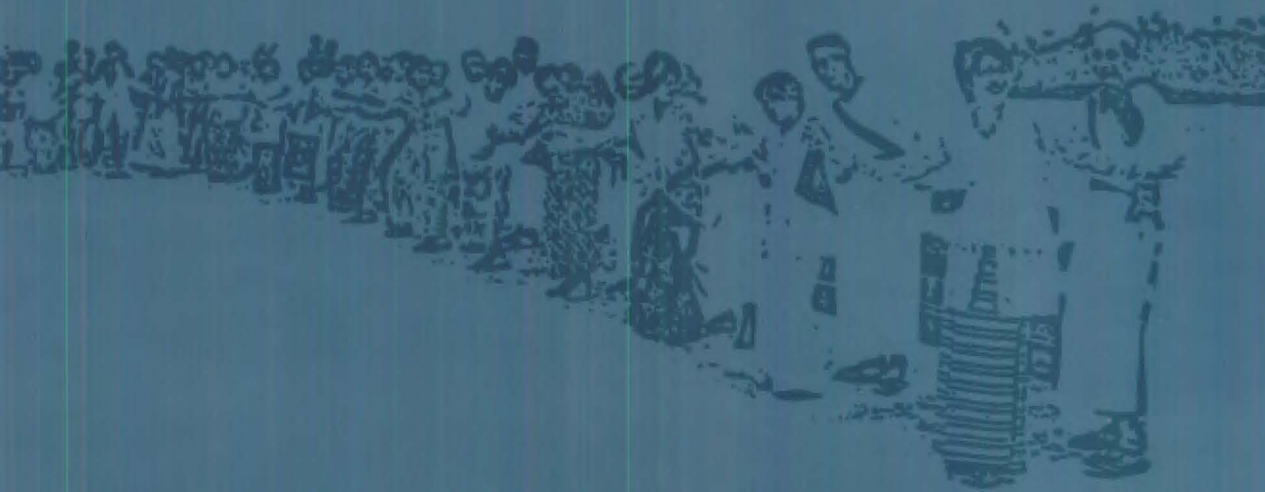


Gambar 1.7 Peta Miangas dan pulau sekitarnya .
 Digambar oleh: Sri Suharjo (Juni, 2011)



BAB 2

MENGUNGKAP RUANG JEJARING



Geografi Miangas tampak seperti sebuah pulau yang lepas-sendiri dan terasing. Namun, jika disimak lebih cermat dengan menelusuri letak pulau-pulau dari jazirah Sulawesi bagian utara hingga daratan Mindanao dalam sebuah peta-bumi, akan tampak deretan pulau-pulau yang menghubungkan dua daratan besar. Deretan pulau-pulau kecil ini, satu persatu dari arah selatan ke utara mulai dari pulau Talise kemudian pulau-pulau Biaro, Tagulandang, Siau dan pulau-pulau kecil lainnya sampai ke pulau Sangihe, ibarat “jembatan-alami” yang memandu pelayaran dari selatan ke utara. Dari pulau Sangihe, kemudian ditemukan percabangan. Pada sisi barat terdapat gugusan pulau yang berderet mulai dari pulau Sangihe, pulau-pulau Toade meliputi Toade, Manipa, Bukide, dan Buang serta beberapa pulau kecil lainnya, kelompok pulau-pulau Kawio meliputi Kawaluso, Dumarehe, Matutuang, Memanuk, Marie, Kemboleng, Kawio, dan Marore di wilayah Indonesia, sampai ke pulau Balut dan pulau Sarangani sebelum mencapai Tanjung Tinaka (bagian selatan-tengah pulau Mindanao). Di bagian timur, berada di posisi yang sama dengan kelompok pulau-pulau Toade yakni di garis 3° 30’ Lintang Utara ditemukan gugusan pulau-pulau Talaud, paling selatan adalah pulau Kabaruan, kemudian ke arah utara, pulau Salibabu, pulau Karakelang, kelompok pulau-pulau Nanusa dan Miangas berada paling utara hingga ke tanjung San Agustin (ujung selatan-timur pulau Mindanao)¹.

1 Lihat: Peta Lingkungan Laut Nasional-28, Bakosurtanal, edisi 1993 dan *Political Map of the Philippines*, Hear Enterprise, 2002.

Gugusan pulau yang menghubungkan kedua pulau besar yakni daratan Sulawesi dan Mindanao, kelak menjadi “pedoman alami” bagi para pelaut pada jamannya. Pedoman pelayaran ini selain terekam dalam “ingatan-kolektif” warga setempat, juga dapat ditemukan dalam catatan-catatan pelayaran dari para pelaut yang melalui kawasan Laut Sulawesi, yakni antara lain catatan dari sebagian armada Cina pada abad ke- 15 sebagaimana dicatat oleh Ma Huan dan diterjemahkan serta dikutip oleh Mills , sebagai berikut:

“... Route from Amoy via Mindoro to Halmahera. Ships left the Ch’uan-chou – Brunei route at Mindoro and traveled by way of Chiao-i (Zamboanga) to eastern Mindanao; thence the navigator steered 112½° (....) to Shao mountain (Talaud island), and again (.....) to Ch’ien-tzu-chi haven, off Chih-lo-li (Galela on Halmahera)...”²;

[... Route pelayaran dari Amoy lewat Mindoro ke Halmahera. Kapal-kapal bertolak dari Ch’uan-chou – Brunei ke Mindoro kemudian melewati Zamboanga menuju arah timur Mindanao; kemudian haluan diarahkan ke 112½° ke Gunung Shao (pulau Talaud), dan selanjutnya ke pelabuhan Ch’ien-tzu, setelah Chih-loli (Galela di Halmahera)...]

Rute pelayaran dari Ternate melewati pulau-pulau Talaud dan pesisir timur Mindanao hingga ke bandar Butuan pada abad ke-15 & 16 sebagaimana dicatat oleh Valentijn³. Rute lain yang sejajar dengan ini ada di tepian timur Laut Sulawesi. Rute ini dilayari oleh sisa armada Magelhaes pada tahun 1521. Setelah bertolak dari Mindanao, mereka melewati gugusan pulau Sangihe hingga Ternate. Antonio Pigaffeta, juru tulis armada, mencatatnya dengan cermat sebagai berikut:

2 Lihat: J.V. Mills, 1979. *Chinese Navigator in Insulinde About A.D. 1500*. Dalam Archipel Na. 18. *Etudes interdisciplinaires su rle mande insulindien*. Paris, halaman 79:

3 Lihat: François Valentijn, 1724. *Oud en Nieuw Oost-Indiën.....* Dordrecht, van Braam.



"... 28 Octubre de 1521...Por su consejo navegamos al sursudoeste, y pasamos por entre ocho islas, mitad habitadas y mitad desiertas, que forman una calle. He aqui sus nombre: Cheava, Caviao, Cabiao, Camanuca, Cabaluzao, Cheai, Lipan y Nusa..."

[...28 Oktober 1521. Berlayar ke arah selatan-tenggara, kami melewati delapan buah pulau, sebagian dihuni dan sebagian tidak berpenduduk. Mereka menamainya Marore, Kawio, Kemboleng, Matutuang, Kawaluso, Dumarehe, Lipang dan Nusa (Bukide).]

["...Sanghir. Siendo imposible doblar la punta de la isla grande, pasamos de largo cerca muchos islotes..."⁵

Sangir – pulau Sangihe Besar – merupakan pulau terbesar di gugusan ini dikelilingi oleh pulau-pulau kecil.]

Catatan pelayaran Thomas Forrest dibuat ketika melayari gugusan pulau ini pada tahun 1776⁶. Berbeda dengan jalur pelayaran yang ditempuh oleh pelaut Cina yang mengikuti tepian timur Laut Maluku ketika bertolak dari pesisir timur Mindanao (tanjung San Agustin), melewati pulau-pulau Talaud langsung ke Halmahera; atau jalur pelayaran yang ditempuh oleh sisa armada Magelhaes, Forrest, sesudah menyusuri pulau-pulau Sangir, berbelok ke arah timur laut menuju pulau-pulau Talaud yang selanjutnya ke Mindanao⁷.

4 Lihat: Antonio Pigaffeta, 1923, *Relation du Premier Voyage Autour du Monde par Magellan*. Edition du Texte Français d'après les manuscrits de Paris et de Cheltenham, par J. Denucé.

5 Lihat: Antonio Pigaffeta, 1923, *Relation du Premier Voyage Autour du Monde par Magellan*. Edition du Texte Français d'après les manuscrits de Paris et de Cheltenham, par J. Denucé.

6 Lihat Peta Pelayaran Thomas Forrest dalam: Thomas Forrest, 1969. *A Voyage to New Guinea and the Mollucas 1774 – 1776*. With an Introduction by D.K. Bassett. Oxford University Press. Kuala Lumpur.

7 Lihat Peta Pelayaran Thomas Forrest dalam: Thomas Forrest, 1969. *A Voyage to New Guinea and the Mollucas 1774 – 1776*. With an Introduction by D.K. Bassett. Oxford University Press. Kuala Lumpur.

"Ingatan-kolektif" yang mengisahkan jalur pelayaran lebih awal yang dilakoni oleh "pelaut dan pedagang berbahasa Melayu" sebelum kehadiran bangsa Eropa di kawasan ini, menghubungkannya dengan Nusantara bagian barat, terutama dengan semenanjung Malaka⁸. Rute pelayaran para pelaut dan pedagang berbahasa Melayu ini kelak dilayari oleh pelaut Eropa. Ada yang menggunakan jasa pelaut Melayu dan lokal, sebagaimana dilakukan oleh sisa armada Magelhaes, yaitu kapal layarnya bernama *Trinidad* yang dikomandani oleh Gomez de Espinosa dan kapal layar *Victoria* yang dinakhodai oleh Elcano. Mereka menggunakan jasa seorang pelaut Sangihe yang ditemukan di Mindanao, ketika mereka mau berlayar ke Maluku (Ternate)⁹. Adapun jaringan pelayaran di kawasan Laut Sulu – Laut Mindanao – Laut Sulawesi, hanya sebagian dari jaringan pelayaran dan perniagaan yang ada di Nusantara hingga Malaka maupun dari Samudera Pasifik pada masanya¹⁰. Masa berjayanya Kesultanan Sulu, turut meramaikan jaringan jalur pelayaran tidak hanya sebatas Laut Sulawesi, Laut Mindanao, dan Laut Maluku, tetapi berlanjut ke selatan sampai Laut Banda kemudian memutar ke arah barat melewati Selat Makassar sebelum kembali ke pulau-pulau Sulu¹¹.

8 Lihat, antara lain, James F. Warren, 1981:3 dan James T. Collins, 2005. Bahasa Melayu Bahasa Dunia, Sejarah Singkat. KITLV-Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, halaman 5-7 dan 21.

9 Lihat A.J. Ulaen, 2003. Nusa Utara: Dari Lintasan Niaga ke Daerah Perbatasan. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, halaman 32.

10 Lihat J.C. van Leur, 1967, Indonesian Trade and Society. Essays in Asian Social and Economic History. W. Van Hoeve Publishers Ltd – The Hague; M.A.P. Meilink-Roelofs, 1962, Asian Trade and European Influence in the Indonesian Archipelago between 1500 and about 1630. Martinus Nijhoff; Ernest S. Dodge, 1976, Islands and Empires, Western Impact on the Pacific and East Asia. University of Minnesota Press, Minneapolis; dan Holden Furber, 1976. Rival Empires of Trade in the Orient, 1600 – 1800. University of Minnesota Press, Minneapolis.

11 James Francis Warren, 1981, The Sulu zone 1768 – 1898: The dynamics of external trade, slavery, and ethnicity in the transformation of a Southeast Asian maritimes state. Singapore University Press.





Peta 2.1 Rute Pelayaran Peniaga Cina, Armada Magelhaes, dan Thomas Forrest di Kawasan Laut Sulawesi dan Laut Mindanao

- ◄ - - - - - ► : Rute pelayaran pelaut peniaga Cina
- ◄ - - - - - ► : Rute pelayaran sisa armada Magelhaes
- ◄ ———— ► : Rute pelayaran Thomas Forrest

Aktivitas pelayaran sekaligus perniagaan pada setiap jamannya menjadikan kepulauan Sangihe dan Talaud, dimana pulau Miangas merupakan bagian dari gugusan pulau ini mengalami berbagai pengaruh peradaban. Mulai dari pengaruh perantau dan pedagang berbahasa Melayu (kuno) sekitar abad ke-10¹², disusul oleh penyiar agama Islam

12 Lihat, James T. Collins, 2005. Bahasa Melayu Bahasa Dunia, Sejarah Singkat. KITLV-Jakarta, Yayasan Obar Indonesia, Jakarta, halaman 7, 21.

dari Melayu pada abad ke- 14 - 15¹³; peniaga Cina pada abad ke-15¹⁴; dan terakhir adalah pengaruh peradaban Barat¹⁵.

2.1 Miangas dalam “Ruang-Jejang Melayu” (Abad 14 – 15)

Kajian awal sejarah Asia Tenggara ada yang tumbuh-kembang dari sejumlah kajian tematis, mulai dari karya klasik George Coedès, *Les États hindouisés d’Indochine et d’Indonésie* (1948) yang antara lain melihat kawasan ini sebagai ranah budaya yang dipengaruhi oleh peradaban Hindu; ada pula seperti karya klasik D.G.E. Hall (1955) yang berupaya merangkum sejarah seluruh kawasan. Perkembangan kajian dari berbagai latar belakang dalam pendekatan Ilmu Sejarah – meskipun tetap melihat Asia Tenggara sebagai satu unit kajian – mulai melakukan pemilahan-pemilahan baik yang kewilayahan sifatnya maupun yang tematis. Cara pandang kewilayahan misalnya terpusat pada sejarah sebuah kawasan “negara-bangsa”, sedangkan yang tematis berupaya meretas ranah kewilayahan negara-bangsa. Misalnya, upaya untuk memahami sejarah, budaya, dan kawasan Asia Tenggara lewat konsep *mandala*, dilakukan oleh O.W. Wolters (1982) dan Renée Hagesteijn (1989). Lain lagi dengan

13 Lihat Najeeb M. Saleeby, 1908, *The History of Sulu*. Bureau of Science Division of Ethnology Publications Volume IV, Part II. Manila; dan Theodore A. Agoncilo, 1990, *History of the Filipino People*. Garotech Publ. Quezon City, 8 Edition, hal. 24 – 25.

14 Lihat: J.V. Mills, 1979. *Chinese Navigator in Insulinde About A.D. 1500* Dalam Archipel No. 18. *Etudes interdisciplinaires su rle monde insulindien*. Paris, halaman 69 – 94, dan: J.V.G. Mills (Ed./Trans.), 1990 (1970). *Ying-Yai Sheng-Lan (The Overall Survey of the Ocean’s Shores)*. Cambridge, Published for the Hakluyt Society at the University Press.

15 Lihat: A.B. Lopian, 2009. *Orang Laut Bajak Laut Raja Laut. Sejarah Kawasan Laut Sulawesi Abad XIX*. Komunitas Bambu. Jakarta.



Takay Yoshikazu (1993), ia berupaya mengungkap “eko-dinamika sosio-kultural” Asia Tenggara (dan dunia) dan memilah kawasan Asia Tenggara atas “*Maritime Southeast Asia World*” atau dunia bahari Asia Tenggara” dan “*Southeast Asia Continental Mountainous World*” atau dunia kontinental dan pegunungan Asia Tenggara. Ada pula kajian-kajian yang lebih spesifik dan terpusat di kawasan-kawasan khusus, semisal “dunia bahari Nusantara”-nya Denis Lombard (1990); “zona Sulu”-nya James Warren (1981); “dunia bahari Melayu”-nya N.M. Tachimoto (1997) dan “kawasan Laut Sulawesi”-nya A.B. Lopian (2009). Kajian-kajian tentang suatu kawasan dan periodik sifatnya seperti itu sangat membantu, dan memberi pemahaman bagaimana berbagai persoalan yang ada sekarang berakar pada warisan hari kemarin. Dan, untuk memahami realita di perbatasan Indonesia – Filipina, mulai dari persoalan tapal-batas kedua negara, kehadiran warga dari kedua negara-merdeka di wilayah tetangga, persoalan para pelintas-batas tradisional baik yang memenuhi persyaratan keimigrasian maupun tidak, akan mudah dipahami dengan merunut hari kemarin mereka.

Untuk menelusuri pertumbuhan kawasan dimana “ruang-jejaring Melayu”¹⁶ tumbuh-kembang, bagian ini akan menaruh perhatian pada dinamika kawasan yang meliputi Laut Sulawesi – Laut Mindanao – Laut Sulu, yang berawal pada kehadiran para perantau-peniaga berbahasa

16 Gagasan tentang “ruang-jejaring Melayu” diinspirasi oleh dua tulisan Denys Lombard, 1996. *Nusa Jawa: Silang Budaya*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Khususnya Bab 1. Pertimbangan: Geohistoris; dan “Le Sultanat Malais comme modèle socio-économique” dalam Denys Lombard et Jean Aubin (Eds.) *Marchands et Hommes d’Affaires Asiatiques dan l’Océan Indien et la Mer de Chine 13e – 20e siècles*. Édition de École des Hautes Études en Sciences Sociales – Paris, halaman 117 – 128; dan tulisan Narifumi Maeda Tachimoto, 1997. “Global Area Studies with Special Reference to the Malay or Maritime World” dalam Kenji Tsuchiya and Tsuyoshi Kato (Eds.), 1997. *An Integrated Study on the Dynamics of the Maritime World of Southeast Asia*. Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University, halaman 125 – 141.



Gambar 2.1 Sisi utara Pulau Miangas



Gambar 2.2 Pasir putih, kelapa dan pohon pandan, ciri khas Pulau Miangas



Gambar 2.3 Sisi utara Pulau Miangas



Gambar 2.4 Pulau Baronto, di ujung selatan Pulau Miangas

Melayu (kuno)¹⁷; dan mengabaikan “ruang-jejaring” ke arah barat – dari pulau-pulau Sulu ke Borneo hingga Malaka – dan ke arah selatan – dari Laut Sulawesi ke Laut Banda, Laut Makassar dan Selat Makassar¹⁸.

“Ruang-jejaring Melayu” ini dapat dirunut berdasarkan narasi-sejarah kesultanan Sulu serta beberapa kesultanan lainnya di Mindanao hingga koloni Melayu di ujung selatan pulau Luzon, dan menggurita hingga ke pulau-pulau Sangihe dan Talaud. Jejaring ini terbentuk mulai dari kehadiran pelaut-peniaga berbahasa Melayu. Hanya saja, kehadiran mereka kurang menarik perhatian penulis *tarsilas* dan narasi kesejarahan kala itu. Berbeda dengan kehadiran para penyiara agama (Islam) sekaligus peletak *dasartamadun* Islam dalam sistem kesultanan baik di Sulu maupun di Mindanao, yang terekam dalam ingatan-ingatan kolektif berupa *tarsilas*, antara lain *tarsilas Mantiri Asep*, *tarsilas Raja Baginda*, *tarsilas Sultan Kabungsuhan*, dan sebagainya¹⁹ serta dituturkan turun-temurun dan kemudian dicatat sebagai “naskah sejarah”. Peletak dasar agama dan tamadun Islam yang berasal dari “Tanah Melayu” di daratan Mindanao serta pulau-pulau Sulu, sebagaimana terekam dalam ingatan bersama ini menurut Saleeby diperkirakan berlangsung pada abad ke-14²⁰. Karya Najeeb M. Saleeby,

17 Lihat, James T. Collins, 2005. *Bahasa Melayu Bahasa Dunia, Sejarah Singkat*. KITLV-Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, halaman 4-5.

18 Lihat konsep “laut sebagai penghubung” yang dipaparkan oleh Denis Lombard dalam karyanya *Nusa Jawa: Silang Budaya*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Khususnya Bab I. Pertimbangan Geohistoris. Ia memetakan Laut Sulu, Laut Mindanao, Laut Sulawesi, Laut Maluku dan Laut Banda sebagai satu kesatuan (penghubung) yang ada di sisi timur Sulawesi, serta Laut Makassar dan Selat Makassar sebagai satu kesatuan (penghubung) yang ada di sisi barat Sulawesi. (Peta 1 halaman 17). Buku 1.

19 Lihat, Shinzo Hayase, Domingo M. Non, Alex J. Ulaen, (compl.)1999. *Silsilas/Tarsilas (Genealogies) and Historical Narratives in Sarangani Bay and Davao Gulf Regions, South Mindanao, Philippines, and Sangihe-Talaud islands, North Sulawesi, Indonesia*. Kyoto: Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University.

20 Agoncilo, 1990:24-25; Shinzo Hayase dkk. 1999; dan R.C. Ileto, 1971, *Mangindanao, 1860 – 1888, The Career of Datu Uto of Buayan*.



seorang sejarawan Filipina menggunakan *tarsila* atau genealogi dan narasi-kesejarahan Sulu, dapat dikategorikan sebagai salah satu sumber – di pihak Filipina – yang mencatat kehadiran orang Melayu berikut:

*"... Mantiri Asip, the hero and learned man of Menangkabaw. Mantiri Asip had the title of Orangkaya at the time he came to Sulu with Raja Baginda. He married a woman from Purul called Sandayli and begot orangkaya Sumanduk..."*²¹

[... Mantiri (menteri) Asip, pahlawan dan orang terpelajar dari Minangkabau. Mantiri Asip bergelar Orang Kaya pada masa itu tiba di Sulu bersama Raja Baginda. Ia kawin dengan seorang wanita dari Purul bernama Sandayli dan mendapatkan anak orang kaya Sumanduk.]

Tokoh Melayu lainnya adalah Raja Baginda yang juga berasal dari Minangkabau, tiba di Sulu pada tahun 1390²². Dikisahkan, Mantiri Asip sebenarnya datang bersamaan dengan Raja Baginda. Hanya saja, Raja Baginda berlayar terus ke Sambuwangan (Zamboanga) lalu ke Basilan kemudian ke Sulu. Ketika perahunya merapat di Bwansa (Sulu) warga setempat menghadangnya. Lalu Raja Baginda bertanya kepada para penghadangnya: "...mengapa kalian mau memerangi seorang muslim yang mau menetap bersama kalian?" Raja Baginda kemudian ditanyai oleh pemimpin Bwansa. Setelah teruji jelas bahwa ia adalah seorang muslim dan khalifah, maka diterimalah dia dengan penuh keramahmatan dan diperlakukan layaknya sebagai anggota keluarga oleh penduduk setempat²³.

21 Saleeby, 1908:40.

22 Saleeby, 1908:42 (150): "*Ten years later Raja Baginda came from Menangkabaw to Sambuwagan. From there he moved to Basilan and later to Sulu...*"

23 Saleeby, 1908:45 (153): "*... when he (Raja Baginda) arrived at Sulu the chiefs of Bwansa tried to sink his boats and drown him in the sea. He resisted and fought them. During the fight he inquired as to the reason why they wanted to sink his boats and drown him. He told them that he had committed no crime against that he was not driven there by the tempest, but that he was simply travelling, and came to Sulu to live among them because they were Mohammedans. When they learned that he was a Mohammedan, they respected him and received him hospitality...*"

Tokoh lainnya yang datang kemudian adalah Abu Bakar dari Palembang melalui Brunei dan tiba di Sulu pada tahun 1450. Menurut Saleeby:

*"...After that time there came Sayid Abu Bakr from Palembang to Brunei and from there to Sulu. When he arrived near the latter place he met some people and asked them: 'Where is your town and where is your place of worship? They said at Bwansa. He then came to Bwansa and lived with Raja Baginda. The people respected him, and he established a religion for Sulu. They accepted the new religion and declared their faith in it...'"*²⁴

[.... setelah itu, Sayid Abu Bakr dari Palembang ke Brunei dan dari sana ia tiba di Sulu. Sesaat ia mendarat dekat tempat dimana ia ketemu warga setempat, ia bertanya kepada mereka: "...dimana kotamu dan tempat kamu sembahyang". Warga setempat menunjukkan tempatnya yaitu di Bwansa. Ia kemudian pergi ke sana dan tinggal bersama Raja Baginda. Warga menaruh hormat kepadanya, dan dia menegakkan agama bagi orang Sulu. Mereka menerima agama baru itu dan menyatakan iman mereka.]

Abu Bakr, baik menurut *tarsilas Sulu* maupun *Sejarah Malaka*, adalah putra Zaynul Abidin dengan salah seorang putri Sultan Johor. Abu Bakar dikenal sebagai seorang ahli tentang hukum dan agama Islam. Selain itu, ia mempunyai keinginan besar menegakkan ajaran agama Islam. Sehingga bukan hal yang aneh apabila ia dipercaya menjadi Sultan Sulu periode 1450 – 1480. Tentang Abu Bakr, Saleeby menjelaskan:

*"... From the Annals of Malacca we know that Abu Bakr was a famous authority on law and religion and that his mission to Malaysia was prompted by enthusiasm for the promulgation of the doctrines of Abu Ishaq. (...) the hospitality with which he was received at Bwansa points to success in his mission to a degree that enabled him latter to marry the Princess Paramisuli, the daughter of Raja Baginda. He established mosque there and taught religion and law; and the people and chiefs actually abandoned their former gods and practiced a new religion and observed its commandments"*²⁵

24 Saleeby, 1908:42-43 (150-151):

25 Saleeby, 1908:54 (162):.



[... Menurut Sejarah Melaka kita tahu bahwa Abu Bakr adalah seorang ahli hukum dan agama dan misinya terhadap Malaysia adalah menyebarkan ajaran Abu Ishaq....kehangatan yang ia terima di Bwansa menjadi titik tolak kesuksesannya dan memungkinkan ia menikahi Paramisuli, putri Raja Baginda. Ia (Abu Bakr) mendirikan mesjid di sana dan mengajar agama dan hukum (Islam); penduduk setempat bersama kepala sukunya meninggalkan ilah yang mereka sembah dan beralih ke agama baru serta menjalankan perintah (agama).]

Sebelum kehadiran Raja Baginda di Sulu, Syarif Karim Al-Makhdum sudah berada di sana sepuluh tahun sebelumnya, sesudah ia menyiarkan agama Islam di Malaka. Syarif Karim Al-Makhdum atau juga dalam *tarsilas* Sulu disebut Makdum sangat berpengaruh dan tidak hanya dalam hal ilmu agama, tetapi juga dalam hal pengobatan dan hal-hal bersifat magis dan dikenal sebagai seorang yang tegar dalam menjalankan ajaran agama²⁶. Pengaruh ajarannya masih dapat ditemukan hingga sekarang selain di pulau-pulau Sulu, juga di pulau Sangihe. Di pulau Sangihe, tepatnya di wilayah Tabukan Utara, kelompok ini dikenal dengan nama "Islam Tua" dan oleh pemerintah dikategorikan sebagai "kelompok aliran dan kepercayaan"²⁷.

Tokoh Melayu lainnya, seperti yang dikisahkan baik oleh Saleeby maupun oleh Agoncillo, seorang sejarawan Filipina, adalah Sarif Kabungsuwan.

"... In Mindanao, Sarif Kabungsuwan, who had meanwhile arrived from Johore with his men, immediately began laying the foundations of Islam. He

26 Lihat, Saleeby, 1908:51 (159). "... Makdum was a noted Arabian judge or scholar who arrived at Malacca about the middle of the fourteenth century (...) he evidently practised magic and medicine and exerted unusually strong influence on the people"; keterangan lain tentang Makdum dapat dibaca dalam H.J. de Graaf, 1989 (1987). *Islam di Asia Tenggara* sampai Abad ke-18 dalam Azyumardi Azra (Ed.), 1989. *Perspektif Islam di Asia Tenggara*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hal: 1 - 35 (8).

27 Lihat: Monografi Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud. n.d.

converted many tribes to his religion and, having married into an influential family, made himself the first sultan of Mindanao..”²⁸

[... Di Mindanao, Sarif Kabungsuan, dalam pada itu tiba dari Johor bersama pengikutnya, segera menyiarkan ajaran Islam. Banyak suku-bangsa memeluk ajarannya, dan karena ia menikahi anak dari keluarga yang berpengaruh, menjadikannya sebagai Sultan pertama Mindanao]

Sarif Kabungsuan bukanlah satu-satunya orang Melayu yang menyiarkan agama Islam dan memperkenalkan pranata kesultanan. Penyebaran agama Islam dengan ikutan budaya Melayu tidak hanya sebatas kepulauan Sulu dan Pulau Mindanao. Agoncillo (1990) mencatat kehadiran sepuluh orang Datu dari Banjarmasin, Borneo pada abad ke-13, berikut:

“... The Ten Bornean Datus. The Malay settlement of Panay in the Visayas is told in the Maragtas, which is legendary or at least semi-historical. In the 13th century, about the time that Sulu was undergoing a transformation owing the paramount influence of Banjarmasin, Borneo was seething with discontent. It appeared that Sultan Makatunaw was mistreating his subjects, so that ten of the chieftains (or datus) decided to leave for unkwon parts in search of freedom. With their families, Datus Puti, Bangkaya, Dumalugdog, Sumakwel, Lubay, Paiburong, Dumangsil, Balensusa, Paduhinog, and Dumangsol secretly sailed in their balangays without any definite destination. After days of sailing, the Bornean datus reached Panay which at the time was inhabited by the Negritos called Atis, who were ruled by their brave chieftain, Marikudo, and his wife, Maniwantiwan. Realizing that the Atis suspected them of evil intention, Datu Puti, the leader of the Bornean datus, assured them of their peaceful intentions. All they wanted, he explained, was to buy land where he and his men and families could settle peacefully. Marikudo, after consulting with his elders, decided to sell his land to newcomers. The purchase price was ridiculously low – a gold salakot and, to satisfy feminine

28 Agoncillo, 1990:23; Lihat juga Shinzo Hayase, dkk. 1999:3-14. Keterangan singkat dan tarsilas (silsilah Sarif Kabungsuan).



*vanity, a long gold necklace for Maniwantiwan. As was customary, a feast was held, after which Marikudo and his people retired to the interior..”*²⁹

[... Sepuluh orang Datu dari Borneo. Pemukiman Melayu di Panay di Visaya sebagaimana dikisahkan dalam *Maragtas*, legenda yang juga narasi-semi-sejarah. Pada abad ke-13, masa ketika Sulu mengalami transformasi dibawah pengaruh kekuasaan tertinggi Banjarmasin, Borneo bergejolak dengan ketidakpuasan. Tampaknya Sultan Makatunow keliru menangani taklukannya, sehingga sepuluh orang datu memutuskan untuk berlayar kemana saja mencari kebebasan. Bersama keluarganya, Datus Puti, Bangkaya, Dumalugdog, Sumakwel, Lubay, Paiburong, Dumangsil, Balensusa, Paduhinog, dan Dumangsol diam-diam berlayar tanpa tujuan pasti. Setelah beberapa hari dalam pelayaran, para datu dari Borneo ini mendarat di Panay yang pada masa itu didiami oleh suku Negrito yang disebut Atis yang dipimpin oleh kepala suku yang pemberani bernama Marikudo, dan istrinya Maniwantiwan. Untuk menghilangkan kecurigaan suku Atis, Datu Puti, selaku pimpinan para datu ini menjelaskan bahwa mereka berniat baik, ia menjelaskan bahwa mereka mau membeli lahan dimana mereka sekeluarga dapat tinggal dengan damai. Marikudo, usai bertukar pikiran dengan para tetua, menjual tanah kepada pendatang baru ini. Bayarannya sangat murah, emas salakot dan barang perhiasan wanita, kalung emas untuk Maniwantiwan. Sebagaimana biasanya, mereka pun menggelar jamuan, setelah itu Marikudo dan pengikutnya pindah ke daerah pedalaman]

Kesepuluh datu bersama pengikutnya sebagian menetap di Panay atau pulau Negros dan kelak menjadi cikal-bakal kesultanan disana. Datu Puti, Balensusa, dan Dumangsil bersama pengikutnya berlayar ke pulau Luzon. Datu Balensusa dan Datu Dumangsil kemudian menetap di Luzon, di sekitar danau Taal atau Bonbon. Datu Puti, setelah melihat keluarga dan pengikutnya mulai menata kehidupan baru di Luzon, memilih kembali ke

29 Agoncillo, 1990:25-26.



Gambar 2.4 Sisi selatan Pulau Miangas dilihat dari punggung bukit



Gambar 2.5 Puncak Bukit Batu, tempat warga berlindung dari serangan bajak laut abad 16 - 19



Gambar 2.6 Selter empat buah meriam kuno di benteng Bukit Batu, Miangas



Gambar 2.7 Empat buah meriam kuno di benteng Bukit Batu, Miangas

Banjarmasin³⁰. Keluarga para datu ini menyebar di sekitar semenanjung Bicol, terutama di sekitar danau Taal atau sekarang dikenal dengan nama Laguna. Tujuh datu lainnya menyebar ke Ilo-ilo dan menetap di empat wilayah yaitu datu Sumakwel di Hantik (sekarang Antique), datu Paiburong di Irong-irong (sekarang Ilo-ilo), dan Datu Bangkaya di Aklan (sekarang Capiz). Untuk alasan keamanan, mereka membentuk konfederasi yang dikenal dengan nama konfederasi Madyaas³¹.

Beberapa hal yang menandai kehadiran para datu sekaligus peniar agama ini adalah: pertama, mereka dikisahkan melakukan kontak secara damai dengan penduduk setempat. Ketika mereka bertemu dengan kepala suku di Panay, Marikudo, para datu ini memperoleh tanah melalui proses barter dengan sejumlah perhiasan emas untuk istri Marikudo, Maniwantinan. Kepala suku serta pengikutnya pindah ke daerah pegunungan, sementara para datu dan pengikutnya bermukim di daerah pesisir³². Kedua, terjadi peralihan pranata kepemimpinan disertai dengan stratifikasi sosial yang berdasarkan tamadun Islam. Jika sebelumnya yang ada di kalangan penduduk lokal adalah "kepala suku", kehadiran para peniar agama Islam serta para datu memperkenalkan pranata "kesultanan" dimana para datu berada pada strata-atas, para sayk (sheik) pada strata kedua, orangkaya pada strata ketiga, dan orang kebanyakan pada strata bawah³³. Sekaligus hukum yang berbasis pada ajaran Islam

30 Agoncillo, 1990:26: "... With the datus and their families firmly settled in Panay, Datus Puti, Balensusa, and Dumangsil sailed northward to Luzon, disembarking in the region around Lake Bonbon (Taal). The fertility of the soil led Dumangsil and Balensusa to find a settlement there, while Puti, satisfied that his men were leading peaceful lives, returned to Borneo."

31 Agoncillo, 1990:26.

32 Lihat catatan kaki 23, kutipan dari karya Agoncillo, 1990:26.

33 Saleeby, 1908:52 (160): "... In considering the etymology of the titles of the Sulu chiefs mentioned in the time of Baginda, we observe that they are three classes. The first class were the datus. These had mantiri or minister and probably represented the descendants of Raja Sipad and Tuan Masha'ika. The second class were the syaik (...) The third class were the orangkaya, the Baklaya chiefs..."



mulai diterapkan. Contohnya adalah “hukum Kalantiyaw” yang diajarkan oleh Datu Kalantiyaw bagi warga Panay³⁴. Ketiga, jika sebelumnya bahasa Melayu hanya digunakan oleh kalangan pedagang dan pelaut, dengan terserapnya sejumlah kosakata Melayu ke dalam percakapan sehari-hari dalam bahasa lokal, baik itu bahasa Visaya, Cebuano, dan Tagalog dan kelak menandai peralihan dari bahasa Melayu Kuno ke Bahasa Melayu Modern³⁵. Keempat, menguatnya jaringan perniagaan yang disertai oleh aktivitas penyiaran agama Islam, terutama dengan sesama kesultanan dan kerajaan-kerajaan kecil di wilayah Nusantara³⁶. Jaringan perniagaan ini tidak hanya antara para datu di Mindanao dengan kesultanan Sulu, tetapi meluas hingga Nusantara bagian Timur, dimana Ternate dan Bugis-Makassar menjadi bagian dari jaringan perniagaan ini hingga abad ke-19. Jaringan perniagaan ini merupakan kelanjutan dari jalur niaga mereka dengan Cina³⁷. Sarangani, pulau yang berada di ujung selatan Mindanao – kurang lebih 60 mil dari pulau Miangas – merupakan salah satu tempat persinggahan para peniaga-Melayu terutama pada akhir abad ke-17 hingga abad ke-19³⁸.

34 Agoncillo, 1990:26 – 28. (26: “.... It has been alleged that about 1433 the third chief of Panay, Datu Kalantiyaw, probably a descendant of Datu Sumakwel, issued orders for the guidance of his people. This so-called Code of Kalantiyaw (....) its contents may be of some interest to the readers...”

35 Lihat: James T. Collins, 2005:28-71; dan Agoncillo, 1990:54 – 66.

36 James Francis Warren, 1981, *The Sulu zone 1768 – 1898: The dynamics of external trade, slavery, and ethnicity in the transformation of a Southeast Asian maritimes state*. Singapore University Press; Shinzo Hayase, 2007, *Mindanao Ethnohistory Beyond Nations. Maguindanao, Sangir, and Bagobo Societies in East Maritime Southeast Asia*. Ateneo de Manila University Press.

37 James F. Warren, 1981:3 “... The Taosug customarily conducted commerce with their more powerful neighbours, the Magindanao. Expert navigators as well as merchants, they travelled considerable distances in small craft, trading as far as Brunei and Ternate”. (...) “The annual arrival of Chinese junks and Bagis prahus at Jolo reflected a regular demand for local product procured principally from the Sultanate’s essential domain – the sea”.

38 James F. Warren, 1981:11 “... the two most important sites in the first half of the nineteenth century were Sarangani island south Mindanao”.

Adanya hasil laut seperti kulit penyu, teripang, sirip hiu, loka, serta hasil laut lainnya yang dihasilkan oleh nelayan di pulau-pulau kecil seperti Miangas, menyebabkan mereka terkait dalam jaringan perniagaan ini hingga abad ke-19. Di sisi lain, perompakan dan perdagangan budak yang berpusat di Sulu turut membawa petaka tidak hanya bagi penduduk pulau-pulau kecil di Laut Sulawesi, tetapi juga sampai ke daratan Sulawesi dan Maluku³⁹. Para perompak *llanun* dan *Balangingi* sangat ditakuti oleh penduduk kepulauan Sangihe dan Talaud. Kisah-kisah kesejarahan yang diwariskan turun-temurun merekam berbagai aksi perlawanan dari penduduk setempat terhadap kegiatan perampokan ini⁴⁰. Keterangan tentang para perompak ini juga dapat ditemukan dalam beberapa laporan pekabari injil berkebangsaan Belanda yang menyiarkan agama Kristen di kepulauan Sangihe dan Talaud. Brilman – seorang pekabari injil yang menetap di Enemawira (Sangihe) – misalnya, mengisahkan kembali serangan perampok pada tahun 1862 di Talaud. Peristiwa ini bertepatan dengan kehadiran kapal patroli bernama *Reteh* ke kepulauan Talaud. Setibanya di sisi barat pulau Karakelang – yang berhadapan dengan Laut Mindanao – kapal patroli Hindia Belanda ini menemukan kurang lebih 300 perompak dari Mindanao yang sudah menawan sebanyak 150 orang Talaud yang siap dibawa dan diperdagangkan sebagai budak. Patroli tersebut dapat membebaskan warga yang sudah tertawan meskipun ada

39 James F. Warren, 1981:149 – 251. Dalam paparannya, Warren tidak sekedar mendeskripsikan rute pelayaran dan perampokan budak. Pada Appendix R, ia mencatat nama-nama orang yang sempat melarikan diri serta asalnya, antara lain Hajati (Gorontalo), Diaminte (Tontoli), Rapar (Tombariri), Sadai (Makassar), Sarenko (Buton), Soleman (Banggai), Kilapon (Amurang), Tabarono (Sangihe), Ramaka (Ratahan), Estepahnus (Tabukan), dll.

40 Shinzo Hayase, Domingo M. Non, Alex J. Ulaen (compls), 1999, *Silsilas/Tarsilas (Genealogies) and Historical Narratives in Sarangani Bay and Davao Gulf Regions, South Mindanao, Philippines, and Sangihe-Talaud Islands, North Sulawesi, Indonesia*. Kyoto: Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University.



korban di pihak Belanda, yaitu Letnan Pertama Laut, Joli. Ia dikuburkan di pulau Nusa-Dalam, depan desa Lobo ⁴¹.

Perampokan dan perburuan budak di kawasan Sulu atau *the Sulu Zone*, mendorong warga Pulau Miangas, mendirikan benteng pertahanan, sebagaimana dipaparkan oleh H.J. Lam, berikut:

"... So frequent seem those raids to have been that the population of Miangas for their defence built up two fortresses, whereto they used to flee in the case of an attack. The first one was for a great deal a natural fortification, viz. P. Baronto, that was accessible only on the side of the isthmus. This spot has been fortified by means of a wall of coral blocks, through which at present a narrow pathway has been cleared. The other refuge, viz. the top of the G. Kota, had to be fortified more carefully and at present the pretty well conserved remainders of a similar wall may be seen around the little plateau on the hill top, oblong in shape, not higher than about 1 m and nearly as thick and at the southern end being attached at a big piece of andesitic rock. This fortress too, has been made accessible by a narrow gateway in the wall..."⁴².

[... seringnya penjarahan (perburuan budak) mendorong penduduk Miangas mendirikan dua buah benteng, kemana mereka berlindung jika ada serangan. Yang pertama pulau Baronto yang secara alamiah merupakan benteng yang berada di ujung selatan merupakan sebuah genting dari pulau Miangas. Dengan dinding karang yang terjal dan jalan masuknya yang sempit. Pengungsian lainnya berada di puncak gunung Kota yang juga pada satu sisinya terjal dan pada sisi lainnya dilindungi dengan susunan batu. Benteng ini mempunyai jalan masuk dengan dinding yang sempit]

41 Brilman, 1937:152. "... Het daaropvolgende jaar had de bevolking een inval van 300 Mindanaache zeeraovers te weerstaan. Gelukkig kwam juist Zr. Ms. "Reteh" een bezoek brengen aan Talaut, die de roovers verjoeg. Op de wasikut van Karakelang kwamen het tot een samentreffen, waarbij een hemel kaperschipen werden vernielden ± 150 reeds buitgemaakte slaven uit de Talautesche bevolking werden bevrijd. In dit gevecht sneuvelde de Luitenant ter Zee 1^e Klas Joly op 18 April 1852. Hij werd begraven op het kleine eiland Noesa-dalam, in de onmiddellijke nabijheid van het dorp Lob(b)o. Aan zijn graf werd door de bevolking de vorm gegeven van een commando-brug en aan het eiland de naam Joly-eiland.

42 Di lokasi tersebut hingga kini masih ditemukan bekas benteng pertahanan berupa pagar batu yang tersusun mengelilingi puncak bukit dan empat buah kanon atau *lantakan*. Lihat juga H.J. Lam, 1932:32 - 40

Baik tradisi lisan maupun keterangan tertulis menyebut pula bahwa baik nama pulau maupun kehadiran penduduk di sana, dihubungkan dengan adanya pelayaran perampokan dari para perampok *Ilanun* dan *Balangingi* yang tidak hanya mengincar hasil laut tetapi terutama menculik warga yang akan diperjual-belikan sebagai budak⁴³. Salah satu inisiatif yang dilakukan oleh “kepala-suku” di Nanusa (pulau Marampit dan Karatung) adalah menempatkan sebagian warga – terutama laki-laki pilihan bersama keluarganya – dipindahkan ke pulau Miangas untuk menangkal serangan perampok ke pulau-pulau Nanusa⁴⁴.

Kehadiran para pedagang berbahasa Melayu juga sempat mempengaruhi kehidupan sosial warga Miangas. Pada masanya, sebagian dari warga setempat memeluk agama Islam⁴⁵. Sisa-sisa kehadiran perniagaan di “Sulu-zone”⁴⁶ yang dapat ditemukan hingga pertengahan abad ke-20 adalah ketrampilan membuat perahu layar. Ketrampilan ini – seperti yang disaksikan oleh Thomas Forrest – sudah mereka miliki sejak abad ke-18⁴⁷. Selain itu mereka trampil melayarkan perahu layar, memiliki pengetahuan navigasi dan perbintangan serta penguasaan mantra-mantra yang berhubungan

43 H.J. Lam, 1932:39. “... In former time the inhabitants – as is suggested before – had to endure several raids of pirates from Sulu, ill-famed up to present days. It is said that the Talaud name of the island (Miangas, Meangas, Meangis, Melangis, Malangis) means: exposed to piracy ...”

44 Selain keterangan dalam H.J. Lam, 1932, salah satu kisah kesejarahan (heroik) yang hingga kini masih dituturkan oleh orang tua kepada anak-cucunya adalah perlawanan datu *Tatulu* dari Nanusa melawan perampok *Balangingi*. (Hasil wawancara dengan J. Lupa, pensiunan guru di Miangas dan sekarang menetap di Dodap Bolaang-Mongondow, 26-03-2011).

45 Lihat, Willem Johan Bernard Versfelt, 1933:1 “...the number of inhabitants, formerly Mohammedans, afterwards converted by Protestant Missionaries from the Island of Celebes...”

46 James F. Warren, 1981, *The Sulu zone 1768 – 1898*:...

47 “...Thomas Forrest ketika berlabu di Lirung (Talaud) tahun 1776 menyaksikan para pembuat perahu dari pulau Nanusa (...) yang handal dan biayanya terbilang murah..” Ulaen, 2003, *Nusa Utara*: dari lintasan niaga ke daerah perbatasan. Halaman 133-134.



dengan aktivitas pelayaran⁴⁸. Hal lainnya adalah penguasaan nama-nama pelabuhan, tanjung, teluk baik di daratan Mindanao maupun pulau-pulau Sulu dengan nama-nama atau toponim lama⁴⁹. Hal mana pada paroh kedua abad ke- 20 perlahan-lahan lenyap bersamaan dengan meninggalnya generasi pelaut, tidak hanya di pulau Miangas dan Nanusa, tetapi di seluruh kepulauan Sangihe dan Talaud⁵⁰.

2.2 Awal Pemisahan “Ruang-Jejaring Melayu” (1521 – 1677)

Pada Oktober 1521 *Trinidad* yang dinakhodai Gomez de Espinosa dan *Victoria* dinakhodai oleh Elcano, adalah dua kapal layar yang tersisa dari armada Ferdinand Magelhaes atau Fernão de Magalhães dan bertolak dari daratan Mindanao dengan tujuan Maluku. Kedua kapal layar ini adalah bagian dari armada Magelhaes yang diporak-poranda oleh Lapu-lapu dan Zula, datu di Mactan. Di sana pula, mereka kehilangan pemimpin armadanya, Ferdinand Magelhaes, pelaut Portugis yang mengabdikan dirinya kepada Raja Spanyol. Pelayaran ini mengikuti alur pelayaran yang sudah sering dilewati oleh pelaut setempat⁵¹. Pelayaran kedua kapal ini menyusuri gugusan pulau yang membentang dari pulau Balut dan

48 Amatan singkat atas sejumlah buku catatan (tulisan tangan) mantra-mantra yang dimiliki oleh para pelaut di daerah ini, mereka peraleh dari para “dukun” yang berguru di pulau-pulau Sulu. Meskipun memerlukan kajian yang lebih lanjut, tampak adanya petunjuk keterkaitannya dengan keterangan tentang tokoh Syarif Karim Al-Makhdum, yang diyakini oleh penganut aliran kepercayaan Makkung di Tabukan Utara.

49 Misalnya, Pangasinan untuk menyebut salah satu pelabuhan di Sulu (Jolo); Sambuwangan untuk Zamboanga; Malulun untuk menyebut Sarangani; dan sebagainya.

50 Lihat, antara lain: Laporan Veriyanta Madijowa: “Sabuk terluar Bernama Miangas” dalam *Tempo*, 22-08-2004.

51 Lihat A.J. Ulaen, 2003: 31 – 32.

Sarangani di ujung selatan Mindanao yakni pulau-pulau Sangihe hingga Tagulandang sebelum menyeberang ke Maluku Utara⁵². Pelaut Spanyol ini disambut baik di Tidore⁵³. Dua puluh empat tahun kemudian, Ruy Lopes de Villalobos memimpin ekspedisi dan melayari sisi timur Mindanao. Eskader yang dipimpinnya bertolak dari Mexico pada tahun 1542⁵⁴ dan setelah tiba di kepulauan Filipina, menyusuri Mindanao bagian timur melayari route ini pada tahun 1545, melewati pulau-pulau Miangas, Nanusa dan langsung ke Gilolo (Jailolo) dan Tidori (Tidore)⁵⁵. Sebelumnya, yakni pada tahun 1537, dilaporkan bahwa ekspedisi Loyasa yang dinakhodai oleh Andres de Urdaneta, melayari route ini pada sisi timur pulau Mindanao. Dalam catatan pelayarannya, ia hanya mencatat adanya pulau Sangihe dan Talaud⁵⁶.

Pelayaran pelaut-pelaut Eropa ini dapat dicatat sebagai tonggak awal masuknya armada bangsa Eropa (Spanyol) dalam “ruang-jejaring Melayu” di kawasan Laut Sulawesi – Laut Mindanao – dan Laut Sulu; meramalkan perniagaan Sulu-Sino. Ruang-jejaring niaga Melayu, yang kemudian berkembang menjadi ruang-jejaring Sino-Sulu, menjadikan

52 Lihat Ulaen, 2003:33.

53 Lihat M.A.P. Meilink-Roelofs, 1962. *Asian Trade and European Influence in the Indonesian Archipelago between 1500 and about 1630*. Martinus Nijhoff / The Hague. Hal. 154: “...the Spanish expedition headed by Magellan arrived in the Moluccas shortly after the death of its leader, and was well received on Tidore....”

54 Lihat Ernest S. Dodge, 1976. *Islands and Empires. Western Impact on the Pacific and East Asia* University of Minnesota Press, Minneapolis, halaman 234: “... An expedition from Mexico in 1542, commanded by Ruy López de Villalobos, renamed the islands, which had been called San Lazaro by Magellan after the saint's day on which he had discovered them, for the infante Felipe – the future Philip II...”

55 Lihat Emma Helen Blair & James Alexander Robertson (Eds.). 1903 – 1919. *The Philippine Islands 1493 – 1898*. Vol. III. Hal. 121 – 131 (Relations of Discoveries of the Malucos and Philipinas); dan Ernest S. Dodge, 1976. *Islands and Empires. Western Impact on the Pacific and East Asia* University of Minnesota Press, Minneapolis,

56 Dalam catatan ekspedisi Loyasa terdapat deretan nama mulai dari Ambon, Banda, Gilolo, Papua, Talao, Bendenao, Cebu, Sanguin, Celebes, Tubuzu, Macazares, Banggai, Buru. Lihat, Ulaen, 2003:33.



pulau Cebu sebagai pusat perniagaan. Dari Cebu ke arah barat melalui pulau-pulau Sulu, dan ke arah selatan ke Maluku hingga bandar-bandar di Jawa. Di sana, rempah-rempah dipertukarkan (barter) dengan barang-barang keramik Cina dan kain tenunan dari Jawa⁵⁷. Ketertarikan pada perniagaan rempah-rempah pula mendorong Raja Filipe II untuk memberi perintah kepada Miguel López de Legazpe agar berlayar ke Cebu (Filipina) pada tahun 1564. Setibanya di sana, ia tidak menemukan rempah-rempah sebagaimana diberitakan, selain mendapat keterangan bahwa penghasil rempah-rempah adalah kepulauan Maluku⁵⁸. J.C. van Leur menandai kehadiran pelaut Eropa dalam jaringan pelayaran di Nusantara sebagai *"the Internationality of Asian Trade"* (internasionalisasi perniagaan Asia)⁵⁹, sedangkan sejarawan-bahari A.B. Lopian, menilai kehadiran pelaut-pelaut Eropa ini sebagai penanda retaknya kesatuan dunia bahari yang ada dan menggabungkan tiga kawasan laut (Sulu – Sulawesi – Mindanao). Lebih lanjut Lopian menjelaskan:

*"...Kesatuan dunia bahari di sini mulai retak dengan kedatangan orang asing (banyaga) dari Eropa Barat. Mula-mula orang Portugis dan Spanyol (abad ke- 16), kemudian orang Belanda (abad- 17)..."*⁶⁰.

Jika para pelaut Iberian (Portugis dan Spanyol) pada abad ke- 16 hingga abad ke-17 berlayar mengikuti route barat yakni dari Malaka

57 Lihat M.A.P. Meilink-Roelofs, 1962. *Asian Trade and European Influence in the Indonesian Archipelago between 1500 and about 1630*. Martinus Nijhoff / The Hague, halaman 98: "...the fact that the Chinese brought Javanese cloth to the Moluccas as well as silver, iron, ivory, beads, and blue Chinese porcelain dishes and cup indicates that they took the same route as the Javanese..."

58 Ernest S. Dodge, 1976. *Islands and Empires. Western Impact on the Pacific and East Asia*. University of Minnesota Press, Minneapolis, halaman 234. "... Legazpe was ordered by Philip II to bring back much spice and other treasure as possible, the primary purpose of the expedition was to find a practical return route eastward across the Pacific to Mexico. Legazpe reached the island of Cebu in April 1565 and founded a settlement there. But spice were few, for cloves did not grow in the Philippines..."

59 Lihat J.C. van Leur, 1967, *Indonesian Trade and Society, Essays in Asian Social and Economic History*. W. Van Hoeve Publishers Ltd – The Hague, halaman 162.

60 Lihat A.B. Lopian, "Pangantar" dalam A.J. Ulaen, 2003: vi.

menyusuri pesisir utara Borneo menuju pulau-pulau Sulu selanjutnya berlayar ke Maluku, maupun melayari jalur pelayaran dari pesisir barat Amerika melalui Pasifik sebelum tiba di Filipina dan Maluku; lain lagi dengan kehadiran pelaut Belanda. Mereka tiba di Maluku lewat jalur selatan, dari Banten melalui Laut Jawa. Jacoob van Neck (1588), disusul oleh Wijbrand van Warwijk (1599) adalah pemimpin armada Belanda yang menjalin perniagaan dengan Sultan Ternate⁶¹.

Selain pelaut ada juga para penyiar agama yang turut bersama dalam beberapa ekspedisi. Bahkan ada di antara para pelaut yang kemudian menjadi biarawan katolik, seperti halnya Andres de Urdaneta. Sewaktu ekspedisi Loyasa 1537, Urdaneta adalah nakhoda handal dalam ekspedisi tersebut. Dalam pelayarannya yang kedua yang dikomandani Miguel Lopez de Legazpe, Urdaneta masih tetap dipercaya sebagai nakhoda dan dikemudian hari ia menjadi seorang biarawan dari ordo Agustinian⁶². Kehadiran para misionaris ini kelak mewarnai kesatuan-kesatuan komunitas di Nusa Utara yang semula berada dibawah pengaruh kesultanan Sulu (di utara) dan Kesultanan Ternate (di selatan) semakin beragam. Beberapa misionaris yang berlayar antara Manila dan Ternate melewati kepulauan Sangihe dan Talaud atau Nusa Utara seperti Pastor Diego de Magelhaes singgah membaptis beberapa datu antara lain Datu Siau Pasuma dengan nama baptis Don Jeronimo⁶³.

Dari sejumlah kedatuan (kerajaan) kecil yang ada di kepulauan Sangihe dan Talaud, pengaruh Portugis dan Spanyol yang paling menonjol

61 Lihat M.A.P. Meilink-Roelofs, 1962. : 98

62 Ernest S. Dodge, 1976. *Islands and Empires. Western Impact on the Pacific and East Asia*. University of Minnesota Press, Minneapolis, halaman 234: "...In November 1564, a fleet of five ships sailed from Mexico for the Philippines under the command of Miguel Lopez de Legazpe and piloted by Andres de Urdaneta (then an Agustinian friar but formerly a naval officer who had sailed to the Maluccas twenty-two years before...)"

63 Lihat H. Jacobs, S.J. *Documenta Maluccensia*, Vol. I, halaman 412 – 413. Datu Siau dibaptis tahun 1563 bersama dengan Datu Manado Tua.



tampak di Kedatuan Siau. Tidak hanya raja dan warganya yang dibaptis oleh paderi katolik⁶⁴, tetapi juga penyelenggaraan pemerintahannya di bawah bimbingan para paderi antara lain Pater Marta dan Pater Antonio Pereyra⁶⁵. Pada masa itu, kerajaan Siau seperti dilaporkan oleh Francisco de Montemayor Y Mansilla:

*"(...) the king of that place (Siau) has many subjects, and allies in the islands of Tabucco or Sanguil Baçar, the Talaos (...) the Talaos number about eleven thousands souls and their chief is a Christian. The country is poor, the people barbarous and naked, and the islands abound in cocoas and vegetables, some little rice (on which they live), and some roots (with which they pays their tribute). (...) they have their own petty chief, who was baptized in Manila; and there are now eight hundred baptized families there. So likewise those Manganita, Moade, Tomaco, and Sabungan in Sanguil Baçar. There are eight hundred native Christians in Calonga, the capital of the same island. A Franciscan priest lives there at present, while the Society, to whom that mission belongs, has no one send there"*⁶⁶

[... Raja dari tempat itu (Siau) mempunyai banyak 'jajahan' dan sekutu di Tabukan dan Sangir Besar, di Talaud...penduduknya sekitar sebelas ribu jiwa dan pemimpinnya beragama Kristen. Negerinya miskin, penduduknya masih barbar dan telanjang, coklat dan sayur-mayur berlimpah di pulau-pulau, sedikit padi (yang menghidupi mereka), dan sumber lainnya (yang mereka gunakan untuk membayar upeti). Mereka mempunyai pemimpin yang picik, yang dibaptis di Manila; dan di sana sekarang ada sekitar delapan ratus keluarga yang dibaptis di sana. Seperti itu juga di Manganitu, Moade, Tamako, dan Sabungan (Sawang?) di Sangir Besar. Di sana ada sekitar delapan ratus pribumi Kristen di Kalongan, kota dari pulau yang

64 Lihat Hubert Jacobs, S.J. 1992. "The Insular Kingdom of Siau under Portuguese and Spain Impact, 16th and 17th centuries" dalam B. Dahm (Ed.) *Regions and Regional Developments in the Malay-Indonesian World. 6 European Colloquium on Indonesia and Malay Studies (ECIMS) June 1987, Passau, Otto Harrasowitz - Wiesbaden*.

65 Lihat Hubert Jacobs, S.J. *Documenta Maluccensia*, Vol. II – 1996.

66 Lihat Laporan Mansilla sebagaimana diterjemahkan dan dikutip oleh Emma Helen Blair & James Alexander Robertson (Eds.). *The Philippines Islands 1493 – 1898*. Vol. XXVIII. 1637 – 1638. Halaman 100 – 101.

sama. Paderi Fransiskan tinggal di sana sekarang, sementara Tarekat, pada siapa misi ini bernaung, tidak mengirimkan seorangpun ke sana.]

Di bawah perlindungan Spanyol, Siau, selain menaklukkan kedatuan-kedatuan kecil di pulau-pulau Sangihe dan Talaud, juga bersekutu dengan kerajaan Tabukan dan beberapa kedatuan kecil lainnya, sebagaimana dilaporkan oleh Francisco de Montemayor Y Mansilla di atas. Bantuan para paderi ini berlangsung setidaknya sampai saat mereka terusir dari Nusa Utara ketika para raja setempat harus menanda-tangki *Verklaring* dengan penguasa VOC, gubernur Robertus Padtbrugge, pada tahun 1677⁶⁷. Perjanjian tersebut jelas menunjukkan supremasi kekuasaan VOC atas kerajaan-kerajaan kecil di Nusa Utara serta melarang hubungan yang sudah terjalin sebelumnya dengan pihak Portugis maupun Spanyol.

Kunjungan Padtbrugge ini kelak memilah “ruang-jejaring Melayu” di kawasan Laut Sulu – Laut Mindanao – Laut Sulawesi, dalam tiga sub-kawasan, yakni (1) pulau-pulau Sulu dan sebagian Mindanao mempertahankan tradisi kedatuan dan kesultanan dalam peradaban Islam; (2) Nusa Utara dari pengaruh Kesultanan Sulu dan Kesultanan Ternate disusul oleh peradaban Katholik, dan digantikan oleh peradaban Kristen-Protestan; dan (3) sebagian dari Mindanao (tengah, timur dan utara) berada di bawah pengaruh peradaban Katholik⁶⁸. Hubungan perniagaan baik dengan Sulu, Buayan, Butuan dan Cebu tidak lagi sebebas seperti semula. Apalagi setelah VOC bankrut dan digantikan dengan Pemerintahan Kolonial, penempatan pejabat-pejabat kolonial di samping

67 Lihat Robide van der Aa, 1867, “Het journal van Padtbrugge’s reis naar Noord Celebes en de Noorden Eilanden” dalam BKI, 1867.

68 Uraian tentang hal ini lebih rinci dalam Alex J. Ulaen, 2007, “Tradisi dan Kebudayaan Masyarakat “Nusa Utara”, Indonesia: Dari Tuturan, Ingatan Kolektif dan Catatan” Makalah ditulis atas permintaan Panitia Pelaksana Pertemuan Ilmiah, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia dan disampaikan dalam Pertemuan tersebut pada tanggal 11 – 12 Desember 2009, di hotel Gran Puri Manado.

para raja di Nusa Utara semakin mengalihkan kawasan pulau-pulau di Laut Sulawesi ini menjadi *landstreek van (keresidenan) Manado*⁶⁹.

2.3 Miangas: Batas Utara Keresidenan Manado

Sejak penandatanganan kontrak antara raja Tabukan dengan Penguasa VOC, pulau Miangas dinyatakan sebagai bagian dari kerajaan tersebut. Dalam dokumen yang disertakan sebagai pelengkap memorandum pihak Belanda ke Mahkamah Arbitrase Internasional, laporan komandan kapd'larycque berdasarkan pada laporan raja Tabukan Marcus Lalero (1700) bahwa menurut Kontrak 1679, rakyat Miangas menyatakan kesetiaannya kepada kerajaan Tabukan⁷⁰. Laporan Gubernur Ternate tertanggal 11 Juni 1706, juga mencatat bahwa "... Pulau Miangas yang berada paling utara kepulauan Talaud merupakan jajahan dari Tabukan"⁷¹. Pada tahun 1825, Pulau Miangas dicatat sebagai jajahan dari kerajaan Taruna. Kerajaan ini memang sudah mengklaim Pulau Miangas sebagai bagiannya sejak tahun 1726.

Kehadiran Penguasa Hindia Belanda di pulau-pulau Talaud nyatanya baru pada tahun 1888, ditandai oleh penempatan seorang *Posthouder* di Lirung untuk memerintah wilayah distrik bawahan Talaud. Sebelumnya, dan bahkan setelah itu, pulau-pulau Talaud terbagi-bagi dan diklaim sebagai bagian dari kerajaan-kerajaan yang ada di Pulau-pulau Sangihe. Setahun setelah itu, yakni pada tahun 1889, untuk pertama kalinya Pemerintah Kolonial Hindia Belanda dalam hal ini Pemerintah Kolonial Keresidenan Manado, melantikapiten laut atau Kepala Kampung

69 Lihat Alex J. Ulaen, 2003: 80 – 84.

70 Laporan tanggal 11 Mei 1701, berdasarkan kunjungan ke pulau-pulau Sangihe dan Talaud bulan November – Desember 1700.

71 Lihat *Reports of International Arbitral Awards (R.I.A.A.)* Vol. X halaman 863.



Miargas, Abaten. Abaten sebelumnya adalah Ratumbanua Miargas. Karena usianya sudah lanjut, tak lama sesudah dilantik, masih dalam tahun yang sama, ia digantikan oleh anaknya yang bernama Timpa⁷². Usulan agar Timpa menggantikan ayahnya yang sudah uzur datangnya dari Jogugu Nanusa, Lantaka II⁷³. Pada tahun 1892, Jogugu Lantaka II memerintahkan Kapiten Laut Timpa untuk menyatukan pemukiman yang semula tersebar di beberapa tempat ke lokasi pemukiman sekarang.

Dalam dokumen resmi pemerintah kolonial juga ditetapkan wilayah pulau-pulau Talaud dengan letak dan kordinat sebagai berikut:

"...de Talaud-eilanden liggen ten noordoosten van Sangihe tusschen 126° 30' en 127° 10' O.L. en 3° 40' en 5° 35' N.Br. en bestaan uit de eilanden Karakelong, Salibaboe en Kabaroean met de daarbij behoorende



Gambar 2.10 Jalan utama kampung Miargas (ujung timur)

72 H.J. Lam, 1932:44.

73 H.J. Lam, 1932:43 – 44.

kleine eilanden, voorts de Nanoesa-groep en eindelijk Miangas of Palmas-eilanden. ⁷⁴

[... pulau-pulau Talaud berada pada arah timur laut, tepatnya 126° 30' – 127° 10' Bujur Timur dan 3° 40' – 5° 35' Lintang Utara, terdiri atas pulau-pulau Karakelang, Salibabu dan Kabaruan dan pulau-pulau kecil, meliputi kelompok pulau-pulau Nanusa dan ujungnya Pulau Miangas atau Palmas.]

Tentang letak pulau-pulau Nanusa dan Miangas, dokumen resmi yang dirujuk di atas mencatatnya berdasarkan laporan dari Letnan (laut) Graaf van Hogendorp yang berkunjung ke sana dengan kapal-patrol (perang) Belanda SS “Raaf” sebagai berikut:

“...ligt het eiland Palmas (Miangas) op 5° 31' 30'' N.Br. en 126° 32' 57'' O.L. ⁷⁵

[... Pulau Palmas (Miangas) pada 5° 31' 30'' Lintang Utara dan 126° 32' 57'' Bujur Timur.]

Pada tahun 1895, Miangas mendapat kunjungan Residen Manado, E.J. Jellesma dengan menggunakan kapal-patrol (perang) S.S. “Raaf”. Kunjungan ini adalah sebagai penghormatan kepada warga dan terutama kapiten laut atas sikapnya yang menolak pemberian bendera Spanyol dari sebuah kapal patroli Spanyol, ketika mereka berlayar ke Mindanao. Menggunakan kapal layar, kapiten laut bersama warganya secara rutin berniaga ke Mindanao. Penolakan ini disertai alasan bahwa mereka sudah turun-temurun merupakan bagian dari pemerintah kolonial Hindia Belanda. Berita penolakan ini sampai ke telinga Residen Manado, E.J. Jellesma. Atas sikapnya yang tegas menolak bendera Spanyol, kapiten laut mendapat penghargaan berupa sebuah medali, bendera Belanda,

74 Lihat *Mededeelingen van het Bureau voor de Bestuurszaken der Buitenbezittingen*. Aflevering II, 1912:5.

75 Lihat *Mededeelingen van het Bureau voor de Bestuurszaken der Buitenbezittingen*. Aflevering II, 1912:5. (pada baris ke 7 dari atas, catatan kaki)



dan bagi warga, pemerintah Belanda menyerahkan sebuah lambang kerajaan Belanda. Semula, lambang yang terbuat dari perunggu ini di pulau Miangas digantung di dalam sebuah pondok berukuran dua meter persegi. Kemudian lambing itu direkatkan pada sebuah monumen beton (kapur) setinggi dua meter. Baik di pulau Miangas maupun ditempat lainnya di Talaud, seperti Karatung, Beo, Lirung dan Mangaran lambang Belanda yang ditempatkan di pelabuhan ini dikenal dengan sebutan "macan". Pasalnya, pada simbol tersebut tergambar dua ekor singa yang berhadapan memegang perisai, dan pada perisai itu juga tergambar seekor singa mengacungkan pedang dan di atas perisai yang bergambarkan singa ini tergambar sebuah mahkota yang ukurannya lebih besar dari ukuran mahkota di atas kedua singa yang mengapit. Di bagian bawah, terdapat motto: "Je Maintiendrai".



Gambar 2.11 Jalan utama kampung Miangas (ujung barat) arah pantai

Ikut pula dalam rombongan Residen Manado, Pendeta Kroll yang bertugas di Manado dan membaptis 254 orang Miangas sebagai penganut Kristen Protestan⁷⁶.

Sejak kunjungan Residen Jellesma, pulau Miangas sering dikunjungi oleh pejabat pemerintah kolonial, yakni antara lain kunjungan Asisten Residen yang berkedudukan di Tahuna dan disertai oleh Pendeta Pennings, seorang misionaris, pada bulan April 1909. Kunjungannya yang kedua berlangsung pada bulan Oktober tahun yang sama. Kunjungan terakhir ini, selain didampingi oleh Zwaan dan Stokking, dua orang misionaris di pulau-pulau Sangihe, menggunakan kapal S.S. Flamingo dan merupakan perjalanan untuk merampungkan peta laut nomor 183⁷⁷. Selain kunjungan pejabat kolonial Belanda ke Miangas yang dicatat oleh H.J. Lam dalam



Gambar 2.8 Dari kiri ke kanan: Raja Ponto, Raja Tamawiwi, H. Eckenhausen, H. Sieberg, Simbol Kerajaan Belanda terpaku di gubuk, Residen Manado, H. Schmidt, H. Claasen, Prof. Dr. W. Weck, dan Dr. H.J. Lam, sewaktu berkunjung ke Pulau Miangas, 12 Juli 1926.

(Sumber: H.J. Lam, *Miangas (Palmas)*, halaman antara 16 & 17)

76 H.J. Lam, 1932:44.

77 H.J. Lam (1932:45) Peta ini dipublikasi tahun 1913.



bukunya ini, berlangsung juga kunjungan Jenderal Leonard Wood dan kunjungan kapal Amerika, S.S. Pathfinder pada tahun 1915.

Semasa perang antara Spanyol dan Amerika, secara rutin, kapal perang Belanda berpatroli di perairan Talaud. Di antaranya, kapal perang "Edi" dengan komandannya van den Toorn, sempat berlabuh di pulau Miangas pada tahun 1898⁷⁸. Selain kunjungan resmi dari para pejabat pemerintah kolonial dan para pekabar injil, kalangan ilmuwan pun tidak ketinggalan. Inisiatif meneliti keadaan pulau Miangas muncul di kalangan ilmuwan yang berkantor di Kebun Raya Bogor. Tim peneliti yang dipimpin Dr. H.J. Lam, dan didampingi oleh Residen Manado serta stafnya dan raja Taruna, S. Ponto serta raja Talaud, J.S. Tamawiwi, berkunjung ke Pulau Miangas tanggal 11 – 12 Juni 1926, menggunakan kapal "Zwaluw". Adapun alasan mengapa Lam berkunjung ke Miangas, dapat dibaca dalam kutipan berikut:

"... The Talaud islands are one of those stretched archipelagoes that form a connection between the Philippines on one hand and the Netherlands Indian part of the Malay Archipelago on the other. Since two of these, viz. the Palawan and Sulu bridges, had formerly been explored by American investigators, as regard their vegetation, the American botanist Prof. E.D. Merrill, formerly Director of the Bureau of Science, Manila, P.I., drew, in this respect, the attention of the Director of the Botanical Gardens of Buitenzorg to the Sangihe and Talaud Islands.

The Director of the Botanical Gardens, Prof. Dr. W. M. Docters van Leeuwen and the then Chief of Herbarium, Dr. J.G.B. Beumée, readily took over Prof. Merrill's suggestion and in the end of 1925 I was honoured with the task of exploring that most interesting group of islands, which might yield the key to the problem of the Philippines-Moluccas-Australia flora connection"

"... Pulau-pulau Talaud adalah satu dari kepulauan yang menghubungkan Filipina di satu pihak dengan Hindia Belanda bagian dari kepulauan

78 H.J. Lam, 1932:45.

Melayu di pihak lain. Sejak dua di antaranya yakni jajaran pulau-pulau Palawan dan pulau-pulau Sulu, vegetasinya telah diteliti oleh investigator Amerika, Prof. E.D. Merrill, seorang botanis, mantan Direktur Kantor Ilmu Pengetahuan Manila, hal itu menarik perhatian Direktur Kebun Raya Buitenzorg (Bogor) melakukan hal serupa di kepulauan Sangihe dan Talaud. Direktur Kebun Raya, Prof. Dr. W.M. Docters van Leeuwen dan kemudian Kepala Herbarium, Dr. J.G.B. Beumée, menanggapi anjuran Prof. Merrill dan pada akhir tahun 1925, saya mendapat kehormatan menjalankan tugas di kelompok pulau yang menarik ini, dengan harapan dapat mengungkap rahasia hubungan dunia tetumbuhan (flora) dari Filipina – Maluku – Australia.”⁷⁹.

Itulah yang terbaca dalam alinea-alinea awal bagian Pengantar tulisan atau tepatnya laporan kunjungan tim yang dipimpin oleh H.J. Lam tentang Miangas. Karya ini terbilang sebagai karya yang lengkap tentang pulau (dan warga) Miangas baik pada masanya maupun setelah Indonesia merdeka. Buku ini merupakan kompilasi dari catatan anggota tim yang ia pimpin. Khusus tentang penduduk dan sejarah pulau ini, ia dasarkan pada catatan Eckenhausen, pejabat sipil kolonial untuk pulau-pulau Talaud, dan J.S. Tamawiwi, raja Talaud dibantu Jogugu Nanusa, yang ditugaskan untuk mengumpulkan keterangan dari penduduk setempat.

Tentang penduduk Miangas dikisahkan bahwa yang dipercayai sebagai cikal-bakal atau nenek moyang mereka bernama Padudu. Ia berasal dari sebuah kampung yang bernama Meiu di Mindanao⁸⁰. Ketika Pulau ini diserang perompak, di bawah pimpinan seorang kepala-suku bernama Bawarodi’a mereka melarikan diri ke arah selatan, yaitu ke pulau-pulau Nanusa dan mendarat di Laluhe, pulau Marampit. Pemimpin mereka ini kemudian kawin dengan seorang perempuan Marampit, dan setelah

79 H.J. Lam, 1932. *Miangas (Palmas) Scattered Annotations, made and collected by dr. H.J. Lam. G. Kolff & Co. at Batavia, D.E.I.* halaman 1.

80 H.J. Lam (1932:36) memberi catatan bahwa dia tidak menemukan nama kampung seperti itu dalam daftar sensus penduduk Filipina.



anak-anaknya menjelang dewasa, ia menunjuk salah seorang anaknya bernama Larungan memimpin sejumlah warga kembali ke Miangas. Itulah sebabnya – menurut Lam – penduduk setempat menggunakan bahasa Talaud dialek Nanusa. Gelombang penduduk lainnya – yang juga berasal dari Pulau Marampit – diperkirakan tiba di Miangas sekitar tahun 1690, dikirim oleh Datu Dapitan, membantu mendirikan benteng pertahanan sekaligus mempertahankan pulau ini dari serangan perompak dari Sulu.

Selain berasal dari Pulau-pulau Nanusa, tercatat pada tahun 1700-an, ada warga yang berasal dari Tugis, Mindanao dan sempat menjadi pemimpin lokal, yakni Ma'atama dan anaknya Guri atau Juri. Datu Guri yang diperkirakan memimpin tahun 1780, memiliki arti penting karena dia tidak hanya memperkuat benteng yang ada tetapi juga mempersenjatainya dengan tiga buah meriam besi atau *lila*. *Lila* ini konon diberikan oleh penduduk Mindanao kepada Guri karena ia adalah putra dari Datu Ma'atama dari Tugis. Oleh penduduk setempat disebut *lantakan*. Meriam keempat dari tembaga diperoleh dari Datu Awala dari Pulau Kakorotan, sekitar tahun 1820. Pemberian ini berhubungan dengan sebagian dari warga Miangas yang juga berasal dari Pulau Kakorotan⁸¹.

Pada saat kunjungan tim peneliti dari Kebun Raya Buitenzorg (Bogor) itu, penduduk Miangas tidak jauh berbeda dengan keadaannya sekarang, yakni 680 jiwa yang terdiri atas pria 325 orang dan wanita 355 orang. Lam juga mencatat adanya perpindahan penduduk ke pulau Karakelang sebagai upaya pemerintah kolonial Belanda mencegah penularan kolera. Tentang tata pemukiman dan perumahan warga, Lam mencatat:

"... the entire population is dwelling in the village Miangas, a very neat kampong, situated on the SW coast and consisting of a broad main street, nearly perpendicular to the coast, and two narrower ones, one on either

81 H.J. Lam (1932:41 -42)

side parallel to it, these three streets being connected by some cross roads. All roads are neatly paved with white coral sand and very clean. The houses, many of them with a solid but low wall, others resting on quadrangular pillars, about 1 m high, stand wide apart and at a distance of several meters from the cleanly white compound walls along the streets, showing the type common in Talaud islands and consisting of a front warandah, reached by means of a staircase in the middle and some rooms behind this. As there is great lack of timber on the island, many houses – among which the school-church and the house of the kapitein-laut – are entirely or partly built up from coconut stems. For smaller pieces the wood of nato (*palaquium oblusifolium*, Burck) is used, a tree that is frequently cultivated for that purpose. For the rest, occasionally timber is imported from the forest reserve of Nanusa, viz, the island of Garat. The roof are covered with "ataps", made from the leaves of sagu- or the coconut-palm"

Near the sea coast stands the house of the kapitein-laut (...) At the other end of the main street and facing it in its full length, stands the large school (at the same time church) consisting of a single large room ⁸².

[...semua penduduk Miangas bermukim di desa Miangas, sebuah kampung yang rapi, terletak di pesisir pantai barat-daya dan terdapat sebuah jalan utama yang lebar dan lurus ke arah pantai, dan dua jalan yang lebih sempit yang sejajar dengan jalan utama tadi. Ketiga jalan ini dihubungkan oleh jalan-jalan yang memotong membentuk persimpangan. Semua jalan tertata rapi dan bersih tertutup pasir-kerikil putih. Umumnya, rumah-rumah yang ada berdinding rendah tapi padat, rumah lainnya didirikan di atas pilar-pilar persegi empat kira-kira satu meter tingginya, berjarak lebar dari pagar-beton yang terbentang sepanjang jalan, tipe tata-rumah yang umum di Talaud dan dengan beranda depan, yang dapat dicapai dengan tangga ditempatkan di depan pada posisi tengah; dan beberapa ruangan setelah beranda. Karena kurangnya kayu di pulau ini, banyak rumah – termasuk di antaranya rumah sekolah sekaligus gereja dan rumah kapitein-laut – seluruhnya atau sebagian menggunakan bahan batang kelapa. Untuk potongan-potongan yang lebih kecil bahannya dari kayu nato (*palaquium oblusifolium*, Burck), jenis kayu yang mereka tanam untuk

82 H.J. Lam (1932:47-48)



bahan bangunan/rumah. Sisanya, kadang-kadang kayu yang didatangkan dari hutan cagar alam di Nanusa yaitu pulau Garat. Atap yang digunakan adalah anyaman daun sagu-rumbia atau juga anyaman daun kelapa. Dekat tepian pantai berdiri rumah kapiten-laut. Di ujung lainnya (arah darat) berdiri sebuah bangunan sekolah yang sekaligus gereja, terdiri dari sebuah ruangan tunggal dan luas.]

Tentang keadaan penduduk, mata pencaharian dan aktivitas ekonomi, Lam mencatat:

"... All natives are Christians (Protestants) and, according to this, monogamists, following the patriarchy. Like those of other Talaud Islands their old national dress of koffo clothes has been substituted by a quasi European dress. Ornaments are made from shells (bracelets) and from brass or gold, imported from Minadanao. The weapons used are in the first place the "peda", a small sword-like chopper, and further a wooden spear.(...) The natives are fishermen, traders and agriculturists and it may be suggested that any individual can take up these professions as opportunity affords. The women assist the men in agricultural work; at home they weave mats out of the leaves of pandan (Pandanus, spec.); these pandan-mats are one of the commonest matters of home industry in the island, in which the natives in former times payed also their taxes, bringing them to Lirung. As to the trader and relations to other islands, the natives use to do business with people of Mindanao, importing there their pandan-mats and exchanging these for tobacco, rice, pigs, maize (milu), paraffin oil, baskets etc., because this island seems to be more easily reached by praus than the Nanusa and the other Talaud Islands. Only rarely, however, people from Mindanao, visit the island, but some do so, merely because the relations, originating from marriages of Miangas people with Mindanao women. The most important product of the island, the copra, is engrassed by the only Chinese trader and shipped to Nanusa, Beo or Lirung to be fetched from these places by the regular K.P.M. liners⁸³.

83 H.J. Lam (1932:48-50)

[... semua penduduk beragama Kristen protestan dan hidup (berumah-tangga) secara monogami dengan sistem patriahat. Sama halnya dengan penduduk Talaud lainnya pakaian tradisional mereka yang terbuat dari koffo telah digantikan dengan pakaian cara Eropa. Perhiasan-perhiasannya terbuat dari kerang (gelang), emas atau kuningan yang didatangkan dari Mindanao. Alat persenjataan yang digunakan pertama-tama adalah 'peda' (parang), sebuah alat pemotong yang berbentuk pedang kecil, dan selanjutnya sebuah tombak kayu (...) Warga umumnya adalah nelayan, pedagang dan petani dan tampaknya mereka melakukannya karena adanya kesempatan. Para pria dibantu oleh wanita melakukan pekerjaan bercocok tanam; dan ketika di rumah, mereka menganyam tikar dari daun pandan dan tikar-pandan ini adalah salah satu industri rumah tangga yang paling utama dan umum di pulau ini, dimana sebelumnya hasil ini digunakan untuk membayar pajak dan dibawa ke Lirung. Warga Miangas sering berhubungan dagang dengan orang-orang Mindanao, membawa tikar-pandan serta menukarnya dengan tembakau, beras, babi, jagung dan minyak parafin, keranjang dan lain-lain, karena pulau ini (Mindanao) tampaknya lebih mudah ditempuh dengan perahu, dibandingkan dengan pulau-pulau Nanusa dan pulau-pulau Talaud lainnya. Orang Mindanao, betapapun, jarang sekali berkunjung ke pulau ini (Miangas), kalau tokh ada yang datang, maka mereka mengunjungi kerabatnya, karena keterikatan perkawinan antara warga Miangas dengan wanita Mindanao. Hasil bumi yang utama di pulau ini adalah kopra, yang dikumpulkan oleh satu-satunya pedagang-pengumpul Cina dan mengapalkannya ke Nanusa, Beo atau Lirung, disana kopra ini dijemput oleh kapal-kapal perusahaan Belanda (KPM) yang berlayar secara reguler.]

Itulah rekaman keseharian warga Miangas saat kunjungan Lam bersama timnya pada pertengahan Juni 1926. Aktivitas serta kenyataan keseharian yang tampaknya tidaklah berbeda jauh setelah hampir seabad lalu, atau paling kurang dilakoni oleh tiga generasi penduduk Miangas.





Gambar 2.14 Tikar pandan, kerajinan wanita Miangas



Gambar 2.15 Selain tikar, para wanita Miangas juga terampil menganyam topi pandan



Gambar 2.12 Rumpun pandan, bahan baku anyaman salah satu kerajinan wanita Miangas



Gambar 2.13 Daun pandan yang sudah dikeringkan, siap untuk dianyam

BAB 3

PULAU MIANGAS YANG DIPERSENGKETAKAN



Dalam beberapa artikel yang dimuat dalam media cetak diberitakan bahwa “sengketa tentang pulau Miangas” seakan-akan terjadi antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Filipina¹. Padahal, sangat jelas bahwa pihak Pemerintah Republik Filipina mengakui status pulau Miangas sebagai “milik Indonesia” meskipun letaknya lebih dekat dengan wilayah Filipina. Itupun kalau penentuan wilayahnya didasarkan pada isi Konstitusi 1935 yang menetapkan wilayah Filipina berdasarkan isi Perjanjian Damai antara Amerika Serikat dengan Kerajaan Spanyol yang ditandatangani di kota Paris tanggal 10 Desember 1898, atau yang dikenal dengan *Paris Treaty* 1898 atau Traktat Paris 1898.

Perkembangan Konstitusi Filipina setelah diamandemen, misalnya: Konstitusi Filipina tahun 1987; *Republic Act* No. 3046 tahun 1961; *Republic Act* No. 5446 tahun 1968; dan *Republic Act* No. 9522 tahun 2009, tidak memasukkan Pulau Miangas sebagai wilayahnya.² Beberapa perjanjian bilateral Indonesia - Filipina, khususnya Perjanjian Lintas-

1 Lihat, antara lain: “Negara berpagar belasan ribu pulau” (*Tempo interaktif*, Selasa, 8 Maret 2005); “Berkunjung ke Pulau tempat transit para pelaku bom Bali” (*Jawa Pos*, 13 Oktober 2005).

2 Terutama Amandemen Konstitusi pada tahun 1987. Lihat a.l. Sonia M. Zaide, 1994. *The Philippines: A Unique Nation*. All Nations Publishing Co. Quezon City, bab 29 (392 – 396) dan Theodore A. Agoncillo, 1990. *History of the Filipino People*. Garotech Publishing, bab 31. The Edsa Revolution, halaman 584 – 587.

Batas atau yang dikenal dengan *Border Crossing Agreement* antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Filipina yang ditandatangani oleh perwakilan kedua belah pihak baik pada tahun 1956³ maupun pada tahun 1965⁴, 1974⁵, dan 1975⁶; serta naskah perjanjian kerjasama militer kedua belah-pihak (Indonesia – Filipina) sebagai tindak-lanjut dari kesepakatan tahun 1975 berupa operasi militer bersama di wilayah perbatasan kedua negara; dan Perjanjian Ekstradiksi Antara Republik Indonesia dan Republik Philippina serta Protokol tahun 1976, jelas menandakan pengakuan pihak Pemerintah Republik Filipina atas pulau Miangas sebagai milik Indonesia. Adapun sengketa soal pulau Miangas terjadi antara Pemerintah Amerika Serikat versus Pemerintah Kerajaan Belanda. Sengketa itupun sudah diselesaikan oleh Mahkamah Arbitrase Internasional dengan arbitrator tunggal, Dr. Max Huber pada tanggal 4 April 1928.

Masalah yang diwarisi oleh dua negara merdeka dari masa kolonial adalah “persoalan tapal-batas” yang tumpang tindih. Ketumpang-tindihan itu disebabkan oleh Konstitusi Pemerintah Republik Filipina yang pada awalnya mengacu pada Traktat Paris dalam hal penentuan garis batas wilayahnya. Sementara Pemerintah Republik Indonesia dalam menentukan Batas Landas Kontinen Indonesia (BLKI) berpedoman pada Undang-Undang No. 1/1973 tentang Landas Kontinen Indonesia, termasuk penetapan zona ekonomi eksklusif, yakni dua konsepsi yang

3 *Agreement on Immigration between the Republic of the Philippines and the Republic of Indonesia*, ditandatangani pada tanggal 4 Juli 1956.

4 *Joint Directives and Guidelines on the Implementation of the Immigration Agreement on Repatriation and Border Crossing Arrangement between Republic of Indonesia and the Republic of the Philippines*, ditandatangani pada tanggal 16 September 1965.

5 *Revised Agreement on Border Crossing between the Republic of Indonesia and the Republic of the Philippines*, ditandatangani pada tanggal 30 Mei 1974.

6 *Joint Implementation of the Border Patrol Agreement and Border Crossing Agreement between the Government of Indonesia and the Government of the Philippines*, yang ditandatangani pada tanggal 11 Maret 1975.



diatur dalam Undang-Undang No. 17/1985, yang meratifikasi *United Nations Convention on the Law Of the Sea* atau UNCLOS 1982. Tanpa memperhitungkan jarak antara kedua negara ini yang kurang dari 400 mil laut, tampak telah terjadi tumpang-tindih wilayah. Oleh karena koordinat yang dijadikan pedoman penentuan batas (selatan) menempatkan pulau Miangas di dalam wilayah teritorial Filipina. Itulah sebabnya, kedua pihak telah mengagendakan persoalan ini dalam perundingan bilateral sejak tahun 1994 dan hingga kini belum tercapai kesepakatan⁷.

Dalam bab ini akan dipaparkan “kasus Pulau Miangas” atau *The Island of Palmas Case (or Miangas)* antara Pemerintah Amerika Serikat dengan Pemerintah Kerajaan Belanda dengan mengacu pada tiga sumber utama yakni (1) “Award of the Tribunal” *the Island of Palmas Case (or Miangas)*⁸; (2) “*The Miangas Arbitration*”⁹; dan (3) “*Max Huber as Arbitrator: The Palmas (Miangas) Case and other Arbitrations*”¹⁰. Pemilihan ketiga sumber utama ini berdasarkan pada pertimbangan bahwa sumber pertama merupakan sumber utama yang berisikan argumen Dr. Max Huber yang dipercaya sebagai Arbitrator. Sumber kedua adalah sebuah karya keilmuan (disertasi) dalam bidang hukum dari Willem Johan Bernard Versfelt yang dipertahankannya di Universitas Utrecht, lima tahun setelah kasus ini diputuskan. Sumber ketiga, sebagai bahan pembanding, juga

7 Lihat: Poltak Portogi Nainggolan (Ed.) 2004. *Batas Wilayah dan Situasi Perbatasan Indonesia: Ancaman terhadap Integritas Teritorial*. Tiga Putra Utama, Jakarta.

8 Lihat *Reports of International Arbitral Awards (R.I.A.A.)*, Vol. XI, halaman 831 – 871 (40 pages); dan terbitan khusus: *Permanent Court of Arbitration, The Hague 4 April 1928, Arbitrator M. Huber*, 37 pages.

9 Willem Johan Bernard Versfelt, *The Miangas Arbitration. Praefschrift ter Verkrijging van den groot van doctor in the Rechtsgeleerdheid aan de Rijkuniversiteit te Utrecht op gezag van den Rector Magnificus Dr. C.G.N. De Vooy, Hoogleraar in de Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte volgens besluit van den Senaat der Universiteit te Verdedigen tegen de Bedenkingen van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid op Vrijdag 7 Juli 1933, des Namiddags 5 Uur. Kemink en Zoon N.V. Over den Dom. Utrecht.*

10 Daniel-Erasmus Khan, 2007. “Max Huber as Arbitrator: The Palmas (Miangas) Case and Other Arbitrations.” *The European Journal of International Law*. Vol. 18 No. 1. Pages 145 – 170.

sebuah karya keilmuan dalam bidang hukum dari seorang pakar hukum internasional, Daniel-Erasmus Khan. Sebagai pelengkap juga digunakan sumber lain untuk mendapatkan keterangan penunjang pemaparan dalam bab ini.

Pemaparan tentang *Palmas Island* (Pulau Miangas) dalam Perjanjian Perdamaian antara Amerika Serikat dan Spanyol yang ditandatangani di Paris atau dikenal dengan Traktat Paris 1898 dipandang perlu karena setelah mendapatkan salinan Perjanjian tersebut, Pemerintah Kerajaan Belanda sepertinya berdiam saja dan tidak bereaksi. Padahal, kalau menyimak garis-batas (lintang dan bujur) yang digunakan untuk menandai batas-batas wilayah Filipina yang diserahkan oleh Kerajaan Spanyol kepada Pemerintah Amerika Serikat, mencakup Pulau Miangas. Nanti setelah adanya laporan kunjungan Gubernur Leonard Wood ke *Palmas Island* (Pulau Miangas) yang disertakan sebagai lampiran surat Perwakilan Pemerintah Amerika Serikat di Den Haag dan balasan dari Kementerian Luar Negeri Kerajaan Belanda, barulah sengketa itu berawal. Kedua pihak akhirnya sepakat menyerahkannya kepada Mahkamah Internasional dan akhirnya mereka harus mematuhi keputusan arbitrator tunggal, Dr. Max Huber.

3.1 Pulau Palmas (Miangas) dalam Traktat Paris 1898

Perjanjian Damai yang ditandatangani 10 Desember 1898 di kota Paris, atau yang dikenal sebagai Traktat Paris (*Paris Treaty*), mengakhiri peperangan antara Spanyol dan Amerika Serikat. Dalam salah satu pasalnya, yakni Pasal III tertulis:

"...Spain cedes to the United States the archipelago known as the Philippine



Islands, and comprehending the islands lying within the following line:

A line running from the West to East, along or near the twentieth parallel of north latitude, and through the middle of the navigable channel of Bachi, from the one hundred and twenty-seven (127th) degree meridian of longitude East of Greenwich, thence along the one hundred and twenty-seven (127th) degree meridian of longitude East to Greenwich to the parallel of four degrees and forty-five minutes ($4^{\circ} 45'$) north latitude, thence along the parallel of four degrees and forty-five minutes ($4^{\circ} 45'$) north latitude to its intersection with the meridian of longitude one hundred and nineteen degrees and thirty-five minutes ($119^{\circ} 35'$) East of Greenwich, thence along the meridian of longitude one hundred and nineteen degrees and thirty-five minutes ($119^{\circ} 35'$) East of Greenwich to the parallel of latitude seven degrees and forty minutes ($7^{\circ} 40'$) north, thence along the parallel of latitude of seven degrees and forty minutes ($7^{\circ} 40'$) north to its intersection with the one hundred and sixteenth (116th) degree meridian of longitude, East of Greenwich thence by a direct line to the intersection of the tenth (10th) degree parallel of north latitude with the one hundred and eighteenth (118th) degree meridian of longitude East of Greenwich, and thence along the one hundred and eighteenth (118th) degree meridian of longitude East of Greenwich to the point of beginning.

The United States will pay to Spain the sum of twenty million dollars (\$ 20.000.000) within three months after the exchange of the ratifications of the present treaty¹¹.

[... Spanyol menyerahkan kepada Amerika Serikat, kepulauan Filipina meliputi pulau-pulau yang berada dalam garis-garis berikut:

Garis yang terbentang dari barat ke timur, sepanjang atau dekat garis sejajar 20° lintang utara, melewati pertengahan terusan Bachi, dari 127° garis meridian bujur timur Greenwich, kemudian sepanjang 127° garis meridian bujur timur Greenwich ke lintang utara $4^{\circ} 45'$, kemudian sepanjang paralel dari $4^{\circ} 45'$ lintang utara ke persimpangannya dengan meridian bujur $119^{\circ} 35'$ timur Greenwich, kemudian sepanjang meridian

11 Willem Johan Bernard Versfelt, *The Miangas Arbitration*. 1933:3.

dari 119° 35' ke/sejajar dengan 7° 40' lintang utara ke persimpangannya dengan 116° meridian bujur timur kemudian terhubung dengan satu garis dari 10° lintang utara dengan meridian bujur 118° timur dari Greenwich, kemudian sepanjang meridian bujur 118° timur dari Greenwich ke titik semula.

Amerika Serikat akan membayar sejumlah 20 juta dollar kepada Spanyol dalam waktu tiga bulan sesudah pertukaran ratifikasi dari perjanjian ini...].

Berdasarkan garis-batas di atas, jelas bahwa *Palmas Island* atau Pulau Miangas tercakup di dalamnya dan merupakan bagian dari kepulauan Filipina, wilayah jajahan Kerajaan Spanyol yang diserahkan kepada Amerika Serikat.

Usai penandatanganan perjanjian tersebut – sesuai protokol diplomatik – pada tanggal 3 Februari 1899, Stanford Newe, perutusan Pemerintah Amerika Serikat – selaku pewaris kekuasaan (kolonial) atas Filipina – yang berada di Den Haag, atas nama pemerintahnya mengirim dua salinan (copy) dokumen perjanjian tersebut kepada Pemerintah Kerajaan Belanda selaku penguasa kolonial di koloni tetangganya, dengan isi surat pengantar sebagai berikut:

Sir:

I have the honor to send Your Excellency herewith two copies of the President's Message relating to the Treaty of Peace between the United States and Spain signed at the City of Paris on December 10, 1898.

Accept, Mr. Minister, the renewed assurance of my high consideration.

(signé) Stanford Newe¹²

12 Willem Johan Bernard Versfelt, *The Miangas Arbitration*. 1933:54 – 54.



[.... Tuan

Saya memperoleh kehormatan untuk mengirimkan 2 salinan dari pernyataan Presiden kepada Paduka Yang Mulia berkaitan dengan Perjanjian Perdamaian antara Amerika Serikat dengan Spanyol yang ditandatangani di kota Paris pada 10 Desember 1898.

Terimalah, tuan Menteri, ungkapan rasa terima kasih kami.

Tertanda: Stanford Newe]

Lima hari kemudian, tepatnya tanggal 8 Februari 1899, W.H. de Beaufort, atas nama Pemerintah Kerajaan Belanda mengirim surat balasan sebagai berikut:

Monsieur le Ministre,

J'ai de honneur de Vous accuser reception de Votre office du 3 ce mois, par lequel Vous avez bien voulu me fair parvenir deux exemplaires du Message du President de États-Unis d'Amerique concernant le traité de paix signé à Paris le 10 décembre dernier, entre ces États et de Royaume d'Espagne.

En vous remerciant de cet envoi, je saisis cette occasion, Monsieur le Ministre, pour Vous renouveler l'assurance de ma haute considération.

*(signé) W.H. de Beaufort*¹³

[.... Tuan Menteri

Saya mendapat kehormatan menerima pemberitahuan dari kantor Tuan pada tanggal 3 bulan ini, dimana tuan dengan senang hati mengirimkan dua buah salinan dari pemberitahuan Tuan Presiden Amerika Serikat perihal Perjanjian Damai yang sudah ditandatangani di kota Paris pada tanggal 10 Desember lalu, antara Amerika Serikat dan Kerajaan Spanyol.

13 Willem Jahan Bernard Versfelt, *The Miangas Arbitration*. 1933:54

Dengan menyampaikan terima kasih kepada tuan atas kiriman tersebut, tuan Menteri, dihaturkan banyak terima kasih atasnya.

Tertanda, W.H. de

Beaufort...]

Dari isi surat balasan ini sangat jelas tidak ada nada tanggapan berupa penjelasan bahwa Pulau Miangas atau Palmas Island sudah menjadi bagian dari Hindia Belanda sejak kurang lebih 200 tahun lalu dan hingga saat itu (1899) masih tetap menjadi bagian dari Hindia Belanda lebih khusus lagi adalah Kejoguguan Nanusa, yaitu satuan administrasi di *Afdeeling Sangi en Talaud, Keresidenan Manado*¹⁴.

Max Huber¹⁵ selaku arbitrator (tunggal) yang ditugaskan untuk mempelajari dokumen yang berkaitan dengan kasus ini, menyatakan – dalam keputusannya – bahwa dia tidak menemukan tanda-tanda silang pendapat baik antara Spanyol dengan Belanda, maupun antara Amerika Serikat selaku pewaris kekuasaan atas Filipina dengan Belanda atas obyek sengketa. Demikian juga dengan Willem Versfelt, seorang akademisi (ahli hukum) Belanda yang melakukan kajian atas keputusan Mahkamah Arbitrase Internasional tersebut¹⁶, sependapat bahwa sesudah pemerintah Amerika Serikat mengirimkan salinan Perjanjian Perdamaian yang di tandatangani di Paris atau lebih dikenal dengan sebutan Traktat Paris 1898 kepada Pemerintah Kerajaan Belanda, dan isi surat balasan (seperti yang sudah dikutip di atas), tidak ada tanda-tanda silang pendapat. Persoalannya muncul ketika Gubernur Leonard Wood selaku penguasa militer di Propinsi Moro mengirim laporan hasil kunjungannya ke Palmas

14 Willem Johan Bernard Versfelt, *The Miangas Arbitration*. 1933:3 – 4; dan *Mededeelingen van het Bureau voor de Bestuurszaken der Buitenbezittingen, Het Encyclopaedisch Bureau, Afl. II*, 1912:5 – 82 dan Peta II. Keterangan tentang Miangas pada halaman 17 – 20, & 82.

15 *Permanent Court of Arbitration*, 1928:1 – 5.

16 Willem Johan Bernard Versfelt, 1933:54.



Island pada awal tahun 1906¹⁷.

3.2 Kasus Pulau Miangas: Berawal dari Kunjungan Jenderal Leonard Wood (1906)¹⁸

Jenderal Leonard Wood adalah Gubernur Propinsi Moro pertama setelah wilayah selatan Filipina meliputi pulau Mindanao dan pulau-pulau Sulu di bagian selatannya sebagai satu wilayah administratif pada tahun 1903. Wilayahnya membawahi daerah kekuasaan para Sultan dan Datu, seperti Lanao, Kotabatu, dan Sulu serta daerah lainnya yang masih di bawah kekuasaan pemimpin lokal¹⁹. Pada saat dilakukan sensus tahun 1903, penduduk Propinsi Moro tercatat sebanyak 395.000 jiwa (yakni muslim 275.000 jiwa; Kristen 40.000 jiwa dan lainnya 80.000 jiwa) yang tersebar di wilayah seluas 38.888 mil persegi.²⁰ Suatu pertumbuhan penduduk yang luar biasa cepat, karena dua tahun sebelumnya, yakni tahun 1901, diperkirakan penduduk propinsi Moro berkisar antara

17 Mungkin saja ada reaksi dari pihak Pemerintah Kerajaan Belanda, maupun Pemerintah Kolonial Hindia Belanda terhadap klaim tidak langsung atas Pulau Miangas karena dengan penentuan garis batas wilayah Filipina seperti yang tercantum dalam Pasal 3 di atas. Hanya saja reaksi seperti itu tidak ditemukan dalam dokumen. Perlu dicatat bahwa Gubernur Leonard Wood pernah berkunjung ke Jawa pada tahun 1923 dan sebagai kunjungan balasan, G.G. Fack berkunjung ke Filipina. Dalam pemberitaan tentang kunjungan Wood ke Jawa (Hindia Belanda) ini penulis belum menemukan adanya agenda atau pernyataan yang berisikan keberatan Wood terhadap Pemerintah Kerajaan Belanda perihal Pulau Miangas. N.A. Baatsma dalam karyanya *Buren in de koloniale tijd* (1986) juga tidak menyinggung hal itu.

18 Sub-judul ini didasarkan pada pernyataan dalam kalimat pertama alinea ke-10 (halaman 5) dari Permanent Court of Arbitration, 1928. *Award the Tribunal, The Island of Palmas Case (or Miangas), United States of America v. The Netherlands...* "... the origin of the dispute is to be found in the visit paid to the island of Palmas (or Miangas) on January 21st, 1906..."

19 Lihat: Patricia N. Abinales, 2000. *Making Mindanao: Cotabato and Davao in the Formation of the Philippine Nation-State*. Ateneo de Manila University Press. 18 – 23; Agoncilla, 1990:251 – 252.

20 Abinales, 2000:19.

4.000 hingga 6.000 jiwa²¹. Pertumbuhan penduduk yang begitu cepat disebabkan oleh arus migrasi besar-besaran baik dari utara (pulau Luzon) dan yang tidak kalah pentingnya adalah pencari kerja dari pulau-pulau Sangihe dan Talaud di perbatasan Indonesia – Filipina.

Sejak masa kolonial Spanyol, wilayah Mindanao Selatan ini dikenal sebagai daerah yang sulit dikendalikan oleh pemerintah kolonial. Itulah sebabnya, ketika Amerika Serikat menguasai Filipina, Gubernur Tasker Bliss berpendapat bahwa wilayah Mindanao Selatan yang dikenal sebagai propinsi Moro, harus dipimpin oleh militer. Para sultan dan datu yang memiliki wilayah kesultanan dan kedatuan, senantiasa terlibat perang dengan Spanyol sebagai reaksi atas penaklukan kolonial, harus dihadapi dengan kekuasaan militer. Pendapat ini ditentang oleh Manuel Quezon, politisi Filipina. Secara khusus, Abinales, seorang sejarawan Filipina spesialis Mindanao mencatat bahwa:

*"... the American's foremost concern when it came to governing Southern Mindanao was the muslim communities, their history of independence and warfare against the Spanish, and their hostility toward the Filipinos.."*²²

[... perhatian utama Amerika ketika memerintah Mindanao Selatan adalah komunitas muslim, sejarah kemerdekaan dan peperangan melawan Spanyol dan permusuhan yang mereka perlihatkan kepada Filipinos (orang Filipina).]

Untuk menjalankan misi ini, ditunjuklah Jenderal Leonard Wood sebagai gubernur. Sesungguhnya, ada kepentingan lebih besar dari sekedar menguasai para sultan dan datu yang selalu berontak. Abinales mengekspresikan ketertarikan pemerintah kolonial Amerika

21 Abinales, 2000:70

22 Abinales, 2000:18 – 19



Serikat terhadap propinsi Moro sebagai “...the last western frontier”²³. Mindanao adalah pulau yang – kala itu – masih kurang penduduk dan memiliki sumber alam berlimpah dan pemerintah kolonial merencanakan pembukaan perkebunan kelapa, tebu, dan abaka, tiga komoditi utama di samping perkebunan buah-buah terutama pisang.

Pada tahun-tahun awal pemerintahannya Jenderal Wood mengadakan perjalanan ke Pulau Miangas. Dalam “memori-banding” yang diajukan oleh pihak Amerika Serikat kepada Mahkamah Internasional di Den Haag disebutkan bahwa kunjungannya yang pertama adalah pada tahun 1903. Apakah Jenderal Wood berhasil mendarat ke pulau Miangas, tidak ditemukan keterangan tertulis baik dari pihaknya maupun dari pihak yang dikunjungi. Sehingga, kunjungan pada tanggal 21 Januari 1906 itu dianggap sebagai kunjungan resmi pertama Gubernur Moro ini ke Pulau Miangas²⁴. Setibanya di pulau Miangas atau kala itu di kalangan pemerintah kolonial Amerika Serikat dikenal dengan nama *Palmas Island*, rombongan sang gubernur disambut dengan kibaran bendera triwarna (merah-putih-biru), sebagaimana dipaparkan oleh Versfelt:

“.. On January 21st of that year a visit was paid to the island by Mayor-General Leonard Wood, who was much surprised to find the Dutch flag flying, both on shore and on a boat which came out to meet him”²⁵.

[tanggal 21 Januari 1906, Mayor Jenderal Leonard Wood berkunjung ke pulau (Miangas), begitu terkejut ketika melihat kibaran bendera Belanda di pantai maupun di perahu yang mendarangi kalanya.]

23 Abinales, 2000:70.

24 Permanent Court of Arbitration, 1928: Award the Tribunal, The Island of Palmas Case (or Miangas), United States of America v. The Netherlands, halaman 5.

25 Willem Johan Bernard Versfelt, 1933:4. “.... On January 21st of that year a visit was paid to the island by Mayor-General Leonard Wood, who was much surprised to find the Dutch flag flying, both on shore and on a boat which came out to meet him”

Sekembalinya di Zamboanga (Filipina), pada tanggal 26 Januari 1906, Wood kemudian melayangkan laporannya kepada Sekretaris Militer Amerika Serikat yang isinya antara lain:

(....) "*As far as I could ascertain*" (...) "*the Dutch flag has been there for the past fifteen years, one man said he thought it had always being there...*"²⁶.

[... Se jauh yang kuketahui... bendera Belanda telah ada di sana sejak lima belas tahun lalu, seperti kesaksian seseorang bahwa ia tahu bendera itu sudah ada di sana...].

Laporan ini kemudian disertakan sebagai lampiran dari surat resmi tertanggal 31 Maret 1906 yang disampaikan oleh pihak Pemerintah Amerika Serikat melalui kedutaannya di Den Haag kepada Pemerintah Kerajaan Belanda mempertanyakan status *Palmas Island*. Menanggapi protes tersebut Kementerian Luar Negeri Belanda dalam Nota Dinasnya tertanggal 17 Oktober 1906 mengajukan beberapa alasan status Pulau Miangas dalam wilayah Hindia-Belanda. Bahwa Miangas sudah berada di bawah pengaruh VOC atau Kompeni Hindia Timur semenjak penguasa-penguasa lokal di kepulauan Sangihe menandatangani kontrak dengan VOC tahun 1677. Setelah Kompeni Hindia Timur bubar, wilayah ini menjadi bagian dari Hindia-Belanda. Persoalan ini berlanjut dalam bentuk surat-menyurat antara kedua belah pihak. Karena masing-masing pihak tidak ada yang mengalah, maka sebagai jalan keluar, keduanya sepakat membawa persoalan ini ke Mahkamah Arbitrase Internasional yang berkedudukan di Den Haag. Kesepakatan ini tertuang dalam *Special Agreement* 23 Januari 1925 dan Dr. Max Huber, ahli hukum dari Swiss, anggota Mahkamah Arbitrase Internasional yang dipercaya menjadi arbitrator tunggal bersedia menangani kasus ini²⁷.

26 Willem Johan Bernard Versfelt, 1933:4.

27 Willem Johan Bernard Versfelt, 1933:4.- 5; "... *The diplomatic correspondence proceeded until January 23, 1925, when on the basis of the existing Arbitration Convention of May 2, 1908, last renewed on*



Serikat terhadap propinsi Moro sebagai “...the last western frontier”²³. Mindanao adalah pulau yang – kala itu – masih kurang penduduk dan memiliki sumber alam berlimpah dan pemerintah kolonial merencanakan pembukaan perkebunan kelapa, tebu, dan abaka, tiga komoditi utama di samping perkebunan buah-buah terutama pisang.

Pada tahun-tahun awal pemerintahannya Jenderal Wood mengadakan perjalanan ke Pulau Miangas. Dalam “memori-banding” yang diajukan oleh pihak Amerika Serikat kepada Mahkamah Internasional di Den Haag disebutkan bahwa kunjungannya yang pertama adalah pada tahun 1903. Apakah Jenderal Wood berhasil mendarat ke pulau Miangas, tidak ditemukan keterangan tertulis baik dari pihaknya maupun dari pihak yang dikunjungi. Sehingga, kunjungan pada tanggal 21 Januari 1906 itu dianggap sebagai kunjungan resmi pertama Gubernur Moro ini ke Pulau Miangas²⁴. Setibanya di pulau Miangas atau kala itu di kalangan pemerintah kolonial Amerika Serikat dikenal dengan nama *Palmas Island*, rombongan sang gubernur disambut dengan kibaran bendera triwarna (merah-putih-biru), sebagaimana dipaparkan oleh Versfelt:

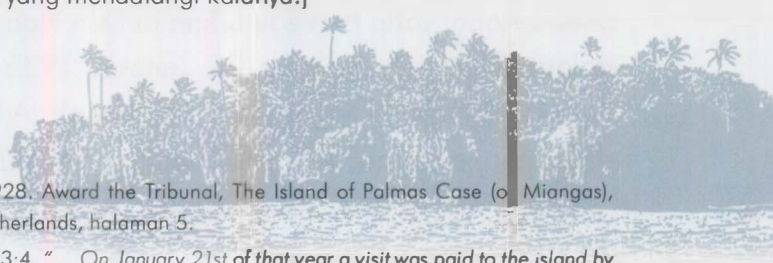
“.. On January 21st of that year a visit was paid to the island by Mayor-General Leonard Wood, who was much surprised to find the Dutch flag flying, both on shore and on a boat which came out to meet him”²⁵.

[tanggal 21 Januari 1906, Mayor Jenderal Leonard Wood berkunjung ke pulau (Miangas), begitu terkejut ketika melihat kibaran bendera Belanda di pantai maupun di perahu yang mendatangi kalanya.]

23 Abinales, 2000:70.

24 Permanent Court of Arbitration, 1928. Award the Tribunal, The Island of Palmas Case (o Miangas), United States of America v. The Netherlands, halaman 5.

25 Willem Johan Bernard Versfelt, 1933:4. “.... On January 21st of that year a visit was paid to the island by Mayor-General Leonard Wood, who was much surprised to find the Dutch flag flying, both on shore and on a boat which came out to meet him”



Sekembalinya di Zamboanga (Filipina), pada tanggal 26 Januari 1906, Wood kemudian melayangkan laporannya kepada Sekretaris Militer Amerika Serikat yang isinya antara lain:

(....) "As far as I could ascertain" (...) "the Dutch flag has been there for the past fifteen years, one man said he thought it had always being there..."²⁶.

[... Sejauh yang kuketahui... bendera Belanda telah ada di sana sejak lima belas tahun lalu, seperti kesaksian seseorang bahwa ia tahu bendera itu sudah ada di sana...].

Laporan ini kemudian disertakan sebagai lampiran dari surat resmi tertanggal 31 Maret 1906 yang disampaikan oleh pihak Pemerintah Amerika Serikat melalui kedutaannya di Den Haag kepada Pemerintah Kerajaan Belanda mempertanyakan status *Palmas Island*. Menanggapi protes tersebut Kementerian Luar Negeri Belanda dalam Nota Dinasnya tertanggal 17 Oktober 1906 mengajukan beberapa alasan status Pulau Miangas dalam wilayah Hindia-Belanda. Bahwa Miangas sudah berada di bawah pengaruh VOC atau Kompeni Hindia Timur semenjak penguasa-penguasa lokal di kepulauan Sangihe menandatangani kontrak dengan VOC tahun 1677. Setelah Kompeni Hindia Timur bubar, wilayah ini menjadi bagian dari Hindia-Belanda. Persoalan ini berlanjut dalam bentuk surat-menyurat antara kedua belah pihak. Karena masing-masing pihak tidak ada yang mengalah, maka sebagai jalan keluar, keduanya sepakat membawa persoalan ini ke Mahkamah Arbitrase Internasional yang berkedudukan di Den Haag. Kesepakatan ini tertuang dalam *Special Agreement* 23 Januari 1925 dan Dr. Max Huber, ahli hukum dari Swiss, anggota Mahkamah Arbitrase Internasional yang dipercaya menjadi arbitrator tunggal bersedia menangani kasus ini²⁷.

26 Willem Johan Bernard Versfelt, 1933:4.

27 Willem Johan Bernard Versfelt, 1933:4.- 5; ".... The diplomatic correspondence proceeded until January 23, 1925, when on the basis of the existing Arbitration Convention of May 2, 1908, last renewed on



3.3 Keputusan Arbitrase Internasional, Dr. Max Huber (1928)

Dr. Max Huber menangani "*The Island of Palmas Case (or Miangas)*" selama kurang lebih tiga tahun. Jangka waktu itu terhitung sejak tercapainya *Special Agreement*, 23 Januari 1925 sampai dengan keluarnya Keputusan tertanggal 4 April 1928. Adapun hasil kerjanya tertuang dalam dokumen setebal 40 halaman,²⁸ yang diawali dengan uraian tentang Perjanjian Khusus atau *Special Agreement* antara kedua belah pihak yang masing-masing diwakili oleh Sekretaris Negara Amerika Serikat, Charles Evans Hughes dan Duta Besar Berkuasa Penuh Kerajaan Belanda di Washington, Dr. A. C. D. de Graeff. Perjanjian ini berisikan sembilan pasal.

Isi pasal satu adalah bahwa Amerika Serikat dan Ratu Kerajaan Belanda sepakat menyerahkan keputusan atas perbedaan pendapat soal kepemilikan pulau Miangas kepada Mahkamah Arbitrase Internasional di Den Haag. Pengadilan arbitral dipercayakan kepada seorang arbitrator. Tugas utama arbitrator adalah untuk menentukan siapa yang berhak atas kepemilikan pulau Miangas. Apakah ia merupakan bagian dari wilayah Amerika Serikat atau wilayah Kerajaan Belanda. Arbitrator yang ditunjuk adalah anggota Mahkamah Arbitrase Internasional. Jika tidak ada di antara mereka (anggota) yang bersedia, maka diminta agar Presiden Konfederasi Swiss yang menunjuk arbitrator.

Pasal dua mengatur persoalan teknis. Dalam waktu enam bulan sejak pertukaran perjanjian khusus, dan setelah perjanjian khusus itu

February 13, 1924, the *Special Agreement* was concluded by which the United States of America and Her Majesty the Queen of the Netherlands agreed to refer the decision of the difference to the permanent Court of Arbitration at The Hague. Dr. Max Huber, of Zurich, member of this Court, having been asked, whether he would be disposed to accept the mandate to act as sole arbitrator under the *Special Agreement* of January 23, 1925, informed the Parties that he was willing to accept the task. This decision was delivered, as has already been stated, on April 4, 1928..".

28 Lihat *Reports of International Arbitral Awards (R.I.A.A.)*, Vol. XI, halaman 831 – 871.

diratifikasi, kedua pihak harus menyerahkan dua kopi memorandum yang berisikan pernyataan pendirian (tentang kepemilikan) disertai dokumen-dokumen pendukung. Dalam waktu enam bulan berikutnya, kedua belah pihak harus menyerahkan kontra-memo kepada pihak lawan dan juga menyerahkan salinannya kepada arbitrator (melalui Mahkamah Arbitrator Internasional).

Pasal tiga mengatur bahwa setelah pertukaran kontra-memo, kasus ditutup, kecuali apabila arbitrator menghendaki adanya penjelasan tambahan secara tertulis dari kedua pihak. Dan jika arbitrator menghendakinya, maka permintaan itu harus melalui kantor Mahkamah Arbitrase.

Pasal empat mengatur persoalan bahasa yang digunakan apakah itu bahasa Inggris atau Belanda maupun bahasa-ibu (*native language*) dari arbitrer jika hal itu diperlukan.

Pasal lima mengatur hak arbitrator yang memutuskan masalah tata cara yang timbul selama berjalannya proses arbitrase. Pasal enam mengatur segera pertukaran ratifikasi persetujuan ini kedua belah pihak harus menyerahkan seratus pondsterling sebagai pembayaran di muka.

Pasal tujuh mengharuskan arbitrator untuk menyerahkan keputusannya sesudah tiga bulan sesudah pernyataan kasus ditutup sebanyak tiga salinan yang semuanya ditandatangani. Selain itu, arbitrator harus menyatakan biaya dan honorariumnya selama kegiatan ini agar kedua belah pihak menyerahkan kewajibannya masing-masing.

Pasal delapan menyatakan bahwa kedua belah pihak siap menerima keputusan arbitrator sesuai dengan tugas yang sudah diserahkan. Jika ada perdebatan yang berkenaan dengan interpretasi atas hasil eksekusi, harus diserahkan kepada arbitrator.

Pasal sembilan menegaskan status perjanjian khusus bagi kedua



belah pihak. Perjanjian ini disepakati di kota Washington pada tanggal 23 Januari 1925, dalam dua bahasa yakni bahasa Inggris dan bahasa Belanda. Ratifikasi perjanjian khusus ini diserahkan oleh kedua pihak di Washington pada tanggal 1 April 1925. Lima bulan sesudah pertukaran ratifikasi perjanjian ini, kedua pihak melalui surat tertanggal 29 September 1925 dan ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Kerajaan Belanda dan Duta Besar Amerika Serikat di Den Haag, sepakat minta kesediaan Dr. Max Huber, warga negara Swiss selaku arbitrator pada Mahkamah Arbitrase Internasional untuk menjalankan tugas ini²⁹.

Secara kronologis, Mahkamah Arbitrase Internasional pada tanggal 16 dan 23 Oktober 1925, menyerahkan ~~Memoranda~~ baik dari pihak Amerika Serikat sebanyak 219 halaman dan 12 peta, maupun pihak Kerajaan Belanda sebanyak 83 halaman, empat peta dan sketsa serta foto-foto kepada arbitrator tunggal, Max Huber. Sesudah itu, kontra-memoranda dari Belanda sebanyak 95 halaman dan sebuah peta pada tanggal 23 April 2006; dan pada 24 April 1926 kontra-memoranda dari Amerika Serikat, 121 halaman disertai oleh tiga foto dan tiga buah peta³⁰. Oleh karena arbitrator ini bekerja atas dasar pasal tiga, Perjanjian Khusus yang menyatakan bahwa "setelah kedua pihak sudah memasukkan kontra-memoranda, maka kasus ini ditutup, kecuali apabila arbitrator menghendaki adanya penjelasan tertulis tambahan". Itupun harus diminta melalui kantor Mahkamah Arbitrase Internasional ; ia menyerahkan kepada kedua belah pihak daftar permintaan, terutama penjelasan-penjelasan awal secara tertulis. Permintaan ini dikirim oleh kantor Mahkamah ke pihak Belanda pada tanggal 6 Desember 1926 dan kepada pihak Amerika Serikat tanggal 6 Januari 1927. Permintaan tersebut dipenuhi oleh pihak Belanda yang mengirimkan dokumen-

29 Lihat *Reports of International Arbitral Awards (R.I.A.A.)*, Vol. XI, halaman 832 - 833.

30 Lihat *Reports of International Arbitral Awards (R.I.A.A.)*, Vol. XI, halaman 834.

penjelasan setebal 146 halaman dan 20 halaman tambahan berupa 25 buah peta dan sketsa yang direproduksi dari jurnal Dampiers dan salinan dari *log-books* dan catatan biografis dari Dr. Adriani, seorang ahli bahasa yang terkenal dengan penelitiannya tentang bahasa-bahasa di Indonesia bagian timur, khususnya Sulawesi dan juga bahasa-bahasa di Filipina, diterima tanggal 24 April 1927. Penjelasan tertulis dari pihak Amerika Serikat setebal 68 halaman diterimanya tanggal 22 April 1927³¹.

Sebulan kemudian, yakni tanggal 19 Mei 1927, arbitrator kembali menerima memoranda dari Amerika Serikat melalui kantor Mahkamah. Memoranda yang bertanggal 2 Mei 1927 ini intinya adalah Amerika Serikat berkeinginan untuk memberikan jawaban dengan mengacu pada isi pasal III perjanjian khusus. Hanya saja, arbitrator memutuskan untuk tidak menerimanya. Selain itu, Amerika Serikat mengajukan permohonan tambahan waktu tiga bulan, lebih dari waktu yang ditetapkan dalam pasal III, yakni selambat-lambatnya tiga bulan dengan alasan bahwa pihak Belanda telah memberikan penjelasan tambahan yang isinya lebih tebal dari kontra-memo dan sebagian besar isinya dalam bahasa Belanda dan tidak diterjemahkan (ke bahasa Inggris). Atas permintaan ini dengan persetujuan pihak Belanda, arbitrator menyetujui perpanjangan waktu. Adanya perpanjangan waktu, pihak Amerika Serikat menyerahkan jawaban atas penjelasan tambahan pada tanggal 21 Oktober 1927; dan pada 3 Maret 1928, arbitrator menyatakan kepada kedua pihak melalui kantor Mahkamah Arbitrase Internasional bahwa kasus ditutup³².

Adapun bahasa yang dipilih oleh arbitrator – sesuai dengan alinea kedua pasal IV Perjanjian Khusus – ialah bahasa Inggris. Untuk menyelesaikan sengketa ini, sesuai isi pasal VII, alinea ketiga, arbitrator

31 Lihat *Reports of International Arbitral Awards (R.I.A.A.)*, Vol. XI, halaman 834.

32 Lihat *Reports of International Arbitral Awards (R.I.A.A.)*, Vol. XI, halaman 835.



menetapkan biayanya sebesar £ 140³³.

Argumen pihak Amerika Serikat yang diajukan kepada Mahkamah Arbitrase Internasional adalah:

- (1) Mereka memiliki hak atas pulau itu sebagai konsekuensi dari penyerahan wilayah yang dilakukan oleh kerajaan Spanyol berdasarkan Traktat Paris 1898 pasal III; dan sebagai pewaris kekuasaan dari “penemu” kepulauan ini;
- (2) Hak kepemilikan mengacu pada Perjanjian Munster;
- (3) Hak kepemilikan dengan mengacu pada kekuasaan Spanyol atas pulau Palmas atau Miangas;
- (4) Hak kepemilikan karena adanya hubungan kedekatan (geografis) antara pulau Mindanao dengan pulau Palmas atau Miangas.

Argumen-argumen tersebut dilengkapi pula dengan bukti-bukti pendukung termasuk di dalamnya peta.

Tentang hak kepemilikan karena warisan dari Spanyol sebagaimana tercantum dalam pasal III Traktat Paris, Max Huber berpendapat bahwa pihak Spanyol tidak dapat menyerahkan hak di luar dari yang miliki atau dikuasainya. Pada bagian awal sebelum arbitrator menjelaskan penilaiannya, dijelaskan bahwa Perjanjian Damai 10 Desember 1898 sebagai perjanjian internasional yang berkaitan dengan “Filipina” dan konvensi dengan penguasa pribumi dan merupakan undang-undang khusus³⁴.

Alasan kedua adalah bahwa Amerika Serikat sebagai penerus kekuasaan Spanyol yang menemukan kepulauan ini (Filipina) mempunyai hak kepemilikan. Alasan ini dijawab oleh pihak Belanda bahwa tidak ada

33 Lihat *Reports of International Arbitral Awards (R.I.A.A.)*, Vol. XI, halaman 835.

34 Lihat *Reports of International Arbitral Awards (R.I.A.A.)*, Vol. XI, halaman 837.

fakta bahwa Spanyol lah yang menemukan pulau ini. Tidak ada bukti bahwa Spanyol mempunyai hak atas pulau ini.

Max Huber menekankan perlu adanya ketegasan dan pembedaan atas menemukan pulau Miangas sebagai bagian dari Filipina dan kemudian menjadikannya sebagai koloni dengan melakukan kontak atau berhubungan langsung dengan pulau (warga) Miangas. Karena persoalan “menemukan” hanya berlaku dalam hubungannya dengan subyek sengketa. Dari dokumen pelengkap, tidak ada indikasi yang menunjukkan bahwa pelaut Spanyol menemukan langsung pulau Miangas. Keraguan Max Huber tentang apakah pelaut Spanyol benar-benar menemukan pulau itu dapat dibaca dalam paparannya berikut:

“... The fact that the island was originally called, not, as customarily, by a native name, but by a name borrowed from a European language, and referring to the vegetation, serves perhaps to show that no landing was made or that the island was uninhabited at the time of discovery. Indeed, the reports on record which concern the discovery of the island of Palmas state only that an island was “seen”, which island, according to the geographical data, is identical with that dispute...”³⁵

[... Fakta bahwa pulau ini disebut tidak seperti biasanya dengan memakai nama yang digunakan pribumi atau lokal, tetapi dengan nama (kata) pinjaman dari bahasa Eropa, dan mengacu pada jenis tetanaman, menunjukkan bahwa (para pelaut itu) tidak membuang sauh dan mendarat, atau pada masa itu pulau itu tidak dihuni. Tentu saja, sebagaimana tercatat dalam laporan sehubungan dengan penemuan pulau itu dinyatakan ‘hanya dilihat’, pulau mana, sesuai dengan data geografis, identik dengan yang disengketakan...]

Max Huber mempersoalkan penggunaan kata “Palmas” dan bukan “Miangas” sebagai bukti bahwa pelaut yang mengaku menemukan pulau

35 Lihat *Reports of International Arbitral Awards (R.I.A.A.)*, Vol. XI, halaman 845.



itu diduga tidak berhubungan langsung dengan warga-pulau sehingga hanya menandai pulau ini dengan ciri tanamapa(ma) yang ada di pulau ini; dan bukan memainkannya sesuai nama lokal yaitu Miangas atau nama-nama lainnya yang ada seperti *Tinonda*, *Poilaten*, *Meanga* dan sebagainya. Bisa saja para pelaut (Spanyol) itu hanya melihatnya atau melewatinya dan tidak berhubungan dengan warga pulau, atau bisa juga karena pulau ini tidak berpenduduk. Dugaan awal lebih beralasan. Apalagi ia menemukan keterangan bahwa penemuan pulau ini 'sepertinya hanya dilihat' dan bukannya berlabuh kemudian menjadikannya sebagai koloni. Anggapan ini didasarkannya pada kebiasaan atau aturan baku bagi setiap pelayaran yang selalu mencatat apa saja yang mereka temukan dalam *log book*. Dan, pihak Amerika tidak dapat menyertakan bukti seperti itu. Sedangkan dugaan bahwa bisa saja sewaktu ditemukan pulau itu belum dihuni, tidak beralasan. Oleh karena catatan silsilah yang ditulis oleh H.J. Lam berdasarkan tuturan warga pulau menunjukkan bahwa kepemimpinan tradisional yang dipraktikkan di pulau Miangas sudah berlangsung semenjak enam generasi lalu sebelum tokoh Tora'E pertama. Tokoh ini (Tora'E) adalah pemimpin tradisional di Miangas yang diperkirakan hidup pada tahun 1690. H.J. Lam memberi catatan bahwa setiap generasi ia perhitungkan 25 tahun, maka pulau Miangas sudah mengenal sistem kepemimpinan tradisional semenjak tahun 1540-an³⁶. Atau, semasa pelayaran Magelhaes menemukan Filipina pada tahun 1521, pulau Miangas sudah berpenduduk dan mengenal sistem kepemimpinan tradisional.

Pihak Amerika Serikat mengajukan isi Perjanjian Damai yang ditandatangani di Munster tahun 1648, atau yang dikenal dengan Perjanjian Munster 1648, terutama pasal V. Adapun isi Pasal V Perjanjian Damai antara Raja Spanyol Filipis IV dengan Sekretaris Kerajaan Belanda

36 Lihat H.J. Lam, 1932, bagan silsilah termuat pada "halaman-antara" dari halaman 36 – 37.

yang ditandatangani pada tanggal 30 Januari 1648 di Munster yang dipublikasi dalam *Corps Universel Diplomatique du Droit des Gens*” dengan teks bahasa Perancis, sebagai berikut:

“...La Navigation & Trafique des Indes Orientales & Occidentales sera maintenüe, selon & en conformité des Octroys sur ce donnés, ou à donner cy-apprès; pour seureté de quoy servira le present Traicté & la Ratification d’iceluy, qui de part & d’autre en sera procurée; Et seront compris sous ledit Traicté tous Potentats, Nations & Peuples, avec lesquels lesdits Seigneur Estats, ou ceux de la Société des Indes Orientales & Occidentales en leur nom, entre les limites de leursdits Octroys sont en Amitié et Alliance; Et un chacun, sçavoir lessusdits Seigneurs Roy & Estats respectivement demeureront en possession et jouiront de telles Seigneuries, Villes, Chasteaux, Fortresses, Commerce & Pays és Indes Orientales & Occidentales, comme aussi au Bresil & sur les costes d’Asie, Afrique & Amérique respectivement tiennent et possèdent, en ce compris specialement les Lieux & Places que les Portugais depuis l’an mil six cent quarante & un, on pris & occupé sur lesdits Seigneurs Estat cy-apprès sans infraction du present Traicté viendront à conquerir & posseder; Et les Directeurs de la Société des Indes tant Orientales que Occidentales de Provinces-Unies, comme aussi les Ministres, Officiers haut & bas, Soldats & Matelots, estants en service actuel de l’une ou de l’autre desdites Compagnies, ou aians esté en leur service, comme aussi ceux qui hors leurs service respectivement, tant en ce Pays qu’au District desdites deux Compagnies, continuent encor, ou pourront cy-apprès estre employés, seront & demeureront libres & sans estre molestez en tous les Pays estants sous l’obeïssance dudit Seigneur Roy en l’Europe, pourront voyager, trafiquer & frequenter, comme tous autres Habitants des Pays desdits Seigneurs Estats. En outre a esté conditionné & stipulé, que les Espagnols retiendront leur Navigation en telle manière qu’ils la tiennent pour le present és Indes Orientales, sans se pouvoir estendre plus avant, comme aussi les Habitans de ce Pays-Bas s’abtiendront de la fréquentation des Places, que les Castillans ont és Indes Orientales ³⁷.

37 J. Du Mont (ed.), *Corps Universel Diplomatique du Droit des Gens*. Vol. VI. Part I. 1728, halaman 430. Lihat *Reports of International Arbitral Awards (R.I.A.A.)*, Vol. XI, halaman 848.



[... Pelayaran dan perniagaan ke India Timur dan Barat akan tetap dilanjutkan dan disesuaikan dengan perjanjian yang ada maupun yang akan ada untuk maksud keberlanjutan dan keamanan dimana perjanjian ini dibuat, dan ratifikasi atasnya dari kedua belah pihak, yang akan dicapai, dan dalam Traktat (perjanjian) yang disebutkan akan dipahami seluruh raja, bangsa, dan warga, dengan siapa para bangsawan, Raja, dan negara-negara atau para anggota dari Kompeni India Barat dan India Timur maupun atas nama mereka dalam batas-batas dari pengakuan dan tanggung-jawab mereka atas dasar persahabatan dan persekutuan. Dan dapat dikatakan setiap pihak, para bangsawan, raja dan negara, secara berturut-turut akan tetap pada pemilikan dan menikmati keagungannya, kota-kota, istana-istana, benteng-benteng, perdagangannya dan negara-negara di India barat maupun timur, begitu pula Brasilia dan pantai-pantai Asia, Afrika dan Amerika secara berturut-turut, dimana para bangsawan, raja-raja dan negara-negara yang disebutkan secara berturut-turut, memegang dan memiliki tempat-tempat serta lokasi yang telah diambil oleh Portugis sejak tahun 1641 dari para bangsawan dan negara-negara yang memiliki tempat-tempat tersebut, termasuk lokasi-lokasi maupun tempat-tempat yang tanpa pelanggaran oleh para bangsawan dan negara akan diduduki atau dimiliki. Para direktur dari Kompeni India Timur dan India Barat dari Propinsi-Uni (Belanda) termasuk para perwira dan pelayan baik tingkat tinggi maupun rendah, para pelaut maupun serdadu yang bekerja pada salah satu dari kompeni di atas atau perusahaan apapun lainnya, baik di dalam negeri atau di distrik dimana kedua kompeni (perusahaan) tersebut, berlangsung terus namun tanpa pelayaran, tetapi siapa yang akan dipekerjakan sesudah itu akan atau tetap bebas dan tanpa gangguan di semua negara dibawah kepatuhan terhadap para raja di Eropa; dan boleh berlayar, berniaga dan menetap dalam koloni seperti halnya para penghuni lainnya yang bermukim di negara-negara yang dikuasai oleh para raja dan negara yang disebutkan di atas. Selanjutnya telah disetujui dan ditetapkan bahwa orang-orang Spanyol akan tetap mempertahankan pelayaran mereka ke India Timur, dengan cara yang sama seperti yang mereka lakukan, tanpa ada kebebasan untuk berbuat lebih jauh, dan para penghuni dari negara-negara dibawah tersebut tidak akan sering berkunjung ke tempat-tempat tersebut seperti yang dimiliki oleh bangsa Kastilia di India Timur.]

Max Huber melihat isi pasal V dari Perjanjian Munster 1648 ini tidak menyatakan secara tegas wilayah yang menjadi milik dari dua kekuasaan yang ada, yakni Spanyol dan Belanda. Bahwa Spanyol disebut sebagai pihak yang menemukan pulau Miangas – dan mengklaimnya sebagai bagian dari Filipina – merupakan pendapat yang dapat diterima. Akan tetapi, dengan mengacu pada isi pasal V Perjanjian Perdamaian Munster 1648, mereka tidak melakukan upaya pendudukan dan yang berlanjut pada kepemilikan. Pertimbangan lain yang digunakan oleh arbitrator tunggal ini adalah, ketika Spanyol digantikan oleh Hindia Belanda di Nusantara, meskipun dalam pasal V Perjanjian Damai di atas membolehkan Spanyol melayari kawasan ini, tetapi dengan adanya perjanjian antara Penguasa VOC dengan Penguasa lokal antara lain di kepulauan Sangihe dan Talaud, Minahasa, Ternate dan Tidore dan sebagainya, maka pihak Spanyol sangatlah sulit melakukan perdagangan dengan penduduk lokal. Lebih lanjut Max Huber menjelaskan:

“... As it is not proved that Spain, at the beginning of 1648 or in June 1714, was in possession of the Island of Palmas (or Miangas), there is no proof that Spain acquired by the Treaty of Munster or the Treaty of Utrecht a title to sovereignty over the island which, in accordance with the said Treaties, and as long as they hold good, could have been modified by the Netherlands only in agreement with Spain..”³⁸

[... sepertinya tidak terbukti bahwa Spanyol, pada awal 1648 atau pada bulan Juni 1714, telah memiliki pulau Palmas atau Miangas, tidak ada bukti bahwa Spanyol dikuatkan oleh Perjanjian Munster dan Perjanjian Utrecht berdaulat atas pulau ini, menurut perjanjian-perjanjian dimaksud, dan selama kedaulatan itu dijalankan dengan baik, mereka dapat mengalihkannya ke Belanda dengan persetujuan Spanyol.]

Lebih lanjut Max Huber beranggapan bahwa, pasal ini tidak menentukan tapal batas dan wilayah yang tegas sebagai milik sebuah

38 Lihat *Reports of International Arbitral Awards (R.I.A.A.)*, Vol. XI, halaman 850.



kekuasaan selain kriteria-kriteria kepemilikan. Sehubungan dengan alasan itu, pihak Amerika Serikat menyatakan bahwa seorang padri Fransiskan Spanyol menjadikan pulau Miangas sebagai bagian dari wilayah pelayanannya paling tidak hingga tahun 1666, saat Belanda menggantikan Spanyol di Maluku. Alasan inipun tidak diterima oleh arbitrator tunggal³⁹.

Max Huber mengacu kepada isi dokumen berupa surat dari Sekretaris Negara Amerika Serikat tertanggal 7 April 1900 kepada Duta Besar Spanyol di Washington, tentang adanya perbedaan pendapat atas dua pulau yang diklaim oleh Spanyol, tetapi pada dasarnya adalah milik negara lain. Lalu apa alasannya jika Spanyol mewariskannya kepada Amerika Serikat.⁴⁰ Bahwa pulau Miangas berada dalam wilayah sesuai dengan penetapan batas wilayah dalam pasal III Traktat Paris 1898, merupakan klaim pihak Spanyol yang mengingkari kenyataan bahwa di sana ada kekuasaan Hindia Belanda. Dalam pembelaannya, pihak Belanda merujuk kepada laporan Residen Manado tertanggal 12 Agustus 1857, yang menyangkut kepulauan Talaud. Menurut isi laporan ini, bangsa Spanyol diusir dari Tabukan oleh Belanda (VOC) pada tahun 1677. Tahun ini mengacu pada ekspedisi Robertus Padtbrugge ke pulau-pulau di utara dan memaksa penguasa lokal, baik raja (Siau, Manganitu, Kalongan) maupun datu (Tabukan) menandatangani Kontrak 1677. Dalam laporan tersebut dinyatakan bahwa pulau Karakelang di Talaud, merupakan bagian dari kedatuan Tabukan. Pihak Belanda menggunakan laporan ini dan menyatakan bahwa:

"...the island of Palmas (or Miangas) together with the Nanusa and Talauer

39 Lihat *Reports of International Arbitral Awards (R.I.A.A.)*, Vol. XI, halaman 838.

40 *"Was it Spain's to give? If valid title belonged to Spain, it passed; if Spain had no valid title, she could convey none". Reports of International Arbitral Awards (R.I.A.A.)*, Vol. XI, halaman 842.

*Islands (Talaud islands) belong to Tabukan*⁴¹

[pulau Palmas atau Miangas bersama dengan Nanusa merupakan bagian dari Tabukan.]

Tidak adanya bukti-bukti penguasaan Spanyol atas pulau Miangas juga didasarkan pada keterangan yang termuat dalam surat seorang pekabar injil (*zendeling*) Belanda, Steller tertanggal 9 Desember 1895. Keterangan ini digunakan oleh pihak Amerika Serikat sebagai lampiran. Isi surat Steller menceritakan kunjungan Residen Manado ke Miangas. Pada kunjungan ini, Residen Manado mendirikan lambang kerajaan Belanda di pelabuhan Miangas⁴². Bersamaan dengan itu, residen menyerahkan medali kepada kepala suku sebagai penghargaan karena sewaktu ia berlayar ke Mindanao untuk berniaga, ia menolak perintah kapal perang Spanyol untuk mengibarkan bendera Spanyol di perahu yang mereka gunakan⁴³. Surat Pendeta Steller ini ditafsirkan oleh arbitrator sebagai hal yang mematahkan alasan bahwa pihak Spanyol memiliki kedaulatan atas pulau Miangas⁴⁴.

Kepemilikan karena “hubungan kedekatan” (*contiguity*) atau dalam terminologi hukum, *terra firma* juga diajukan oleh pihak Amerika Serikat. Alasan ini mengacu pada letak pulau Miangas – meskipun terletak sejauh kurang lebih 50 mil dari Tanjung San Agustin pulau Mindanao – dipandang sebagai bagian dari daratan Mindanao. Jaraknya memang lebih pendek jika dibandingkan dengan jarak dari pulau-pulau Nanusa yang mana pulau Miangas merupakan bagian dari kelompok pulau-pulau ini, yakni kurang lebih 56 mil. Namun, sebagai bagian dari kelompok pulau

41 Lihat *Reports of International Arbitral Awards (R.I.A.A.)*, Vol. XI, halaman 849.

42 Lihat uraian dalam bab II

43 Lihat *Reports of International Arbitral Awards (R.I.A.A.)*, Vol. XI, halaman 852.

44 Lihat *Reports of International Arbitral Awards (R.I.A.A.)*, Vol. XI, halaman 852.



(Nanusa) yang dihuni oleh satu kelompok etnis menjadi pertimbangan dalam penentuan keputusan⁴⁵.

Pihak Kerajaan Belanda mengajukan argumen kepemilikan yang didasarkan pada adanya kontrak antara raja-raja di pulau-pulau Sangihe dengan VOC dan berlanjut dengan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda⁴⁶. Dalam paparan pihak Belanda yang diajukan ke Mahkamah Arbitrase Internasional bahwa pulau Miangas merupakan milik mereka sejak tahun 1677 ketika para raja-lokal kerajaan Tabukan, Siau, Taruna, Kendahe, Kendahe-Taruna, Manganitu dan Tagulandang menandatangani kontrak atau perjanjian dengan VOC. Kontrak tersebut disusul oleh sejumlah kontrak yang ditandatangani pada tahun 1697, 1720, 1758, 1828, 1885 dan 1899⁴⁷. Isi kontrak atau perjanjian tersebut, mulai dari kontrak pertama (1677) hingga kontrak 1899, isinya hampir serupa dan mengatur hal-hal yang berkenaan dengan kehidupan ekonomi, keagamaan dan pada dasarnya pihak raja-raja setempat mengakui kekuasaan VOC dan Belanda atas wilayahnya⁴⁸. Khususnya kontrak 1885, terdapat penekanan akan mengucilkan raja yang menjalin hubungan niaga atau apapun dengan kekuasaan lain selain Belanda. Kontrak yang bersinambung di atas menjadi bukti bahwa penyelenggaraan kekuasaan Belanda berlangsung efektif dan tidak dipersoalkan. Keaslian kontrak-kontrak di atas juga tidak

45 Lihat *Reports of International Arbitral Awards (R.I.A.A.)*, Vol. XI, halaman 855 “.... it is possible that a group may under certain circumstances be regarded as in law a unit, and that the fate of the principal part may involve the rest. Here, however, we must distinguish between, on the one hand, the act of first taking possession, which can hardly extend to every portion of territory, and, on the other hand, the display of sovereignty as a continuous and prolonged manifestation which must take itself felt through the whole territory”.

46 Lihat *Reports of International Arbitral Awards (R.I.A.A.)*, Vol. XI, halaman 842 - 866.

47 Lihat J. E. Heeres, 1931. “*Corpus Diplomaticum, Neerlandico-Indicum. Verzameling van Politieke contracten en verdeve verdragen door de Nederlanders in het Oosten gesloten, van Privilegebrieven, aan het verleend, enz.*”. Deerde deel. BKI, 91, Martinus Nijhoff.

48 Lihat *Reports of International Arbitral Awards (R.I.A.A.)*, Vol. XI, halaman 856: “... but they are all based on the conception that the prince receives his principality as a fief of the Company or the Dutch State, which is suzerain...”

luput dari perhatian arbitrator.

Tambahan kontrak (*annexe*) 1885 mencantumkan pulau Miangas dalam daftar wilayah kerajaan Taruna. Begitu pula dengan daftar tambahan kontrak 1899, ketika kerajaan Kandahar-Taruna bergabung, pulau Miangas sebagai bagian dari pulau-pulau Nanusa dicantumkan sebagai wilayah bawahan kerajaan itu⁴⁹. Sebelumnya, Pulau Miangas dan pulau-pulau Nanusa, dinyatakan sebagai bagian dari kedatuan Tabukan. Hal ini tidak dipersoalkan oleh arbitrator dan dianggapnya sebagai permasalahan internal Belanda (Hindia Belanda), dan tidak lebih dari sebuah bentuk penataan wilayah dalam sistem kolonial untuk mengatur koloninya.

Tentang kontrak-kontrak yang sudah ditandatangani oleh VOC dengan pemimpin lokal yang bukan anggota sebuah liga bangsa-bangsa, menurut arbitrator, dalam artian hukum internasional bukanlah sebuah perjanjian atau konvensi yang berkekuatan (hukum) menjamin hak kepemilikan. Apalagi isi kontrak-kontrak tersebut di atas selain pernyataan pengakuan terhadap kekuasaan superior, juga ditujukan untuk mengatur perniagaan, hubungan dengan kekuasaan ketiga, bahkan kehidupan beragama, dan bukanlah sebuah perjanjian yang sifatnya protektoral atau perlindungan atas koloni. Oleh karena itu, pernyataan hak kepemilikan Pulau Miangas oleh pihak Belanda yang didasarkan atas pertimbangan adanya kontrak-kontrak tersebut diabaikan, namun isinya dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Menurut Max Huber, pembaharuan kontrak yang sudah berlangsung sejak adanya kontrak pertama merupakan bukti penyelenggaraan kedaulatan yang efektif. Dan kedaulatan Belanda atas pulau-pulau Sangihe dan Talaud tidak dapat dipersoalkan. Namun, dia mengingatkan

49 Lihat *Reports of International Arbitral Awards (R.I.A.A.)*, Vol. XI, halaman 857.



bahwa tugasnya adalah menjawab pertanyaan sebagaimana tercantum dalam pasal satu Perjanjian Khusus. Apakah pulau Palmas atau Miangas pada tahun 1898 merupakan bagian dari wilayah Hindia Belanda, koloni Belanda di India Timur? Dan bukti-bukti apa saja yang menguatkan pernyataan tersebut. Untuk menjawabnya, Max Huber menelaah kembali tambahan atau *annexe* dari kontrak tahun 1885. Dalam *annexe* kontrak tersebut dinyatakan bahwa pulau-pulau Nanusa adalah daerah bawahan Taruna dan

“... ten slotte nog het eiland Melangis (Palmas)”

[... akhirnya pulau Melangis (Palmas)].

Begitu pula dengan kontrak 1899, Nanusa termasuk pulau Miangas merupakan bagian dari kerajaan Kandahar-Taruna. Hal ini menyisakan pertanyaan bagi arbitrator, apakah ada kontrak atau perjanjian dengan kepala suku di Miangas.

Kajian yang dilakukan oleh Max Huber untuk memutuskan persoalan ini juga menemukan penggunaan sejumlah nama pulau Miangas dalam berbagai dokumen kedua belah pihak, terutama dalam peta. Ketepatan menunjuk lokasi nautikal dan penamaan juga dibahas secara khusus. Dari kumpulan dokumen dan peta yang ada, arbitrator ini berkesimpulan bahwa otoritas Belanda yang sangat hati-hati dan mengetahui secara tepat tentang identitas pulau Miangas. Anggapannya ini didasarkan pada laporan komandan kapal api “Raaf” (Nopember 1896) dan kapal perang “Edi” (Juni 1898) yang terlampir dalam memorandum pihak Belanda. Keduanya tidak hanya tepat mendeskripsikan posisi nautikal tetapi juga dalam penulisan nama yakni “Miangas eiland” atau “Palmas eiland” yang menandai pulau tersebut. Oleh karena dalam beberapa peta yang bersumber dari catatan para pelaut, Dampier, seorang pelaut Inggris misalnya, mencantumkan nama “island Meangis”. Peta yang

digambar oleh Coven dan Mortier menyebutnya “pulau Menangus”. Peta lainnya mencantumkan nama “pulau Palmas of Melangis”⁵⁰.

Tentang adanya simbol-simbol kekuasaan yang ditemukan di pulau ini juga mendapat perhatian arbitrator. Ia mencatat keberadaan bendera Kompeni Hindia Timur yang dilambai-lambaikan ketika kapal (layar) *De Bye, Larycque*, dan *De Peer* berlayar mendekati pulau Miangas pada tanggal 21 Nopember 1700. Hal ini dipandang sebagai adanya kehadiran kekuasaan Belanda.

Dokumen lainnya yang terlampir dalam memorandum pihak Belanda dan dijadikan bahan pertimbangan arbitrator adalah laporan Residen (Manado) van Delden. Laporan yang ditulis pada tahun 1825, mencantumkan “Melangis” sebagai bagian dari Tabukan. Lepas dari penyebutan nama yang berbeda yakni Melangis dan bukan Miangas, laporan Residen van Delde terbilang rinci mendeskripsikan struktur pemerintahan di pulau-pulau ini. Mulai dari nama-nama *negorij* atau kampung di pulau-pulau Nanusa seperti Mehampi (Marampit), Karaton (Karatung) dan Kakorota (Kakorotan) serta statusnya sebagai *kejoguguan* dengan jogugunya bernama Sasoe⁵¹.

Max Huber juga meyakini – berdasarkan laporan kunjungan Residen Manado tahun 1895 – bahwa kunjungan ini menandai kehadiran orang Eropa di pulau ini. Hal itu didasarkan pada keterangan penduduk setempat kepada Residen:

“....according to the natives, no ship had ever before that time visited the island, and no European had ever been there; the Residen himself was an opinion that he was the first colonial official who went to Palmas (or Miangas); also the commander of H.M.S. “Edi”, who patrolled the Celebes

50 Lihat *Reports of International Arbitral Awards (R.I.A.A.)*, Vol. XI, halaman 860.

51 Lihat *Reports of International Arbitral Awards (R.I.A.A.)*, Vol. XI, halaman 865.



Sea in 1898, mentions that “in man’s memory a steamer had never been at Miangas”⁵².

[... menurut keterangan penduduk setempat, tidak ada kapal yang berkunjung sebelumnya dan tidak ada orang Eropa yang ada di sana; Residen sendiri berpendapat bahwa dialah satu-satunya pejabat kolonial yang pertama berkunjung ke Miangas; juga komandan H.M.S. “Edi” yang berpatroli di Laut Sulawesi pada tahun 1989, menyatakan bahwa menurut ingatan warga setempat belum pernah ada kapal api yang berkunjung ke Miangas.]

Bukti perhatian Belanda terhadap warga pulau ini tampak tidak hanya karena adanya patroli kapal perang “Edi” yang berpatroli di kawasan Laut Sulawesi dan dua kali buang sauh di pulau ini, tetapi juga ketika bencana angin topan melanda pulau Miangas pada bulan Oktober 1904, pemerintah kolonial turun tangan membantu meringankan penderitaan penduduk. Hal mana dalam pemahaman arbitrator tunggal merupakan bukti adanya penyelenggaraan kekuasaan atas warga dan wilayah.

Sesudah melakukan kajian atas bukti-bukti serta argumen dari kedua belah pihak, Max Huber, menyimpulkan status objek sengketa sebagai berikut:

“(a). *The island of Palmas (or Miangas) is identical with an island designated by this or similar name, which has formed, at least since 1700, succesively a part of two of the native States of the Island of Sangi (Talautse Isle).*

(b). *These native States were from 1677 onwards connected with the East India Company, and thereby with the Netherlands, by contracts of suzerainty, which conferred upon the suzerain such powers as would justify his considering the vassal State as a part of his territory.*

(c). *Act characteristic of State authority exercised either by vassal State*

52 Lihat *Reports of International Arbitral Awards (R.I.A.A.)*, Vol. XI, halaman 865.

or by the suzerain Power in regard precisely to the island of Palmas (or Miangas) have been established as occurring at different epoch between 1700 – 1898, as well as the period between 1898 – 1906.

The act of indirect or direct display of Netherlands sovereignty at Palmas (or Miangas), especially in the 18th and early 19th centuries are not numerous, and there are considerable gaps in the evidence of continuing display. But apart from the consideration that the manifestations of sovereignty over a small and distant island inhabited only by natives, cannot be expected to be frequent, it is not necessary that the display of sovereignty should go back to a very far distant period. It may suffice that such display existed in 1898, and had already existed as continuous and peaceful before that date long enough to enable any Power who might have considered herself as possessing sovereignty over the island, or having a claim to sovereignty, to have, according to local condition, as reasonable possibility for ascertaining the existence of a state of things contrary to her real or alleged rights.

It is not necessary that the display of sovereignty should be established as having begun at precise epoch; it suffices that it had existed at the critical period preceding the year 1898. It is quite natural that the establishment of sovereignty may be the outcome of a slow evolution, of a progressive intensification of State control. This is particularly the case, if sovereignty is acquired by the establishment of the suzerainty of a colonial Power over a native State, as in regard to outlying possessions of such a vassal State.

Now, the evidence relating the period after the middle of the 19th century makes it clear that the Netherlands Indian Government considered the island distinctly as a part of its possessions and that, in the year immediately preceding 1898, an intensification of display of sovereignty took place⁵³.

[... a. Pulau Palmas atau Miangas identik dengan dengan sebuah pulau yang ditandai oleh nama yang sama yang telah terbentuk sekurang-kurangnya sejak 1700, berkesinambungan sebagai bagian dari dua 'satuan pemerintahan tradisional' (native states) kepulauan Sangihe dan Talaud.

53 Lihat Reports of International Arbitral Awards (R.I.A.A.), Vol. XI, halaman 867 - 868.



b. Dua 'satuan pemerintahan tradisional' ini sejak tahun 1677 dihubungkan dengan Kompeni Hindia Timur (VOC) dan kemudian Belanda di bawah perjanjian pengakuan kekuasaan raja yang merupakan vasal dari kekuasaan yang di atasnya (VOC & Belanda) atas wilayahnya.

c. Ciri dari kekuasaan 'satuan pemerintahan tradisional' ini yang dijalankan atau dipraktikkan baik oleh vasal atau pun oleh penguasa atas vassal ini tepatnya berkaitan dengan pulau Palmas (Miangas) telah ditetapkan sebagai terjadi pada periode (epoch) yang berbeda antara tahun 1700 – 1889, dan juga periode antara 1898 – 1906.

Ditunjukkannya tindakan langsung atau tidak langsung dari kedaulatan Belanda di Palmas (Miangas) terutama pada abad 18 dan permulaan abad ke 19 tidaklah banyak, dan terdapat kekosongan yang memadai dalam pelaksanaan penguasaannya. Namun, lepas dari pemikiran bahwa manifestasi atau perwujudan kedaulatan terhadap pulau kecil terpencil ini hanya didiami oleh orang asli, tidak dapat diharapkan menjadi sering, tidaklah perlu bahwa unjuk kekuasaan dan kedaulatan harus dikembalikan pada masa lampau. Cukuplah bahwa unjuk kedaulatan sedemikian terjadi pada tahun 1898, dan telah ada secara berkesinambungan dan berlangsung secara damai sebelumnya dimana hal itu cukup untuk memungkinkan setiap kekuatan apapun yang barangkali telah menganggap dirinya memiliki kedaulatan terhadap pulau itu, atau memiliki/mengklaim kedaulatan atasnya, untuk memiliki, menurut kondisi lokal, sebagai kemungkinan yang masuk akal untuk memastikan keberadaan hal-hal yang bertentangan dengan hak-haknya yang nyata.

Tidaklah perlu bahwa suatu unjuk-kedaulatan harus ditetapkan sebagai telah mulai pada periode yang tepat, sudah cukup bahwa unjuk-kedaulatan itu telah ada pada periode kritis mendahului tahun 1898. Adalah wajar bahwa penetapan kedaulatan mungkin sebagai akibat dari evolusi yang lamban dari suatu intensifikasi progresif dari pengawasan negara. Hal ini terutama, jika kedaulatan adalah dituntut oleh penetapan suzerainitas dari sebuah kekuatan kolonial terhadap suatu 'satuan pemerintahan tradisional' lokal, dan berkaitan dengan pemilikan-pemilikan wilayah yang terpencil dari suatu vassal sedemikian.

Saat ini, bukti yang menghubungkan periode sesudah pertengahan abad ke 19 membuat segalanya menjadi jelas bahwa Pemerintah Hindia Belanda menganggap pulau itu sebagai bagian dari miliknya dan bahwa pada permulaan tahun 1898, suatu unjuk-kedaulatan yang intensif terjadi..]

Perihal kehadiran kekuasaan Spanyol atas pulau yang disengketakan, Max Huber berkesimpulan:

"... Since the moment when Spaniards in withdrawing from the Moluccas in 1666, made express reservations as to the maintenance of their sovereign rights, up to the contestation made by the United States in 1906, no contestation or other action whatever or protest against the exercise of territorial rights by the Netherlands over the Talautse (Sangi) Isles and their dependencies (Miangas included) has been recorded. The peaceful character of the display of Netherlands sovereignty for the entire period to which the evidence concerning act of display relates (1700 – 1906) must be admitted.

There is moreover no evidence which would establish any act of display of sovereignty over the island by Spain and another Power, such as might counter-balance or annihilate the manifestations of Netherlands sovereignty. As to third Powers, the evidence submitted to the Tribunal does not disclose any trace of such action, at least from the middle of the 17th century onwards. These circumstances, together with the absence of any evidence of a conflict between Spanish and Netherlands authorities during more than two centuries as regards Palmas (or Miangas), are an indirect proof of the exclusive display of Netherlands sovereignty⁵⁴.

[... Sejak saat kapan orang-orang Spanyol menarik diri dari Maluku pada tahun 1666, menjadikannya sebagai penampungan dengan maksud untuk mempertahankan hak-hak kedaulatan mereka, hingga tiba pada saat perebutan dari Amerika Serikat di tahun 1906, tidak ada perebutan ataupun tindakan serta protes apapun terhadap penyelenggaraan hak-hak teritorial oleh orang-orang Belanda terhadap kepulauan Sangihe dan Talaud dan

54 Lihat *Reports of International Arbitral Awards (R.I.A.A.)*, Vol. XI, halaman 869.



tanah jajahannya termasuk Miangas yang tercatat atau terdokumentasi. Perlakuan damai yang diperlihatkan oleh orang-orang Belanda dalam kedaulatannya selama periode 1700 – 1906 harus diakui.

Selanjutnya, tidak terdapat bukti apapun menunjukkan adanya perwujudan kedaulatan oleh pihak Spanyol maupun pihak lainnya terhadap kepulauan tersebut, yang merupakan imbalan atau meniadakan unjuk-kedaulatan pihak Belanda. Begitu juga dengan pihak kekuatan ketiga, kenyataan yang diajukan ke pihak tribunal tidak mengungkap jejak apapun dari tindakan sedemikian, sekurang-kurangnya sejak pertengahan abad ke-17 dan sesudahnya. Keadaan-keadaan yang disebutkan di atas, termasuk tidak adanya bukti apapun tentang adanya konflik antara otoritas Spanyol dan Belanda selama lebih dari dua abad mengenai Palmas (Miangas) adalah bukti tidak langsung dari adanya penyelenggaraan kekuasaan yang eksklusif dari kedaulatan Belanda.]

Sangat beralasan catatan yang dikemukakan oleh Max Huber di atas. Dalam bab II telah dipaparkan bahwa para penguasa lokal di kepulauan Sangihe dan Talaud baik pada masa ketika Spanyol dan Portugis masih menguasai Maluku Utara maupun ketika mereka dikalahkan oleh VOC (Belanda) dan terusir dari Ternate, para rohaniwanlah yang lebih banyak berperan. Mereka tidak hanya membaptis para raja menjadi Katholik tetapi juga mendampingi mereka menyelenggarakan pemerintahannya seperti halnya yang berlangsung di kerajaan Siau. Di sisi lain, kekuasaan Spanyol dalam artian hadimnya pemegang otoritas apalagi pengakuan hukum atas kekuasaannya, seperti yang dilakukan oleh VOC (Belanda) yang mengikatnya dengan perjanjian (kontrak) antara mereka dengan penguasa lokal, tidak dipraktikkan oleh penguasa Spanyol⁵⁵.

55 H. Jacobs, SJ., 1992. "The Insular Kingdom of Siau under Portuguese and Spain Impact, 16th and 17th centuries" dalam B. Dahm (Ed.), *Region and Regional Development in the Malay-Indonesian World*. 6 European Colloquium on Indonesia and Malay Studies (ECIMS). Otto Harrassowitz-Wiesbaden.

Soal hubungan atau kedekatan (geografis) yang diajukan oleh pihak Amerika Serikat sebagai alasan kepemilikan, menurut Max Huber, hal itu tidak ada dasarnya dalam Hukum Internasional.

Kewenangan Max Huber seperti sudah dikemukakan dalam bagian awal sub-bab ini, diatur dalam Pasal 1 Perjanjian K~~husus~~^{Special} (Agreement) tanggal 23 Januari 1925 antara Pemerintah Amerika Serikat dengan Pemerintah Kerajaan Belanda, berikut:

... The United States of America and Her Majesty the Queen of the Netherlands hereby agree to refer the decision of the above-mentioned differences to the Permanent Court of Arbitration at The Hague. The arbitral tribunal shall consist of one arbitrator. The sole duty of the Arbitrator shall determine whether the Island of Palmas (or Miangas) in its entirety forms a part of territory belonging to the United States of America or of the Netherlands territory. The two Governments shall designate the Arbitrator from the members of the Permanent Court of Arbitration. If they shall be unable to agree on such designation, they shall unite in requesting the President of the Swiss Confederation to designate the Arbitrator”⁵⁶.

[... Amerika Serikat dan Paduka Ratu Kerajaan Belanda sepakat menyerahkan keputusan atas beda pendapat di atas kepada Mahkamah Arbitrase Internasional. Pengadilan arbitrase hanya seorang arbitrator. Satu-satunya tugas arbitrator adalah untuk memutuskan apakah pulau Palmas (atau Miangas) secara keseluruhannya adalah bagian dari wilayah Amerika Serikat atau bagian dari wilayah Belanda (Hindia-Belanda). Kedua pemerintah menunjuk arbitrator dari anggota Mahkamah Arbitrase. Jika mereka tidak setuju dengan penunjukan itu, mereka secara bersama mengajukannya kepada Presiden dari Konfederasi Swiss untuk menunjuk arbitrator..]

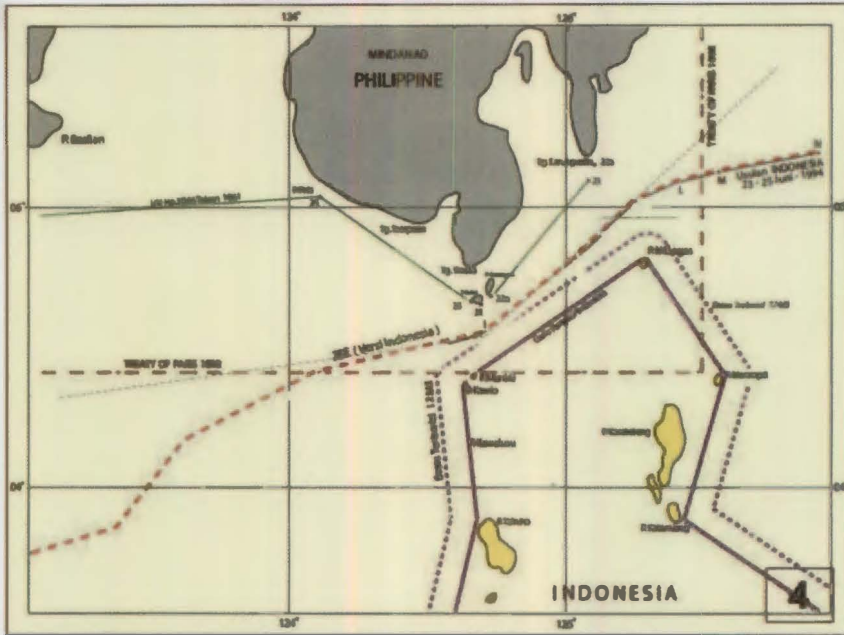
Satu-satunya tugas arbitrator adalah memutuskan apakah Pulau Palmas (atau Miangas) milik Amerika atau Belanda. Sesudah mempelajari

56 Lihat *Reports of International Arbitral Awards (R.I.A.A.)*, Vol. XI, halaman 831 - 832: “... Article I.





BATAS MARITIM RI - FILIPINA



Gambar 3.1 Peta Garis Perbatasan Bahari RI - Filipina

Sumber: Laporan Penelitian BPPK-Kemlu RI & Unsrat, 2010.

dokumen dari kedua belah pihak, sampailah ia pada keputusan bahwa: *The Island of Palmas (or Miangas) forms in its entirety a part of Netherlands territory*⁵⁷. [..Pulau Palmas atau Miangas seluruhnya adalah bagian dari wilayah Hindia-Belanda.] Pernyataan keputusan ini tercantum sebagai alinea terakhir dalam dokumen setebal 40 halaman dan ditandatangani di Den Haag, tanggal 4 April, 1928. Dokumen ini diserahkan kepada Mahkamah Arbitrase Internasional bersama dua buah salinannya yang juga ditandatangani oleh Max Huber dan diserahkan kepada kedua pihak yang bersilang pendapat tentang Miangas.

⁵⁷ Lihat *Reports of International Arbitral Awards (R.I.A.A.)*, Vol. XI, halaman 871.



Gambar 3.1. Lokasi Pulau Miangas di Provinsi Sumatera Utara

Ujung Merauh, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan. Pulau Miangas merupakan pulau kecil yang terletak di bagian utara Pulau Sumatra. Pulau ini memiliki luas wilayah sekitar 1.000 hektar. Pulau Miangas merupakan pulau yang strategis karena terletak di jalur perdagangan internasional. Pulau ini juga memiliki potensi wisata yang besar. Pulau Miangas memiliki pemandangan yang indah dengan pasir putih dan air biru. Pulau ini juga memiliki banyak pepohonan hijau. Pulau Miangas merupakan pulau yang sangat indah dan layak untuk dikunjungi. Pulau ini juga memiliki banyak fasilitas yang lengkap. Pulau Miangas merupakan pulau yang sangat strategis karena terletak di jalur perdagangan internasional. Pulau ini juga memiliki potensi wisata yang besar. Pulau Miangas memiliki pemandangan yang indah dengan pasir putih dan air biru. Pulau ini juga memiliki banyak pepohonan hijau. Pulau Miangas merupakan pulau yang sangat indah dan layak untuk dikunjungi. Pulau ini juga memiliki banyak fasilitas yang lengkap.



BAB 4

MIANGAS: DARI “PULAU PERBATASAN” KE “BERANDA DEPAN”



Dalam kurun waktu tahun 2000 hingga 2010, ada pergeseran pencitraan atas Miangas dan pulau-pulau lainnya di perbatasan. Jika semula disebut-sebut sebagai “pulau-pulau di perbatasan” dan dalam diskursus peraturan perundang-undangan dan rumusan strategi militer disebut sebagai “pulau terluar”, maka pada satu dekade terakhir ini diwacanakan dalam berbagai diskusi maupun tertuang dalam dokumen pembangunan, diangankan sebagai “beranda depan”. Ibarat beranda dalam struktur sebuah rumah, para perencana pembangunan “mengangankan” pulau-pulau diperbatasan menjadi tempat “menerima tamu” atau para tetangga melihat-lihat isi rumah seperti yang terpajang di setiap beranda rumah.

Sejauh mana keseriusan para perencana-pembangunan berusaha memoles perbatasan yang identik dengan keterisolasian serta keterbelakangan menjadi “beranda depan”, dalam bab ini akan dipaparkan hasil penelusuran dokumen dan pelaksanaan pembangunan di kawasan perbatasan dimana pulau Miangas berada. Pertama, tentang Perjanjian Lintas-Batas yang disepakati oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Filipina. Kedua, sekilas tentang dinamika warga Miangas dalam kurun waktu dua Orde Pemerintahan (Lama dan Baru), dan ketiga, wacana tentang Miangas dalam agenda pembangunan Pasca-Soeharto.

Mengawali bagian ini dengan melihat sekilas Perjanjian Lintas Batas atau yang lebih dikenal dengan *Border Crossing Agreement* disingkat BCA, dihubungkan dengan Pulau Miangas sangatlah beralasan. Upaya mengatur arus pelintas-batas dari kegiatan ilegal menjadi legal merupakan perlindungan pemerintah atas warganya. Pada aras hubungan bilateral, dalam isi perjanjian ini tampak jelas pengakuan pihak Pemerintah Republik Filipina terhadap Miangas sebagai milik Indonesia. Hal itu nyata dalam penentuan pulau ini – bersama dengan pulau Marore – sebagai pintu masuk-keluar baik orang maupun barang di kawasan yang telah disepakati sebagai daerah lintas-batas atau *border crossing area* di wilayah Indonesia. Pilihan Miangas sebagai salah satu pintu masuk-keluar bagi pelintas batas menandai kehadiran penyelenggara kekuasaan negara. Pemerintah kabupaten kepulauan Sangihe dan Talaud menunjuk dua orang pegawai sipil yang mengemban tugas sebagai Camat Lintas-Batas. Seorang bertugas di pulau Marore, dan seorang bertugas di pulau Miangas. Di setiap pulau yang ditentukan sebagai pos-masuk atau *check point harbor* disediakan fasilitas keimigrasian dan kepabeanan dari kedua belah pihak. Begitu pula halnya dengan fasilitas keamanan berupa pos marinir dari kedua belah pihak merupakan tindak lanjut kerjasama militer yang mengawal daerah perbatasan.

Selama dua orde pemerintahan semenjak kemerdekaan, pulau Miangas – seperti halnya pulau-pulau di daerah perbatasan dan terpencil – belum mendapat perhatian pemerintah terutama dalam hal penyediaan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan mereka. Hal seperti itu masih berlanjut hingga kini. Bedanya, jika pada masa dua orde pemerintahan, nama Miangas hanya dikenal sebagai salah satu pulau pintu keluar-masuk pelintas batas karena adanya perjanjian lintas batas antara kedua negara bertetangga, maka pada era pasca-Soeharto, daerah terpencil dan wilayah perbatasan mulai diwacanakan, terutama dengan pertimbangan keamanan. Perhatian serupa kemudian muncul



dari kalangan politisi. Tanpa diduga, pada tahun 1999, salah seorang warganya, John Lantaa, pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang lama mengabdikan dirinya sebagai Kepala Kecamatan Lintas Batas Miangas ditunjuk oleh pemerintah propinsi mewakili kelompok etnis minoritas Sangihe di Majelis Permusyawaratan Rakyat-RI¹. Memasuki tahun 2000-an, sejumlah pejabat pemerintah pusat dan propinsi mengagendakan kunjungan ke pulau yang terpencil di perbatasan, seiring dengan masuknya kawasan perbatasan dalam agenda pembangunan nasional².



Gambar 4.1

1 Lihat Sumber KPU dan *Tempo*, 12 Juni 1993.

2 Lihat Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005, khususnya Bab 26 (Pembangunan Wilayah).

4.1 “Border Crossing Agreement” Indonesia – Filipina (1956)

Ketika dua negara bertetangga – Indonesia dan Filipina – lepas dari penjajahan dan sebagai negara yang berdaulat menyatakan wilayah teritorialnya, keduanya mewarisi tinggalan-sejarah di wilayah perbatasan. Status keduanya sebagai negara berdaulat tidak secara langsung menghentikan dinamika pelintas-batas yang sudah mentradisi semenjak kawasan ini masih merupakan sebuah ruang-jejaring peniaga-melayu. Di daratan Mindanao dan khususnya di kedua pulau paling selatan yaitu pulau Balut dan pulau Sarangani ditemukan puluhan ribu orang Sangihe dan Talaud.

Warga keturunan Indonesia yang bermukim di daratan Mindanao khususnya, oleh Domingo M. Non, diklasifikasi atas: (1) warga keturunan pelaut & peniaga yang sudah menetap sejak beberapa abad lampau, terutama sejak kawasan ini (Mindanao dan pulau-pulau Sulu) ramai dilayari para peniaga. Mereka menetap terutama di pulau Balut dan pulau Sarangani, di daerah pesisir propinsi Glan dan propinsi Davao. Komunitas ini disebut “orang Sangil” telah dianggap sebagai salah satu suku-bangsa di Filipina³. Sebaran warga komunitas Sangil terbanyak berada di wilayah propinsi Davao. Pada sensus tahun 1932 tercatat orang

3 Lihat Domingo M. Non, 1988 (1995), “Impact of Development on Cultural Minorities in Mindanao”. MSU Research Journal. Tentang pengklasifikasian ini, bagian dari penelitian sedang dilakukannya, dan dikomunikasikan secara pribadi pada pertemuan 18 September 2003 sewaktu kami terundang sebagai pembicara di forum *The Historical & Cultural Basis of the Brunei-Indonesia-Malaysia-Philippines East Asean Growth Area (BIMP-EAGA) Isang Kumperensyang Internasyonal Tungo sa Pambansang Pagkakakilantan* (18 – 20 September 2003, Grand Regal Hotel, Davao City) diselenggarakan oleh University of the Philippines Manila, College of Arts and Sciences and University of the Philippines Mindanao, College of Humanities and Social Sciences in collaboration with Southeast Asian Studies Regional Exchange Program (SEASREP), National Commission for Culture and the Arts (NCCA), Teacher Education Council (TEC). Lihat juga tulisan Jesus T. Peralta, 2003, *Glimpses Peoples of the Philippines*. Anvil Publ. Inc. Pasig City, tentang status “orang Sangil dan bahasa Sangil”.



Sangil di propinsi ini, 1 347 jiwa dan di wilayah propinsi Glan, Buayan, Kiamba, Kling, Koronadal, Sarangani (daratan) masing-masing berada pada kisaran 200-an jiwa⁴. (2) warga keturunan Sangir atau "orang Sangir" yang datang sebagai pekerja di daerah-daerah perkebunan, perusahaan perikanan pada awal-awal tahun 1900-an. Mobilitas warga yang masuk dalam kategori dua ini berlangsung hingga tahun-tahun 1940-an. Umumnya para pendatang ini tidak memiliki kartu identitas dan atau pas jalan. Sebenarnya, dari sisi kebahasaan, tidak ada perbedaan antara "orang Sangil" yang sudah diakui sebagai salah satu komunitas etnis setempat (Filipina) dan "orang Sangir" yang datang kemudian. Mereka adalah penutur bahasa yang sama yakni bahasa Sangir atau Sangil, sebagaimana dibuktikan oleh Kenneth R Maryott dan Alice Maryott, dua linguist yang meneliti bahasa ini⁵. (3) warga yang dikategorikan sebagai "orang Marore" dan "orang Miangas". Kelompok ini adalah mereka yang datang di Mindanao setelah adanya Perjanjian Lintas-Batas. Disebut "orang Marore" dan "orang Miangas" mengacu pada kartu identitas yang mereka gunakan sewaktu masuk ke daratan Mindanao. Pemegang kartu Lalu-Lintas Perbatasan ini mempunyai izin selama 14 hari. Akan tetapi tidak sedikit yang alpa dan melewati batas waktu yang ditentukan sehingga kartu identitas mereka kadaluwarsa. Berbeda dengan para pendatang pencari kerja di tanah asing, tanpa topangan kerabatnya, warga Sangihe dan Talcud yang mencari nafkah di Mindanao umumnya tinggal dan ditampung oleh sanak keluarganya.

4 Lihat Shirzo Hayase, 2007, *Mindanao Ethnolinguistic Nations: Maguindanao, Sangir, and Bagobo Societies in East Maritime South-east Asia*. Ateneo de Manila University Press, halaman 216 & 218.

5 Lihat, Alice Maryott, 1963, "The nuclear predication in Sangir" dalam *The Philippines Journal of Sciences*, 92, 1, halaman 111 – 120; Kenneth R. Maryott 1978, "Sangire (or Sangil)" dalam *Studies in Philippines Linguistics*, Vol. 2 No. 2, halaman 145 – 161; dan sejumlah tulisan dari penulis tersebut (Lihat Kepustakaan).

Begitu pula sebaliknya, baik di pulau-pulau Sangihe dan Talaud maupun di daratan Sulawesi Utara, ditemukan ratusan pendatang dari Mindanao⁶. Keberadaan mereka – terutama warga komunitas Sangil maupun dari komunitas etnis lainnya di Mindanao – karena kunjungan keluarga, maupun ajakan sahabat mereka, warga Sangihe dan Talaud yang sewaktu berada di Mindanao, menginap bersama keluarga tersebut. Kelompok penduduk ini bepergian tanpa berbekalkan identitas diri. Gerak mobilitas penduduk yang sudah mentradisi ini tidak dapat dipandang lepas dari alasan warga bahwa mereka berada di wilayah yang sejak dulu merupakan satu kesatuan kultural⁷. Selain itu, di pulau-pulau perbatasan baik di wilayah Republik Filipina maupun di wilayah Republik Indonesia, baik pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda di Nusantara maupun pemerintahan kolonial Spanyol dan diteruskan oleh Amerika Serikat di Filipina, belum ada fasilitas keimigrasian dan kepabeanan kepada siapa para pelintas-batas ini harus melaporkan dirinya. Di pulau-pulau Sangihe dan Talaud masa lampau, setiap kerajaan kecil mempunyai *syahbandar*, yang diikuti oleh kehadiran *onderkoopman* yang ditugaskan oleh VOC, mereka lebih terpusat pada kegiatan pengumpulan pajak dari aktivitas perniagaan. Selain itu, setiap *syahbandar* lebih berurusan dengan masalah keamanan kerajaannya⁸.

Sebagai negara yang baru berdaulat pada paroh pertama abad ke- 20, pemerintah Indonesia dan Filipina sejak kemerdekaan belum sempat melakukan pertukaran kunjungan kenegaraan. Ketika Presiden Filipina Elpidio Quirino berinisiatif mengadakan konferensi bagi negara-

6 Lihat antara lain Evelyn Tan-Culamar (1989, 1998); Shinzo Hayase (2004); Shinzo Hayase, et.al. (1999); Aswatini Raharto (2000).

7 Realita historik seperti itu dibahas oleh Shinzo Hayase dalam beberapa tulisannya antara lain dalam bukunya berjudul *Mindanao Ethnohistory Beyond Nations, Maguindanao, Sangir, and Bagobo Societies in East Maritime Southeast Asia*. Ateneo de Manila University Press, 2007.

8 Lihat A.J. Ulaen, 2003. halaman 47 – 80.

negara Asia yang baru pada tanggal 26 sampai 30 Mei 1950, di Baguio, Filipina dan menghasilkan kesepakatan para peserta agar memperbanyak konsultasi diplomatik antar-bangsa Asia⁹, sejak itu mulai terjalin kontak-kontak diplomatik. Upaya itu diawali oleh konsultasi antara delegasi Departemen Luar Negeri Indonesia dengan delegasi Departemen Luar Negeri Filipina yang membahas secara intensif soal perbatasan Indonesia – Filipina yang dilaksanakan di Manila bulan Mei 1954¹⁰.

Inisiatif Perdana Menteri Indonesia Dr. Ali Sastroamidjojo mengadakan konferensi Asia Afrika yang diselenggarakan di Bandung 18 – 24 April 1955, dengan hasil kesepakatan memperkuat kerjasama ekonomi, budaya dan sebagainya¹¹; semakin memperkuat komitmen pihak pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik Filipina dalam membahas masalah di kawasan perbatasan, terutama persoalan warga dan aktivitas lintas-batas. Persoalan ‘tapal-batas’ kedua negara kala itu belum dipandang penting, apalagi, sebagai pewaris wilayah Hindia Belanda, kala itu kawasan laut masih dilihat dengan cara pandang yang berbeda dibandingkan dengan cara pandang setelah adanya Deklarasi Juanda pada tahun 1957.

Ketika Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung, delegasi Filipina yang dipimpin oleh Jenderal Carlos Romulo berinisiatif melakukan pembicaraan awal dengan pihak delegasi Indonesia. Hasilnya adalah kesepakatan melakukan pertemuan bilateral. Agendanya adalah membicarakan keberadaan baik warga Indonesia yang berada di daratan Mindanao dan pulau sekitarnya, maupun warga Filipina yang berada di kepulauan

9 Lihat Sonia M. Zaide (1994:358-359); Arthur Conte, 1965 *Bandoung, tournant de L'Histoire* (18 Avril 1955) halaman 26.

10 Diskusi ini dipimpin oleh Mauro Calingo dari Filipina. Lihat Salindeho & Sombawidlo, *Kawasan Sangihe – Talaud – Sitara*. 2008:210.

11 Arthur Conte, 1965. *Bandoung, tournant de L'Histoire* (18 Avril 1955) halaman 309 - 316.

Sangihe dan Talaud, dan daerah lainnya di Sulawesi Utara¹².

Pada awal Juli 1956, delegasi pemerintah Republik Filipina dan delegasi pemerintah Republik Indonesia mengadakan pertemuan di Jakarta. Pemerintah kedua negara ini menyadari bahwa dalam menjalankan pemerintahannya, keduanya menghadapi kenyataan di daerah perbatasan sebagai berikut:

1. Sejumlah orang Indonesia yang berdiam tanpa izin di daerah Filipina, dan sejumlah orang Filipina yang berdiam tanpa izin di daerah Indonesia;
2. Orang-orang Indonesia, penduduk daerah Indonesia di sebelah utara yang mondar-mandir mengunjungi Filipina tanpa izin; begitu pula sebaliknya, penduduk daerah Filipina di sebelah selatan yang mondar-mandir mengunjungi Indonesia tanpa izin;
3. Mondar-mandirnya warganegara dari kedua belah pihak di daerah perbatasan itu telah berjalan sejak lama dan telah mentradisi;
4. Dipandang dari sudut keimigrasian, kenyataan tersebut menyalahi ketentuan dan bersifat ilegal, dan tidak mendapat perlindungan hukum;
5. Pulau-pulau di perbatasan ini secara ekonomis saling memenuhi kebutuhan dan mengadakan kunjungan-kunjungan kekeluargaan dan berziarah ke makam keluarganya;
6. Kedekatan geografislah yang memudahkan penduduk saling memenuhi kebutuhan ekonominya;
7. Kedua pihak berkehendak menjalankan peraturan keimigrasian. Namun, hal itu akan menyulitkan warga, dan sangat tidak bijaksana jika kedua pihak menerapkan peraturan tersebut tanpa memikirkan warganya;

12 Arthur Conte, 1965.



8. Terdorong oleh semangat dari Perjanjian Persahabatan Indonesia – Filipina, pula oleh semangat Konperensi Asia Afrika, keduanya bersepakat untuk mengadakan ketentuan-ketentuan yang sifatnya mempermudah warganegara kedua pihak¹³.

Alasan-alasan tersebut di atas menjadi dasar dokumen perjanjian mengenai warga negara yang berada secara tidak sah di daerah Republik Indonesia dan Republik Filipina yang ditandatangani pada tanggal 4 Juli 1956. Perjanjian ini dapat dipilah menjadi: (1) penyelesaian soal berdiamnya warganegara masing-masing di wilayah pihak yang lain secara tidak sah; dan (2) memecahkan soal mondar-mandirnya warganegara masing-masing ke wilayah pihak yang lain¹⁴. Pejabat yang menandatangani perjanjian dengan sebutan, *Agreement on Immigration Between the Republic of the Philippines and the Republic of Indonesia*, di pihak Indonesia adalah Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Mr. Soehardjo Wirjopranoto dan di pihak Filipina, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Jose Fuentebella. Di pihak Indonesia, persetujuan ini dituangkan menjadi Undang-undang nomor 77 tahun 1957 dan dikenal sebagai Undang-Undang Persetujuan Mengenai Warga Negara yang Berada Secara Tidak Sah di Daerah Republik Indonesia dan Republik Filipina¹⁵; dan di pihak Filipina disahkan sebagai Resolusi Senat No. 94, 23 Mei 1957 dengan nama dokumen *Resolution Expressing the Concurrence to and Approval of the Senate of the Philippines of the Agreement Between the Republic of the Philippines and the Republic of Indonesia on Immigration*. Perjanjian ini mengatur antara lain, alasan serta persyaratan

13 Lihat dokumen perjanjian tersebut dan Memori penjelasan tentang Undang-undang tersebut menjadi Undang-undang (No. 77 tahun 1957).

14 Lihat: Lembaran Negara R.I. Nomor 167, 1957 dan Undang-Undang Nomor 77 tahun 1957. Disahkan di Jakarta tanggal 19 Desember 1957 oleh Presiden R.I. Soekarno; diundangkan pada tanggal 23 Desember 1957 oleh Menteri Kehakiman G.A. Maengkom dan Menteri Luar Negeri Subandrio.

15 Lihat: Lembaran Negara R.I. Nomor 167, 1957 dan Undang-Undang Nomor 77 tahun 1957.

bagi pelintas-batas. Pelintas batas diizinkan selama alasannya adalah kepentingan perniagaan, kunjungan keluarga, kunjungan melaksanakan ibadah keagamaan dan kunjungan wisata. Setiap pelintas batas harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan kartu lintas batas. Syaratnya, pemohon sudah bertempat tinggal di wilayah perbatasan minimal lima (5) tahun sebelum tanggal yang dicantumkan dalam surat permohonan. Membayar biaya administrasi sebesar 10 Pesos atau Rp. 15,-. Masa berlaku kartu lintas batas adalah 59 hari. Wilayah yang diatur dalam perjanjian yang disebut di atas meliputi kepulauan Sangihe dan Talaud (Sulawesi Utara) dan Nunukan (Kalimantan Utara) di wilayah Indonesia, sedangkan di wilayah Filipina meliputi pulau-pulau Balut dan Sarangani, yang berbatasan dengan wilayah Sulawesi Utara; pulau-pulau Sibutu, Simunul dan Manuk Manka yang berbatasan dengan Kalimantan Timur. Dalam perjanjian ini pula diatur persyaratan bagi pelintas-batas serta alasan bepergian.

Setelah melalui beberapa hasil amatan dari kedua pihak dan rangkaian pertemuan di Manado dan Tarakan akhir tahun 1963, di Davao kemudian disusul dengan penandatanganan memorandum bersama tanggal 30 Mei 1964 di Jolo, kedua pihak memandang perlu menindaklanjuti perjanjian pertama (4 Juli 1956) dengan sebuah dokumen yang lebih rinci, yang dikenal dengan sebutan *Joint Directives and Guidelines on the Implementation of the Immigration Agreement on Repatriation and Border Crossing Arrangement Between Republic of Indonesia and the Republic of the Philippines*. Dokumen ini ditandatangani di Manila pada tanggal 16 September 1965 oleh Jusuf Ronodipuro, Menteri-Counselor Kedutaan Besar Republik Indonesia dan Leon T. Garcia, Konsul Jenderal Republik Filipina. Keduanya juga merangkap sebagai ketua tim dari kedua pihak. Isi perjanjian ini selain lebih rinci dibandingkan dengan perjanjian sebelumnya, juga telah menetapkan empat buah pos keluar-masuk yakni Marore dan Miangas di pihak Indonesia, Mabila dan Balut



di pihak Filipina¹⁶.

Berbeda dengan warga Filipina yang berada di wilayah Indonesia yang kembali secara spontan setelah adanya sosialisasi perjanjian tersebut dan memilih untuk tetap berkunjung lewat prosedur yang disepakati¹⁷, pemerintah Indonesia harus melakukan repatriasi atau pemulangan penduduk ke daerah asalnya setelah mereka dilegalisasi oleh pemerintah Filipina. Upaya repatriasi ini hanya mampu memulangkan warga sebanyak 3216 jiwa dari 6000-an jiwa selama periode 1963, 1964, dan 1965. Tahap pertama pemulangan warga, tahun 1963, menggunakan KM Morotai sebanyak 1.501 jiwa. Tahap kedua, tahun 1964, menggunakan KM Cakalang dan KM Misseul berjumlah 333 jiwa. Tahap ketiga, tahun 1965, menggunakan KM Tobelo meliputi 1.382 jiwa¹⁸.

Kendala berkurangnya jumlah warga yang dilegalisasi antara lain adalah persoalan identitas diri yang dimiliki warga sebagai persyaratan legalisasi¹⁹. Hal ini dijumpai di kalangan warga yang sudah lama menetap atau lahir di wilayah Filipina, dan dianggap sebagai warga komunitas etnis Sangil. Mereka tidak lagi dianggap sebagai “pendatang haram”

16 Lihat dokumen *Joint Directives and Guidelines on the Implementation of the Immigration Agreement on Repatriation and Border Crossing Arrangement Between Republic of Indonesia and the Republic of the Philippines*.

17 Warga Filipina yang menetap di wilayah Indonesia (kepulauan Sangihe dan Talaud) kurang lebih berjumlah 200 jiwa. Lihat Sri Suharjo, dkk. 2002. *Border Crossing Agreement Unit Marore*. Laporan Penelitian, Nalai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Manado.

18 Dokumen Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud. Data tersebut juga dicantumkan dalam “Pecok-pokok Pikiran Peninjauan Kembali Border Crossing Agreement Indonesia-Filipina dalam rangka Pelaksanaan Border Trade Agreement di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud” Tahunan, 1 Maret 2000.

19 Pada tahap pertama, pemerintah Indonesia dapat merepatriasi 1.501 jiwa pada tahun 1963. Tahun berikutnya (1964) 333 jiwa; dan tahun 1965, 1.382 jiwa. Lihat Sri Suharjo, dkk. 2002. *Border Crossing Agreement Unit Marore*. Laporan Penelitian, Nalai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Manado.

sebagaimana berita media²⁰. Akan tetapi di antara mereka masih ada yang mengaku sebagai warga Sangihe. Persoalan lain menyangkut warga yang sudah kawin-mawin dengan penduduk lokal. Bagi yang perkawinannya tercatat di arsip pemerintah setempat, tidak menjadi masalah baik menyangkut status kewarganegaraan bagi keduanya, terlebih pula bagi keturunan mereka. Namun, ada warga yang hidup bersama dan tidak menikah secara resmi sehingga perkawinannya tidak tercatat baik di Catatan Sipil maupun Akte Gereja. Hal ini menyulitkan keturunannya untuk mendapatkan kartu identitas diri. Warga yang tidak memiliki kartu identitas diri, dalam catatan pemerintah Filipina dikategorikan sebagai *Undocumented Citizen*²¹. Media di Indonesia akhir-akhir ini menggunakan sebutan "warga SaPi" singkatan dari Sangir Philipina, bagi kelompok ini²².

Setelah proses repatriasi berhasil memulangkan warga dalam tiga tahapan di atas, pada periode 1983 hingga 1991 terjadi mobilitas warga yang kembali ke Indonesia. Menurut dokumen dan laporan Kepala Kecamatan Lintas-Batas Marore, pada periode ini warga yang kembali melalui pintu masuk Marore sejumlah 2.833 jiwa. Kurang lebih 53 % di antara mereka menetap di tanah leluhurnya (pulau Sangihe) dan 44 % memilih menetap di Halmahera²³. Di tempatnya yang baru, yaitu pulau Halmahera, mereka menyebar di beberapa tempat seperti di desa atau kampung Tutumaloleo, Salimuli, Jere dan Saluta di kecamatan Galela;

20 Lihat penggunaan istilah tersebut oleh Ardian Taufik Gesuri & Waspada Santing: "Kembalinya di Anak Haram" dalam *Tempo online*, 12 Juni 1993.

21 Lihat, Shinzo Hayase, 2001, *Historico-Geographical World of Sangir: An Ethno-History of East Maritime Southeast Asia*. Paper for UGAT (The Anthropological Association of the Philippines) conference, 22 – 23 Oktober, 2001, University of the Philippines.

22 *Kompas*, Jumat, 21 Agustus 2009. Edna Caroline Pattisina dan Jean Rizal Layuck, "Miangas nun Jauh di Mata".

23 Lihat Andris Aambong, 1991. *Selayang Pandang dan Hari Esok penduduk dan wilayah Border Crossing Agreement*. Laporan Camat Lintas Batas Indonesia – Filipina, BCA Unit Marore.



kampung Akelaha di kecamatan Jailolo; kampung Akelamo, Gumi, dan Guruapin di kecamatan Oba; kampung Puli, Puankakaraino, Heletotor, dan Tumares di kecamatan Wasilei. Mereka memilih tempat tinggalnya masing-masing melalui keberadaan kerabat dan sahabat mereka yang sudah menetap lebih dahulu di Halmahera. Keadaan seperti itu disebabkan oleh kedatangan mereka di tempat baru ini bukan difasilitasi oleh pemerintah seperti halnya program *resettlement* atau pemukiman penduduk maupun program transmigrasi, tetapi upaya mandiri warga yang memilih kembali ke wilayah Indonesia. Kelompok ini umumnya memiliki modal sendiri²⁴.

Tahun 2000, sebagian dari warga repatriasi ini kembali – mengungsi ke tempat perantauan mereka di Filipina – akibat kerusuhan yang melanda wilayah ini²⁵. Sebagian warga yang masih menetap di Maluku Utara hingga kini tetap menjaga hubungan baik dengan anggota keluarga mereka di daratan Mindanao maupun di pulau Balut dan Sarangani. Seperti sudah dikemukakan di atas bahwa ada kalangan media yang menyebutnya sebagai komunitas “SaPi”, warga komunitas ini terbilang khas dalam artian budaya²⁶. Mereka umumnya penutur lebih dari satu bahasa atau komunitas multilingual. Jika ayahnya berasal dari komunitas etnis Sangir dan Talaud, dalam komunikasi sehari-hari anak-anak ini akan bertutur-sapa dalam bahasa Sangir atau bahasa Talaud dan bahasa

24 Tentang keberadaan warga repatriasi di Halmahera, dapat pula dibaca dalam tulisan Aswatini Raharto, 2000, “Return migration among the Sangirese: Life and adjustment in the homeland”. Dalam *Population Movement in Southeast Asia: Changing Identities and Strategies for Survival*, Edited by Abe Ken-ichi dan Ishii Masako. JCAS Symposium Series 10. The Japan Center for Area Studies, National Museum of Ethnology, Osaka, halaman 239–253.

25 Komunikasi pribadi dengan beberapa warga repatriasi yang ketemu di Wasilei, sewaktu penulis dan Sandiah melakukan penelitian di Halmahera, Januari–Februari 2010, disponsori oleh PT Environmental Resources Management Indonesia, Jakarta, bekerja sama dengan Maritime and Indigenous Culture Research Center, Manado.

26 *Kompas*, Minggu, 30 Agustus 2009. Iwan Setiawan/Agung Setyahadi: “Melaut di Indonesia, Sekolah di Filipina.

Melayu. Dengan ibunya yang Filipina, selain bercakap-cakap dalam bahasa Tagalog atau Visaya, juga menggunakan bahasa daerah asal ibunya. Karena sebagian dari mereka disekolahkan di General Santos atau kota lainnya di Mindanao Selatan, mereka pun fasih berbahasa Inggris meskipun tingkat pendidikannya baru setara Sekolah Dasar²⁷.



Gambar 4.2
Kantor *Border Crossing Station (Indonesian Team)*
dan Pos Angkatan Laut Miangas

Kembali ke pembicaraan awal, yakni soal perjanjian lintas batas. Perjanjian yang ditandatangani tanggal 16 September 1965 kemudian direvisi dan ditandatangani di Manado tanggal 30 Mei 1974, ketika Presiden Soeharto dan Presiden Marcos mengadakan pertemuan di ibukota propinsi Sulawesi Utara ini. Dalam pertemuan itu, yang menjadi salah satu agendanya adalah penandatanganan dokumen, *Revised Agreement*

27 Selain hasil temuan penulis, kesaksian serupa dapat dibaca dalam artikel "Melaut di Indonesia, Sekolah di Filipina", Kompas, Minggu, 30 Agustus 2009.



on Border Crossing Between the Republic of Indonesia and the Republic of the Philippines (Revisi Perjanjian Lintas Batas antara Republik Indonesia dan Republik Filipina) Dibandingkan dengan perjanjian sebelumnya, salah satu tambahan dalam dokumen ini adalah pencantuman wilayah sub-distrik Tarakan dan Tarakan sebagai pos keluar-masuk wilayah lintas



Gambar 4.3
Pos Border Crossing Station (The Philippine Team)
sekaligus pos marinir Filipina di Miangas

batas. Alasan kunjungan yang dihilangkan adalah alasan niaga, karena bersamaan dengan itu juga dibicarakan perjanjian dagang lintas-batas. Begitu pula halnya dengan persyaratan bagi pemohon kartu lintas batas dikurangi menjadi minimal tiga (3) tahun lamanya bermukim di daerah perbatasan, dan masa menetap di wilayah yang dituju tidak lebih dari sebulan (30 hari) dan bagi awak kapal selama 15 hari. Setahun kemudian, dilakukan peninjauan kembali perjanjian ini atau tepatnya penambahan butir perjanjian yang mengatur patroli perbatasan oleh aparat keamanan kedua belah pihak secara bersama.

Dokumen revisi Perjanjian Lintas Batas ditandatangani di Jakarta tanggal 11 Maret 1975, sedangkan Perjanjian Patroli Bersama ditandatangani di Quezon City²⁸. Kedua perjanjian ini berupa satu dokumen dikenal dengan sebutan, *Joint Implementation of the Border Patrol Agreement and Border Crossing Agreement Between the Government of the Republic of the Philippines and the Republic of Indonesia*. Selain perjanjian tersebut di atas, perlu pula dicatat adalah Persetujuan Perdagangan Daerah Perbatasan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Filipina yang ditandatangani baik pada tanggal 29 Juli 1971 maupun tanggal 8 Agustus 1974²⁹.

Rangkaian perjanjian di atas menghadirkan sejumlah fasilitas di pulau Miangas, seperti fasilitas keimigrasian dan Kepabeanan, Pos Keamanan (Polisi, TNI-AD, Marinir) ditambah pula dengan perwakilan dari pihak imigrasi dan Marinir pihak Filipina. Personilnya pun secara bertahap bergantian bertugas di pulau perbatasan ini³⁰. Bagi warga Miangas dan pulau-pulau yang termasuk di wilayah yang ditentukan dalam perjanjian ini atau *border crossing area*, mereka boleh berkunjung ke kawasan yang sama di wilayah Filipina (pulau Balut, pulau Sarangani, pulau Olanivan, Tanjung San Agustin dan sekitarnya melalui pos Tibanban untuk tujuan kunjungan keluarga, tamasya, ibadah keagamaan dan pertandingan. Mereka boleh membawa barang bawaan tidak melebihi 250 US \$ setiap orang, atau jika bepergian dengan kapal dan perahu, muatannya

28 Pihak Indonesia yang menandatangani *Border Patrol Agreement* adalah Marsekal Madya TNI Soedarmono, Kepala Staf Operasi Dephankam (Indonesia) dan Rear Admiral Romulo Espaldon, the Deputy Chief of Staff, AFP and Commander, Southwest Command.

29 Persetujuan Perdagangan Daerah Perbatasan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Filipino yang ditandatangani tanggal 8 Agustus 1974, ditandatangani oleh Radius Prawiro selaku Menteri Perdagangan dan Suhadi Mangkusuwondo selaku Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri di pihak Indonesia, dan di pihak Filipina, Troadio T. Quiazon, JR, selaku Menteri Perdagangan dan Modesto Farolan, Duta Besar Filipina untuk Indonesia.

30 Beberapa di antara petugas marinir mendapat pasangan hidup di Miangas.



tidak melebihi 200 meter kubik. Warga yang diizinkan sebagai pelintas-batas adalah mereka yang sudah menetap di pulau-pulau yang berada di kawasan ini minimal 3 tahun. Dengan mengantongi Kartu Pelintas Batas, atau *Kard ng Pagbagtas sa Hanggahan* (*Border Crossing Card*) yang dikeluarkan oleh Pejabat Lalu-Lintas Perbatasan, si pemegang kartu ini boleh menetap selama 30 hari. Begitu sebaliknya, ketentuan di atas berlaku pula bagi warga Filipina yang berada di wilayah lintas-batas yang berkunjung ke wilayah Indonesia³¹

Pelaksanaan Perjanjian Lintas-Batas yang direvisi dan ditandatangani tahun 1974, kemudian mendapat kritikan terutama dari penyelenggara administrasi pemerintahan di Kabupaten Sangihe dan Talaud. Ada tiga hal utama yang disoroti, terutama oleh badan legislatif di daerah ini, yakni: (1) ada kelemahan dalam Peraturan Pelaksanaan BCA; (2) tentang aparat pos lintas-batas; dan (3) luas wilayah BCA yang dikurangi. Tentang kelemahan dalam Peraturan Pelaksanaan, hal yang dikritik adalah tidak diikutsertakannya Bupati Kepulauan Sangihe dan Talaud dalam keanggotaan Komisi Perbatasan Indonesia-Filipina yang dibentuk dengan Surat Keputusan Menhankam Pangab Nomor: SKEP/55/IX/1975 tanggal 25 September 1975 tentang Pembentukan Komisi Perbatasan (*Border Committe*) Indonesia-Philipina. Hal ini menurut amatan legislatif (DPRD Kabupaten Sangihe dan Talaud) "... amat berpengaruh pada pelaksanaan pengawasan, koordinasi dan bantuan Pemerintah Daerah terhadap kesatuan yang bertugas pada Pos Lintas-Batas. Sekaligus, "tidak memberi landasan hukum bagi bupati/kepala daerah untuk mendorong dan memberdayakan pelaksanaan *Border Trade Agreement*"³². Soal

31 Lihat dokumen *Revised Agreement on Border Crossing Between the Republic of Indonesia and the Republic of the Philippines*.

32 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud: "Pokok-Pokok Pikiran Peninjauan Kembali *Border Crossing Agreement* Indonesia-Philipina dalam rangka Pelaksanaan *Border Trade Agreement* di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud" Tahun, Maret 2000.

aparatus, yang disorot adalah "... praktik pemerasan kepada para pelintas batas yang memanfaatkan peluang BTA (Border Trade Agreement) dengan pengenaan Tax yang melebihi ketentuan untuk barang yang dibawa ke luar ataupun masuk wilayah Indonesia...." dipandang sebagai pemicu atau pendorong "... terjadinya pemasukan barang secara ilegal/penyelundupan barang dari dan ke Philipina tanpa melalui fasilitas Pos Lintas Batas..."³³ Tentang penciutan wilayah yang diatur dalam Surat Keputusan Direktorat Jenderal Imigrasi nomor: 399/I-DIR/1975 tanggal 11 September 1975 tentang Ketentuan-ketentuan Teknis Keimigrasian dan Persetujuan Lintas Batas, yang hanya terbatas pada tiga (3) kepulauan kecil, yakni pulau-pulau Nanusa, pulau-pulau Kawio dan pulau-pulau Toade (Bukide). Kritik terakhir dilontarkan oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe, W. Salindeho bersama Sombowadile, yang menyatakan antara lain bahwa perjanjian di atas telah memberlakukan pembatasan di daerah perbatasan yang penuh keterbatasan³⁴.

Meskipun pulau Miangas sudah ditentukan sebagai salah satu pintu keluar-masuk pelintas-batas (*check point harbor*), namun dibandingkan dengan pos Marore, yang disebut terakhir inilah yang lebih ramai. Sebagai gambaran, catatan yang ada di Kantor Camat BCA Unit Marore merekam sebanyak 448 jiwa WNI penduduk Indonesia; 245 jiwa WNI penduduk Filipina; 240 WN Filipina dengan status penumpang; 108 WNI awak kapal pemilik KTP Indonesia; 63 WNI awak kapal pemegang kartu identitas Filipina; dan 93 WN Filipina, yang tercatat keluar-masuk lewat Pos Marore selama tahun 2001. Tahun 2005, catatannya lebih rinci. Sebanyak 395 WNI; 310 WNI penduduk Filipina; 502 WN Filipina, pelintas-masuk ke wilayah Indonesia lewat Pos Marore. Sebanyak 591

33 Loc.cit

34 Winsulangi Salindeho & Pitres Sombowadile, 2008. *Kawasan Sangihe – Talaud – Sitaro: Daerah Perbatasan, Keterbatasan, Pembatasan*. Puspada, Jogja.

WNI; 284 WNI penduduk Filipina; dan 492 WN Filipina, pelintas-keluar lewat Pos Marore³⁵. Di Miangas, menurut keterangan lisan yang diperoleh dari Kepala Kecamatan Khusus Miangas, sewaktu kunjungan penelitian penulis pada bulan Mei 2007, bertepatan dengan peresmian Kecamatan Khusus, Miangas – karena catatan seperti itu tidak ditemukan – baik tahun 2001 maupun tahun 2005, setiap tahunnya tidak mencapai angka 100 orang. Keterangan serupa juga diperoleh dari petugas imigrasi setempat.

Para pelintas batas baik dari pulau-pulau Talaud, bahkan Nanusa sekali pun, lebih memilih melewati pos Marore dibandingkan dengan pos Miangas dengan alasan jarak dan waktu tempuh serta keadaan arus laut. Tujuan para pelintas batas ini umumnya di kota General Santos melewati pulau Sarangani. Jika pelintas batas adalah penduduk kepulauan Talaud dan harus melewati pos Pulau Miangas, selisih waktu tempuh sekitar tiga jam jika dibandingkan dengan rute pelayaran lewat pos Marore. Ini berarti mereka harus memboroskan bahan bakar untuk tiga jam berlayar.

Sejak masa berjayanya perniagaan di Zona Sulu (the Sulu Zone)³⁶ pada abad ke- 18 hingga abad ke- 19, pulau Sarangani – sebagai salah satu pelabuhan niaga – paling dekat dengan pulau-pulau Sangihe dan Talaud. Demikian pula halnya ketika pemerintah kolonial Amerika Serikat mengembangkan perkebunan – terutama perkebunan kelapa di Mindanao Selatan terutama sejak tahun 1917, atau sejak tahun 1990-an ketika perhatian pemerintah pusat membangun pulau Mindanao, daerah ini dikenal dengan sebutan kawasan SOCSARGEN, akronim dari South Cotabato, Sarangani, and General Santos³⁷; para pelintas-batas dari

35 Data Kantor Kecamatan Lintas Batas Marore.

36 James Francis Warren, 1981.

37 Lihat, Domingo M. Non, 1995, "Impact of Development on Cultural Minorities in Mindanao" dalam *MSU Research Journal*, Official Publication of the Research and Development Center MSU (Mindanao State University) General Santos City. Vol. 1, No.1, halaman 70 – 79.

pulau-pulau Sangihe dan Talaud yang menjual jasa di perkebunan kelapa serta perusahaan perikanan menggunakan jalur Marore – Balut/Sarangani sebagai pintu masuk ke daratan Mindanao. Tidaklah mengherankan kalau konsentrasi warga asal Sangihe dan Talaud lebih banyak ditemukan di pulau Balut, pulau Sarangani dan pesisir selatan daratan Mindanao.

Daerah tenggara-timur Mindanao, yaitu Propinsi Davao Oriental dengan ibukotanya Mati, lebih jauh jika ditempuh lewat pulau Miangas, sehingga kurang menarik bagi pencari kerja. Warga Miangas yang pernah ke wilayah sekitar tanjung San Agustin (Cape San Agustin) pada periode 1940 – 1960-an lebih banyak melakukan pertukaran barang (*barter*) bahan makanan. Mereka membawa hasil laut berupa ikan kering, daging tuna yang sudah diolah menjadi kayu dan tikar anyaman dari daun pandan. Berbeda dengan tiga propinsi yaitu Davao del Sur, Sarangani dan General Santos yang jauh lebih maju dan merupakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, terutama perkebunan dan perikanan yang memerlukan tenaga kerja, propinsi Davao Oriental kurang menarik bagi para pelintas-batas yang mencari pekerjaan atau berniaga.

Warga Miangas yang pernah bekerja di daratan Mindanao, baik sebagai nelayan maupun pekerja kasar mula-mula terpusat di perusahaan ikan Jepang di Davao sejak tahun 1933-an³⁸. Di perusahaan ikan ini, para pekerja asal Miangas mendapat pengalaman mengolah ikan tuna menjadi ikan kayu, kegiatan yang mereka tekuni setelah kembali ke kampung halaman mereka. Daging ikan tuna yang sudah diproses menjadi *ikan kayu* ini menjadi barang dagangan yang mereka bawa ke pulau Karakelang dan menjadi alat tukar untuk bahan makanan seperti padi, jagung, dan umbi-umbian. Sepuluh tahun terakhir, makin sedikit

38 Lihat, Alex J. Ulaen, 1998. The Japan Fishing activity in North Sulawesi, Indonesia: Past and Present. Research Report submitted to the Sumitomo Foundation; dan John G. Butcher: *The Closing of the Frontier: A History of the Marine Fisheries of Southeast Asia c. 1850 – 2000*. KITLV Press, 2004, halaman 157 – 159.



warga Miangas yang bekerja di perusahaan perikanan Filipina. Enos Nangori barangkali tinggal satu-satunya pelaut yang bekerja di kapal ikan Dolly 15. Ia bekerja di sana sejak tahun 1992. Ia bisa diterima karena kemampuannya berkomunikasi dalam bahasa Cebuano³⁹.

4.2 Dinamika Warga Miangas di Perbatasan dalam Dua Orde Pemerintahan

Sejak kemerdekaan, secara administratif pulau Miangas merupakan bagian dari wilayah *Kejoguguan Nanusa*. Ketika wilayah *kejoguguan* beralih status menjadi wilayah Kecamatan Nanusa, apalagi dengan hadirnya prasarana pendidikan mulai dari tingkat dasar dan tingkatan lanjutan pertama, orientasi warga Miangas untuk menyekolahkan anak-anak mereka baik di pulau Karatung sebagai pusat kecamatan maupun di Lirung dan Beo (Talaud) tempat dimana tersedia saran dan prasarana pendidikan tingkat lanjutan pertama, semakin meningkat. Keuletan warga Miangas menyekolahkan anak-anak mereka tercermin dari cara hidup mereka kala itu. Ada yang mendirikan pondok serta menjaga anak-anak mereka secara bergantian. Baik di Lirung maupun di Beo, mereka mendirikan pondok-pondok darurat di sekitar pesisir pantai. Selama menjaga anak-anaknya bersekolah, orang tua laki-laki meminjam lahan dari warga setempat. Mereka menanaminya dengan umbi-umbian sebagai stok makanan untuk anak-anaknya. Ada juga yang menjual jasa pertukangan. Beraktivitas sebagai nelayan merupakan pilihan utama. Dari hasil melaut, mereka tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan untuk lauk, tetapi dapat menukarkan hasil tangkapannya dengan bahan makanan

39 Lihat Andreas Harsono, 2004.



Gambar 4.4
Jenis umbi-umbian,
tepungnya
digunakan
sebagai bahan
makanan bayi
dan tepung kue



Gambar 4.5
Cara menanam
ubi jalar (batatas)



Gambar 4.6
Memanen hasil
ubi jalar



Gambar 4.7
Rumpun talas
(laluga), salah
satu stok makanan
di saat paceklik



Gambar 4.8
Ikan segar,
kekayaan laut
yang melimpah



atau menjajakannya di pasar. Tidak ketinggalan, kaum wanita menekuni kerajinan menganyam tikar dari daun pandan, salah satu industri rumah yang mereka tekuni turun-temurun, untuk mendapatkan uang atau menukarkannya dengan bahan makanan.

Setelah anak-anak mereka berhasil menamatkan pelajarannya, ada orang tua yang kembali ke pulau Miangas. Ada pula yang pindah ke Manado, menyekolahkan anak-anak mereka pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan tetap melakoni cara hidup yang sama. Untuk bepergian dari kampung halamannya, mereka menggunakan perahu layar buatan mereka sebagai alat transportasi. Dengan alat transportasi seperti ini, para pelaut tidak hanya mengandalkan bantuan angin. Sebuah perahu sepanjang 10 meter misalnya, di kedua sisinya masing-masing disediakan tujuh sampai delapan tempat bagi pendayung. Para pelaut ini juga mewarisi pengetahuan tentang pergerakan angin serta arus, pembentukan awan, posisi-posisi bintang yang memandau serta menandai tempat tujuannya⁴⁰. Hingga akhir tahun 1960-an, setiap keluarga luas di Miangas dan pulau-pulau Nanusa umumnya, memiliki perahu layar dengan ukuran panjang lunasnya bervariasi antara 7 sampai 15 meter.

Warga pulau-pulau kecil ini, baik warga Miangas maupun warga pulau-pulau Nanusa pada umumnya dikenal tidak hanya sebagai nelayan dan pelaut, tetapi juga pembuat perahu. Keahlian ini mereka warisi turun-temurun. Thomas Forrest, seorang pelaut berkebangsaan Inggris ketika melewati pulau-pulau Talaud, mencatat ketrampilan warga Nanusa sebagai pembuat perahu yang handal dengan biaya yang murah⁴¹.

Membaiknya prasarana perhubungan laut pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, terutama adanya pelayaran perintis yang disubsidi

40 Pengetahuan ini juga dibahas oleh A.B. Lopian (2008), *Pelayaran dan Perniagaan Nusantara Abad ke 16 dan 17*. Depok, Komunitas Bambu.

41 Forrest, 1969: 317 – 318.



oleh pemerintah menghubungkan pulau-pulau kecil di Nusantara, yang di antaranya menghubungkan pelabuhan Bitung sampai Marore dan Miangas. Warga Miangas dan pulau-pulau Nanusa pada umumnya mulai meninggalkan penggunaan perahu layar dan beralih ke kapal laut dan perahu bermotor. Begitu pula halnya dengan hubungan ke Filipina.

Sejak adanya perjanjian lintas-batas antara kedua negara dan menjadikan pulau Miangas sebagai pintu keluar masuk pelintas batas, kehadiran kapal motor dan perahu-cadik bermotor⁴² dari Filipina secara perlahan-lahan menggeser peran perahu layar. Memasuki tahun 1970-an, di pulau Miangas tersisa hanya satu dua buah perahu layar. Kalaupun ada pemilik perahu layar, mereka mulai beralih ke perahu bercadik yang menggunakan mesin pompa air atau pambut. Perahu ini mereka beli dari negara tetangga, Filipina⁴³.

Pelayaran perintis yang disubsidi oleh pemerintah dan dioperasikan oleh Departemen Perhubungan semula mengontrak dua kapal motor berukuran sekitar 25 dan 30 gross ton dan berkecepatan rata-rata 8 knot. Pada tahun 1990-an, PT Pelnı mulai merencanakan pelayaran ke pulau-pulau Sangihe dan Talaud, bahkan hingga ke pelabuhan Davao dengan mengoperasikan KM Tilongabila, sebagai bagian dari program kerjasama BIMP-EAGA. Setelah rute pelayaran Bitung – Davao ini dipandang merugi, PT Pelnı mengusahakan pelayaran KM Sangiang dari pelabuhan Bitung hingga pelabuhan Miangas.

42 Jenis perahu bercadik ini dikenal dengan sebutan pambut (pump boat) karena menggunakan mesin pompa air yang putarannya hanya satu arah. Panjang perahu jenis ini bervariasi antara 5 sampai 10 meter. Jenis perahu cadik yang lebih besar disebut Fuso, karena menggunakan mesin fuso, panjangnya berkisar antara 15 sampai 30 meter.

43 Bayu Dwi Mardana, wartawan Sinar Harapan dalam artikelnya berjudul "Petualangan Laut di Kepulauan Talaud: Kegagalan Menembus Filipina Selatan" (SH, 2003) memberitakan bahwa membaiknya prasarana hubungan laut ini telah melumpuhkan semangat budaya-bahari yang dimiliki oleh warga pulau-pulau Nanusa.



Gambar 4.9
Kembali dari
ladang



Gambar 4.10
Alat transportasi
serbaguna



Gambar 4.11
Aktivitas keluarga
petani muda



Gambar 4.12
Siap-siap
menyambut tamu di
dermaga Miangas



Gambar 4.13
Membunuh
kesepian,
menyalurkan
kelebihan
karbohidrat
dengan olah raga



Gambar 4.14
Rekreasi warga
Miangas



Semakin membaiknya prasarana perhubungan laut sangat berpengaruh terhadap mobilisasi penduduk Miangas. Warga setempat ada yang memilih untuk meninggalkan kampung halamannya dan mencari pekerjaan tidak hanya di wilayah propinsi Sulawesi Utara, tetapi juga ke wilayah propinsi tetangga seperti ke Maluku Utara, Kalimantan Timur dan beberapa kota pelabuhan terutama Jakarta, Surabaya dan Makassar. Di tempat yang disebut terakhir ini mereka memilih pekerjaan sebagai pelaut⁴⁴.

Migrasi keluar seperti itu tidak hanya dilakukan secara perorangan atau keluarga kecil. Sudah sejak akhir abad ke- 19, tepatnya tahun 1885, seperti yang dilaporkan oleh H.J. Lam, ratusan warga Miangas pindah dan menetap di Kuma, pulau Karakelang, ketika kampung halamannya dilanda oleh epidemi kolera⁴⁵. Pada awal tahun 1960-an, kurang lebih 200 jiwa dimukimkan di pemukiman antara Beo dan Rainis, pulau Karakelang. Terakhir, setelah pulau ini mengalami bencana Tsunami tahun 1972, sebanyak 90 kepala keluarga dipindahkan oleh pemerintah propinsi ke pemukiman baru bernama Dodap, kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang-Mongondow⁴⁶. Itulah sebabnya, dari tahun ke tahun penduduk pulau Miangas selalu berada pada kisaran 600 jiwa.

Perhatian pemerintah terhadap pulau Miangas dapat dikatakan berlebihan jika dibandingkan dengan pulau perbatasan yang berdekatan seperti pulau Marampit bahkan dengan pulau Marore. Pulau yang berpenduduk sebanyak 203 Kepala Keluarga dan menghimpun didalamnya 762 jiwa, dengan alasan letak geografis terpencil, sejak tahun 2007 secara administratif diresmikan sebagai kecamatan khusus

44 Konsentrasi pelaut asal Miangas dan Nanusa di Jakarta Utara misalnya, dapat ditemukan di Ampera (belakang ktr. Walikota Jakarta Utara) dan Cilincing (belakang asmara Polairud).

45 H.J. Lam, 1932:43.

46 Sejak pemekaran kabupaten, desa Dodap menjadi bagian dari Kabupaten Bolaang-Mongondow Timur.





Gambar 4.15
Tugu Benteng Pancasila di Miangas



Gambar 4.16
Tugu Perbatasan di Miangas



Gambar 4.17 Monumen yang belum rampung



Gambar 4.18
Menara Suar Miangas



Gambar 4.19
Fasilitas Perhubungan
Laut di Miangas



Gambar 4.20
Fasilitas untuk
menara suar



Gambar 4.21 PT PLN Sub-ranting Miangas



Gambar 4.22 Kepolisian Sektor Miangas

dengan wilayahnya seluas 315 hektar dan penduduknya (saat diresmikan) sebanyak 700-an jiwa. Adapun fasilitas yang tersedia sehubungan dengan statusnya sebagai Pos Lintas Batas, ialah: (1) Kantor Bea Cukai; (2) Kantor Imigrasi dan HAM; (3) Pos Angkatan Laut (POSAL) dengan 5 personil; (4) Pos Angkatan Darat (POSAD) dari batalyon 712 dengan 11 personil; (5) Polsek dengan 8 personil, yang mana 7 orang adalah putra Miangas; (6) Koramil dengan 6 personil; (7) kantor UPT Dirjen Perhubungan Laut yang mengawasi Pelabuhan/Dermaga dan Lampu Suar; (8) Kantor Perwakilan Negara Tetangga yang bertugas di Pos BCA dengan 2 personil; (9) pos Marinir Filipina dengan 5 personil. Selain itu, juga tersedia fasilitas (fisik) seperti: (10) Puskesmas; (11) Fasilitas pendidikan mulai dari Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Kejuruan; (12) Kantor Kecamatan Khusus; (13) Gudang Beras dan rumah pengelolanya; (14) PLTD; (15) BTS Telkom dengan 5 sambungan; (15) Ruang tunggu penumpang; (16) Pasar Desa; (17) Rumah Ibadah (Gereja); (18) Kantor Kepala Desa; (19) Lapangan Olah-raga; (20) Pengelolaan Air Bersih; dan (21) dalam waktu dekat fasilitas *airstrip*. Fasilitas tersebut belum termasuk yang diperoleh dari program bantuan berbagai instansi pemerintah seperti halnya 3 buah tangki BBM yang tetap kosong, Pajeko dan Pambut dari Dinas Sosial, Katinting, bak penampungan air bersih dan lainnya.⁴⁷

Dari sejumlah fasilitas yang sudah disebut di atas, yang dilengkapi dengan personalianya hanyalah fasilitas-fasilitas yang diadakan dalam rangka kerjasama dua negara yang menunjang pelaksanaan Perjanjian Lintas Batas. Misalnya, personalia keimigrasian dan bea cukai serta marinir dari kedua belah pihak. Selain itu, petugas keamanan baik yang ada di lingkungan TNI Angkatan Darat yang sifatnya terstruktur seperti Koramil, maupun penempatan berdasarkan program Satuan Tugas yang bertugas secara bergiliran. Begitu pula halnya dengan petugas dari kantor UPT

47 Hasil pencacahan pada kunjungan penulis Mei 2007 dan 2011.



Dirjen Perhubungan Laut yang mengawasi Pelabuhan/Dermaga dan Lampu Suar. Aparat yang disebut di atas selalu berada di tempat dalam situasi apa pun. Sebaliknya, fasilitas-fasilitas yang harus dilayani oleh pegawai sipil, seperti terbiar begitu saja. Misalnya, untuk pelayanan kesehatan. Pemerintah sudah menyediakan rumah untuk dokter. Tapi dokternya tidak pernah betah bertugas di sana. Yang melayani kesehatan warga adalah tenaga paramedis warga setempat. Begitu pula halnya dengan sektor pendidikan. Kekurangan tenaga guru selalu menjadi keluhan warga yang sering disuarakan lewat media⁴⁸. Berbeda dengan keberadaan fasilitas di atas yang semuanya dibangun dengan dana pemerintah (pusat dan daerah), satu-satunya fasilitas yang mereka bangun dengan kerja-keras mereka adalah rumah ibadah (Gereja).

Kehadiran pejabat pemerintah yang datang berkunjung merupakan berkah tersendiri bagi warga. Dari sekian banyak pejabat yang berkunjung, ada yang membawa bantuan berupa sembilan bahan pokok, perlengkapan siswa berupa baju seragam dan alat tulis menulis maupun perlengkapan olahraga. Waktu kunjungan Menteri PDT Saefullah Yusuf (2005), media memberitakan bahwa menteri memberi bantuan berupa uang tunai sebesar Rp. 20 juta, menambah saluran telekomunikasi, dan akan menyampaikan permintaan warga kepada Presiden soal pengadaan gudang depot logistik. Janji tersebut langsung dipenuhi pembangunannya, dan diresmikan oleh Presiden (dari Tomohon) tahun 2007. Meskipun hingga kini gudang tersebut tidak pernah diisi stok beras. Diberitakan pula bahwa pejabat (Wakil Gubernur Sulut) yang mendampingi kunjungan menteri PDT, memberi bantuan 20 ton beras dan sembako yang langsung dibagikan kepada warga, serta baju seragam anak sekolah dan perlengkapan olah

48 Lihat misalnya laporan Verrianto Madjowa: "Warga Miangas Butuh Tambahan Guru", Tempo interaktif, Rabu, 23 Mei 2007, maupun berita serupa dalam beberapa media.

raga⁴⁹.

Kehadiran personil petugas keamanan di setiap pos dan fasilitas pemerintah yang ada turut mempengaruhi keseharian warga. Jalinan persahabatan antara aparat dengan warga memungkinkan warga menitip anak-anak mereka untuk mendapatkan pendidikan maupun pekerjaan di tempat tugas awal aparat. Ada pula satu dua marinir yang ketika bertugas di Miangas masih bujangan, mendapat pasangan hidupnya di sana.

Hal-hal yang disebut di atas, di satu sisi, tampaknya memberi kemudahan bagi warga, tapi disisi lain menumbuhkan sikap ketergantungan dengan memperlakut keberadaannya di pulau terpencil sebagai alasan, sekaligus 'melumpuhkan' semangat hidup seperti yang sudah diperlihatkan oleh generasi sebelumnya (yang hidup di era tahun 1950-an hingga tahun 1960-an) seperti dipaparkan pada bagian awal sub-bab ini. Seringnya kunjungan dan perhatian mendorong satu dua warga melihatnya sebagai peluang untuk menyampaikan keinginan-keinginan mereka. Salah satu contoh, apa yang dilakukan oleh seorang kader salah satu partai, O. Lupa. Akhir tahun 2006, ia mengirim surat ke kantor sekretariat Wapres Jusuf Kalla, di Jakarta. Ia melaporkan ketidaksenangannya terhadap perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kepulauan Talaud yang konon tidak mengakomodir bahkan terkesan menganaktirikan warga Miangas. Laporan ini ditindaklanjuti oleh Sekretariat Wapres dengan mengirim stafnya yang didampingi oleh pejabat Inspektorat Propinsi Sulawesi Utara melakukan pengecekan pada bulan April 2007 di lingkungan Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. Dari hasil temuan kedua pejabat tersebut di setiap unit SKPD menemukan bahwa hampir di setiap SKPD ditemukan warga Miangas baik sebagai pegawai rendahan maupun pejabat eselon

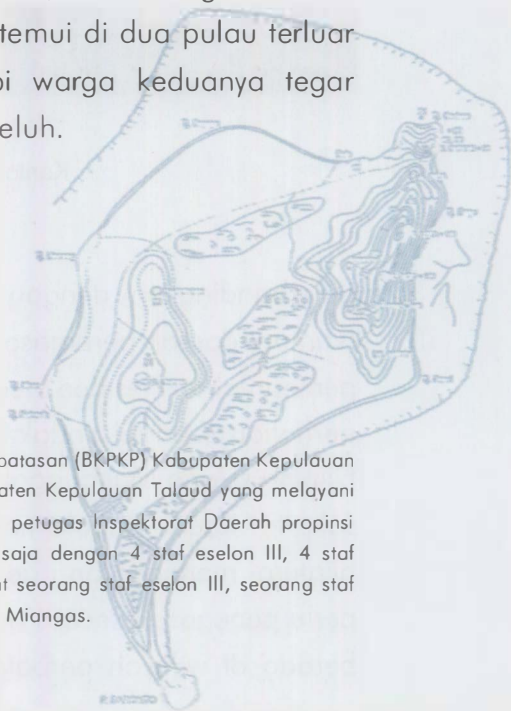
49 <http://www.sulutlink.com/berita2005>. Budi H. Rarumangkay, "Menteri Negara Pertama ke Perbatasan, Lagu Indonesia Raya Berkumandang di Miangas".



III. Bahkan, jika diperbandingkan dengan warga Talaud asal kecamatan lain, prosentase warga Miangas dalam struktur PNS di Talaud terbilang tinggi⁵⁰.

Kecenderungan tumbuh-kembangnya sikap warga seperti di atas diamati baik oleh seorang sosiolog (Filipina) yang meneliti di Miangas⁵¹, maupun seorang wartawan senior, seperti terbaca dalam hasil investigasinya berikut: *"...Hengky Vantriardo, the Indonesian Army lieutenant, told me that he believes the Miangas people use the border issue as bait to receive more subsidies from Manado and Jakarta. It is a mentality, Hengky said* ⁵². [Henky Vantriardo, Letnan TNI, mengatakan pada saya bahwa ia percaya, orang Miangas memanfaatkan isu perbatasan sebagai umpan untuk mendapatkan lebih banyak subsidi dari Manado dan Jakarta.]

Keluhan warga yang paling sering diberitakan adalah kekurangan stok BBM. Pemerintah telah menyerahkan tiga buah tangki BBM, tetapi sudah sekian lama tidak pernah terisi dengan BBM, dan berbagai keluhan lainnya. Sementara, keadaan serupa dapat ditemui di dua pulau terluar lainnya, yaitu Marampit dan Marore, tetapi warga keduanya tegar menghadapi kenyataan yang ada tanpa mengeluh.



50 Informasi dari Kepala Badan Koordinasi Pengelolaan Kawasan Perbatasan (BKPKP) Kabupaten Kepulauan Talaud dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kepulauan Talaud yang melayani petugas Sekretariat Kantor Wakil Presiden RI didampingi oleh petugas Inspektorat Daerah propinsi Sulawesi Utara, 2007. Menurut Kepala BKPKP, di kantornya saja dengan 4 staf eselon III, 4 staf administrasi yang berstatus PNS, serta 5 staf honorir, terdapat seorang staf eselon III, seorang staf administrasi (PNS), dan seorang staf honorir, berasal dari Pulau Mianas.

51 Komentarnya dibahas dalam Bab V.

52 Andreas Harsono, 2004.

4.3 Miangas dalam Agenda Pembangunan Pasca-Soeharto

Semenjak pemerintahan Presiden B.J. Habibie, pemerintah pusat mulai merasakan adanya kesenjangan pembangunan antarwilayah. Secara umum, kawasan timur Indonesia dipandang tertinggal jika



Gambar 4.23
Kantor Kecamatan Khusus Miangas

diperbandingkan dengan kawasan barat dan terutama pulau Jawa. Namun, daerah perbatasan belum secara tegas mendapat perhatian. Era pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, pulau Miangas mendapat perhatian sebagai tindak-lanjut agenda pertemuannya dengan Presiden Filipina Gloria Macapagal-Arroyo, 12 Nopember 2001 di Istana Negara Jakarta. Kedua kepala negara ini dalam jumpa pers se usai pertemuan bilateral menegaskan agenda yang dibahas ialah soal tapal-batas yang perlu penegasan secara hukum, soal status warga dari dua negara yang berada di wilayah perbatasan dan soal kerjasama bilateral mengatasi



terorisme. Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, pulau Miangas mendapat kunjungan dari salah seorang anggota kabinetnya, yaitu Menteri Perikanan dan Kelautan, Rokhmin Dahuri. Kemudian pada masa pemerintahan Presiden SBY, upaya membangun



Gambar 4.24
KM Sangiang (PT PELNI) berlabuh di dermaga Miangas

daerah perbatasan mendapatkan perhatian sebagaimana tercantum dalam bab 26 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional⁵³. Adapun perhatian pemerintah untuk membangun daerah perbatasan dipandang perlu karena alasannya adalah:

"....Wilayah Perbatasan dan Terpencil Kondisinya Masih Terbelakang. Wilayah perbatasan, termasuk pulau-pulau kecil terluar memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar, serta merupakan wilayah

53 Lihat Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005, khususnya Bab 26 (Pembangunan Wilayah).

yang sangat strategis bagi pertahanan dan keamanan negara. Namun demikian, pembangunan di beberapa wilayah perbatasan masih sangat jauh tertinggal dibandingkan dengan pembangunan di wilayah negara tetangga. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di daerah ini umumnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan kondisi sosial ekonomi warga negara tetangga. Hal ini telah mengakibatkan timbulnya berbagai kegiatan ilegal di daerah perbatasan yang dikhawatirkan dalam jangka panjang dapat menimbulkan berbagai kerawanan sosial..."⁵⁴

Letak geografis Miangas sebagai pulau paling utara di wilayah administratif Propinsi Sulawesi Utara memang merupakan wilayah yang sangat strategis tidak hanya dalam artian pertahanan dan keamanan, tetapi juga sebagai titik terluar dan dijadikan patokan dalam menentukan garis batas wilayah negara. Dalam rumusan di atas, juga jelas pemerintah menyadari ketertinggalan (pembangunan) dibandingkan dengan negara tetangga. Pemerintah menyadari bahwa keterbelakangan dan ketertinggalan pembangunan karena arah dan kebijakan pembangunan masa lampau.

".... Permasalahan utama dari ketertinggalan pembangunan di wilayah perbatasan adalah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi *inward looking* sehingga seolah-olah kawasan perbatasan hanya menjadi halaman belakang dari pembangunan negara. Akibatnya, wilayah-wilayah perbatasan dianggap bukan merupakan wilayah prioritas pembangunan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Sementara itu pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia sulit berkembang terutama karena lokasinya sangat terisolir dan sulit dijangkau. Di antaranya banyak yang tidak berpenghuni atau sangat sedikit jumlah penduduknya, serta belum tersentuh oleh pelayanan dasar dari pemerintah..."⁵⁵

54 Lihat Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, 2004 – 2009, Bagian IV-26-2.

55 Lihat Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, 2004 – 2009, Bagian IV-26-2.





Gambar 4.25 Gedung Sekolah Dasar Miangas



Gambar 4.26 Gedung SMPN Miangas



Gambar 4.27 Puskesmas di Miangas



Gambar 4.28 Fasilitas Telekomunikasi di Miangas



Atas dasar pikiran di atas, pemerintah pusat menetapkan program pengembangan wilayah perbatasan dengan dua tujuan, yakni:

".... (1) menjaga keutuhan wilayah NKRI melalui penetapan hak kedaulatan NKRI yang dijamin oleh hukum internasional; dan (2) meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dengan menggali potensi ekonomi, sosial dan budaya serta keuntungan lokasi geografis yang sangat strategis untuk berhubungan dengan negara tetangga..."⁵⁶

Tujuan dari kedua program pengembangan wilayah tersebut di atas kemudian dijabarkan dalam enam kegiatan pokok yang penganggaran dan pelaksanaannya tersebar ke berbagai departemen atau sekarang dikenal dengan kementerian, melalui UPT setiap departemen yang ada di propinsi maupun kabupaten, atau juga melalui pemerintah propinsi, kota dan kabupaten⁵⁷.

56 Lihat: *Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, 2004 – 2009*, Bagian IV-26-7.

57 Adapun keenam kegiatan pokok yang dijabarkan dalam RPJMN 2004 – 2009 ialah: (1) Penguatan pemerintah daerah dalam mempercepat peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui: (a) peningkatan pembangunan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi; (b) peningkatan kapasitas SDM; (c) pemberdayaan kapasitas aparatur pemerintah dan kelembagaan; (d) peningkatan mobilisasi pendanaan pembangunan; (2) Peningkatan keberpihakan pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, terutama untuk pembangunan sarana dan prasarana ekonomi di wilayah-wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil melalui, antara lain, penerapan berbagai skema pembiayaan pembangunan seperti pemberian prioritas dana alokasi khusus (DAK), *public service obligation* (PSO) dan keperintisan untuk transportasi, penerapan *universal service obligation* (USO) untuk telekomunikasi, program listrik masuk desa; (3) Percepatan pendeklarasian dan penetapan garis perbatasan antar negara dengan tanda-tanda batas yang jelas serta dilindungi oleh hukum internasional; (4) Peningkatan kerja sama masyarakat dalam memelihara lingkungan (hutan) dan mencegah penyelundupan barang, termasuk hasil hutan (*illegal logging*) dan perdagangan manusia (*human trafficking*). Namun demikian perlu pula diupayakan kemudahan pergerakan barang dan orang secara sah, melalui peningkatan penyediaan fasilitas kepabeanan, keimigrasian, karantina, serta keamanan dan pertahanan; (5) Peningkatan kemampuan kerja sama kegiatan ekonomi antar kawasan perbatasan dengan kawasan negara tetangga dalam rangka mewujudkan wilayah perbatasan sebagai pintu gerbang lintas negara. Selain daripada itu, perlu pula dilakukan pengembangan wilayah perbatasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya alam lokal melalui pengembangan sektor-sektor unggulan; (6) Peningkatan wawasan kebangsaan masyarakat; dan penegakan supremasi hukum serta aturan

Dalam wawancara khusus dengan Tempo, 15 Agustus 2005, Presiden SBY menyatakan bahwa Miangas – dan daerah perbatasan lainnya – haruslah menjadi “beranda depan” negara ini⁵⁸. Sejak itu sebutan “beranda-depan” tidak hanya diberitakan oleh media yang mengutip pernyataan para pembantu presiden maupun aparat pemerintah baik di pusat maupun di propinsi dan kabupaten, tetapi juga dapat ditemukan dalam berbagai dokumen pembangunan⁵⁹.

Pada bagian 4.2 di atas telah dipaparkan keberadaan berbagai fasilitas yang diadakan baik untuk menunjang pelaksanaan Perjanjian Lintas-Batas, maupun pengadaan fasilitas lainnya untuk memenuhi kebutuhan warga. Dan juga dikemukakan bahwa, sesuai amanat lapangan maupun dari berita-berita media, fasilitas yang lengkap dengan aparatnya hanyalah yang berhubungan dengan Perjanjian Lintas Batas dan pertahanan keamanan.

Pemerintah daerah kabupaten telah menetapkan pulau Miangas sebagai satu wilayah kecamatan khusus, untuk mendekatkan pelayanan masyarakat – pada tingkat kecamatan – lebih dekat dengan warganya. Pelayanan dimaksud misalnya untuk pengurusan Kartu Tanda Penduduk, Pencatatan Sipil bagi untuk mendapatkan Akte Kelahiran, Pernikahan, maupun kematian. Di sisi lain, statusnya sebagai kecamatan khusus ini secara politis merupakan penampakan kedaulatan negara, sama halnya dengan kehadiran simbol “supremasi pertahanan bangsa”⁶⁰, dan sejumlah

perundang-undangan terhadap setiap pelanggaran yang terjadi di wilayah perbatasan. (Naskah RPJMN 2004 – 2009, bagian IV.26.7 – 8).

58 “Presiden Susilo Bambang Yudhoyono: Perbatasan adalah beranda depan kita” judul wawancara khusus Tempo dengan pewawancara: Bambang Harymurti, Toriq Hadad, Gendur Sudarsono, Hanibal W.Y. Wijayanta, fotografer Hendra Suhara. Tempo online, 15 Agustus 2005.

59 Lihat: terutama dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2005 – 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 05 Tahun 2005: Bab II halaman 11.

60 Kompas 21 Agustus 2009 mengutip pernyataan Panglima Kodam Wirabuwana, Mayjen Djoko Susilo usai meresmikan patung Santiago di Miangas: “.... Patung setinggi 7 meter itu dinilai sebagai supremasi



simbol "penampakan kedaulatan RI di perbatasan"⁶¹.

Penjabaran program pembangunan yang teramati dan dirasakan langsung oleh warga adalah program yang ditangani oleh Departemen Sosial, meskipun bantuan-bantuan untuk pemberdayaan seperti perahu mesin teronggok begitu dan kurang digunakan karena alasan kelangkaan bahan bakar. Tim peneliti dari Departemen Sosial yang berkunjung ke pulau ini tahun 2008 mengakui bahwa pulau ini sarat permasalahan sosial⁶². Beberapa temuan tim tentang permasalahan kesejahteraan sosial, sebagian besar muncul diakibatkan oleh keterisolasian, keadaan iklim dan cuaca, kelangkaan bahan bakar, sebagai penyebab banyaknya keluarga fakir miskin, rumah tidak layak huni, anak terlantar, lanjut usia, penyandang cacat, dan wanita rawan sosial ekonomi⁶³. Selain itu, tim peneliti Departemen Sosial menemukan adanya potensi yang ada, mulai dari sumber alam, sumber sosial dan infrastruktur yang ada⁶⁴. Temuan lain, serupa halnya dengan temuan Velasco dan Harsono yang sudah dibahas juga dalam tulisan ini, bahwa:

"...karena mendapat perhatian yang lebih (dari pemerintah), terlihat banyaknya program yang masuk menyebabkan perilaku masyarakat cenderung mengharapkan datangnya bantuan, dan beranggapan bahwa program pemerintah yang diturunkan identik dengan Proyek/ uang, artinya

pertahanan bangsa Indonesia di wilayah perbatasan" ujar Pangdam, Pembuat perahu ini melalui anggaran Rp. 1,2 miliar.

61 Lihat tulisan Sadina (pemerhati masalah pertahanan) dalam harian Sinar Harapan 6 September 2009. <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0609/09/opi01.html>.

62 Lihat: Laporan Miangas: Beranda Depan NKRI yang Sarat Permasalahan Sosial. PPKSM-BPPKS Departemen Sosial RI.

63 Lihat: Laporan Miangas: Beranda Depan NKRI yang Sarat Permasalahan Sosial. PPKSM-BPPKS Departemen Sosial RI, halaman 4.

64 Lihat: Laporan Miangas: Neranda Depan NKRI yang Sarat Permasalahan Sosial. PPKSM-BPPKS Departemen Sosial RI. Halaman 5.

bantuan merupakan program bagi-bagi uang⁶⁵.

Sebuah persoalan yang harus dicermati oleh para pengambil kebijakan, karena dengan menghadirkan berbagai fasilitas (infrastruktur) tanpa menyiapkan warga, tidak dipungkiri justru akan menjebak mereka dalam mentalitas ketergantungan dan melumpuhkan semangat budaya bahari yang pernah dimiliki oleh warga Miangas generasi sebelumnya. Singkatnya, merancang kehidupan warga dengan melanjutkan pengalaman-pengalaman kesejarahan yang pernah membuat mereka kuat dan eksis menjalani hidup.

65 Lihat: Revitalisasi Model Pemberdayaan Pranata Sosial di Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara (Ringkasan Laporan) Pusat Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat, Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial, Departemen Sosial, RI, halaman 12.



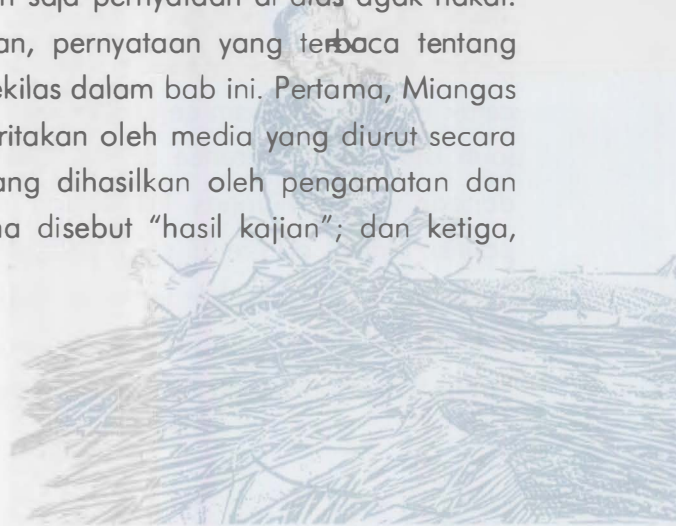
BAB 5

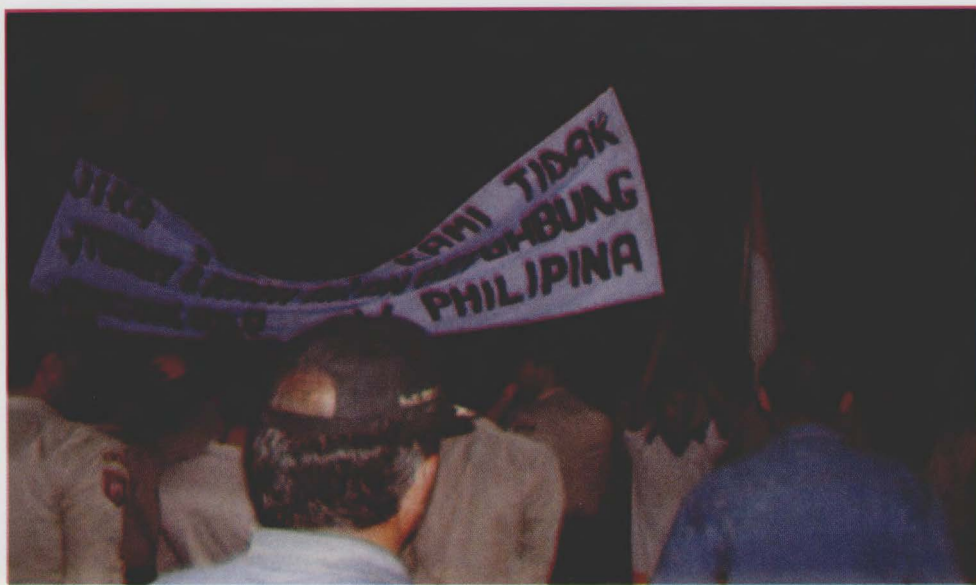
MIANGAS: APA KATA (d)ORANG



Membaca berita media cetak selama periode 2000 - 2010¹ tentang Miangas ibarat memahami isi rumah lewat "beranda-depan". Ada informasi yang jeli, mampu melongok keseharian warga dan tidak terpengaruh dengan "pajangan di beranda-depan". Ada reportase sesaat hasil kunjungan singkat. Dan, ada pula kutipan dari pernyataan nara-sumber yang entah karena terpesona dengan pasir-putih dikelilingi oleh laut dalam yang biru atau karena ketika menginjakkan kaki di dermaga Miangas, kepala masih pening dihantam oleh mabuk-laut, lalu memberi pernyataan yang tidak didukung oleh fakta. Seakan, Miangas – bagi narasumber ini – adalah Miangas yang diangankan, dan yang bukan ditemui dan dilihatnya, meskipun hanya lewat perjumpaan sesaat. Mungkin saja pernyataan di atas agak nakal. Tetapi itulah cerminan dari tulisan, pernyataan yang terbaca tentang Miangas yang akan dipaparkan sekilas dalam bab ini. Pertama, Miangas dan warganya sebagaimana diberitakan oleh media yang diurut secara kronologis; kedua, hal serupa yang dihasilkan oleh pengamatan dan pemaparan yang taat-azas karena disebut "hasil kajian"; dan ketiga, berupa catatan akhir.

1 Lihat daftar berita terlampir.





Gambar 5.1
Massa menyambut Bupati Talaud di Miangas,
Mei 2005: Unjuk rasa yang bikin heboh

5.1 Miangas: dalam berita Media

Sejak dekade pertama tahun 2000-an, Miangas mendapat perhatian dari banyak pihak. Hanya dalam waktu satu dekade, dapat dibaca kurang lebih 100 berita di media utama (Kompas dan Tempo). Belum terhitung jumlah berita serupa di media lokal Sulawesi Utara. Dalam berita media-cetak tersebut terekam sejumlah kegiatan. Mulai dari percakapan jarak jauh atau teleconference antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan warga Miangas, kunjungan pejabat negara, aparat keamanan, politisi, aktivis, dan tentu saja, pekerja media (wartawan) yang mengikuti perjalanan para pejabat tersebut. Tidak kalah pentingnya adalah berita tentang kehadiran mahasiswa Universitas Indonesia yang menjalankan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama sebulan; tercatatnya pulau ini dalam



buku Rekor Muri karena aksi pembentangan bendera Merah Putih terpanjang (7.000 meter) mengelilingi pulau ini².

Adapun pemberitaan media tentang Miangas jika dirunut secara kronologis adalah sebagai berikut: Pada tahun 1985, dalam berita tentang pergantian gubernur Sulawesi Utara, tertulis: "... siapakah yang bakal menjadi tonaas (orang besar) dari Miangas ke Popayato (daerah perbatasan) Sulawesi Utara periode 1985 – 1990..."³. Pencantuman Miangas dalam berita tentang pemilihan gubernur Sulawesi Utara periode tersebut untuk menandai batas wilayah atau teritorial Sulawesi Utara. Pulau Miangas berada di ujung utara, penanda batas utara dan Popayato berada di selatan, berbatasan dengan wilayah Sulawesi Tengah.

Kemudian dua tahun setelah berita di atas, yakni tahun 1987, dalam berita bertajuk: "Subsidi untuk Perintis", tertulis: "... Pelni tidak boleh berpikir untung rugi. Sebuah pulau di utara Manado, Pulau Miangas, misalnya, harus disinggahi, kendati penduduknya hanya 500 jiwa..."⁴. Hal ini terungkap dari pernyataan Dirjen Perhubungan Laut, J.E. Habibie, seusai meresmikan rute pelayaran KM Lawit yang dioperasikan oleh Pelni menyinggahi pelabuhan Tanjung Pinang.

Setelah enam tahun tidak diberitakan, tahun 1993, dalam sebuah berita tentang keberadaan warga negara di Filipina. "... Hasil sensus Konsul Jenderal RI di Davao pada 1991 menyebutkan, dari 10.000 WNI, sekitar 3.000 diantaranya hidup di pulau-pulau kecil di kawasan perbatasan, seperti di pulau Ensihe, Memanuk, Matutuang, Miangas, dan sekitarnya..."⁵. Berita berjudul "Kembalinya si Warga Haram" ini

2 <http://www.muri.org>. 22 Mei 2010. Rekoris, Badan Narkotika Nasional R.I., Kecamatan Miangas; Kecamatan Nanusa dan Poldo Sulawesi Utara.

3 Tempo, 2 Maret 1985. Herry RD. Nachrawy: "Penggantian Gubernur"

4 Tempo, 7 Nopember 1987. MW dan Linda Djalil: "Subsidi untuk Perintis".

5 Tempo, 12 Juni 1993. Ardian Taufik Gesuri & Waspoda Santing: "Kembalinya si Warga Haram".

intinya memberitakan upaya pemerintah Propinsi Sulawesi Utara untuk memulangkan warga yang menetap tanpa identitas diri di wilayah Filipina.

Bergulirnya gerakan yang disebut “reformasi” di Indonesia, ikut membawa dampak bagi Miangas. Tahun 1999, Komite Pemilihan Umum menetapkan empat kursi di Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk lima kelompok etnis minoritas di tanah air yakni Suku Kubu/Anak Dalam di Jambi, Badui di Jawa Barat, Dayak di Kalimantan, Sangir/Miangas di Sulawesi Utara dan Irian di Irian Jaya⁶. Seorang warga Miangas – atas usulan pemerintah propinsi – ditunjuk mewakili kelompok etnis ini. Padahal, jika pengklasifikasian kelompok etnis benar-benar dipahami, Miangas adalah komunitas etnis Talaud dan bukan Sangir. Hanya saja, Talaud waktu itu merupakan bagian dari kabupaten kepulauan Sangihe dan Talaud. Penunjukan warga Miangas yang telah puluhan tahun bekerja sebagai Kepala Kecamatan Lintas-Batas (Miangas) ini menjadi kebanggaan mereka.

Pada tahun 2002 pemerintah Indonesia harus menerima keputusan Mahkamah Internasional di Den Haag, soal Sipadan dan Ligitan. Media menurunkan berita berjudul: “Sipadan-Ligitan: Mercu Suar Membawa Untung”⁷. Pada bagian akhir paparan berita ini, tertulis: “... Adapun kepemilikan terhadap Pulau Miangas yang pernah diributkan Filipina, menurut Hassan Wirajuda, sudah tidak ada masalah. Hakim Max Huber dari pengadilan arbitrase tahun 1928 sudah memutuskan Belanda berdaulat atas pulau ini...” Media tidak hanya memberitakan reaksi pemerintah atas keputusan itu, tetapi juga menurunkan hasil wawancara dengan Menteri Luar Negeri. Dalam wawancara tersebut, ketika ditanya,

6 Tempo, 30 Agustus 1999. Golongan Lembaga/Kursi

7 Tempo, 23 Desember 2002, I.G.G. Maha Adi.



pulau mana saja yang masih berpotensi menjadi sengketa di Indonesia, Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda menjelaskan:

"... Ada kesan bahwa kita masih mempunyai potensi sengketa mengenai status pulau-pulau kita yang terpencil. Misalnya, Miangas dan Natuna. Perlu saya sampaikan, Pulau Miangas dan Natuna sudah jelas milik kita. Tidak ada pihak lain yang menyoal hal itu. Jadi, yang masih tertinggal adalah beberapa sisa masalah..."⁸.

Sepertinya, penjelasan pemerintah tentang status Miangas yang sudah diberitakan media di atas belum banyak diketahui atau dibaca dan didengar oleh banyak pihak, sehingga, masih ada saja komentar-komentar seputar Miangas yang perlu disimak lebih lanjut. Menjawab berbagai komentar yang ada, pemerintah dalam hal ini Menteri Luar Negeri kembali menjelaskan status pulau ini sebagaimana diberitakan oleh media dengan tajuk: "Menlu: Jangan Campuradukkan Batas Wilayah dan Kepemilikan Pulau", sebagai berikut:

"... Menurut Hassan, status kepemilikan pulau sudah jelas tidak ada masalah, karena pulau-pulau yang disebutkan menjadi persoalan karena terletak di perbatasan seperti Pulau Miangas, Natuna atau Nipah sudah jelas milik Indonesia dan tidak pernah diklaim negara lain. Tampak terjadi kebingungan dan kurang pengetahuan yang seragam yang perlu diluruskan, lanjut dia, yakni beda antara status kepemilikan dan status batas perairan baik laut wilayah, landas kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif yang memang masih perlu dinegosiasikan."⁹

Pernyataan serupa kembali diulangi oleh Menteri Luar Negeri dalam konferensi pers se usai pertemuan dengan Dewan Maritim Indonesia,

8 Tempa online, 23 Desember 2002. Purwani D. Prabandari, Bina Bektiati, dan Hermien Y. Kleden. Wawancara Khusus: "Hassan Wirajuda: Tak ada lagi Pulau yang menjadi sengketa".

9 Gatra, 6 Januari 2003. "Menlu: Jangan Campuradukkan Batas Wilayah dan Kepemilikan Pulau".

Rabu, 15 Januari 2003. "...Menteri Luar Negeri: Tak ada pulau lain yang berstatus sengketa"¹⁰. Penjelasan Menteri Luar Negeri ini dipertegas oleh seorang diplomat cum akademisi dan pakar kelautan, Hasyim Djalal. Menurutny, masalah pulau-pulau yang letaknya jauh dan terpencil di Indonesia ada empat. Pertama, kepemilikannya. Kedua, masalah kehadiran atau physical presence. Ketiga, masalah sosial ekonomi. Keempat, pulau-pulau itu tidak terpelihara karena pengawasan yang lemah akibat letaknya yang jauh. Tentang Miangas, ia menjelaskan:

"... Pulau Miangas (...) murni milik Indonesia. Tetapi karena letaknya yang jauh dan terpencil maka kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat setempat condong ke Filipina. Sehingga banyak orang mengatakan Pulau Miangas milik Filipina"¹¹

Pernyataan Hasyim Djalal ini kembali dikutip oleh media 20 Januari 2003 dengan judul: "Sambung-menyambung diambil tetangga"¹². Artikel yang dimuat dalam Tempo edisi 20 – 26 Januari 2003 ini mendapat tanggapan penjelasan dari pemerintah. Direktur Informasi Media Departemen Luar Negeri, M. Wahid Supriyadi di media yang sama (kolom Surat Pembaca) menjelaskan:

" (...) Demikian juga dengan Pulau Miangas, yang merupakan bagian dari wilayah RI. Sengketa kepemilikan pulau ini antara Amerika Serikat dan Belanda diselesaikan oleh Arbitrator tunggal, Max Huber, pada 1928, yang menetapkan pulau tersebut sebagai milik Belanda. Pulau Miangas dicantumkan dalam UU No. 4/Prp/1960, sedangkan UU Filipina No. 3046/1961 tidak mencantumkan pulau Miangas sebagai titik dasar.

10 Tempo interaktif, 15 Januari 2003. D.A. Chandraningrum-Tempo News Room. dalam paparan berita ini, wartawan Tempo kurang cermat dalam menempatkan posisi geografis-administratif. Tertulis, "... pulau Miangas, yang terletak di utara pulau Kalimantan" (alinea ke-5 dari atas).

11 Tempo interaktif, 15 Januari 2003. Diah A. Chandraningrum-Tempo News Room.

12 Tempo online, 20 Januari 2003.

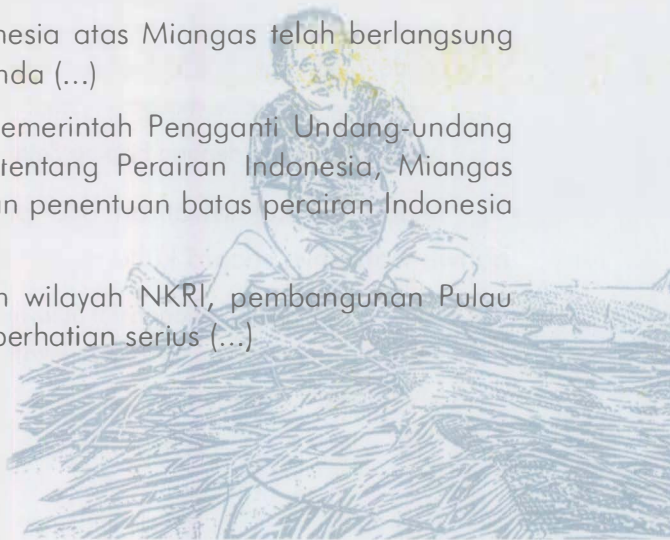


Dalam hal ini pemerintah Filipina mengaku pulau Miangas adalah milik Indonesia, sebagaimana tertuang dalam protokol terhadap persetujuan ekstradisi RI-Filipina tahun 1976¹³.

Penulis lainnya, Paulus Londa turut mempertegas pernyataan di atas. Dalam tulisannya ia menjelaskan antara lain

1. Pulau Miangas adalah salah satu pulau kecil di gugusan kepulauan Talaud yang sejak zaman dulu dalam tradisi masyarakat setempat dianggap sebagai bagian integral dari wilayah kepulauan di Sulawesi Utara, yakni Sangihe dan Talaud. Di Sangihe Talaud, pulau yang bersentuhan langsung dengan wilayah negara tetangga Filipina, bukan hanya Miangas, tapi ada beberapa pulau lainnya, yang termasuk dalam wilayah kepulauan Kawio, Marore, Kawaluso. Namun, karena posisi geografisnya, Miangas dijadikan tapal batas terutama dari wilayah kepulauan Sangihe Talaud, yang mencakup sejumlah pulau dari Miangas hingga Biaro.
2. Miangas bukan pulau kosong, tapi berpenghuni bahkan berstatus kecamatan (...)
3. Miangas memang pernah menjadi sengketa (...)
4. Dalam literatur, pulau Miangas dikenal dengan tiga nama, yakni Las Palmas (Pulau Kelapa), Miangas, dan Tinonda (...)
5. Penguasaan efektif Indonesia atas Miangas telah berlangsung sejak zaman Hindia Belanda (...)
6. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 4 Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia, Miangas adalah salah satu patokan penentuan batas perairan Indonesia (...)
7. Untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI, pembangunan Pulau Miangas memang perlu perhatian serius (...)

13 Tempo online, 27 Januari 2013.



Komentar tentang kepemilikan Pulau Miangas tidak hanya disuarakan di Jakarta. Media juga memberitakan pernyataan para pejabat pemerintah di daerah, yang antara lain adalah pernyataan Bupati Kepulauan Sangihe dan Talaud, Aries JT Makaminan dalam Seminar Arah dan Strategis Pembangunan Kabupaten Talaud ke Depan, Senin, 10 Februari 2003. Menurut bupati itu: "...aspek hukum internasional belum sepenuhnya memberi jaminan bahwa Miangas milik Indonesia". Sepertinya, wartawan yang mendengar pernyataan itu berupaya mencari penjelasan, karena di media yang sama pada saat yang sama pula terbaca tanggapan dari Kepala Biro Operasional Kepolisian Daerah Sulawesi Utara, Kombes (pol.) Mathius Salempang.

"...Sejak Indonesia merdeka, pulau Miangas itu milik Indonesia. Kita (polisi) sudah lama disitu (...) di pulau Miangas dan Marore yang berbatasan dengan Filipina telah ditempatkan masing-masing tujuh personil polisi.

Tidak hanya aparat kepolisian yang ditempatkan di Miangas, tetapi juga personil angkatan laut; sebagaimana ditegaskan oleh Dan Lantamal VI, Laksamana Pertama Eddy Santoso, tentang penambahan personil AL di Miangas dan Marore.

Pernyataan bahwa Miangas merupakan salah satu pulau bermasalah, kembali diungkap oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Rokhmin Dahuri, pada bulan Juli 2003. Menurut Menteri Kelautan, ada sepuluh pulau Indonesia masih bermasalah. (Salah satunya) ... adalah Pulau Miangas yang berbatasan dengan Filipina Selatan".

Ada pula kekhawatiran bila pulau ini diabaikan karena dugaan bahwa warganya secara kultural dan ekonomi dekat dengan Filipina.

"... Di pulau Miangas di Sulawesi Utara, penduduk fasih berbahasa Tagalog. Selain pulau itu sangat dekat ke Filipina, interaksi antar-penduduk dua negara juga baik sekali. Jika abai, bisa saja Indonesia kecolongan lagi".



Kekhawatiran terancam hilangnya pulau Miangas tidak hanya disuarakan oleh pemerhati, tetapi juga terungkap dalam sebuah seminar yang diselenggarakan oleh Lemhannas. Seminar dengan topik: "Perbatasan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) yang digelar Kamis, 11 Nopember 2004 mengkhawatirkan keberadaan 12 pulau di antaranya pulau Miangas terancam hilang dari wilayah Indonesia. Kekhawatiran seperti itu beralasan. Hasyim Djalal, salah seorang negosiator penetapan tapal-batas Indonesia - Filipina, dalam wawancaranya dengan media, 14 Maret 2005 menyatakan bahwa:

".... Selain itu perbatasan laut antara Indonesia dan Filipina di pulau Miangas. Filipina mengakui pulau Miangas milik Indonesia. Tapi mereka menyatakan pulau itu berada di laut Filipina. Saya sudah berunding mengenai pulau Miangas dengan Filipina sejak 1973. Tapi sampai sekarang tak maju-maju.

Jalan panjang perundingan mengenai tapal batas masih berjalan. Pemerintah Indonesia tidak hanya menempuh jalan diplomasi. Penampakan penyelenggaraan kekuasaan dan keamanan pun diupayakan di pulau Miangas. Selain keterangan pihak Kepolisian serta Lantamal di atas, Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Bernard Kent Sondakh, seperti diberitakan media menyatakan bahwa "April (2004) nanti kami akan pasang prasasti Pulau Miangas yang merupakan perbatasan dengan Filipina".

Akhir Mei 2005, kembali Miangas diberitakan. Berbeda dengan berita-berita sebelumnya, kali ini (warga) Miangas yang membuat berita. Berikut ini kutipan dari berita yang diturunkan oleh *Gatra* 4 Juli 2005:

"... Di peta, Pulau Miangas di gugus Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, jelas masuk wilayah Indonesia. Letaknya berbatasan dengan negara tetangga, Filipina. Namun, ketika Bupati Talaud dr. Elly Lasut mengibakkan kaki di pulau berjuluk "tetesan peluh Sang Khalik" itu pada penghujung bulan lalu, yang ditemui bukan kibaran bendera Merah-Putih. Melainkan lambaian bendera Filipina.

Bendera-bendera itu tampak sejak dari pelabuhan hingga pedalaman. Ada juga beberapa spandak bernada siap bergabung dengan

Filipina. Kedatangan Elly pun tampaknya tak dikehendaki. Sekitar pukul 20.00, warga melakukan aksi mematikan lampu penerangan. Sehingga pulau seluas 168,5 hektar itu gelap gulita. Tentu saja Elly cemas. Sebab selama ini sikap penduduk Pulau Miangas menjadi barometer kesetiaan terhadap NKRI. 'Jika nasionalisme warga Miangas runtuh, bisa mengancam NKRI', kata Elly. Pulau ini memang pernah menjadi bahan sengketa antara Indonesia dan Filipina.

Tapi setelah diadakan pendekatan, akhirnya warga mau berdialog dengan bupati. Dalam tatap muka terungkap bahwa 'pemberontakan' warga Miangas dipicu kasus penganiayaan Yongki Awala, sekretaris desa, hingga tewas oleh Kapolsek Miangas, Inspektur Dua Ayub Dareda pada 21 Mei lalu".

Aksi protes warga mereda setelah pelaku diproses secara hukum. Hal yang menarik dalam pemberitaan ini adalah 'dramatisasi' jumlah bendera Filipina yang dikibarkan "sejak dari pelabuhan hingga pedalaman". Berdasarkan keterangan warga – dan terekam dalam foto pada halaman depan bab ini – bendera Filipina tersebut diambil secara paksa oleh warga dari kantor petugas BCA. Oleh karena, di pulau Miangas, setiap harinya berkibar 2 buah bendera Filipina. Sebuahnya berada di pos Marinir Filipina dan yang kedua di kantor petugas BCA perwakilan Filipina. Kekurangcermatan lainnya adalah soal luas pulau (168,5 hektar) yang seharusnya 315 hektar dan "...pulau ini memang pernah menjadi bahan sengketa antara Indonesia dan Filipina".

Dua hari menjelang ulang tahun kemerdekaan, Miangas kembali disebut sebagai satu dari "...12 pulau yang perlu mendapat perhatian khusus dan serius dari pemerintah pusat dan daerah.." sebagaimana terungkap dalam wawancara Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Slamet Soebijanto, di bawah judul: "Kekuatan TNI AL Memang Menurun". Di hari yang sama, media yang sama menurunkan hasil wawancara Presiden RI yang berupaya membangun perbatasan sebagai beranda depan bangsa.



Kepala Negara, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dalam wawancara khusus dengan Tempo (15 Agustus 2005) menegaskan bahwa mempertahankan keutuhan tanah air adalah salah satu prioritas pemerintahannya. Dalam rekaman wawancara bertajuk: "Presiden Susilo Bambang Yudhoyono: Perbatasan adalah beranda depan kita", Presiden menjelaskan bahwa:

".... Pertama-tama, Pulau Miangas adalah sah wilayah Indonesia. Dalam pertemuan saya dengan Presiden Arroyo di Laos, November lalu, kami membicarakan bahwa pulau Miangas – sesuai dengan kesepakatan sebelumnya – adalah sah wilayah Indonesia. Soal kedekatan geografis dan interaksi warga negara Indonesia di Miangas dengan tetangganya di Filipina itu perkara lain. Tapi Kongres Filipina mengklaim Miangas wilayah mereka.... itu dinamika internal di Filipina. Tapi di tingkat saya, resmi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, dengan Presiden Arroyo, telah menyampaikan dengan jelas tentang posisi pulau Miangas"

Dua bulan sesudah wawancara Presiden dengan media (Tempo) tentang daerah perbatasan. Pada hari minggu, 9 Oktober 2005, Menteri Negara PDT Saefullah Yusuf didampingi Deputi II PDT dan anggota Dewan Perwakilan Daerah, Aryanthi Baramuli Putri menjejakkan kaki di dermaga Miangas. "... ini merupakan menteri negara yang pertama menginjakkan kakinya di pulau Miangas. Kunjungan ini sangat berarti bagi kami" ujar Raul Pase (45) warga setempat" sebagaimana diberitakan oleh media . Kunjungan yang didampingi oleh wakil Gubernur Sulawesi Utara dan Bupati Kepulauan Talaud bersama pejabat pemerintah daerah ini tidak lupa menyerahkan bantuan in natura kepada warga, selain bantuan uang dan penambahan saluran telepon satelit dari Menteri PDT . Gagasan agar pejabat setingkat menteri berkunjung ke daerah perbatasan disuarakan oleh salah seorang wakil rakyat (DPR-RI) yang menyertai kunjungan ini. "...sedikitnya sekali ketika menjabat sebagai tanda mereka memiliki perhatian karena sebenarnya perbatasan ini adalah beranda depan kita"

Kunjungan demi kunjungan – baik teragendakan khusus mengunjungi pulau ini maupun sekedar lewat setelah mengikuti acara di tempat lain – makin meramaikan pulau seluas 315 hektar ini. Ada yang berhasil menjejakkan kakinya di pulau Miangas, ada pula yang terpaksa menggunakan jalur lewat negara tetangga namun tidak sampai ke Miangas, seperti yang dialami oleh Tim Merah Putih bersama Wakil Direktur PT Telkom Indonesia, Garuda Sugardo dan Pangdam VII/ Wirabuana, Mayjen Arif Budi Sampurno . Rombongan Tim PT Telkom yang mengambil jalur Davao rencananya akan berada di Miangas untuk meresmikan fasilitas telekomunikasi di salah satu pulau terluar ini. Rencananya, pada saat dilakukan percakapan jarak jauh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dari Cibinong dengan warga Miangas yang direncanakan pada hari Jumat, 24 Februari 2006 Wakil Direktur PT Telkom, Garuda Sugardo berada di Miangas dan turut berdialog dengan Presiden . Rencana tinggal rencana. Oleh karena yang datang menjemput rombongan bukan sebuah kapal motor yang layak mengarungi laut lepas, tetapi sebuah perahu nelayan dengan motor seadanya yang tak mungkin ditumpangi oleh seluruh anggota tim.

Tidak hanya pejabat negara yang diberitakan mengunjungi Miangas. Penyanyi dan aktivis lingkungan, Uly Hary Rusady bersama rombongan Ekspedisi Pulau Terluar Indonesia dan organisasi pemuda Garuda Nusantara pun tertarik dan merayakan kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 2006 di Miangas.

"Di Miangas, kami mengibarkan bendera Merah Putih berukuran panjang 17 meter. Bendera kami bawa mengitari pulau bersama masyarakat setempat. Ini bukan biar kelihatan heroik, tetapi kami ingin bangkitkan nasionalisme, kata Uly, yang khawatir ada bendera dari negara lain berkibar di sana".



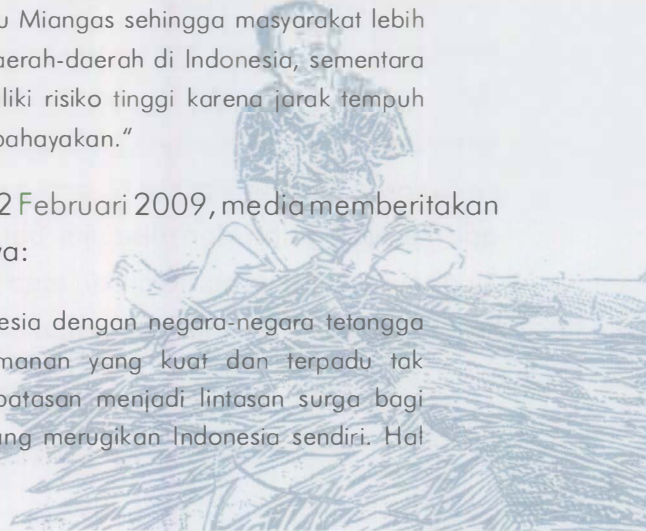
Sejak akhir tahun 2006 sampai akhir 2008, beberapa berita tentang Miangas isinya adalah seputar kegiatan-kegiatan tertentu seperti peresmian gudang dolog di Miangas yang diresmikan oleh Presiden SBY dari Tomohon ; tentang survei Bakosurtanal di pulau-pulau terluar rawan konflik ; tentang warga Miangas membutuhkan tambahan guru ; tentang ekspedisi utara yang isinya antara lain singgahnya rombongan Menteri Kelautan Freddy Numberi usai menyaksikan tradisi mane'e (menangkap ikan secara masal) di pulau Kakorotan ; tentang Sarana Transportasi Terbatas Warga Miangas Kehabisan Stok Sembako ; tentang kunjungan Gubernur Sulut menghadiri penetapan Kecamatan Khusus Miangas sekaligus pelantikan Camatnya.

Kekhawatiran tentang status Miangas kembali terungkap lewat pernyataan beberapa pejabat negara tentang Miangas pada awal tahun 2009. Berita pertama diturunkan oleh Kompas, 12 Januari 2009:

"...Dua pulau terluar di Sulawesi Utara (Sulut), Miangas dan Marore, bisa jadi kasus Sipadan dan Ligitan versi kedua, jika tidak dijaga Pemerintah Indonesia. Gubernur Sulawesi Utara ditengah dialog dengan Komisi VII DPR-RI, Senin (12/1) di Manado, mengatakan, Pulau Miangas dan Marore harus dijaga baik dengan mengedepankan pembangunan secara optimal sehingga masyarakat bisa hidup sejahtera di bawah naungan Negara Kesatuan RI. ...) Pemprov Sulut sementara berupaya membangun bandar udara di pulau Miangas sehingga masyarakat lebih dimudahkan dalam menjangkau daerah-daerah di Indonesia, sementara menggunakan angkutan laut memiliki risiko tinggi karena jarak tempuh jauh dengan kondisi perairan membahayakan."

Sebulan kemudian, tepatnya 12 Februari 2009, media memberitakan pernyataan aparat keamanan bahwa:

"Kawasan perbatasan Indonesia dengan negara-negara tetangga nyaris tak terurus. Sistem pengamanan yang kuat dan terpadu tak terwujud. Akibatnya, kawasan perbatasan menjadi lintasan surga bagi sindikat kejahatan tingkat tinggi yang merugikan Indonesia sendiri. Hal



itu terungkap dari paparan serta pemetaan masalah oleh 14 kepolisian daerah dalam Rapat Koordinasi Pengamanan Wilayah Perbatasan NKRI yang digelar oleh National Central Bureau (NCB) Interpol Indonesia di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (11/2)".

Dalam pemberitaan ini, lebih lanjut Wakapolda Sulut, Kombes John Kalangi menjelaskan soal Miangas, Marore, dan Marampit yang sempat dimuat dalam peta pariwisata Filipina. Selain itu ia menambahkan:

"...Ketiga pulau tersebut terletak di Kabupaten Sangihe dan Talaud. Jarak ketiga pulau itu lebih dekat dengan Filipina (selatan) ketimbang ibukota kabupaten. Dampaknya, secara sosial dan budaya, masyarakat setempat merasa lebih memiliki kedekatan sosial dengan Filipina ketimbang Indonesia. Kebutuhan sehari-hari dan sarana telekomunikasi terpenuhi dari negeri Filipina. 'Dulu penduduk di pulau-pulau itu pasang foto Presiden Marcos di rumah mereka dan terbiasa berbahasa Tagalog. Pernah satu kali ada bentrok antara aparat dan masyarakat yang tidak terselesaikan. Mereka lalu menaikkan bendera Filipina' kata John".

Di hari dan media yang sama, berita serupa diturunkan di bawah judul: "KSAL: Deplu Harusnya Tertantang Selesaikan Miangas" :

Kepala Staf TNI-AL, Laksamana TNI Tedjo Edhi Purdijanto mengharapkan Departemen Luar Negeri tertantang untuk menyelesaikan masalah pulau Miangas dengan Filipina. Hal itu menurutnya untuk mencegah terjadinya kasus yang sama seperti saat lepasnya Sipadan dan Ligitan beberapa tahun silam. 'Kami berharap Deplu merasa tertantang untuk selalu membicarakan masalah ini. Contohnya mengenai perbatasan yang sering kita bicarakan dengan Singapura, sekarang sudah ada kesepakatan dan disetujui batas wilayah kita (Indonesia) dengan Singapura. Kita harap demikian juga dengan Filipina', kata Tedjo disela-sela rapat dengar pendapat dengan Komisi I, (Kamis) di Gedung DPR .

Esok harinya, Jumat, 13 Februari 2009, media memberitakan:



"... Biro Perjalanan wisata swasta asal Filipina melalui brosur wisatanya mengklaim bahwa Pulau Miangas milik Filipina. Namun, hal ini tidak membuat Departemen Luar Negeri Republik Indonesia bereaksi keras. 'Biro perjalanan swasta tersebut tidak memahami bahwa Miangas merupakan bagian dari Indonesia' ujar juru bicara Deplu, Teuku Faizasyah, pada konferensi pers, Jumat (13/2) di Deplu, Jakarta. Deplu RI percaya diri sepenuhnya bahwa Pulau Miangas merupakan bagian integral dari Negara Kesatuan RI. Lebih lanjut, Faizasyah mengatakan, Pemerintah Filipina sendiri telah mengakui bahwa Miangas merupakan bagian dari Indonesia. Dengan demikian, kedua pemerintah, kata Faizasyah, tidak memiliki masalah dengan status Pulau Miangas".

Berita tentang pernyataan kedua pejabat di forum resmi kala mendengar pendapat di DPR-RI, ditanggapi oleh Kementerian Luar Negeri, 13 Februari 2009, sebagai berikut:

"...Kita sering ribut tanpa tahu masalahnya. Buang waktu, buang energi. Karena soal kepemilikan Indonesia atas pulau Miangas pertama pada masa penjajahan Belanda dan Philipina dijajah Amerika pada tahun 2008 (1898, pen), pulau Miangas ini menjadi objek sengketa Amerika dan Belanda dan diserahkan penanganannya kepada Mahkamah Arbitrase dan Hakim Max Hubber pada tahun 2008 (1928, pen) memutuskan bahwa pulau Miangas atau bahasa Spanyolnya Las Palmas dinyatakan sebagai milik Belanda dan karena itu sekarang milik Indonesia. Status kepemilikan ini juga dipertegas pada tahun 1976 dalam ~~annex~~ protokol dalam perjanjian ekstradisi Indonesia – Philipina. Dokumen 1 halaman itu sangat jelas menyebutkan pengakuan Philipina atas kepemilikan Indonesia atas pulau Miangas. Jadi secara hukum tidak ada keraguan, secara politis juga Philipina sampai saat ini tidak pernah melakukan klaim. Jadi itu yang saya maksud ribut-ribut buang energi, buang tenaga tanpa tahu duduk permasalahannya. Bagi Departemen Luar Negeri itu bukan suatu masalah."

Pernyataan Menlu di atas diberitakan oleh media yang terbit tanggal 14 Februari 2009.



Gambar 5.2
Monumen Santiago di Miangas



Gambar 5.3
Monumen Santiago di Miangas dibangun dengan biaya 1,2 milyar





Gambar 5.4
Menhankam meresmikan Monumen Santiago
didampingi Gubernur Sulawesi Utara

"... Menteri Luar Negeri (Menlu) Hassan Wirajuda mengkritik pihak-pihak yang dianggapnya meributkan masalah status Pulau Miangas – yang ditakutkan diklaim Filipina – tanpa mencoba mengerti posisi hukum yang jelas tentang status tersebut. Menlu Wirajuda menegaskan, secara hukum dan politis, Indonesia memiliki posisi kuat sebagai pemilik pulau yang berada di kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara itu. 'Kita sering ribut tanpa tahu masalahnya. Buang waktu, buang energi,' cetusnya di Jakarta, Jumat (13/2), ketika menjawab pertanyaan tentang kekhawatiran sebagian pihak baru-baru ini bahwa Filipina akan mengklaim kepemilikan Pulau Miangas".

"... Jangankan pembicaraan, agenda atau permasalahan saja tidak ada. Apa yang mau dibicarakan? Karena itu bagian integral dari NKRI, yang tidak pernah dipermasalahkan. Banyak perdebatan yang tidak

perlu,” kata Hassan kepada wartawan, sebelum raker dengan Komisi I DPR, Senin (16/2), di Gedung DPR.

Kekhawatiran dan isu kemungkinan dicaploknya Pulau Miangas oleh tetangga bermula dari berita tentang temuan Konsul Jenderal RI di Davao, Lalu Malik Partawana. Ketika akan berangkat ke Manado dari bandara Davao awal Februari 2009, ia menemukan sebuah peta daerah wisata yang mencantumkan Las Palmas (Miangas) dan Marore dalam peta wisata tersebut. Ia kemudian melaporkan temuannya ke Jakarta.

Untuk mengatasi rasa khawatir, baik pemerintah (sipil) maupun aparat keamanan merancang berbagai upaya agar penguasaan efektif atas pulau kecil ini tampak jelas. Dari kalangan TNI, seperti yang diberitakan media:

“...Guna meredam kemungkinan munculnya klaim negara tetangga terhadap pulau-pulau terluar Indonesia, TNI berupaya menghidupkan aktivitas perekonomian warga yang tinggal di pulau-pulau sekitar perbatasan RI-Filipina. Salah satu langkah yang ditempuh adalah mendorong pengadaan infrastruktur transportasi udara. ‘Saat ini kami memfasilitasi kajian perencanaan pembangunan lapangan terbang perintis di Pulau Miangas (Sulawesi Utara), salah satu pulau terluar yang berbatasan langsung dengan Filipina’, kata Mayjen Djoko Susilo Utomo, Panglima Kodam VII Wirabuana, di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (19/2). Lapangan terbang tersebut, lanjut Djoko, dirancang memiliki landasan pacu sepanjang 1400 meter sehingga dapat didarati pesawat sejenis Casa dan Fokker. Pada 1 – 2 tahun mendatang, setelah tim teknis dari Kodam VII Wirabuana merampungkan kajiannya, pelaksanaan pembangunan diserahkan kepada Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara dan instansi terkait. ‘Pada pelaksanaan pembangunan kelak, Kodam VII Wirabuana juga akan menggelar program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) skala besar, yang melibatkan aparat lintas sektoral’, tambah Djoko.



Selain rencana di atas, pihak TNI tetap berupaya menunjukkan adanya penguasaan secara efektif atas pulau Miangas lewat simbol berupa patung, seperti yang diberitakan: "Patung Santiago Diresmikan di Pulau Miangas".

"... 'Patung setinggi tujuh meter itu dinilai sebagai supremasi pertahanan bangsa Indonesia di wilayah perbatasan', kata Pangdam. Didampingi Korem 131 Santiago Kol Istu Hadi, Kapolda Sulut Brigjen Bekto Suprpto, dan Bupati Talaud Elly Lasut, Pangdam mengharapkan patung Santiago juga menjadi panutan bagi jajaran TNI dalam menjalankan tugas kenegaraan. Pembuatan patung Santiago itu menelan anggaran 1,2 milyar. Patung itu merupakan simbol pahlawan Manganitu (daerah kepulauan Sangihe dan Talaud) yang melawan jajahan Belanda. Sementara anggaran itu bersumber dari Pemprov Sulut, Pemerintah Kabupaten Talaud dan Mabes TNI, apalagi ide pembuatan patung tersebut atas ide Panglima TNI. Patung Santiago dibuat dari perunggu dan dirancang di Muntilan, Provinsi Jawa Tengah, kemudian ada tulisan tentang protokol perjanjian RI dan Filipina".

Tampaknya, tidak hanya kalangan pemerintah, politisi dan aparat keamanan yang menaruh perhatian atas Miangas. Pertengahan Juni 2009, tersiar berita:

"...Universitas Indonesia kembali mengaktifkan program Kuliah Kerja Nyata yang sempat vakum selama tujuh tahun. Direktur Kemahasiswaan Universitas Indonesia, Kamaruddin mengatakan program K2N yang dilakukan kali ini sedikit berbeda karena mahasiswa akan dikirim ke wilayah paling utara wilayah Indonesia, yakni pulau Miangas".

Sebulan kemudian, tepatnya 15 Juli 2009, Universitas Indonesia melepas sejumlah 71 mahasiswa peserta program Kuliah Kerja Nyata ke Pulau Miangas. Kegiatan itu berlangsung selama sebulan. "...kita nanti juga akan beri pengetahuan ke mereka untuk ekspor produk mereka ke luar negeri". Nyatanya, banyak hal yang manfaatnya dirasakan langsung oleh warga pulau Miangas. Kunjungan KKN mahasiswa UI ini sangat berarti bagi warga karena selama ini, dua perguruan tinggi negeri di

Sulawesi Utara, tidak berani mengirimkan mahasiswanya melaksanakan kegiatan KKN di sana.

Jika penyanyi dan aktivis lingkungan Uly Harry Rusadi bersama pemuda Garuda Nusantara memilih untuk merayakan hari ulang tahun proklamasi, 17 Agustus 2006 bersama warga Pulau Miangas, "...bukan biar kelihatan heroik, tetapi kami ingin bangkitkan nasionalisme" , lain lagi dengan wartawan senior cum sastrawan, Gerson Poyk. Lewat sebuah cerpen yang dipublikasinya pada tahun 2007, ia: "Berlayar ke Miangas" dalam angan dan khayalan seorang penulis.

Sayangnya, dari sekian banyak artikel hanya sedikit saja yang memaparkan informasi akurat. Katakanlah, seperti halnya tulisan Andreas Harsono¹⁴, Djorina Velasco¹⁵, Ferdi Rosman Feisal¹⁶, dan hasil reportase dari Jean Rizal Layuck (Kompas) dan Veriyanto Madjowa (Tempo)¹⁷.

Artikel Andreas Harsono tidak saja menarik karena dalam kunjungannya yang singkat ia memaparkan keadaan warga sebagaimana yang didengar dan dilihatnya, dengan gaya paparan yang singkat tetapi kaya informasi tentang keseharian warga. Kunjungannya pada bulan September 2004¹⁸ bertepatan dengan pelaksanaan Pemilihan Presiden

14 Andreas Harsono: "Miangas, nationalism and isolation" AsiaViews, Edition: 47/1 December, 2004.

15 Djorina Velasco: "Between Manado and Davao: How the Indonesian island of Miangas is making use of its Philippine ties" Newsbreak online (<http://newsbreak.com.ph/index2.php?option...>) dan, "Navigating the Indonesian-Philippine Border: The Challenges of Life in the Borderzone" dalam Kasarinlan: Philippines Journal of Third World Studies 2010 25 (1-2):95 – 118.

16 Ferdi Rosman Feisal (pakar telekomunikasi) yang tinggal di Miangas beberapa bulan telah menulis sejumlah laporan dan artikel, antara lain: "Miangas ke Istana Negara"; "Telkom dan TNI-AD Bangun Tandon Air untuk Pos Perbatasan Negara di Pulau Miangas"; "Prajurit Penjaga Perbatasan Negara di Pulau Miangas mencari Ikan untuk Makan"; dan "Enam Hari di Lautan".

17 Reportase kedua wartawan ini dapat dibaca dalam beberapa tulisan (artikel & berita) di kedua media tempat mereka bekerja.

18 "...One week prior to Indonesia's first direct presidential election in September 2004, I took a two-night trip to Miangas from Manado in northern Sulawesi, on board the KM Ratu Maria motorboat". Andreas Harsono: "Miangas, nationalism and isolation" AsiaViews, Edition: 47/1 December, 2004.



secara langsung; menempatkannya sebagai saksi betapa besar “biaya” untuk melibatkan warga perbatasan yang memiliki hak pilih dalam pelaksanaan sebuah praktek demokrasi¹⁹. Tulisannya juga merekam kunjungan warga hasil perkawinan warga Miangas dengan Filipina dan telah menetap di Sarangani²⁰, atau keterangan warga yang bekerja sebagai nelayan di perusahaan perikanan Filipina yang melaut di wilayah laut RI. Para pekerja ini diterima tidak semata karena keahlian melaut tetapi kemampuannya berkomunikasi dalam bahasa Cebuano²¹. Kekhawatiran serta cara pandang warga terhadap keadaan keamanan di Indonesia pun tidak luput dari amatannya²². Kutipan Andreas atas pernyataan petugas keamanan tentang sikap sebagian warga sekaligus menjelaskan aksi warga seperti yang dipaparkan dalam sub-bab 4.2 di atas: “dinamika warga Miangas di perbatasan dalam dua orde pemerintahan”²³. Hal terakhir ini diperkuat oleh Djorina dengan menunjuk bagaimana penanganan kasus kematian Sekretaris Desa yang disuarakan lewat demonstrasi dan mengibarkan bendera Filipina. Upaya atau tepatnya reaksi itu tidak sekedar mempercepat penanganan kasusnya secara hukum, tetapi

19 “...Indonesia spends so much money on Miangas but the fact is it is geographically, and partly culturally, closer to the Philippines. Donala Rumokoy told me he spent Rp. 25 million (around US \$ 23,000) just to charter the KM Ratu Maria to deliver the ballot papers to Miangas when it only has 450 voters”. Andreas Harsono, 2004.

20 “... That morning his guests included Alfredo Papea Pagtun, a 38-year old pastor in Sarangani, who visited Miangas to meet his relatives. “My late mother is a Miangas (woman) but father is a Filipino of Bloan tribe” Pagtun said. Andreas Harsono, 2004.

21 “... Just listen to Ennos Nangori a Miangas sailor: “I began to work in the Philippines in 1992 on a fishing ship named Dolly 15. It was a Filipino ship, fishing mostly in Indonesia waters. I got the job because I speak Cebuano”. Andreas Harsono, 2004.

22 “...If the Republic of Indonesia is peaceful, we are loyal to Indonesia. But if Indonesia is not at peace, well, we’re closer to the Philippines, you know, we could head for the Philippines in the morning and back in the evening, just three or four hours sailing with prau,” said Lupa. Andreas Harsono, 2004.

23 “...Hengky Vantriardo, the Indonesian Army lieutenant, told me that he believes the Miangas people use the border issue as bait to receive more subsidies from Manado and Jakarta. It is a mentality, Hengky said” Andreas Harsono, 2004

sekaligus mendorong perhatian dari pemerintah kabupaten dan propinsi menghadirkan sejumlah proyek dan sumbangan.

*"Agitated villagers kept vigil outside the residence of the sub-district head, threatening to set a fire if their calls for justice would not be heard. The next day, the Regent Elly Lasut arrived to prevent the situation from escalating. About two hundred people dressed in black, mobilized to express their outrage at the senseless death and their acute neglect by the Indonesian state. They lowered the Indonesian flag at the Miangas pier and greeted the local government delegation by waving a Philippine flag. In shock, Indonesian authorities wasted no time in wooing back the island population. Sack of rice, assorted medicines and sports equipment were doled out almost immediately. Officially, the incident was downplayed as a 'spontaneous emotional response to the death of a villager'. But it is obvious that the dramatic protest action has left a deep impression on worried provincial officials. Two years after the incident, the once sleepy island is awash with government projects: the pier has been upgraded and ware house constructed, and there is even talk of developing an airstrip to bering Miangas closer the world. Piped water and street lights arrived in 2006. A residence for a village doctor has been built, although the doctor has yet to arrive"*²⁴.

[...Para penduduk yang terhasut tetap berjaga-jaga di luar kediaman kepala kecamatan, sambil mengancam akan membakarnya jika permintaan keadilan bagi mereka tidak didengar. Besoknya, bupati Elly Lasut tiba untuk mencegah situasi menjadi lebih panas. Kira-kira ada sejumlah 200 orang berpakaian hitam, termobilisasi untuk mengungkapkan kekejaman terhadap kematian yang tidak masuk akal dan kesedihan mereka terhadap negara. Mereka menurunkan bendera Merah-Putih yang berkibar di dermaga Miangas dan menyambut delegasi pemerintah (rombongan bupati) dengan kibaran bendera Filipina. Terkejut dengan sikap itu, tanpa membuang waktu pemerintah membujuk warga. Berkarung-karung beras, beragam obat-obatan dan peralatan olahraga diserahkan. Secara resmi

24 Djorina Velasco, "Between Manado and Davao: How the Indonesian island of Miangas is making use of its Philippines ties". Newsbreak Online. [http://newsbreak.com.ph/11 Februari 2007](http://newsbreak.com.ph/11%20Februari%202007).



kejadian itu terjadi sebagai suatu 'tanggapan emosional yang spontan terhadap kematian seorang penduduk desa'. Tetapi jelaslah bahwa tindakan protes secara dramatis tersebut telah meninggalkan suatu kesan mendalam dipihak petinggi-petinggi propinsi yang khawatir. Dua tahun sesudah kejadian itu, pulau Miangas yang tadinya seakan tertidur-lelap dipenuhi dengan proyek-proyek pemerintah. Dermaga telah diperbaiki dan gudang penampungan dibangun, dan bahkan ada rencana membangun landasan pacu (bandara) untuk membuat Miangas lebih dekat ke dunia. Pipa-pipa air dan lampu jalan tiba di Miangas pada tahun 2006. Juga dibangun sebuah rumah dinas untuk dokter desa, walaupun dokternya sendiri belum tiba di sana..]

Sebagai praktisi pertelekomunikasian, tulisan Ferdi Rosman Feisal tidak saja memberitakan pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Miangas²⁵. Ia juga menyoroti keberadaan depot logistik yang dibangun atas dasar permintaan warga kepada presiden SBY dalam video conference tanggal 26 Februari 2006, diresmikan oleh presiden awal Januari 2007; namun hingga pertengahan tahun 2008 tetap kosong. Padahal, gudang atau depot logistik itu dibangun dengan biaya yang cukup mahal²⁶. Dan gudang depot logistik bukanlah satu-satunya fasilitas yang sudah dibangun tapi belum difungsikan. Velasco, seperti sudah dikutip di atas mencatat adanya rumah dokter yang dibangun tetapi dokternya tidak kunjung datang²⁷. Padahal, pemerintah daerah telah menyediakan dana-insentif berupa honorarium yang cukup besar untuk dokter yang mau bertugas di sana. Atau tentang kekurangan guru baik untuk tingkat Sekolah Lanjutan Pertama maupun Sekolah Menengah Kejuruan²⁸.

25 "Teknologi tepat guna dijadikan model fastel perbatasan negara dan daerah tertinggal" Ferdi Rosman Feisal.

26 "Depot Logistik Miangas yang Kosong" Ferdi Rosman Feisal, 30 April 2008, Sekar Telkom.

27 Velasco, 11 Februari 2007: 3.

28 Kompas, 27 Juni 2007. "Dem masa depan anak yang lebih baik".

Membaca satu per satu "Ironi di Antara Simbol dan Realitas" dan "Miangas Nun Jauh di Mata" reportase Jean Rizal Layuck dan Edna Pattisina, membuat hati siapapun miris. Sesudah membaca berita berbagai kunjungan pejabat dan rencana pembangunan yang sudah diprogramkan di sana. Ada empat buah tugu yang dibangun dengan biaya mulai dari ratusan juta hingga milyaran. Ada yang selesai dan sudah diresmikan, ada pula sebuah tugu yang terbengkalai. Ada bantuan program mesin untuk perahu tapi terkendala dengan terbatasnya BBM. Ada tiga tangki BBM yang sejak dibangun tahun 2008 terbiar kosong. Ada gudang Depot Logistik yang sudah diresmikan Presiden (dari Tomohon, 2007) tetap kosong dan dihuni oleh semut bersama kepiting pantai. Ada sekolah yang dibangun tanpa disertai penempatan guru yang memadai. Ada rumah dokter yang tidak pernah dihuni karena dokternya enggan bertugas di pulau terpencil. Dan banyak lagi temuan kedua wartawan ini²⁹. Tidak heran jika keduanya menyatakan "...ibarat sebuah rumah, rona kehidupan Miangas dan Marore masih bergerak di dapur, bukan beranda sebagaimana slogan pembangunan wilayah perbatasan"³⁰.

Ada berita, isinya akan membuat dahi pembaca yang akrab dengan Miangas, berkerut. Ambillah contoh salah satu wawancara, seorang pejabat negara yang menyatakan meskipun ada dana yang tersedia, namun betapa sulitnya membangun Miangas dan Marore karena penduduknya dalam jumlah yang besar pindah ke Mindanao:

"....Sekarang yang sedang dikhawatirkan adalah pulau di Marore dan Miangas, Sulawesi Utara, karena penduduknya yang hanya 20 ribu orang sekarang pindah ke Filipina..³¹

29 Kompas, Sabtu, 15 Agustus 2009, "Ironi di Antara Simbol dan Realitas"; dan Kompas, Jumat, 21 Agustus 2009, "Miangas Nun Jauh di Mata".

30 Kompas, Jumat, 21 Agustus 2009, "Miangas Nun Jauh di Mata"

31 Tempo interaktif, Senin, 17 April 2006. Keterangan Pers Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi, dilaporkan oleh Endang Purwanti.



Sejak masa kolonial, catatan tentang jumlah penduduk Miangas seperti yang dilaporkan oleh H.J. Lam, pada tahun 1923 sebanyak 658 jiwa³². Sebelum tahun 1885 pernah mencapai 1000 jiwa. Tapi karena ada epidemi kolera, hampir separuh penduduknya pindah ke pulau Karakelang (Talaud)³³. Pada tahun 1960-an, jumlahnya mendekati angka 750 jiwa dan saat itu sekitar 200 jiwa dipindahkan oleh pemerintah ke pulau Karakelang dan hingga kini mereka beranak pinak di pemukiman antara Beo – Rainis. Pada tahun 1972, sesudah bencana tsunami, 90 Kepala Keluarga atau kurang lebih 400 jiwa dipindahkan oleh Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara ke Dodap, kabupaten Bolaang-Mongondow³⁴. Jumlah penduduk di pulau Marore tidak jauh berbeda dengan Miangas. Tahun 2002 tercatat sebanyak 645 jiwa mendiami pulau seluas 168,5 hektar³⁵. Dengan demikian, jumlah 20.000 jiwa merupakan sebuah angka yang terlampau tinggi bagi dua buah pulau seluas 168,5 hektar dan 315 hektar.

Berkaitan dengan jumlah penduduk, ada berita seolah-olah sebagian dari warga Miangas secara kultural merupakan bagian dari Filipina. Kesan seperti ini oleh pembuat berita dikuatkan dengan pernyataan soal bahasa yang digunakan sehari-hari adalah bahasa Tagalog, atau mata uang yang digunakan adalah peso. Jika disimak dengan baik, keterangan seperti itu ada benarnya jika si pembuat berita menilikinya berdasarkan waktu. Ketika perjanjian lintas batas disepakati dan perdagangan pada periode akhir tahun 1950-an hingga akhir tahun 1960-an masih ramai, ada warga yang menyimpan baik rupiah maupun peso sebagai mata uang

32 H.J. Lam, 1932:46.

33 H.J. Lam, 1932: 47.

34 Hasil kunjungan lapangan di Dodap, 4 Maret 2011.

35 Sri Suharjo, dkk. 2002. Marore, Suatu Kampung di Wilayah Perbatasan. Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, Manado. Halaman 17.

yang dapat digunakan dengan siapa mereka belanja. Begitu pula dengan bahasa. Sudah sejak dahulu kala, sehari-hari warga menggunakan bahasa Talaud dialek Nanusa. Jika mereka berkomunikasi dengan sesama warga Indonesia, ada dua bahasa yang digunakan. Bahasa Indonesia atau Melayu Manado³⁶.

Berita lainnya ialah soal integritas teritorial, transnational crime (terorisme, penyelundupan senjata dan obat bius atau narkoba) sebagaimana dilaporkan tidak hanya oleh media³⁷ tetapi juga tertulis dalam laporan penelitian³⁸. Menjadikan pulau Miangas sebagai persinggahan dalam pelayaran bagi pelaku aktivitas ilegal sangatlah berisiko bagi pelakunya. Di pulau seluas 315 hektar dengan jumlah penduduk 762 orang pada bulan Mei 2008 dan terkonsentrasi dalam satu pemukiman, dan pola interaksi antar warga maupun antara warga dengan petugas yang intensif, kehadiran seorang pendatang dengan mudah dan cepat diketahui. Adapun personel yang ada di pos-pos keamanan, keimigrasian semuanya berjumlah kurang lebih 40 orang (sudah termasuk pihak personel dari Filipina). Mereka sudah berbulan-bulan bertugas dan mengenal satu per satu warga setempat. Kalau selama ini ada pelintas

36 Lihat, Struktur Dialek Miangas. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1986: "... Dialek Miangas digunakan oleh penduduk di pulau itu, baik dalam lingkungan rendah maupun lingkungan tinggi. Hal itu tampak dari penggunaan dialek ini dalam upacara-upacara resmi dan keagamaan. Penggunaan bahasa Indonesia atau dialek Melayu Manado oleh anak-anak masih kurang diandalkan walaupun dapat dikatakan masih sangat sulit..."(halaman 1) Pada bagian lain tim peneliti menjelaskan bahwa "...Dialek Miangas sebagai salah satu dialek bahasa Talaud termasuk ke dalam rumpun bahasa Filipina..."(halaman 4). Hal ini sama saja dengan bahasa-bahasa di Sangihe dan Talaud serta Minahasa yang oleh J.C. van Eerde, masuk dalam kelompok bahasa-bahasa Filipina dan lebih besar lagi ke dalam kelompok bahasa Austronesia. Lihat J.C. van Eerde, 1920, *Inleiding tot de Valkenkunde van Nederlandsch Indië*. Deel 1, p. 2 – 4. Dalam laporan ini tim juga menemukan sejumlah warga dapat berbahasa Bisaya dan Tagalog, bahkan ada yang paham bahasa Inggris.

37 "Berkunjung ke pulau tempat transit para pelaku Bom Bali" Jawa Pos 13 Oktober 2005. www.jawapos.co.id. (Miangas disebut sebagai tempat transit teroris).

38 Lihat, Poltak Partogi Nainggalan (Ed.). *Batas Wilayah dan Situasi Perbatasan Indonesia: Ancaman Terhadap Integritas Teritorial*. Tiga Putra Utama, Jakarta, 2004.





Gambar 5.5
Mendagri disambut oleh tokoh
masyarakat Miangas



Gambar 5.6
Gubernur Sulawesi Utara
berkunjung ke Miangas

batas yang pulang pergi ke wilayah MNLF di Mindanao, maka jalur yang digunakan adalah gugusan pulau-pulau di kecamatan Nusa Tabukan³⁹.

Berita yang lebih akhir (Mei, 2011) adalah kunjungan Menteri dalam Negeri Fauzi Gamawan ke Miangas. Dari sekian kunjungan para pejabat, ada yang meninggalkan kenangan manis dan berarti bagi warga yang merasa betapa mereka dihargai sebagai bagian dari republik ini dengan kehadiran seorang menteri⁴⁰. Kunjungan pejabat militer yang meresmikan monumen penanda 'supremasi pertahanan bangsa di wilayah perbatasan' pun memberi harapan bagi warga, terutama anak muda yang bercita-cita menjadi anggota militer⁴¹. Hal ini karena sudah sejak Panglima Angkatan

39 Lihat, Takashi Shiraishi & Alex J. Ulaen, 2004, *The traffic zone reconsidered*, Menado-Sangihe/Talaud-Mindanao. Dalam *Dynamics studies on the everyday life and resources management in shagtime world Wallacea*. Kyoto: Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University.

40 "...Ini merupakan kunjungan menteri negara yang pertama mengunjungi kakinya di pulau Miangas. Kunjungan ini sangat berarti bagi kami" ujar Raul Pase (45) warga setempat. http://www.sulutlink.com/berita2005/komentar_atas_kunjungan_Menteri_PDT_Santoso_Yusuf_Menteri_PDT_juga_menyetujui_pembangunan_Gudang_Depot_Logistik.

41 Patung Santiago, yang dibangun TNI-AD diresmikan Panglima Kadam VII Wirabuana, Mayjen Djoko Susilo.... "Patung setinggi 7 meter itu dinilai sebagai supremasi pertahanan bangsa Indonesia di wilayah

Darat Jenderal Try Sutrisno, diperkuat dengan kunjungan jenderal L.B. Murdani pada tahun 1986, pihak TNI-AD memberi prioritas penerimaan calon-calon militer.

Berita media pun merekam berbagai reaksi warga atas kunjungan-kunjungan yang ada. Entah itu berupa ucapan terima kasih karena perhatian perhatian pemerintah⁴², atau kunjungan politisi yang mengumbar-janji tak ditepati⁴³, serta ungkapan kekesalan warga bagi pemberi janji yang tidak ditepati: "...Kami, masyarakat Miangas, mau percaya sama siapa lagi kalau terus dibohongi pemerintah", kata Gusti Papea kepada media-cetak⁴⁴.

5.2 Miangas: dalam Beberapa Hasil Kajian

Keterangan tentang pulau Miangas tidak hanya dapat dibaca lewat media cetak tetapi juga dalam hasil-hasil penelitian mutakhir. Salah satunya adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi DPR-RI⁴⁵. Dalam laporan yang sudah dipublikasi dalam bentuk buku ini Miangas dan pulau-pulau di perbatasan digambarkan sebagai berikut:

perbatasan" Kata Pangdam. Pembuatan patung itu menelan anggaran Rp. 1.2 miliar... bersumber dari pemprov Sulut, Pemkab Talaud & Mabes TNI. Kompas, 21 Agustus 2009.

- 42 "... ini merupakan menteri negara pertama menginjakkan kakinya di pulau Miangas. Kunjungan ini sangat berarti bagi kami," ujar Raul Pase (45) warga setempat. "Biar busu-busu, torang tetap cinta Indonesia. Cuma, sampai kapan torang bisa bertahan jika untuk makan saja tidak ada" getarnya sambil menatap jauh samudra Pasifik dihadapannya. Berita Sulut, 11 Oktober 2005.
- 43 Kompas, 27 Juni 2007 "... Demi Masa Depan Anak yang Lebih Baik". Pada kunjungan DPR-RI di Miangas...tahun 2006...terlontar janji mereka akan membawa 6 anak pulau itu untuk belajar di sekolah unggulan di pulau Jawa. Janji ini tidak ditepati. Anak-anak tersebut akhirnya jadi tanggungan Kodim setempat dan Bupati Talaud.
- 44 Lihat: Kompas, Sabtu, 15 Agustus 2009. "Ironi di antara Simbol dan Realitas" oleh Jean Rizal Layuck dan Edna C. Pattisina.
- 45 Lihat Poltak Partogi Nainggolan (Ed.) Batas Wilayah dan Situasi Perbatasan Indonesia: Ancaman terhadap Integritas Teritorial. Tiga Putra Utama, Jakarta, 2004.



(1) "...salah dari pulau-pulau yang rentan dan terbatas daya dukungnya.."; (2) "... (senantiasa) dihadap oleh persoalan ekonomi dan transportasi yang sulit..." (3) "... sedang menghadapi persoalan lingkungan hidup yang kronis sehingga sering terjadi erosi secara besar-besaran akibat merajalelanya penebangan hutan dan pepohonan..." (4) "... tingkat pertumbuhan penduduknya rendah karena migrasi besar-besaran ke berbagai tempat termasuk sebagian menuju Mindanao..."⁴⁶.

Beberapa hal yang tidak akurat misalnya, soal identifikasi warga Miangas yang disebut-sebut bahwa sebagian besar sudah kawin mawin dengan orang Filipina dan keturunan Filipina. Kekeliruan ini tidak hanya dijumpai dalam berita media tetapi juga ditemukan dalam sebuah karya ilmiah⁴⁷. Dalam karya itu tertulis:

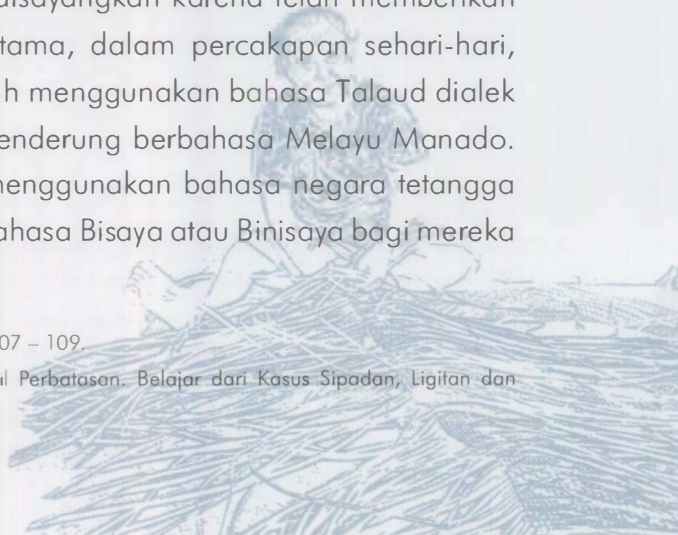
".... Pulau Miangas, secara hukum pulau tersebut milik Indonesia tetapi secara politik merupakan milik Filipina karena bahasa yang dipakai dalam percakapan sehari-hari adalah bahasa Tagalog bukannya bahasa Indonesia. Begitu juga dengan mata uang yang dipakai, masyarakat di pulau tersebut lebih banyak menggunakan mata uang Peso bukannya Rupiah"⁴⁸. (garis bawah dari pengutip).

Tidak jelas apakah si penulis karya yang dipublikasi dan awalnya adalah sebuah disertasi ini pernah berkunjung ke Miangas atau tidak. Sebagai karya akademik, sangat disayangkan karena telah memberikan informasi yang menyesatkan. Pertama, dalam percakapan sehari-hari, orang Miangas (generasi tua) masih menggunakan bahasa Talaud dialek Nanusa, sementara anak muda cenderung berbahasa Melayu Manado. Kalau tokoh ada penduduk yang menggunakan bahasa negara tetangga (Filipina), mereka menggunakan bahasa Bisaya atau Binisaya bagi mereka

46 Lihat Poltak Partogi Nainggolan (ed.), 2004:107 – 109.

47 Mustafa Abubakar. Menata Pulau-pulau Kecil Perbatasan. Belajar dari Kasus Sipadan, Ligitan dan Sebatik. Penerbit Buku Kompas Jakarta 2006

48 Mustafa Abubakar, 2006:97.



yang pernah berkunjung ke Propinsi Davao del Sur dan kota Davao; atau bahasa Cebuano bagi warga yang pernah berkunjung ke daerah South Cotabato⁴⁹; atau bahasa Pangasinan bagi yang berkunjung ke Mindanao lewat Propinsi Davao Oriental⁵⁰. Tagalog adalah bahasa resmi (nasional) yang biasanya digunakan dalam situasi resmi warga Filipina; sementara warga Miangas yang pernah berkunjung ke Mindanao umumnya penjual jasa (buruh), dan berhubungan dengan pemberi kerja yang menggunakan adalah bahasa lokal (Bisaya, Cebuano, Pangasinan, dll dengan variasi dialek lokal). Tentang penggunaan mata uang Peso lebih banyak dari Rupiah juga merupakan informasi yang tidak akurat. Sejak era Orde-Baru, meskipun Miangas merupakan salah satu pelabuhan pintu-masuk bagi pelintas-batas sesuai Perjanjian Lintas Batas (Border Crossing Agreement) yang disepakati pemerintah Indonesia dan Filipina sejak tahun 1956, orientasi ekonominya tertuju ke Nanusa dan Manado. Selain itu, bagi warga Miangas yang menyekolahkan anaknya di Manado, yang mereka cari adalah Rupiah bukan Peso. Menyimak kedua publikasi di atas sepertinya para penulisnya hanya mendasarkan pada informasi dari pihak kedua dan tidak turun langsung ke lapangan. Anggapan seperti ini akan muncul dari pembaca jika menyimak dua laporan lainnya tentang Miangas baik yang ditulis oleh tim Peneliti Departemen Sosial RI⁵¹ dan tim peneliti Unsrat & Kemenlu RI⁵². Laporan tim peneliti Pusbangtansosmas Departemen Sosial misalnya secara tegas menyatakan bahwa:

49 Keterangan tentang pemakaian bahasa Cebuano, lihat catatan kaki 9 (Andreas Harsono, 2004).

50 Hasil kerja lapangan di Mindanao tahun 1996 – 1997; Miangas 2007 dan 2008.

51 Revitalisasi Model Pemberdayaan Pranata Sosial di Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaud Propinsi Sulawesi Utara. Ringkasan Laporan. 2008. Pusat Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial RI.

52 Identifikasi Masalah Keamanan Perbatasan Kepulauan Talaud (Indonesia – Filipina) dalam Perspektif Sosial Ekonomi dan Politik. 2010. Laporan Penelitian. Kerjasama Kementerian Luar Negeri RI dan Universitas Sam Ratulangi Manado.



"... Pulau Miangas tidak seperti yang pernah diungkapkan oleh beberapa pengamat yang terkesan sebagai tempat penyelundupan, tempat teroris, bahkan pernah berkibar bendera Philipina mata uang yang digunakan bukan rupiah dan lainnya. Selama seminggu Tim Peneliti Pusbangtansosmas berada di pulau Miangas tidak menemukan hal-hal yang pernah dilonarkan oleh beberapa pengamat seperti yang diungkapkan pada kerangka konseptual di depan"⁵³.

Lebih lanjut tim peneliti Pusbangtansosmas menjelaskan bahwa kondisi ekonomi penduduk memang miskin antara lain "... karena relatif sulitnya memasarkan hasil laut kerajinan dan perkebunan" dan itu karena faktor alam yang bergelombang. Tentang program bantuan pemerintah, tim peneliti Pusbangtansosmas Departemen Sosial RI, memberi rekomendasi yang menandakan bahwa mereka paham benar situasi warga yang mereka kaji, yakni:

1. Perlu pergeseran bantuan yang semula lebih banyak barang (material), menjadi lebih bersifat pengembangan sumber daya manusia dengan memperbanyak pelatihan keterampilan yang sesuai dan pendampingan (pemberdayaan).
2. Perlu kajian mendalam terlebih dahulu bagi program-program pembangunan yang akan diluncurkan, khususnya yang bersifat bantuan sosial.
3. Perlu adanya buku saku atau leaflet tentang pulau Miangas⁵⁴.

53 Ringkasan Laporan. 2008. Pusat Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial RI, halaman 10.

54 Ringkasan Laporan. 2008. Pusat Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial RI, halaman 12.

Rekomendasi ketiga ini menarik agar pencari berita tentang Miangas tidak dibingungkan oleh berbagai informasi yang tidak berdasar atau kadang membingungkan.

5.3 Catatan Akhir

Miangas, dari hari ke hari semakin dikenal. Tidak hanya dalam pidato-pidato resmi pejabat negara yang menyapa warganya, "...dari Sabang sampai Merauke, dan dari Miangas sampai pulau Rote"⁵⁵, tetapi juga lewat iklan mie instan⁵⁶ dan program ujungnegeri TV-One. Publikasi seperti itu membuatnya semacam mendapat perlakuan khusus jika dibandingkan dengan pulau-pulau di perbatasan lainnya seperti pulau Marampit, pulau Marore, dan pulau Kawio di wilayah propinsi Sulawesi Utara. Pulau yang menyandang dua nama (Miangas dan Palmas) jelas sejak semula dimiliki seorang juragan semata yang kemudian mewariskannya kepada anak negeri yang berhak mengurus diri sendiri dan bangsanya. Persoalan yang tersisa, dan dalam waktu dekat akan memiliki kepastian hukum adalah soal perbatasan (laut) antara dua negara. Dan jika perundingannya telah usai, Miangas bukan lagi beranda-depan yang berada di pekarangan (laut) tetangga, tetapi di pekarangan sendiri. Semoga.

55 Lihat naskah/rekaman pidato Presiden pada acara resmi, terutama pidato kenegaraan setiap tanggal 17 Agustus.

56 Lagu iklan Indomie-seleraku "Dari Sabang sampai Merauke, Dari Miangas sampai Rote... Indo Mie Seleraku.



BAB 6

PENUTUP



Pulau Miangas atau *Las Palmas* (*Palmas Island*) memiliki keunikan dalam persoalan tapal-batas dua negara, Indonesia – Filipina. Pulau Miangas pada masa lalu yakni ketika kedua negara masih berstatus tanah jajahan – Indonesia masih berstatus Hindia Belanda, jajahan Belanda dan Filipina jajahan Amerika Serikat – menjadi obyek sengketa antara Belanda dan Amerika Serikat.

Ada perbedaan pendapat antara kedua negara kolonial tersebut. Di satu pihak, Amerika Serikat yang menerima Filipina dari Spanyol, menganggap Pulau Miangas adalah wilayahnya berdasarkan Perjanjian Damai antara Amerika Serikat dan Kerajaan Spanyol yang ditandatangani tanggal 10 Desember 1898 di kota Paris. Di pihak lain, Belanda telah menampakkan kedaulatannya atas pulau Miangas sejak 1889 dengan melantik *kapiten laut*, pejabat pemerintah setingkat kepala desa. Sengketa tersebut telah diselesaikan oleh Mahkamah Arbitrase Internasional di Den Haag dengan arbitrator tunggal Dr. Max Huber, ahli hukum berkebangsaan Swiss. Pada tanggal 4 April 1928 arbitrator tunggal ini memutuskan bahwa Pulau Miangas seluruhnya adalah milik Belanda yang berada di wilayah tanah jajahan, Hindia Belanda.

Ketika Republik Filipina merdeka dan menetapkan Konstitusinya, penentuan wilayahnya didasarkan pada Perjanjian Damai yang ditandatangani di Paris 10 Desember 1898, antara Amerika Serikat dan

Spanyol, atau lebih dikenal dengan sebutan Traktat Paris (*Paris Treaty*). Menurut isi perjanjian yang dijadikan dasar penentuan wilayah dalam konstitusi Filipina, pulau Miangas atau *Las Palmas (Palmas island)* berada di dalam wilayah teritorial Filipina. Namun, pemerintah Filipina tetap menghormati keputusan Mahkamah Arbitrase Internasional tentang kepemilikan pulau Miangas yang sah ada pada pihak Belanda.

Ketika Indonesia menyatakan kemerdekaannya, sebagai pewaris wilayah Hindia Belanda, Pulau Miangas merupakan salah satu pulau miliknya yang berada di “kawasan perbatasan”. Penentuan wilayah seperti itu menyebabkan terjadinya “tumpang-tindih” di kawasan perbatasan utara antara Indonesia – Filipina.

Pada tahun 1950-an, meskipun pemerintah kedua negara baru merdeka ini telah menyadari adanya persoalan dalam penentuan perbatasan, namun ada hal yang harus mendapat perhatian yaitu soal kehadiran warga dari kedua negara ini di daerah masing-masing. Orang Indonesia berada di wilayah Filipina, sebaliknya orang Filipina berada di wilayah Indonesia tanpa prosedur keimigrasian. Dan, semangat persaudaraan Asia-Afrika pula lah yang mendorong kedua pihak mencari pemecahan atas persoalan di atas, dengan mengedepankan bagaimana memecahkan permasalahan yang ada di daerah perbatasan kedua negara, terutama menyangkut kehadiran (ilegal) dari warga negara masing-masing pihak di wilayah tetangga; sementara persoalan penentuan tapal-batas masih dalam tahap pembahasan.

Pertemuan demi pertemuan berakhir pada penandatanganan Kesepakatan Keimigrasian antara kedua negara pada 4 Juli 1956. Kesepakatan ini disertai dengan aksi repatriasi warga kedua belah pihak. Kesepakatan tersebut kemudian diperbarui dengan perjanjian-perjanjian berikutnya yang mengatur pengawasan pelintas-batas, kemudian perdagangan lintas-batas, dan terakhir adalah kerja sama antara aparat



keamanan dari kedua belah pihak untuk melakukan pengamanan perbatasan laut. Bersamaan dengan itu pula, terutama setelah Indonesia meratifikasi UNCLOS, dilakukan perundingan dalam penentuan tapal-batas kedua negara. Perundingan itu hingga kini masih berjalan – dan menurut informasi – sudah mendekati kesepakatan akhir.

Adanya pengakuan Pemerintah Filipina terhadap kepemilikan Pulau Miangas yang tercermin dalam perjanjian-perjanjian bilateral maupun dalam perubahan konstitusinya menunjukkan bahwa sebenarnya tidak ada masalah dengan kepemilikan pulau Miangas. Hal itu telah ditegaskan oleh Menlu RI Hassan Wirajuda: *"...pulau Miangas sudah jelas milik kita. Tidak ada lagi pihak lain yang menyoal hal itu"*. Tapi, ketika Indonesia tidak dapat mempertahankan pulau Sipadan dan Ligitan, tahun 2002, banyak pihak mengkhawatirkan status Pulau Miangas. Kekhawatiran serupa berulang kembali pada tahun 2009, hanya karena salah satu biro wisata di Davao, Filipina, mencantumkan pulau Miangas dan pulau Marore sebagai salah satu tujuan wisata. Kekhawatiran seperti itu beralasan, karena meskipun pemerintah Filipina tidak mempersoalkan status Pulau Miangas, tetapi ada warga Filipina, antara lain dari kalangan oposisi di kongres yang mengangkat soal apakah sah keputusan seorang arbitrator dalam kasus Miangas dibandingkan dengan keputusan majelis arbitrator dalam kasus Sipadan-Ligitan. Ada juga isu lain yang digulirkan oleh seorang ahli hukum, Datu Michael O. Mastura (2007), tentang "wilayah bangsamoro".

Penegasan Menlu di atas juga diperkuat oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, bahwa tidak ada pembicaraan di tingkat kepala negara soal status Pulau Miangas. Hal yang perlu dilakukan adalah bagaimana pemerintah membangun daerah perbatasan sebagai bukti penampakan kedaulatan negara yang efektif. Dan ternyata, berbagai komentar yang menunjukkan kekhawatiran yang berlebihan lebih banyak

didasari kenyataan bahwa pengetahuan tentang kawasan perbatasan Indonesia – Filipina dan lebih khusus Pulau Miangas, hanya dimiliki oleh sedikit orang.

Memahami kawasan perbatasan Indonesia – Filipina dan Pulau Miangas tidaklah lengkap kalau tidak melihat latar sejarah perkembangan kawasan ini. Para sejarawan bahari serta pemerhati melihat kawasan ini pada abad-abad lampau menjadi “lintasan-niaga” yang semula didominasi oleh pelaut-peniaga berbahasa Melayu, disusul oleh pelaut-peniaga Cina, kemudian pelaut-peniaga Eropa. Pengalaman masa-lampau, terutama semasa kawasan ini merupakan satu kesatuan yang diikat oleh “jejaring-Melayu” meninggalkan tradisi perniagaan yang di satu sisi dipandang ilegal oleh peraturan sebuah negara, tetapi di sisi lain, ada pembenaran-tradisi bagi pelaku pelintas-batas. Perjanjian Lintas-Batas antara dua negara merupakan keputusan yang arif dan telah menyelesaikan persoalan ini.

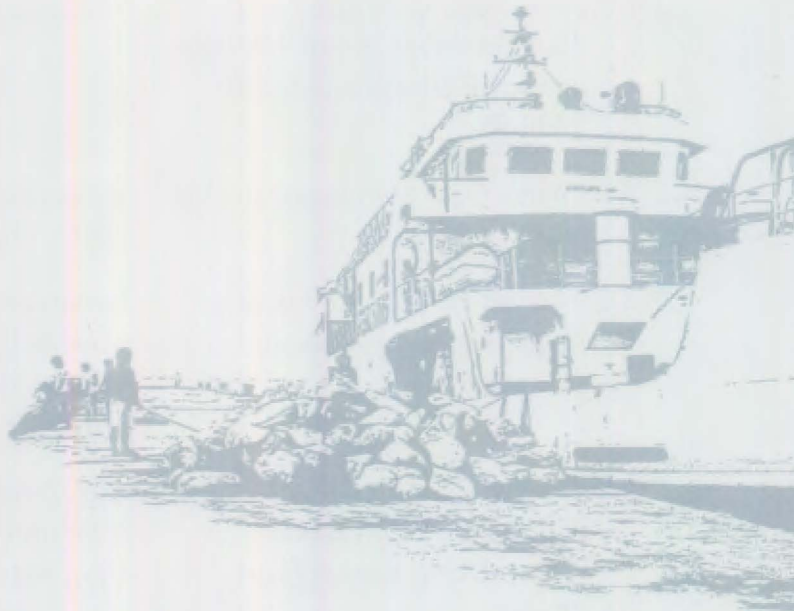
Pengaruh peradaban luar melalui perniagaan menghadirkan tidak saja pengaruh peradaban Kristen (dan Eropa) di samping peradaban Islam dan Melayu tetapi juga jejak-jejak DNA yang tercecercer dari para pelaut dan pejabat kolonial telah menyumbang keaneka-ragaman ciri fisik warga. Ada pula yang berpendapat bahwa sebenarnya satuan-satuan komunitas tradisional ini retak dan terbelah karena kehadiran negara yang diwarisi dari masa kolonial.

Pada masa itu, pulau kecil seluas 315 hektar dikenal dengan sekian nama, dan yang paling sering dan resmi digunakan adalah Miangas dan Palmas. Pulau ini telah mendapat perhatian sejak masa lalu. Semasa penjajahan, seorang residen (Manado) harus berkunjung ke sana sebagai tanda apresiasi atas sikap pemimpin lokal dan warganya menolak simbol kekuasaan lain yakni, bendera Spanyol. Pengalaman serupa tampaknya berulang, Sejak awal tahun 2000-an, pulau ini mendapat



perhatian melebihi dua pulau lainnya yang berstatus “pulau terluar” dan “perbatasan” di propinsi yang sama, yaitu Pulau Marampit dan Pulau Marore. Perlakuan seperti itu teramati sebagai hal yang membawa dampak berupa “pelumpuhan semangat bahari” ada di kalangan warga dan secara tidak disadari menciptakan ketergantungan warga.

Perhatian pemerintah yang ditujukan pada penampakan simbol kedaulatan negara melalui slogan pembangunan daerah perbatasan sebagai “beranda-depan negara” tampaknya lebih banyak menyedot dana, sementara pemenuhan kebutuhan warga – sesuai kebijakan yang disusun oleh pemerintah – belum mendapat perhatian yang menyeluruh (holistik), seperti halnya pengadaan infrastruktur (fisik) tapi belum didukung baik dengan pengadaan aparatnya maupun material lainnya.



Lampiran 1:

DAFTAR PUBLIKASI MEDIA TENTANG MIANGAS (sumber Indonesia)

Thn	Judul	Sumber
1985	Penggantian Gubernur	Tempo online, 2 Maret 1985 Herry RD. Nachrawi
1987	Subsidi Untuk Perintis	Tempo online, 7 Nopember 1987 MW & Linda Djalil
1993	Kembalinya si Anak Haram	Tempo online, 12 Juni 1993 Ardian Taufik Gesuri & Waspada Santing
1999	Golongan Lembaga Kursi (Sumber KPU: Sangir/Miangas mewakili Etnis Minoritas di MPR-RI	Tempo online, 30 Agustus, 1999
2002	Mercu Suar Membawa Untung	Tempo online: 23 Desember 2002 I.G.G. Maha Adi
2002	Hassan Wirajuda: "Tak ada lagi Pulau yang Menjadi Sengketa"	Tempo online: 23 Desember 2002 Purwani D. Prabandari, Bina Bektiati, & Hermien Y. Kleden (wawancara khusus)
2003	Menlu: "Jangan Campuradukkan Batas Wilayah dan Kepemilikan Pulau"	http://www.gatra.com 6 Januari 2003 Tma, Ant.

- | | |
|--|--|
| 2003 Menteri Luar Negeri: Tak ada pulau lain yang berstatus sengketa | Tempo interaktif, Rabu, 15 Januari 2003 14.05 WIB
D.A. Chandraningrum-TNR |
| 2003 Masalah Utama Pulau Terluar Indonesia Soal Kehadiran Fisik | Tempo Interaktif, Rabu, 15 Januari 2003
D.A. Chandraningrum-TNR |
| 2003 Sambung-menyambung Diambil Tetangga | Artikel Tempo Edisi 20 – 26 Januari 2003, rubrik Opini |
| 2003 Pulau Sengketa | Tempo online, 27 Januari 2003
Surat pembaca:
M.Wahid Supriyadi, Direktur Informasi Media Departemen Luar Negeri |
| 2003 Status Pulau Miangas | http://majalah.tempointeraktif.com
20 Januari 2003
Paulus Londo |
| 2003 Pulau Miangas Belum Sepenuhnya Milik Indonesia | Tempo online
12 Februari 2003
Verrianto Madjowa - TNR |
| 2003 Angkatan Laut Tambah Pasukan di Perbatasan | Tempo online
25 Februari 2003
Verrianto Madjowa - TNR |
| 2003 Suara Warga Perbatasan: Tolong naikkan harga hasil bumi | http://www.sinarharapan.co.id/berita/
Laporan: Eddy Lahengko |
| 2003 Menteri Kelautan: Sepuluh Pulau Indonesia Masih Bermasalah | Tempo interaktif 12 Juli 2003
Verrianto Madjowa - TNR |

- | | | |
|------|--|---|
| 2003 | Miagas, Pulau Terpencil di Ujung Sulawesi | http://www.korantempo.com/news/2003/3/17/nusantara
laporan Verrianto Madjowa |
| 2003 | Penyewaan Pulau: Mendulang Rupiah dari Pulau-Pulau Kosong | Tempo Interaktif, 22 September 2003
Dara Meutia Uning, Faidil Akbar |
| 2004 | KASAL Bantah Perebutan Pulau dengan Negara Lain | Tempo interaktif, 21 Februari 2004
Dewi Retno - TNR |
| 2004 | Reklamasi Pulau Nipa Butuh Rp. 80 Miliar | Tempo interaktif, Senin, 26 Juli 2004
Agriceli - TNR |
| 2004 | Tertatih-tatih di Perbatasan | http://64.203.71.11/kompas-cetak/
Jean Rizal Layuck, Rabu, 2 Juni 2004 |
| 2004 | Sabuk terluar Bernama Miagas | http://www.korantempo.com/news/2004/8/22/perjalanan
Laporan: veriyanto madjowa |
| 2004 | Belasan pulau terancam Hilang | Tempo interaktif, Jumat, 12 November 2004
Sunariah - Tempo |
| 2005 | Negara Berpagar Belasan Ribu Pulau | Tempo interaktif, Selasa, 8 Maret 2005
Arif/berbagai sumber tempo |
| 2005 | 6. Pulau Miagas (dari 12 pulau terluar) | http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0503 //Sabtu, 12 Maret 2005 |
| 2005 | Hasjim Djalal: Malaysia Tak Bersikap sebagai Tetangga Baik | Tempo online, 14 Maret 2005
Setiyardi & Fotografer Bernard Chaniago (wawancara khusus) |

- | | |
|--|--|
| 2005 Bendera Tetangga di Miangas | Gatra, 4 Juli 2005
Jurichal Antameng (Manado) |
| 2005 Menjaga Daulat Lewat 12 Titik | Tempo online, 15 Agustus 2003 |
| 2005 Dua belas Pulau terluar Indonesia yang membutuhkan perhatian khusus | Tempo online, 15 Agustus 2003 |
| 2005 Kekuatan TNI-AL memang menurun
(Laksamana Slamet Soebijanto) | Tempo online, 15 Agustus 2005
Arief Kuswardono, Zed Abidien,
Johan Budi S.P. (Wawancara khusus) |
| 2005 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono:
Perbatasan adalah beranda depan kita | Tempo online, 15 Agustus 2005
Bambang Harymurti, Toriq Hadad,
Gendur Sudarsono, Hanibal W.Y. Wijayanta, fotografer Hendra Suhara
(Wawancara khusus) |
| 2005 Dari Benggala hingga Batas Papua | Tempo online, 15 Agustus 2005 |
| 2005 Pada Sebidang Pantai Miangas | Tempo interaktif, 15 Agustus 2005 |
| 2005 Ketika Halaman Sudah Ditetapkan | Tempo online, 15 Agustus 2005 |
| 2005 Angkatan Laut RI-Filipina Patroli bersama | Tempo interaktif, Minggu, 28 Agustus 2005
Verrianto Madjowa |
| 2005 Menteri Negara Pertama ke Perbatasan
Lagu Indonesia Raya berkumandang di Miangas | http://www.sulutlink.com/berita2005
Laporan: Budi H. Rarumangkay |

2005 Pertahanan Laut Indonesia Lemah: Miangas Terancam Lepas	Berita Sulut, 11 Oktober 2005 Budi H. Rarumangkay
2005 Menteri Dukung Pembangunan Gudang Dolog Miangas	Humas Pemprop Sulut, 11 Oktober 2005
2005 Menanti Miangas Jadi "Halaman Depan"	Suara Pembaruan, Senin, 17 Oktober 2005 /Y.W. Nugroho
2005 Pulau Miangas Butuh Perhatian Khusus	Sabtu, 22 Oktober 2005 (vie)
2005 Berkunjung ke pulau tempat transit para pelaku bom Bali	Jawa Pos 13 Oktober 2005 www.jawapos.co.id
2005 Miangas ke Istana Negara	Ferdi Rosman Feisal Oktober 2005
2005 Jejak Sangihe di Mindanao	Tempo online, 28 Oktober 2005 R. Fadjri & Verrianto Madjowa
2006 Telkom & TNI-AD Bangun Tandon Air untuk Pos Perbatasan Negara di Pulau Miangas	Ferdi Rosman Feisal
2006 Prajurit Penjaga Perbatasan Negara di Pulau Miangas Mencari Ikan untuk Makan	Ferdi Rosman Feisal
2006 Enam Hari di Lautan	Ferdi Rosman Feisal (25-02-2006)
2006 Miangas-Marore Dijaga Intensif	Kompas, Jumat 10 Februari 2006 REN/MZW/REI
2006 Melihat Miangas dari sudut pandang yang lain	d-mog

- | | |
|--|---|
| 2006 Pangdam VII/Wirabuana
Benar-benar Meng hargai
Perjuangan Tim Merah Putih
Telkom ke Miangas | d-mog// 25 Februari 2006 |
| 2006 Teleconference Presiden
dengan Masyarakat Sabang,
Merauke, Miangas, dan
Atambua | http://www.presidensby.info/index |
| 2006 Garuda Sugardo: Gagal ke
Miangas | Tempo interaktif, 6 Maret 2006
he-r |
| 2006 Pendidikan di Ujung Utara
Nusantara
(Kompas, 16-03-06) | http://www.sampoernafoundation.org |
| 2006 Kesadaran Geografi Kita | www: Kompas.com. 17 April 2006
Sri-Edi Swasono |
| 2006 Indonesia Butuh Investasi Rp.
90 Miliar | Tempo interaktif, Senin, 17 April
2006
Endang Purwanti |
| 2006 Status Pulau Miangas dalam
Perspektif Sejarah | Majalah Cakrawala TNI-AL, 26
April 2006
Paulus Londo |
| 2006 Langkah Jitu Melawan
Keterpurukan | http://www.majalahtrust.com |
| 2006 INDOSIAR: Miangas, dll | Tayang Rabu, 28 Juni 2006
(12.00 WIB)
Reporter Asep Syaifullah
Kameramen: Dedi Effendi |

- | | |
|---|---|
| 2006 Menantang Badai Membelah Laut
Komitmen Bangun Daerah Perbatasan | Berita Sulut, 7 Juli 2006
Laporan: Budi H. Rarumangkay |
| 2006 Dr. Djohermansyah: Miangas Perlu di Perhatikan | Henry Dumais & Vanny Loupatty
Sabtu, 8 Agustus 2006 |
| 2006 Nama dan Peristiwa:
Uly Kibarkan Bendera di Miangas | http://kompas.com/kompas-cetak
Kamis 24 Agustus 2006 |
| 2006 KP-NKRI: Miangas-Marore Rentan Masalah | Vanny Loupatty
Selasa, 12 September 2006 |
| 2006 Bakti Telkom untuk Negeri
- Miangas terjangkau telpon | 26 September 2006 |
| 2006 Membangun Silaturahmi Pulau Terluar | http://www.gatra.com/2006-11-12
Nasional, Gatra no. 51 beredar
Kamis 2 Nop 2006 |
| 2006 Komisi I DPR Desak Telkom Prioritaskan Pembangunan Fastel di Perbatasan | Dpr.go.id 15 Nop. 2006
http://www.dpr.go.id/artikel |
| 2006 Marore, Miangas, Marampit Potensial 'Dicaplok' | http://www.identitasminaesa.com |
| 2006 Deplu RI: Status Kepemilikan Pulau Pasir Sudah Final Jadi Bagian Australia | Suara Karya online, Kamis 21 Desember 2006 |
| 2007 Berlayar ke Miangas Cerpen Gerson Poyk | http://www.suarakarya-online.com |

- | | |
|---|--|
| 2007 Presiden Resmikan Proyek Rp. 12,9 M di Tomohon (Minggu, 14 Januari) | http://www.danareksa.com |
| 2007 Kodam VII Wirabuana Amankan Pulau-pulau Perbatasan | http://www.rri-online.com
Senin, 05 Maret 2007
Rusdi Rahman/Heri Firmansyah |
| 2007 Pengalaman Prajurit Marinir Penjaga Pulau-pulau Terluar | Thursday, 22 Maret |
| 2007 Pulau Terluar Rawan Konflik Diinventarisasi | http://www.rri-online.com
WD |
| 2007 Survei Kelautan Pemetaan 12 Pulau Kecil Terluar Mendesak Dilakukan | http://www.kompas.com/kompas-cetak/0705/16
Rabu, 16 Mei 2007/GSA |
| 2007 Warga Miangas Butuh Tambahan Guru | Tempo interaktif, Rabu, 23 Mei 2007
Verrianto Madjowa |
| 2007 Ekspedisi Utara: Menggapai Marore Menyentuh Miangas | http://www.swarakita-manado.com_
28 mei |
| 2007 Sarana Transportasi Laut Terbatas Warga Miangas Kehabisan Stok Sembako | http://www.swarakita-manado.com |
| 2007 Miangas diproteksi menjadi daerah otonomi khusus | (erer) 30 mei 2007 |
| 2007 INDOSIAR: On air: 19 Juni 2007 (12.30 WIB) | http://news.indosiar.com/ |

- 2007 Demi Masa Depan Anak yang Lebih Baik http://www.kompas.com/kompas-cetak_27_juni
Laporan: Gesit Ariyanto & Jannes Eudes Wawa
- 2007 Tugu NKRI di Miangas, Marampit dan Marore <http://jurnalsulut.com/vnews>.
- 2007 Sulut Daftarkan 258 Pulau ke PBB
- Pulau Miangas berpotensi direbut negara-negara tetangga <http://www.gatra.com/2007-08-26/artikel>
- 2007 Menkes siapkan Rp. 252 M untuk bangun RS di Sulut <http://www.media-indonesia.com>
Laporan: Vouke Lontaan
- 2007 Cuaca Buruk Miangas Tidak Bisa Dijangkau <http://www.hariankomentar.com>
- 2008 Inilah Daftar 92 Pulau Terluar Nusantara <http://www.kompas.com>
Senin, 12 Mei 2008
WAH
- 2009 Miangas-Marore Bisa Jadi Sipadan-Ligitan Jilid II <http://www.kompas.com>
12 Januari 2009
- 2009 KSAL: Deplu Harusnya Tertantang Selesaikan Miangas
- 2009 Perbatasan Tak Terurus <http://www.kompas.com>
14 Februari 2009
(SF)
- 2009 Pulau Miangas diklaim Filipina, Deplu Santai <http://www.kompas.com>
Jumat 13 Februari 2009
HIN

- 2009 Soal Pulau Miangas:
Menlu: Kita Sering Ribut
<http://www.gatra.com>
14 Februari 2009
EL, Ant.
- 2009 Menlu: Soal Miangas, Banyak
Perdebatan yang Tidak Perlu
<http://www.kompas.com>
Senin, 16 Februari 2009
Inggried Dwi Wedhaswary
- 2009 Kemenlu RI. Door-stop
Interview Foreign Policy
Breakfast (130209) Hassan
Wirajuda
<http://www.deplu.go.id/>
Senin, 16 Februari 2009
- 2009 Nasional (Pulau Terluar)
Menjaga Miangas Tak Jadi
Las Palmas
http://www.gatra.com/versi_cetak
gatra No. 15 Beredar Kamis, 19
Februari 2009
Laporan: Astari Yanuarti,
Bernadetta Febriana, dan Rach
Alida Bahaweres
- 2009 TNI Dorong Pengadaan
Transportasi di Miangas
<http://www.kompas.com>
Senin, 20 Februari 2009
nar
- 2009 Perlu Penampakan Kedaulatan
RI di Miangas
<http://www.sinarharapan.co.id/>
Penulis: Sadina (pemerhati
masalah pertahanan)
- 2009 UI Kembali Aktifkan Program
Kuliah Kerja Nyata
<http://www.temppointeraktif.com/>
Rabu, 17 Juni 2009
TIA HAPSARI
- 2009 Universitas Indonesia Lepas
Mahasiswa ke Pulau Miangas
<http://www.temppointeraktif.com/>
Rabu, 15 Juli 2009
TIA HAPSARI
- 2009 Tim KKN UI Gali Potensi Pulau
Miangas
<http://www.kompas.com>
Senin, 27 Juli 2009
LTF

- | | |
|--|---|
| 2009 Ironi antara Simbol dan Realitas
Jean Rizal Layuck & Edna Pattisina | http://www.kompas.com
15 Agustus 2009 |
| 2009 Jangan Menangis Miangas | http://www.kompas.com
19 Agustus 2009 |
| 2009 Patung Santiago diresmikan di pulau Miangas | http://www.kompas.com
21 Agustus 2009 |
| 2009 Miangas nun Jauh di Mata Edna C. Pattisina & Jean Rizal Layuck | http://www.kompas.com
21 Agustus 2009 |
| 2009 Melaut di Indonesia, Sekolah di Filipina
Iwan Santosa/Agung Setyahadi | http://www.kompas.com
30 Agustus 2009 |
| 2009 32 Hari di Las Palmas (Pulau Miangas) dan Manado | Patricia Girsang (Mahasiswa KKN UI), Jumat 30 Oktober 2009 |
| 2010 Ribuan WNI Terancam "Stateless" | http://www.kompas.com
Selasa, 11 Mei 2010
ONG |
| 2010 Pembentangan Bendera Merah Putih Terpanjang, 7.000 meter Mengelilingi Pulau Miangas | http://www.muri.org
22 Mei 2010 |
| 2010 Talaud, Porodisa di Ujung Laut | Tempo interaktif, Senin, 21 Juni 2010 |
| 2010 Hampir Separuh Pengguna Narkoba Usia Produktif | http://www.tempointeraktif.com/
Selasa, 22 Juni 2010
Dianing Sari |

- 2010 Komitmen untuk Pulau Terluar <http://www.tempointeraktif.com/>
Sabtu, 24 Juli 2010
- 2010 Perundingan Batas Laut
Indonesia ternyata Belum
Kelar <http://www.tempointeraktif.com/>
Kamis, 19 Agustus 2010
Adisti Dini Indreswari
- 2010 Miangas Destinasi Alternatif
Backpacker <http://www.gatra.com>
24 Desember 2010
- 2010 Miangas, Pulau Menangis
yang Cocok Buat Backpackers Fitriyan G. Dennis/Firmansyah
Jumat, 31 Desember 2010.
- 2011 TNI AL Tingkatkan
Pengamanan Pulau Terluar <http://www.tempointeraktif.com>
Minggu, 23 Januari 2011
DIM/Ant
- 2011 Hasil Penelitian Badan
Pengembangan Budpar:
Miangas Garda Terluar
Penjaga NKRI ANTARA: Senin, 24 Januari 2011
- 2011 TNI AL Hibahkan Kapal untuk
Transportasi Warga Sangihe <http://www.tempointeraktif.com/>
Rabu, 2 Februari 2011
Mahardika Satria Hadi
- 2011 Rencana Kunjungan ke
Daerah Perbatasan <http://dpd.go.id>
7 Maret 2011 - Lela

KEPUSTAKAAN

Dokumen:

Award of the Tribunal, Permanent Court of Arbitration, The Island of Palmas Case (or Miangas), United States of America v The Netherlands, Arbitrator M. Huber, The Hague, 4 April 1928. (Reports of International Arbitral Awards (R.I.A.A.) Vol. XI, ps 831 – 871).

Paul G. Dominguez, (Philippine Senior Official to BIMP-EAGA, 1992 – January 1998, *"Brunei Darussalam Indonesia Malaysia Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA), 11 ps (tapuscript).*

The Geographer Office of the Geographer, Bureau of Inteligence and Research, USA, "International Boundary Study" Series A, Limits in the Seas, No. 33 – March 26, 1971, Philippines, Straight Baselines: Philippines (Country Codes: RP) 10 ps.

De zelfbesturende landschappen Tahoelandang, Siaoe, Taboekan, Kandhar-Taroena en Manganitu op de Sangi- en Talaud –eilanden (met twee kaarten Nos I en II). Ps. 5 – 82. Mededeelingen van het Bureau voor de Bestuurszaken der Buitenbezittingen. Bewerkt door Het Encyclopaedisch Bureau, Aflevering II. 1912.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2002, tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008, Tanggal 10 Maret 2008, tentang Penetapan Kawasan Strategis Nasional.

Undang-Undang Nomor 77 Tahun 1957, Tanggal 19 Desember 1957.
Tentang Persetujuan Mengenai Warga Negara yang Berada
Secara Tidak Sah Di Daerah Republik Indonesia dan Republik
Filipina.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1976, Tanggal 26 Juli 1976. Tentang
Pengesahan Perjanjian Ekstradiksi Antara Republik Indonesia dan
Republik Philippina secara Protokol.

Buku:

Ken-ichi Abe & Masako Ishii (Eds.). 2000. *Population Movement in the Modern World IV. Population movement in Southeast Asia: Changing Identities and Strategies for Survival*. JCAS Symposium Series 10. The Japan Center for Area Studies. National Museum of Ethnology. Osaka.

Patricio N. Abinales, 2000. *Making Mindanao: Cotabato and Davao in the Formation of the Philippine Nation-State*. Ateneo de Manila University Press. Quezon City.

Theodore A. Agoncillo, 1990. *History of the Filipino People*. (Eighth Edition). Garotech Publ. Quezon City.

Albert E. Alejo, SJ. 2000. *Generating Energies in Mount Apo. Cultural Politics in a Contested Environment*. Ateneo de Manila, Quezon City.

N.A. Bootsma, 1986. *Buren in de koloniale tijd. De Philippijnen onder Amerikaans bewind en de Nederlandse, Indische en Indonesische reacties daarop 1898 – 1942*. Foris Publications, Dordrecht.

D. Brilman, 1938. *Onze zendingsvelden De zending op de Sangi – en Talaud – eilanden*. Uitgegeven vanwege den zendingsstudieraad

- door de drukkerij van de stichting Hoenderlo. (Diterjemahkan dengan judul: Wilayah-wilayah Zending Kita. Zending di Kepulauan Sangi dan Talaud; oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Masehi Injili Sangihe Talaud (BPS-GMIST), 1986 dan diterbitkan kembali dengan judul: Kabar Baik di Bibir Pasifik (Oleh BPS-GMIST & Pustaka Sinar Harapan Jakarta, 2000).
- John G. Butcher, 2004. *The Closing of the Frontier, A History of the Marine Fisheries of Southeast Asia c. 1850 – 2000*. KITLV Press Leiden.
- James T. Collins, 2005. *Bahasa Melayu Bahasa Dunia, Sejarah Singkat*. KITLV-Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Robert Cribb & Michele Ford (Eds.), 2009. *Indonesia beyond the Water Edge, Managing an Archipelagic State*. Research School of Pacific and Asian Studies the Australian National University's Indonesia Update Series. ISEAS Singapore.
- Robert Cribb, 2000. *Historical Atlas of Indonesia*. University of Hawaii Press. Honolulu.
- Ronald Daus, 1989. *Portuguese Eurasian Communities in Southeast Asia. Local History and Memoirs* Institute of Southeast Asian Studies. Singapore.
- Shinzo Hayase, Domingo M. Non, and Alex J. Ulaen, comps. 1999. *Silsilas/Tarsilas (genealogies) and historical narratives in Sarangani Bay and Davao Gulf regions, South Mindanao, Philippines, and Sangihe-Talaud islands, North Sulawesi, Indonesia*. Kyoto: Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University.
- Shinzo Hayase, 2004. *Mindanao Ethnohistory Beyond Nations, Maguindanao, Sangir, and Bagobo Societies in East Maritim Southeast Asia*. Ateneo de Manila University Press.
- Shinzo Hayase, 2008. *Rekishu Kuukan toshiteno Kaiiki wo Aruku (A Walk Through Maritime World as a Historical Space)*. Hosei University Press. (Cetakan dalam Kanji).

- Renée Hagesteijn, 1989. *Circles of Kings: Political Dynamics in Early Continental Southeast Asia*. Foris Publications Dordrecht-Holland.
- Ahamd Ibrahim, Sharon Siddique, Yasmin Hussain (Eds.), 1985. *Readings on Islam on Southeast Asia*. Institute of Southeast Asian Studies, Singapore.
- H. Jacobs, SJ., 1974, *Documenta Maluccensia I (1542 – 1577)*, Vol. 109; 1980, *Documenta Maluccensia II (1577 – 1606)*, Vol. 119; 1984, *Documenta Maluccensia III (1606 – 1682)*, Vol. 126. *Monumenta Historica Societatis Iesu*, Jesuit Historical Institute. Rome.
- Tsuyoshi Kato (ed.), 1997. *Studies on the Dynamics of the Frontier World in Insular Southeast Asia*. Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University.
- Paul Kratoska, Remco Raben, Henk Schulte Nordholt (eds.), 2005. *Locating Southeast Asia: Geographies of Knowledge and Politics of Space*. Singapore University Press. Singapore.
- H.J. Lam, 1932, *Miangas (Palmas)*. G. Kolf & Co. Batavia.
- Adrian B. Lopian, 2008. *Pelayaran dan Perniagaan Nusantara Abad ke-16 dan 17*. Komunitas Bambu, Jakarta.
- Adrian B. Lopian, 2009. *Orang Laut Bajak Laut Raja Laut*. Sejarah Kawasan Laut Sulawesi Abad XIX. Komunitas Bambu. Jakarta.
- Denis Lombard, 1990, *Le Carrefour javanais: essais d'histoire globale*. Paris EHESS.
- Cesar Adib Majul, 1985. *An Analysis of the "Genealogy of Sulu"* dalam Shinzo Hayase, 2008. *Rekishu Kuukan toshiteno Kaiiki wo Aruku (A Walk Through Maritime World as a Historical Space)*. Hosei University Press. (Cetakan dalam Kanji).
- Alice Marriott, 1963, *"The nuclear prediction in Sangir"* dalam *The Philippines Journal of Science*. Vol. 92 No.1, halaman 111 – 120.

- Kenneth R. Marriott, 1961, "Sangiré (or Sangil)" dalam *Studies in Philippines Lingusitics*, Vol.2 No.2, halaman 145 – 151.
- Otto van den Muijzenberg, 1992. *Dutch Filipiniana. An Annotated Bibliography of Dutch Publications on the Philippines*. KITLV Press-Leiden.
- Domingo M. Non, 1988. "Impact of Development on Cultural Minorities in Mindanao" dalam *MSU Research Journal*, Vol. 1 No.1: June 1995:70 -79.
- Domingo M. Non, 1994. "Moro Piracy during the Spanish Period and Its Impact" dalam *Journal CSEAS Kyoto University*, Vol. 3, halaman 21 – 39.
- Jesus T. Peralta, 2003. *Glimpses Peoples of the Philippines*. Anvil Publ. Inc. Pasig City.
- Anthony Reid, 2004. *Sejarah Modern Awal Asia Tenggara*. LP3ES. (Terjemahan dari: *Charting the shape of early modern southeast Asia*/© 1999 Anthony Reid. Silkworm Books, Suriwong, Chiang Mai)
- Najeeb M. Saleeby, 1908. *The History of Sulu*. Bureau of Science Division of Ethnology Publications Vol. IV, Part II. Manila Bureau of Printing.
- Winsulangi Salindeho & Pitres Sombowadile, 2008. *Kawasan Sangihe – Talaud – Sitaro: Daerah Perbatasan Keterbatasan Pembatasan*. Puspada, Jogja.
- Thomas Suárez, 1999. *Early Mapping of Southeast Asia*. Periplus Editions (HK) Ltd.
- Thomas Suárez, 2004. *Early Mapping of the Pacific. The Epic Story of Seafarers, Adventures, and Cartographers Who Mapped the Earth's Greatest Ocean*. Periplus Editions (HK) Ltd.
- Nicholas Tarling (Ed.) *The Cambridge History of Southeast Asia*. Vol. I. *From Early Times to c. 1500*. Cambridge University Press.
- Kenji Tsuchiya & Tsuyoshi Kato (eds.), 1997. *An Integrated Study on the*

Dynamics of the Maritime World of Southeast Asia Center for Southeast Asian Studies. Kyoto University.

Alex J. Ulaen, 2003. Nusa Utara: Dari Lintasan Niaga ke Daerah Perbatasan. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Alex J. Ulaen, 2010. Nusa Utara: dalam Peta Sejarah Bahari. Marin-CRC Manado.

Alex J. Ulaen, 2010. Membaca Sangi-Talaud: Bibliografi 1724 – 2006. Marin-CRC Manado.

O.W. Wolters, 1982. History, Culture, and Region in Southeast Asian Perspectives. Institute of Southeast Asian Studies. ISEAS. Singapore.

Sonia M. Zaide, 1994. The Philippines: A Unique Nation. All Nations Publ. Co., Inc. Quezon City.

Artikel, Makalah, Laporan & Data Paper

(diterbitkan dalam jurnal, Proceeding Seminar & Surat Kabar/harian)

Evelyn Tan Cullamar, "Migration across the Sulawesi Sea" dalam Proceedings of the Symposium Human Flow and Creation of New Cultures in Southeast Asia. December 3 – 5, 1996 Tokyo: KKR Hotel Tokyo (Takebashi Kaikan). Institute for the Study of Languages and Cultures of Asia and Africa, Tokyo University of Foreign Studies, 1998. (Ps. 13 – 26)

Edwin Espejo, "Tahuna revisited" dalam ASIAN CORRESPONDENT.COM, May 14, 2008. <http://asiancorrespondent.com/> 3 ps. (dikunjungi 20 Mei 2008)

Edwin Espejo, "Miangas: Flashpoint island between RP and Indonesia" dalam Asian Correspondent. Com. September 02, 2010. <http://asiancorrespondent.com/edwin-espejo/archives>. 3 ps.

(Dikunjungi 24 Okt. 2010)

- Andreas Harsono, "Miangas, nationalism and isolation". Dalam *Tempo*, No. 13/V/November 30 – December 06, 2004; *Asia Views*, Edition: 47/I/December/2004. 6 ps. (dikunjungi 8 Desember 2004).
- Reynaldo Clemeña Ileta, "Magindanao, 1860 – 1888: The Career of Datu Uto of Buayan" Data Paper Number 82. Southeast Asia Program Department of Asian Studies Cornell University, Ithaca, October 1971.
- H. Jacobs, S.J., 1992, "The Insular Kingdom of Siau under Portuguese and Spain Impact, 16th and 17th Centuries", dalam B. Dahm (Ed.), *Region and Regional Developments in the Malay-Indonesian World. 6 European Colloquium on Indonesia and Malay Studies (ECIMS)*, Otto Harrassowitz-Wiesbaden.
- Daniel-Erasmus Khan, "Max Huber as Arbitrator: The Palmas (Miangas) Case and Other Arbitrations", dalam *The European Journal of International Law* Vol. 18 No. 1 (145 – 170).
- Datu Michael O. Mastura, 2007. "The Bangsamoro Territory: Explanatory Arguments for Territorial Waters". Paper prepared for the MILF-GRP Exploratory Task.
- Pusat Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial RI. "Revitalisasi Model Pemberdayaan Pranata Sosial di Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara" (Ringkasan Laporan, 2008). 20 ps.
- Nathan Gilbert Quimpo, "Colonial Name, Colonial Mentality and Ethnocentrism" dalam *KASAMA* Vol. 17 No. 3 / July – August – September 2003 / Solidarity Australia Network.
- Aswatini Raharto, "Return Migration Among the Sangirese: Life and Adjustment in the Homeland" dalam Ken-ichi Abe & Masako

- Ishii (Eds.). 2000. *Population Movement in the Modern World IV. Population movement in Southeast Asia: Changing Identities and Strategies for Survival*. JCAS Symposium Series 10. The Japan Center for Area Studies. National Museum of Ethnology. Osaka. (ps. 239 – 254).
- Takeshi Shiraishi & Alex J. Ulaen, 2004. "The Traffic Zone Reconsidered: Menado-Sangihe/Talaud-Mindanao" dalam *Dynamics studies on the everyday life and resources management in maritime world Wallacea*. Kyoto: Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University.
- Riwanto Tirtosudarmo, "Migration, Development and Political Autonomy in Eastern Indonesia" dalam Ken-ichi Abe & Masako Ishii (Eds.). 2000. *Population Movement in the Modern World IV. Population movement in Southeast Asia: Changing Identities and Strategies for Survival*. JCAS Symposium Series 10. The Japan Center for Area Studies. National Museum of Ethnology. Osaka. (ps. 177 – 194)
- Macario D. Tiu, "Personal Accounts of Indonesian Migrants in Davao and Cotabato" Research Report. *Kyoto Review of Southeast Asia*. 10 ps.
- Alex J. Ulaen, 2009. "Tradisi dan Budaya Masyarakat 'Nusa Utara', Indonesia: Dari Tuturan dan Catatan". Makalah dibacakan dalam Pertemuan Ilmiah Terbatas dengan tema: Indonesia dan Negara Kebudayaan Maritim, di selenggarakan oleh Komisi Ilmu Sosial – Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, di Manado, 11 – 12 Desember 2009.
- Alex J. Ulaen, 2010. "Nusa Utara dalam Dinamika Wilayah Perbatasan". Makalah disampaikan pada Pertemuan Ilmiah dengan tema: Dinamika Wilayah Perbatasan Maritim – Keragaman Budaya, Kesempatan Ekonomi, Integrasi Bangsa". Diselenggarakan oleh

Komisi Ilmu Sosial – Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, di Batam, 1 – 4 Juli 2010.

Alex J. Ulaen, 2011. "Nusa Utara: Dynamics of the Society and History around the Sea Boundaries". Makalah dibacakan di The 7th Kyoto University Southeast Asia Forum. Dengan tema: Politics, Livelihood and Local Praxis in the Era of Decentralization in Indonesia. Organized by Makassar Kyoto University Field Station; Hassanuddin University, Indonesia, Kyoto University Japan; JSPS International Training Program (ITP): "On-site Education of Practical Languages for Area Studies"; Global COE Program: "In Search of Sustainable Humanosphere in Asia and Africa". ASAFAS and CSEAS, Kyoto University, Japan. Dilaksanakan di Kampus Unhas Makassar, 8 – 9 Januari 2011.

Djorina Velasco, "Between Manado and Davao: How the Indonesian Island of Miangas is making use of its Philippine ties", dalam Newsbreak Online (11 Februari 2007) <http://newsbreak.com.ph/> 4 ps. (dikunjungi 25 Februari 2007)

Djorina Velasco, "Navigating the Indonesian-Philippine Border: The Challenges of Life in the Borderzone" *Kasarinlan: Philippine Journal of Third World Studies* 2010 25 (1-2): 95 – 118.

BIODATA

Penyunting



Drs. Endjat Djaenuderadjat , lahir di Banten pada 12 Mei 1955. Menyelesaikan studi ilmu Arkeologi di Fakultas Sastra UGM pada tahun 1983. Sejak Maret 2007 hingga sekarang menjabat sebagai Direktur Geografi Sejarah, Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.

Beberapa buku yang pernah disunting antara lain: Soedirman: Patriotisme, Gerilya, dan Martabat Bangsa, Jakarta: Depbudpar dan Pusjarah ABRI, 2008; Atlas Prasejarah Indonesia, Jakarta: Geografi Sejarah Kembudpar, 2009; Sejarah Wilayah Perbatasan Batam-Singapura : Satu Selat Dua Nahkoda, Gramata Publishing, 2009; Sejarah Wilayah Perbatasan Entikong-Malaysia Satu Ruang Dua Tuan Jakarta: Gramata Publishing, 2009; Toponim Jakarta dan Kepulauan Seribu, Jakarta: Geografi Sejarah Kembudpar, 2010; dan Sejarah Benteng Inggris di Indonesia, Jakarta: Kembudpar, 2010.

Para Penulis



Alex J. Ulaen , lahir di Talaud, 3 Agustus 1949. Menyelesaikan studinya di Jurusan Antropologi Fakultas Sastra Unsrat Manado (drs,1977), selanjutnya belajar sejarah kebudayaan Asia Tenggara (*l'histoire et civilisation de l'Asie du Sud-est*) di Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris, menulis memoire dibawah bimbingan Prof.

Denys Lombard (DEA, 1983). Aktif melakukan penelitian dibidangnya, antara lain disertakan dalam penelitian tentang Social and Cultural Aspects

of Development in North Sulawesi and Surroundings atau Proyek SCAD, kerjasama Unsrat – SDRC (Sociology of Development Research Centre) Universitas Bielefeld Jerman, membawanya ke SDRC Universitas Bielefeld sebagai peneliti tamu (1989).

Sejak tahun 1994 ikut serta dalam penelitian bersama peneliti dari Center for Southeast Asian Study, CSEAS-Kyoto University; bersama Shinzo Hayase (CSEAS-Kyoto/Osaka City University) Dominggo M. Non (Mindanao State University) mengerjakan kompilasi hasil penelitian berjudul: *Silsilas/ Tarsilas (Genealogies) and Historical Narratives in Saranggani Bay and Davao Gulf Regions, South Mindanao, Philippines, and Sangihe-Talaud Islands, North Sulawesi, Indonesia* (CSEAS-Kyoto, 1999); pada tahun 2001 – 2002 menjadi Visiting Fellow di CSEAS Kyoto, mengerjakan monografi, *The Northern Islands: From the Edge of Commerce to the Border Area* (CSEAS, 2002). Aktif mengikuti seminar dibidangnya, antara lain menjadi pembicara (undangan) di Institute for the Study of Languages and Cultures of Asia and Africa, Tokyo (2002); Pemakalah undangan di *The Historical & Cultural Basis of the Brunei-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area* (SEASREP-UPI Manila, UPI Mindanao, di Davao, 2003); *Workshop on Ethnic Minorities in Southeast Asia* (SEASREP-ATMA, UKM, Kuala Lumpur, 2003); dan SEASREP Mekong Project 2003 – 2005. Telah menulis sejumlah buku (antara lain: *Nusa Utara: Dari Lintasan Niaga ke Daerah Perbatasan*. Pustaka Sinar Harapan, 2003), bagian dari buku dan artikel. Salah satu karyanya terakhir diterbitkan sebagai bab. 14, “Dari Permesta dan PRRI sampai ke Peluang Otonomi Daerah” dari buku berjudul: *MR. Sjafruddin Prawiranegara, Pemimpin Bangsa dalam Pusaran Sejarah*. Disunting oleh Lukman Hakiem & Mohammad Noer, diterbitkan oleh Harian Republika, Oktober 2011. Setelah sempat ditugaskan sebagai birokrat (2006 – 2009), Agustus 2009 kembali ke kampus sebagai pengajar di Jurusan Sejarah Fakultas Sastra dan Jurusan Antropologi FISIP Unsrat.



Triana Wulandari , lahir di Magelang pada Desember 1962. Menyelesaikan Program Sarjana Sejarah di UNS, Solo, pada 1987 dengan skripsi berjudul " Pendudukan Jepang di Surakarta 1942-1945". Tahun berikutnya, ia diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Perempuan yang akrab dipanggil Ibu Ana ini menyelesaikan Program Magister Antropologi di Universitas Indonesia pada tahun 2011 dengan mempertahankan tesis berjudul "Hubungan Antar Etnik di Pemukiman Baru (Studi Kasus di Perumahan Kenten Kelurahan Lebong Gajah Kec. Sako Palembang)".

Beberapa jabatan yang pernah diembannya antara lain: Kepala Sub Direktorat Penulisan Sejarah Direktorat Sejarah (2003), Kepala Bidang Makna Sejarah (2003-2005), Kepala Sub Direktorat Peradaban Sejarah Direktorat Geografi Sejarah (2005-2008). Sejak tahun 2008 hingga sekarang menjabat sebagai Kepala Sub Direktorat Perkembangan Wilayah Sejarah, Direktorat Geografi Sejarah.

Beberapa karyanya antara lain adalah: Tantangan dan Rongrongan terhadap Keutuhan NKRI, Jakarta: Depdikbud, 1993; Ensiklopedia Tokoh Kebudayaan II, Jakarta: Depdikbud, 1994; Kerajaan Tradisional di Indonesia: Bima ; Peranan Desa dalam Perjuangan Kemerdekaan di Sumatera Barat 1945-1950, Jakarta 1998; Seri Pengenalan Budaya: Wilayah NTB, 1999; Hatta dan Pemikiran-pemikirannya, Jakarta: Depbudpar, 2000; Menciptakan Strategi Pembauran pada Masyarakat Multi Etnis di Pemukiman Baru Palembang, 2000; Sarekat Islam dan Pergerakan Politik di Palembang, Jakarta: Depdikbud, 2001; Modul Sejarah Indonesia untuk Ujian Depkeu tingkat II, Jakarta: Depkeu, 2003; Wisata Sejarah Bahari: Pantura Laut Jawa, Jakarta: Depbudpar, 2006; Wisata Sejarah Bahari, Pontianak-Ketapang-Sukadang 2007; Wisata Sejarah Bahari, Tenate-Bacan-Tidore-Jailolo 2008; Soedirman: Patriotisme, Gerilya dan Martabat

Bangsa, Depbudpar dan Pusjarah ABRI, 2008; Pancasila: Nilai Budaya, Ideologi Bangsa dan Harapan Kita, Depbudpar, 2009; Sejarah Wilayah Perbatasan Entikong-Malaysia: Satu Ruang Dua Tuan Jakarta: Gramata Publishing, 2009, Sejarah Wilayah Perbatasan Batam-Singapura :Satu Selat Dua Nakhoda, Jakarta: Gramata Publishing 2009, dan Sejarah Ben-teng Inggris di Indonesia, Jakarta: Kembudpar, 2010.



Dr. Yuda Benharry Tangkilisan, SS, M.Hum., lahir di Jakarta tahun 1961, menyelesaikan pendidikan S-1 (1987) dan S-2 (1993) di Universitas Indonesia, dan meraih gelar Doktor (S-3) dalam Ilmu Sejarah pada tahun 2009 di lembaga pendidikan yang sama dengan disertasi berjudul *Laut Bebas, Pasar Bebas dan Perjanjian 1855: Pelayaran, Perdagangan dan Diplomasi Amerika Serikat di Kepulauan Indonesia 1784-1855*, pernah mengikuti pelatihan Ilmu Sejarah di Leiden, Negeri Belanda dan London, Inggris (Summer Course) pada tahun 1990-1992, Kursus Musim Panas tentang Peradaban Amerika di India (1993), Hukum dan Sejarah Legal di Boston (1995) dan Abad Amerika di Hongkong (1996). Publikasinya meliputi Sejarah Perekonomian Indonesia (anggota tim) tahun 1997, Swadharma Bhakti Nagara: 50 Tahun Bank Negara Indonesia (anggota tim) tahun 1997, Sejarah Perekonomian Amerika Serikat (mandiri) tahun 2007, Sejarah Nasional Indonesia edisi pemutakhiran jilid IV dan V (anggota tim) tahun 2008, dan Penulisan Sejarah Pemikir Kebudayaan (anggota tim) tahun 2010. Beberapa artikel ilmiah tersebar di sejumlah jurnal ilmiah, seperti Makara, Wacana, Prisma, Jurnal Etika dan Sari. Kini bekerja sebagai pengajar pada Program Studi Sejarah FIBUI.

Bukan masalah nama Miangas atau Las Palmas, karena selain dua sebutan itu, pulau kecil di wilayah administratif Provinsi Sulawesi Utara, perbatasan Indonesia – Filipina juga memiliki sejumlah nama-lokal. Menarik, karena pulau yang pernah dipersengketakan Amerika Serikat (yang kala itu menjajah Filipina) dengan Kerajaan Belanda (yang juga menjajah Nusantara atau Hindia Belanda) dan diputuskan oleh DR. Max Hubert, arbitrator tunggal Mahkamah Arbitrase Internasional, 4 April 1928, adalah bagian dari wilayah Hindia Belanda dan itu berarti milik Kerajaan Belanda. Setelah Indonesia lepas dari penjajahan Belanda, demikian pula halnya dengan Filipina lepas dari penjajahan Amerika, pihak pemerintah Filipina meskipun telah menetapkan batas wilayahnya berdasarkan Traktat Paris 1898 dalam Konstitusinya, tetapi mereka mengakui keputusan Arbitrase Internasional di atas. Pengakuan ini diperjelas dalam *Border Crossing Agreement* antara Indonesia dan Filipina yang ditandatangani tahun 1956 (mengakui pulau Miangas sebagai pos lintas batas di pihak Indonesia).

Sejak Indonesia dikalahkan oleh Malaysia dalam masalah Sipadan-Ligitan, tiba-tiba pulau Miangas mendapat perhatian media. Dibandingkan dengan dua pulau di perbatasan yang berdekatan dengannya yaitu pulau Marore dan pulau Marampit, Miangaslah yang paling banyak dipermasalahkan, kemudian dikunjungi dan mendapat perhatian besar dari pemerintah pusat dan propinsi.

Buku ini berusaha memaparkan keberadaan pulau ini dari sisi sejarahnya.



DIREKTORAT GEOGRAFI SEJARAH
DIREKTORAT JENDERAL SEJARAH DAN PURBAKALA
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2011

ISBN: 978-979-18278-3-6



9 789791 827836